



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, dan Pasal 263 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI  
dan  
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen

perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Dairi serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

### Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK  
DAERAH

BAB VI : PENUTUP

### Pasal 4

Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

RPJPD disusun dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara.

## BAB III

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Dairi Nomor 150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 27 Maret 2025  
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 27 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA NOMOR : (1-26/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, seluruhnya diarahkan dan difokuskan untuk mewujudkan cita-cita nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memedomani cita-cita luhur yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 45 dan agar sasaran pelaksanaan pembangunan itu sendiri dapat berlangsung secara efektif dan menyentuh kebutuhan mendasar dari setiap lapisan masyarakat Indonesia, maka reformasi dalam sistem pemerintahan pun dilakukan.

Paska reformasi sistem pemerintahan menjadi desentralisasi, dengan harapan agar masing-masing daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan memberdayakan segala potensi yang dimilikinya serta lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

RPJPD untuk periode 2025-2045 yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, serta memperhatikan kondisi daerah, isu-isu strategis dan keberadaan undang-undang serta peraturan daerah yang relevan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disebut RPJPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah (Kabupaten) untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen RPJPD ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur *stakeholder*.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang, sangat penting bagi Kabupaten Dairi untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kurun waktu RPJPD adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD ke-1 Tahun 2025-2029, RPJMD ke-2 Tahun 2029-2034, RPJMD ke-3 Tahun 2034-2039, RPJMD ke-4 Tahun 2039-2045.

RPJPD digunakan sebagai pedoman daerah dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum daerah, visi, misi dan tujuan pembangunan daerah, arah dan tahapan jangka panjang daerah. RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup.

RPJPD disusun dengan mangacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara serta sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. RPJPD sesuai hasil Musrenbangda RPJPD dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Provinsi Sumatera Utara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. RPJPD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Maksud dari RPJPD mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatera Utara bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP Provinsi. RPJPD dijabarkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan visi dan misi dirinya yang diformulasi dalam bentuk RPJMD.

### Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinasi oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk. Pengendalian dan Evaluasi yang dilaksanakan menyangkut:

- a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Hasil Rencana Pembangunan.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR : 1 Tahun 2025  
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH TAHUN 2025-2045

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki peran strategis untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Dairi selama 20 tahun. RPJPD berfungsi menjaga kesinambungan dalam pelaksanaan empat kali periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD meskipun terdapat prioritas pembangunan yang berbeda, namun tetap berada pada jalur dan arah yang sama sebagaimana telah dirumuskan RPJPD. Arah pembangunan yang dirumuskan terkait tujuan pembangunan daerah, yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 merupakan instrumen penting untuk mewujudkan transformasi pembangunan daerah selaras dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Transformasi mencakup sosial, ekonomi, tata kelola yang disertai penerapan landasan dan kerangka implementasi transformasi. Transformasi nasional dan daerah diharapkan mencapai visi RPJPN, yaitu “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, sehingga penyusunan RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 harus diselaraskan dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara, sehingga mampu menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD yang terintegrasi dan sinergis dan RPJPD Kabupaten Dairi harus dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan melalui strategi yang terpadu dan terukur.

Capaian kinerja periode 2005-2025 menjadi pijakan bagi Kabupaten Dairi untuk melakukan transformasi. Capaian kinerja Kabupaten Dairi

berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 memperlihatkan kondisi yang baik, meskipun masih menyisakan tantangan pembangunan yang perlu direspon pada periode perencanaan jangka panjang berikutnya. Kabupaten Dairi berhasil pulih dari dampak pandemi dengan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 sebesar 5,04%. Pertumbuhan ekonomi diiringi dengan tingkat pemerataan pendapatan, dengan Indeks Gini sebesar 0,221 atau berada pada tingkat ketimpangan rendah. Kondisi yang baik juga dilihat dari tingkat pengangguran terbuka dengan kondisi pada Tahun 2023 yaitu 1,23%. Meskipun demikian, tantangan pembangunan pada masa depan tidak kecil, terutama jika dihadapkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di tengah ketimpangan pendapatan dan pengangguran yang rendah, Kabupaten Dairi memiliki tingkat kemiskinan sebesar yakni 7,47%. Kondisi tersebut mengandung arti bahwa masih perlunya peningkatan sumber penghidupan yang layak. Aspek pembangunan SDM Kabupaten Dairi yang direpresentasikan oleh IPM memiliki nilai 75,18 pada Tahun 2023. Capaian tersebut masih sedikit berada di atas IPM Sumatera Utara sebesar 75,13 pada Tahun 2023. Capaian kinerja yang dielaborasi dengan arah kebijakan nasional dan pencermatan dinamika perkembangan lingkungan strategis menjadi pijakan penting untuk menyusun visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045.

RPJPD disusun dengan menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu teknokratik melalui penggunaan hasil evaluasi, analisis data kinerja, dan membangun hubungan logis antar muatan RPJPD. Pendekatan partisipatif berjalan ketika berbagai muatan RPJPD perlu mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan di dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pendekatan politik berada pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJPD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilaksanakan dengan sinkronisasi muatan RPJPD Kabupaten Dairi dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPN. Selain menggunakan berbagai pendekatan, RPJPD juga disusun melalui berbagai tahapan, yaitu penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), Rancangan, Rancangan Akhir, hingga penetapan Perda RPJPD.

## 1.2 Dasar Hukum

RPJPD Kabupaten Dairi 2025-2045 disusun menggunakan berbagai dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

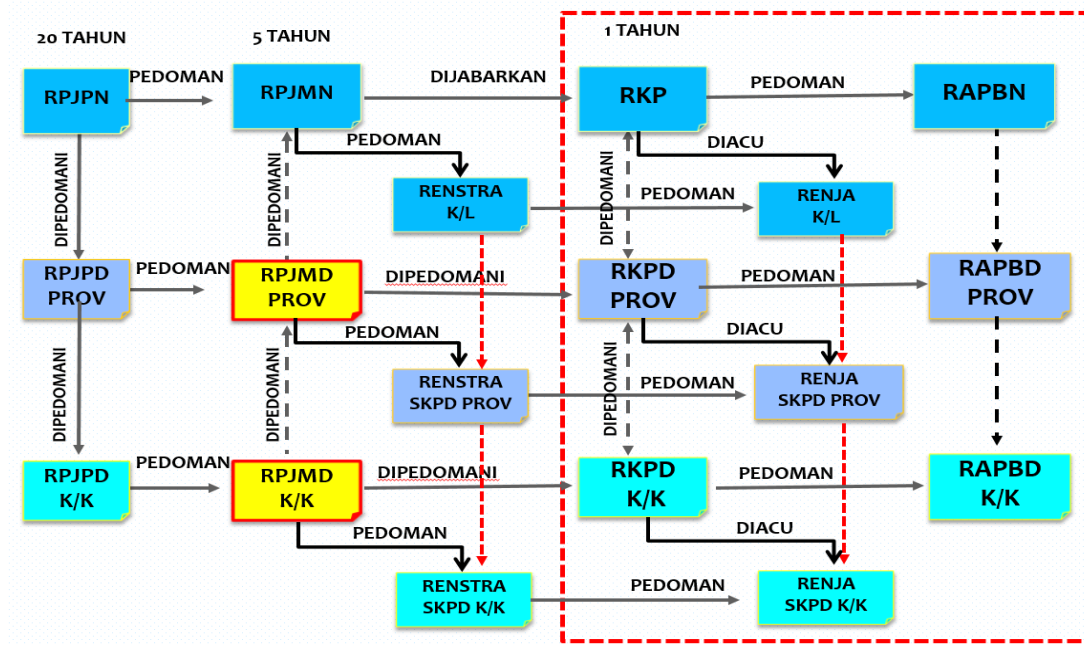
- Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

RPJPD bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. RPJPD memiliki jangka waktu 20 tahun yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Maksud dari penyusunan secara sistematis karena antar bab memiliki keterkaitan, secara terarah karena harus selaras dengan RPJPN sebagai perencanaan makro nasional, secara terpadu dan menyeluruh sebagai perencanaan makro yang memadukan berbagai bidang pembangunan sehingga memiliki lintas fungsi yang baik, serta tanggap terhadap perubahan karena penyusunan RPJPN harus memperhatikan isu strategis aktual dan megatren pada masa depan.

Gambar 1. 1  
Hubungan Antar Dokumen



RPJPD Kabupaten Dairi dalam penyusunannya tidak hanya berpedoman pada RTRW, tetapi juga harus diintegrasikan kepada kebijakan dan strategi RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPN, sehingga dapat membangun keselarasan antara perencanaan jangka panjang nasional, provinsi, dan kabupaten.

### 1.3.1 Keselarasan antara RPJPD dengan RPJPN

RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 bagian dari upaya transformasi yang dibawa oleh RPJPN 2025-2045. Rancangan Akhir RPJPN telah merumuskan visi pembangunan jangka panjang, yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut memiliki 5 sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Upaya pencapaian visi melalui pelaksanaan misi atau agenda pembangunan yang dibagi ke dalam rumpun Transformasi Indonesia, Landasan Transformasi, dan Kerangka Implementasi Transformasi.

Gambar 1. 2  
Misi/Agenda Pembangunan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

8 misi/agenda pembangunan RPJPN memiliki gagasan besar tentang transformasi. Transformasi yang dibawa pada setiap misi memiliki 17 tujuan pembangunan dan upaya transformasi superprioritas (*game changers*) sebagai berikut:

Tabel 1. 1  
Tujuan Pembangunan dan Upaya Transformasi Superprioritas

Misi (Agenda Pembangunan)	Tujuan (Arah Pembangunan)	Upaya Transformasi Superprioritas ( <i>game changers</i> )
Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesehatan untuk Semua</li> <li>2. Pendidikan Berkualitas yang Merata</li> <li>3. Perlindungan Sosial yang Adaptif</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).</li> <li>• Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas, termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.</li> <li>• Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.</li> <li>• Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama tuberkulosis dan kusta.</li> </ul>

Misi (Agenda Pembangunan)	Tujuan (Arah Pembangunan)	Upaya Transformasi Superprioritas ( <i>game changers</i> )
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.</li> </ul>
Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</li> <li>5. Penerapan Ekonomi Hijau</li> <li>6. Transformasi Digital</li> <li>7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</li> <li>8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri</li> <li>• Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.</li> <li>• Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.</li> <li>• <i>Superplatform</i> untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.</li> <li>• Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.</li> <li>• Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).</li> </ul>
Transformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama <i>single salary</i> dan sistem pensiun), serta pemberantasan korupsi.</li> <li>• Penguatan integritas partai politik.</li> </ul>
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substantial</li> <li>11. Stabilitas Ekonomi Makro</li> <li>12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi sistem penuntutan menuju <i>single prosecution system</i> dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai <i>advocaat general</i>.</li> <li>• Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan <i>value chain</i> industri nasional.</li> <li>• Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.</li> </ul>

Misi (Agenda Pembangunan)	Tujuan (Arah Pembangunan)	Upaya Transformasi Superprioritas ( <i>game changers</i> )
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Reformasi subsidi, terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.</li> </ul>
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 15. Lingkungan Hidup Berkualitas 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan karakter dan jatidiri bangsa.</li> <li>Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.</li> <li>Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>Food, Energy, Water</i>).</li> </ul>

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Wilayah Sumatera dalam transformasi ekonomi ditetapkan sebagai “Industri Berbasis SDA dan Hub Ekonomi Biru Barat Indonesia”. Sumatera diharapkan memiliki kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 23,2 persen pada Tahun 2045 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi terjaga 5,7-6,7 persen setiap tahun. Sumatera dapat memanfaatkan peluang dari posisinya yang strategis dilalui Jalur Sutera, Wilayah ALKI 1 dan SLoC (*Sea Line of Communication*) sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan wilayah timur dan barat dunia. Kawasan strategis yang dikembangkan untuk pengungkit ekonomi baru, yaitu kawasan strategis industri, pertanian-agroindustri, pariwisata, perkotaan, dan kawasan konservasi strategis. Pengembangan kawasan baru tersebut disertai optimalisasi kawasan pengungkit yang sudah ada berupa Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Metropolitan, dan Destinasi Pariwisata Prioritas. Tujuan utama pembangunan wilayah pertumbuhan Sumatera, yaitu mendorong upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.

### 1.3.2 Keselarasan antara RPJPD dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara

RPJPD Kabupaten Dairi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara harus membangun keselarasan perencanaan jangka panjang dengan perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tujuan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 yaitu

mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Tujuan tersebut dicapai melalui penetapan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah sebagai berikut:

Tabel 1. 2  
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah  
Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Mengurangi kesenjangan antara wilayah timur dan barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung.</li> <li>• Membangun dan meningkatkan aksesibilitas wilayah timur dan barat serta dataran tinggi.</li> </ul>
Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan.</li> <li>• Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan.</li> <li>• Meningkatkan aksesibilitas transportasi, perhubungan, sumber daya air dan telekomunikasi dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran.</li> <li>• Mengembangkan pusat-pusat agropolitan, minapolitan serta kawasan wisata potensial untuk meningkatkan daya saing.</li> <li>• Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan.</li> <li>• Mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.</li> </ul>
Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan luasan lahan pertanian.</li> <li>• Meningkatkan produktivitas pertanian.</li> <li>• Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.</li> <li>• Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru dan penyediaan sarana prasarannya untuk memenuhi swasembada pangan.</li> </ul>
Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan luasan kawasan lindung.</li> </ul>

<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas kawasan lindung.</li> <li>• Mengembalikan ekosistem kawasan lindung</li> </ul>
Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.</li> <li>• Mengendalikan perkembangan fisik permukiman dan peruntukan lainnya.</li> <li>• Mendorong sinergitas pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan.</li> </ul>
meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dan pemeratakan sarana dan prasarana ekonomi sosial pada seluruh bagian kawasan.</li> <li>• Menyediakan dan pemeratakan fasilitas pelayanan ekonomi sosial.</li> </ul>

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037

Kabupaten Dairi dalam rencana struktur ruang wilayah direncanakan menjadi lokasi bagi pembangunan bandar udara baru. Sedangkan dalam rencana pola ruang, Kabupaten Dairi memiliki arah pembangunan berupa pengembangan pola ruang kawasan rawan bencana, terutama massa gerakan tanah/tanah longsor; pengembangan sentra produksi agropolitan dataran tinggi, terutama di Sitingo yang sekaligus sebagai kawasan strategis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi; pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan besar; serta pengembangan kawasan pertambangan timah hitam dan seng.

### 1.3.3 Keselarasan antara RPJPD dengan RTRW Kabupaten Dairi

Keselarasan antara RPJPD dengan RTRW mulai dibangun dari merujuk tujuan penataan ruang wilayah. RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 memiliki tujuan mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Tujuan tersebut memiliki kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Tabel 1. 3  
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah  
Kabupaten Dairi 2014-2034

<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan interaksi kawasan untuk perkembangan ekonomi dengan</li> </ul>

Kebijakan	Strategi
	<p>pengembangan jaringan jalan, sarana dan prasarana daerah lainnya.</p>
<p>Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri melalui pola intensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.</li> <li>• Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan, pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian.</li> <li>• Peningkatan pengembangan agroindustri berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.</li> <li>• Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan sektor primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja.</li> </ul>
<p>Peningkatan fungsi Kawasan Perkotaan Sidikalang sebagai PKW dan Kawasan Perkotaan Sumbul, Tigalingga dan Parongil sebagai PKLp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah.</li> <li>• Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal.</li> <li>• Peningkatan prasarana transportasi dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.</li> </ul>
<p>Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan lindung, dan lain-lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.</li> <li>• Penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat.</li> <li>• Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.</li> <li>• Penggalangan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung.</li> <li>• Pengaturan penduduk yang berada dalam kawasan lindung dalam bentuk <i>enclave</i> dan relokasi.</li> <li>• Melarang aktifitas penduduk dalam hutan lindung.</li> </ul>
<p>Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.</li> <li>• Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.</li> </ul>

Kebijakan	Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.</li> <li>• Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.</li> </ul>
<p>Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).</li> <li>• Peningkatan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.</li> <li>• Peningkatan keterkaitan fungsional pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama pertanian untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.</li> <li>• Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.</li> <li>• Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat pada pusat permukiman.</li> <li>• Pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berimbang.</li> </ul>

Sumber: Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Integrasi muatan RTRW secara lebih teknis akan dijabarkan di dalam Bab 2 RPJPD. Integrasi ini diharapkan semakin menyelaraskan antara perencanaan makro di seluruh bidang pembangunan di dalam RPJPD dengan tujuan, kebijakan, strategi, serta rencana pola dan struktur ruang di dalam RTRW. Keselarasan antara kedua dokumen perencanaan tersebut diharapkan agar konsep pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik.

### **1.3.4 Keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD**

RPJPD merupakan perencanaan jangka panjang yang menaungi empat kali periode RPJMD. RPJMD tetap selaras dengan arah besar yang ditetapkan di dalam RPJPD, meskipun terdapat pergantian Kepala Daerah dan kemungkinan terdapat prioritas pembangunan yang berbeda. Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok RPJPD harus menjadi acuan di dalam penyusunan Visi, Misi, dan Program Prioritas Kepala Daerah. Demikian halnya terkait kinerja yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah merupakan penjabaran maupun sama secara eksplisit dengan kinerja yang terdapat di dalam RPJPD.

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045, yaitu sebagai pedoman pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun dan menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 yaitu "Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.", sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen yang menjadi instrumen bagi transformasi daerah dan mendukung transformasi nasional.
2. Tersusunnya dokumen yang menjadi pedoman bagi 4 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan.
3. Tersusunnya dokumen yang memuat arah makro pembangunan yang menjadi acuan bagi perencanaan makro sektoral.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan:**

Gambaran umum RPJPD yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah:**

Gambaran kondisi daerah memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, ringkasan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

**Bab III Permasalahan dan Isu Strategis:**

Pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang.

**Bab IV Visi dan Misi Daerah:**

Rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

**Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok:**

Rumusan arah kebijakan sebagai tema makro dan pentahapan pembangunan setiap periode di dalam RPJPD, serta rumusan sasaran pokok sebagai kinerja dan indikatornya yang akan dicapai.

**Bab VI Penutup:**

Memuat kaidah pelaksanaan RPJPD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

##### **2.1.1 Aspek Geografi**

Kabupaten Dairi berperan strategis sebagai wilayah penyangga pertanian untuk Sumatera Utara, dengan potensi perkebunan kopi, dan tanaman pangan, yang mendukung perekonomian regional. Dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor tanaman pangan, Kabupaten Dairi berpotensi menjadi pusat pengembangan industri hilir berbasis agro. Aspek geografi Kabupaten Dairi meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana.

##### **A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Dairi menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

##### **1) Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 1927,80 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Kabupaten adalah Sidikalang, terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 169 desa/kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan (IKK)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> /sq.km)	Persentase Luas Kabupaten (%)
1.	Sidikalang	Sidikalang	11	70,67	3,67
2.	Berampu	Berampu	5	40,85	2,12
3.	Sitinjo	Sitinjo	4	53,15	2,76
4.	Parbuluan	Sigalingging	11	235,40	12,21
5.	Sumbul	Sumbul	19	192,58	9,99
6.	Silahisabungan	Silalahi	5	75,62	3,92
7.	Silima Punggapungga	Parongil	16	88,35	4,58
8.	Lae Parira	Lae Parira	9	42,75	2,22
9.	Siempat Nempu	Buntu Raja	13	60,15	3,12
10.	Siempat Nempu Hulu	Silumboyah	12	93,93	4,87
11.	Siempat Nempu Hilir	Sopobutar	10	105,62	5,48
12.	Tigalingga	Tigalingga	14	197,00	10,22
13.	Gunung Sitember	G. Sitember	8	77,00	3,99
14.	Pegagan Hilir	Tiga Baru	13	155,33	8,06
15.	Tanah Pinem	Kuta Buluh	19	439,40	22,79
Total			169	1927,80	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

Batas-batas wilayah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Tenggara)
- Sebelah Timur : Kabupaten Toba Samosir
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pakpak Bharat
- Sebelah Barat : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Selatan)

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

## 2) Letak dan Kondisi Geografis

Letak Kabupaten Dairi yang strategis dengan jarak sekitar 153 km dari Kota Medan dengan waktu tempuh sekitar 3 jam yang membuat aksesibilitas keluar/masuk Kabupaten Dairi relatif tinggi, baik dari/ke Kota Medan sebagai *Primary City* Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan salah satu jalur menuju Provinsi Aceh.

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 400 - 1.700 meter di atas permukaan laut (dpl) atau sekitar 200 meter di atas permukaan Danau Toba dengan karakter topografi yang spesifik dan bervariasi, memiliki curah (ceruk) yang cukup dalam dimana pada musim hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Secara ekologis, Kabupaten Dairi merupakan penyangga ekosistem Danau Toba dan menyumbang sebagian besar input air ke Danau Toba melalui beberapa sungai-sungainya.

## 3) Topografi/Kelerengan

Topografi Kabupaten Dairi yang didominasi dataran tinggi mempengaruhi daya dukung untuk pertanian dan perkebunan. Namun, risiko bencana longsor dan banjir akibat letak geografis yang berada di dataran tinggi membutuhkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta strategi mitigasi perubahan iklim. Kabupaten Dairi berada pada ketinggian 200 – 1.431 meter di atas permukaan laut (*mdpl*), didominasi kelerengan berombak, bergelombang, curam sampai dengan terjal, dengan karakter kelerengan sebagai berikut:

- Kelerengan bergelombang, berombak dan sebagian kecil datar;
- Kelerengan curam lebih kurang 27.824 ha sekitar 14,43% dari luas Kabupaten Dairi;
- Kelerengan terjal lebih kurang 88.097 ha atau sekitar 45,70% dari luas Kabupaten Dairi.

Dari karakter topografi dan pola drainase alami wilayah Kabupaten Dairi sangat rentan terhadap erosi, khususnya di Bagian Tengah memanjang dari bagian Utara ke Selatan, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga dan Pegagan Hilir, Sidikalang, Berampu dan Lae Parira. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsor. Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada Tabel dan Gambar berikut.

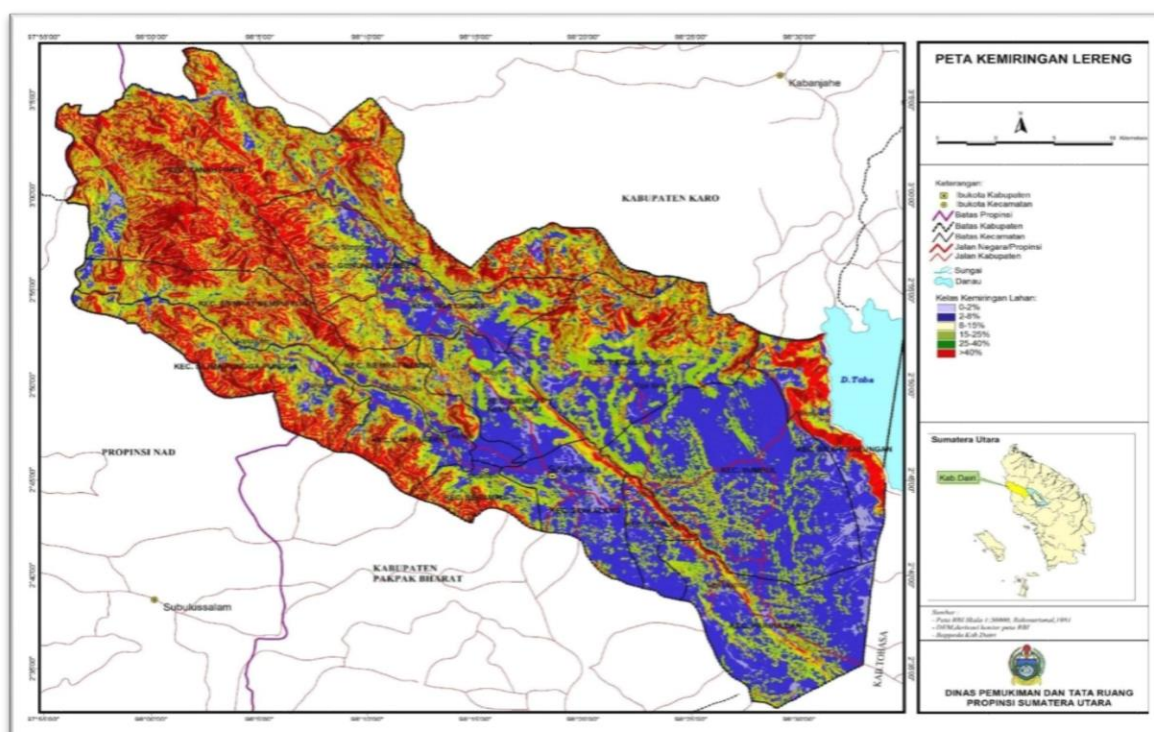
Tabel 2.2 Luas Kabupaten Dairi Berdasarkan Kelerenghan (ha) dan Ketinggian (mdpl)

NO.	KECAMATAN	KELERENGAN					JUMLAH	KETINGGIAN (M. DPL)
		DATAR	BEROM BAK	BERGELOM BANG	CURAM	TERJAL		
1.	Sidikalang	11.165	10.395	4.620	7.315	5.005	38.500	1.068
2.	Sitinjo <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	1.080
3.	Berampu <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	880
4.	Parbuluan <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	1.431
5.	Sumbul	9.119	4.828	6.169	4.828	1.876	26.820	1.021
6.	Silahisabungan <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	956
7.	SilimaPunggapungga	1.444	1.444	1.444	1.011	9.097	13.640	596
8.	Lae Parira <sup>3)</sup>	-	-	-	-	-	-	777
9.	Siempat Nempu	1.550	4.134	6.640	2.067	11.449	26.020	655
10.	Siempat Nempu Hulu <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-	935
11.	Siempat Nempu Hilir <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-	434
12.	Tigalingga	2.162	1.297	6.054	8.648	25.079	43.240	473
13.	Gunung Sitember <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	416
14.	Pegagan Hilir <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	1.171
15.	Tanah Pinem	879	1.318	2.197	3.955	35.591	43.940	200
KABUPATEN DAIRI		26.319	23.416	27.124	27.824	88.097	192.780	200-1.431

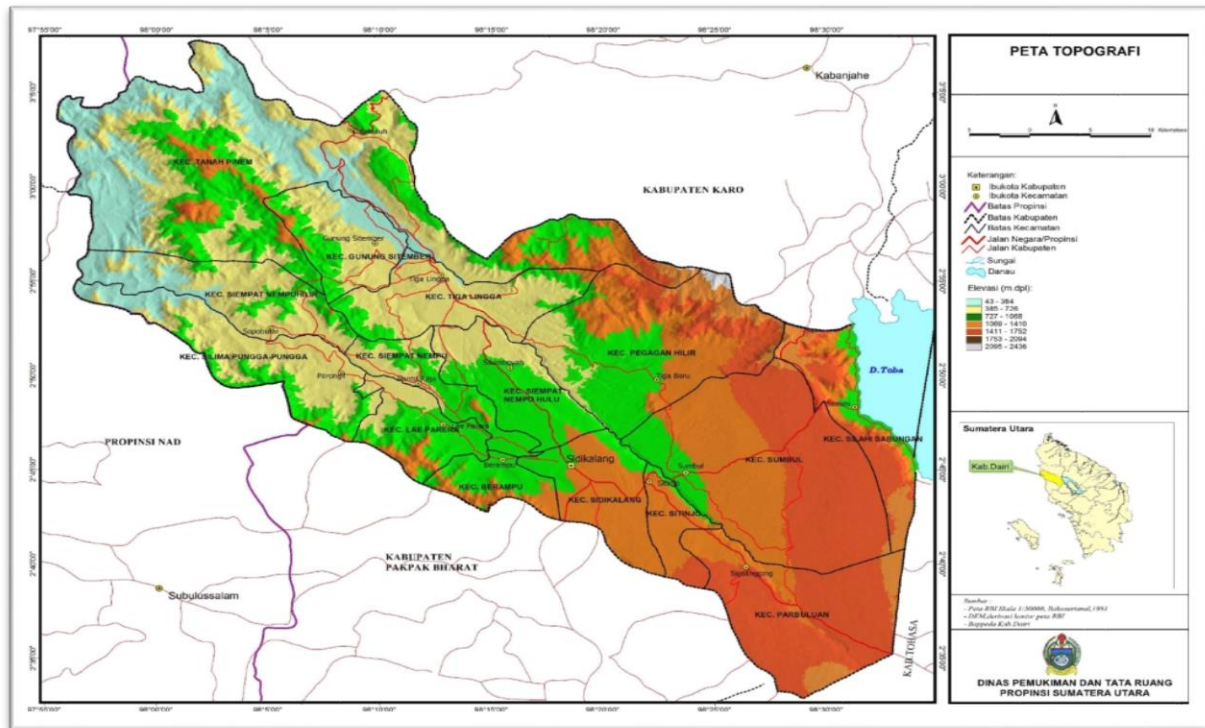
Sumber: RTRW Kab. Dairi Tahun 2014-2034 dan BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2024.

Keterangan: <sup>1)</sup>Masih bergabung dengan Kecamatan Sidikalang; <sup>2)</sup>Masih bergabung dengan Kecamatan Sumbul; <sup>3)</sup> Masih bergabung dengan Kecamatan Silima Punggapungga; <sup>4)</sup> Masih bergabung dengan Siempat Nempu

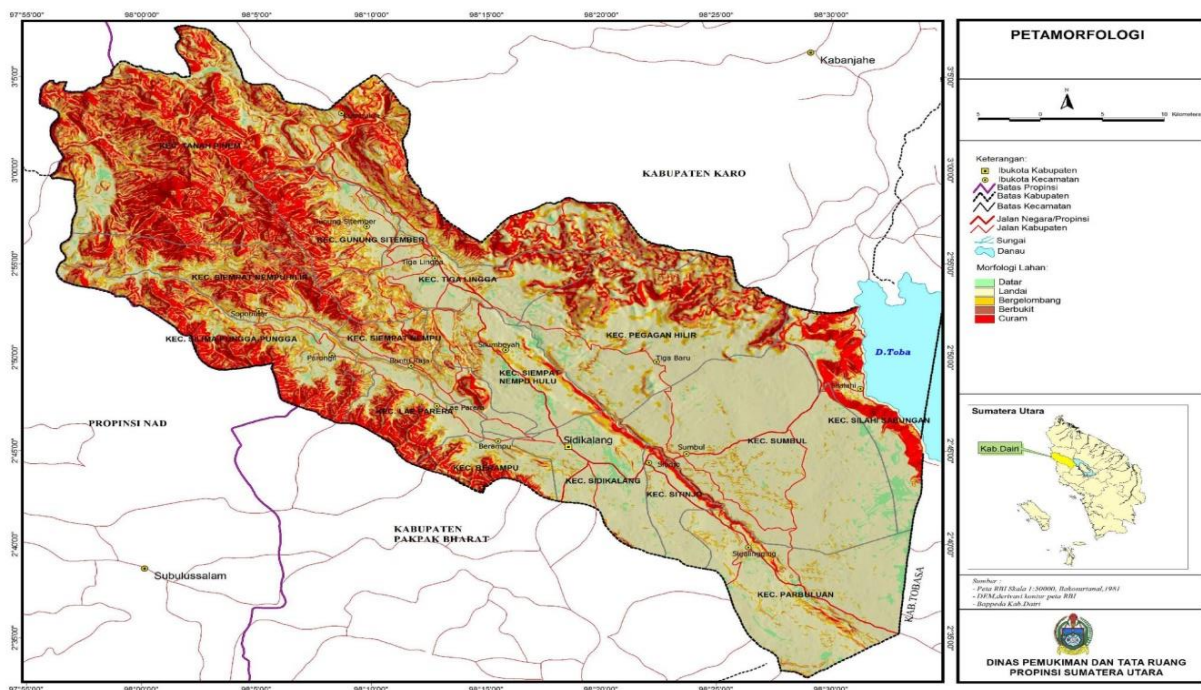
Gambar 2.2  
Peta Topografi Kabupaten Dairi



Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kabupaten Dairi



Gambar 2.4 Peta Morfologi Kabupaten Dairi



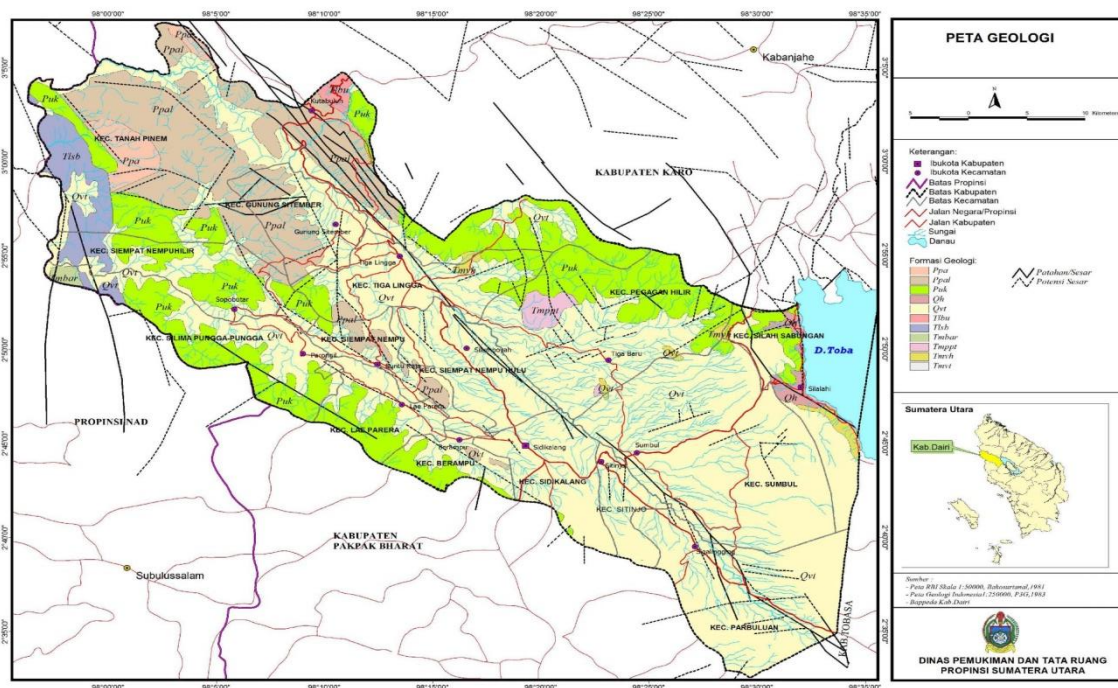
#### 4) Geologi

Kondisi geologi regional peta geologi lembar Sidikalang dan geomorfologi wilayah Kabupaten Dairi termasuk dalam zona fisiografi jajaran pegunungan Bukit Barisan Bagian Timur dan Bagian Tengah. Stratigrafi terdiri dari formasi/satuan dari yang tertua sampai termuda, yaitu Formasi Kluet (Puk) yang dicirikan oleh litologi batu sabak dan filit

yang memperlihatkan sistem foliasi bersifat keras dan berwarna kehitaman yang berumur permokarbon. Satuan ini terletak tidak selaras dengan batuan yang di atasnya, yaitu Formasi Alas (Ppal) yang terdiri dari anggota Batu Gamping dengan litologi batu gamping hablur, bersifat pejal, keras dan kompak dengan warna putih keabu-abuan. Di atas batuan ini diendapkan batuan dari Formasi Peutu (Tmptt) yang merupakan anggota Parapat yang dicirikan oleh litologi batu pasir, konglomerat dan batu lumpur gampingan yang bersifat agak keras dan kompak, berwarna putih kecoklatan, umumnya berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

Kemudian, secara tidak selaras di atasnya dijumpai Formasi Gunung Api Haranggaol (Tmvh) yang dicirikan oleh litologi andesit, dasit dan piroklastik, bersifat keras dan padat berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir, seperti dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Dairi

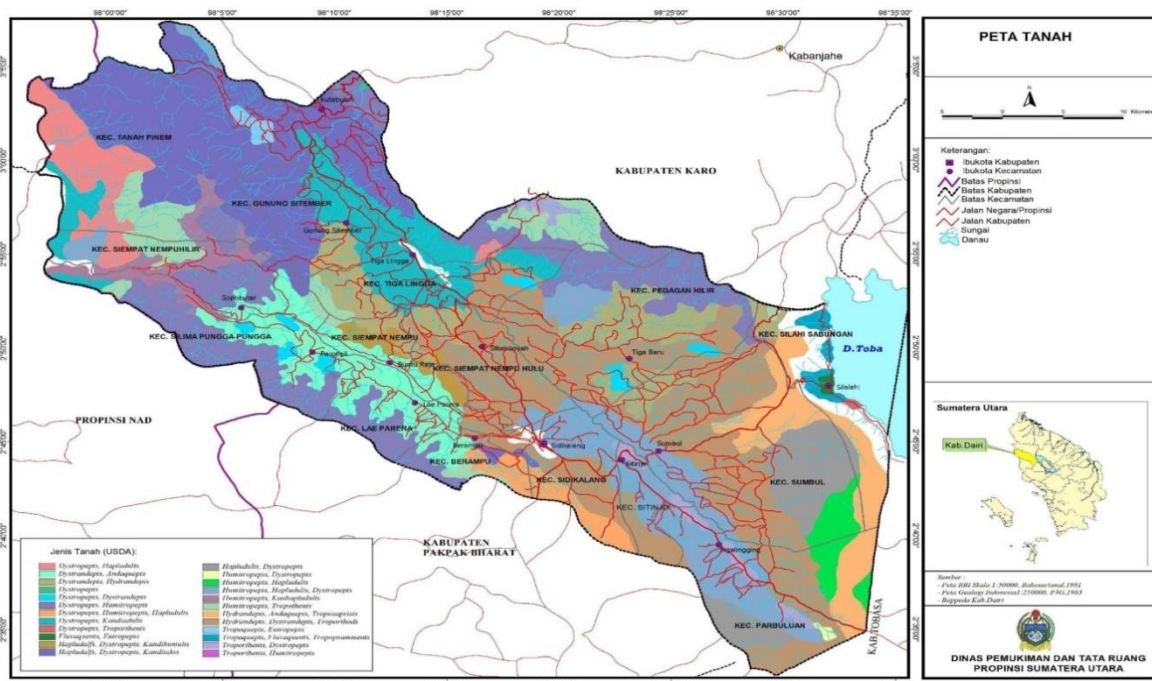


## 5) Jenis Tanah

Kabupaten Dairi memiliki berbagai jenis tanah sebagai hasil letusan Gunung Toba dimasa lalu, seperti jenis tanah liparit seluas kurang lebih 103.812,030 ha atau sekitar 53,85% dari luas total Kabupaten Dairi menyebar di seluruh kecamatan, permokarbon seluas kurang lebih 62.190,83 ha atau sekitar 32,26%, palaegon seluas kurang lebih 3.527,87 ha atau sekitar 1,83%, garbo diabase sepertijin seluas 23.017,93 ha atau

sekitar 11,94% dan sisanya jenis tanah jura seluas 231,34 ha. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Gambar berikut.

Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dairi



Kedalaman efektif tanah diperinci menurut kedalaman < 30 cm, 30 - 60 cm, 60 - 90 cm dan > 90 cm. Kedalaman efektif tanah < 30 cm terdapat di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga, kedalaman efektif tanah 30 - 90 cm terdapat di sebelah Selatan Kecamatan Parbuluan, kedalaman efektif tanah 60 - 90 cm tersebar merata di seluruh kecamatan. Tekstur tanah diperinci menurut halus dan kasar, tekstur halus menyebar di seluruh kecamatan sedangkan tekstur kasar berada di sebelah Barat Kabupaten Dairi, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga.

## 6) Hidrologi

Pola hidrologi Kabupaten Dairi meliputi air permukaan dan air bawah tanah dengan karakter Wilayah Sungai (WS) dan Cekungan Air Tanah (CAT).

### A. Wilayah Sungai (WS)

Penetapan WS didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006 yang terdiri dari 2 (dua) WS, yaitu:

- WS Toba – Asahan (Sumatera Utara – Strategis Nasional), terdiri dari 1 (satu) DAS Danau Toba di Kabupaten Dairi seluas 110.260 ha;
- WS Alas – Singkil termasuk DAS Singkil (NAD dan Sumatera Utara - Lintas Provinsi).

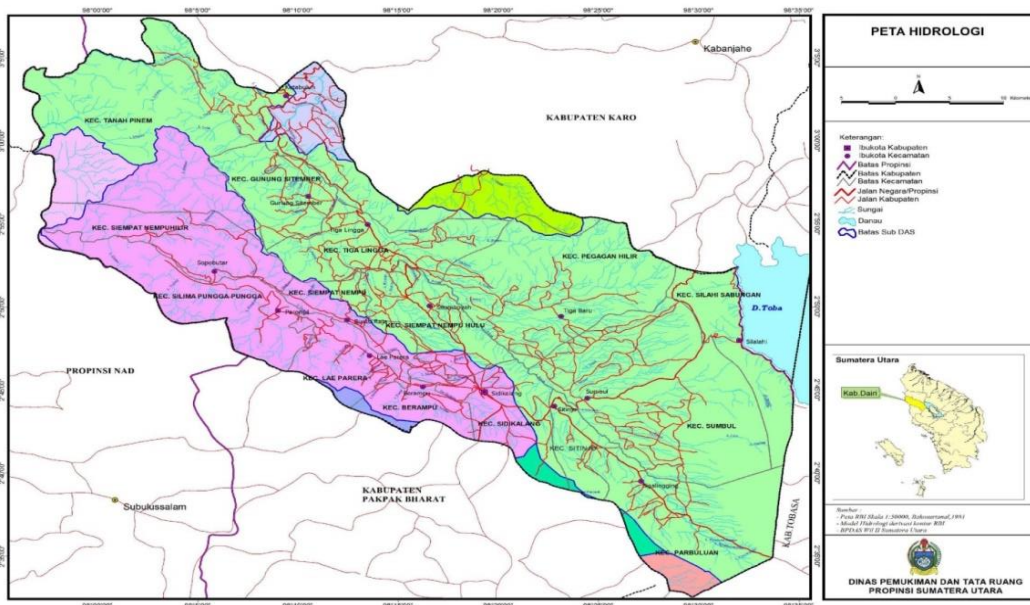
Diantara sungai-sungai yang ada, dimanfaatkan untuk irigasi sederhana maupun setengah teknis, dan kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan air minum. Lihat Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.3 Sungai-Sungai di Kabupaten Dairi

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)
1.	Lae Renun	Sumbul	120
2.	Lae Simbelin	Sidikalang	60
3.	Lae Simuhur	Pegagan Hilir/Tigalingga	15
4.	Lae Luhung	Siempat Nempu	25
5.	Lae Manalsal	Sumbul	20
6.	Lau Belulus	Tigalingga	7
7.	Lae Lobe	Siempat Nempu	5
8.	Lau Gunung	Tanah Pinem	10
9.	Lae Panginuman	Silima Punggapungga	4
10.	Lae Pangoroan	Silima Punggapungga	4
11.	Lae Kentara	Silima Punggapungga	10
12.	Lae Panencoh	Silima Punggapungga	8
13.	Lae Silobi	Silima Punggapungga	4
14.	Lae Pandaroh	Sitinjo	7
15.	Lae Nuaha	Sidikalang	6
16.	Lae Patulen	Sumbul	8
17.	Lae Longki	Siempat Nempu	8

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

Gambar 2.7 Peta Hidrologi Kabupaten Dairi



## B. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang di Kabupaten Dairi meliputi wilayah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.438 km<sup>2</sup>.

## C. Ketahanan Air Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi memiliki jaringan sungai yang luas yang mendukung pertanian, namun juga rentan terhadap banjir tahunan. Perlu ada upaya penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan pengelolaan air untuk memastikan ketahanan air jangka panjang dengan komponen Indeks Ketahanan Air Kabupaten Dairi yaitu kapasitas tampungan air (M<sup>3</sup>/Kapita) dengan target 63,45 pada Tahun 2025 dan sebesar 200 pada Tahun 2045.

### 7) Klimatologi

Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan curah hujan ekstrem berpotensi memperburuk banjir di Kabupaten Dairi. Strategi mitigasi, seperti peningkatan kapasitas sistem drainase dan konservasi lahan kritis, harus segera diimplementasikan untuk mengurangi risiko bencana. Curah hujan di Kabupaten Dairi antara 2.000 – 3.500 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 181 hari/tahun. Menurut *Oldeman (1979)*, pembagian tipe iklim didasarkan atas banyaknya bulan basah (curah hujan >100 mm/bulan) dalam setahun. Tipe iklim di Kabupaten Dairi dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Iklim B1

Bulan basah antara 7 – 9 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir dan Silima Punggapungga.

- Iklim C1

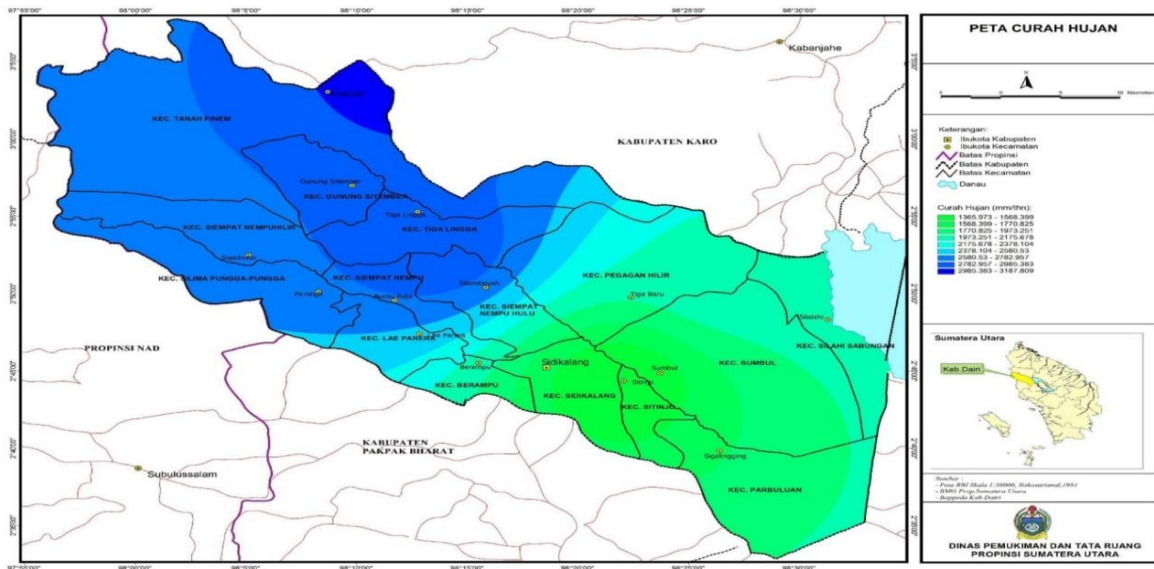
Bulan basah antara 5 – 6 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sumbul, sebagian Kecamatan Siempat Nempu, Parbuluan dan Pegagan Hilir.

- Iklim D1

Bulan basah antara 3 – 4 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Tigalingga, sebagian Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Tanah Pinem dan Silahisabungan.

Iklm sub tropis terjadi pada daerah ketinggian < 500 mdpl, iklim tropis pada ketinggian antara 500 - 1.000 mdpl, sedangkan iklim dingin pada ketinggian > 1.000 mdpl. Lihat Gambar berikut:

Gambar 2.8 Peta Curah Hujan Kabupaten Dairi



## 8) Penggunaan Lahan

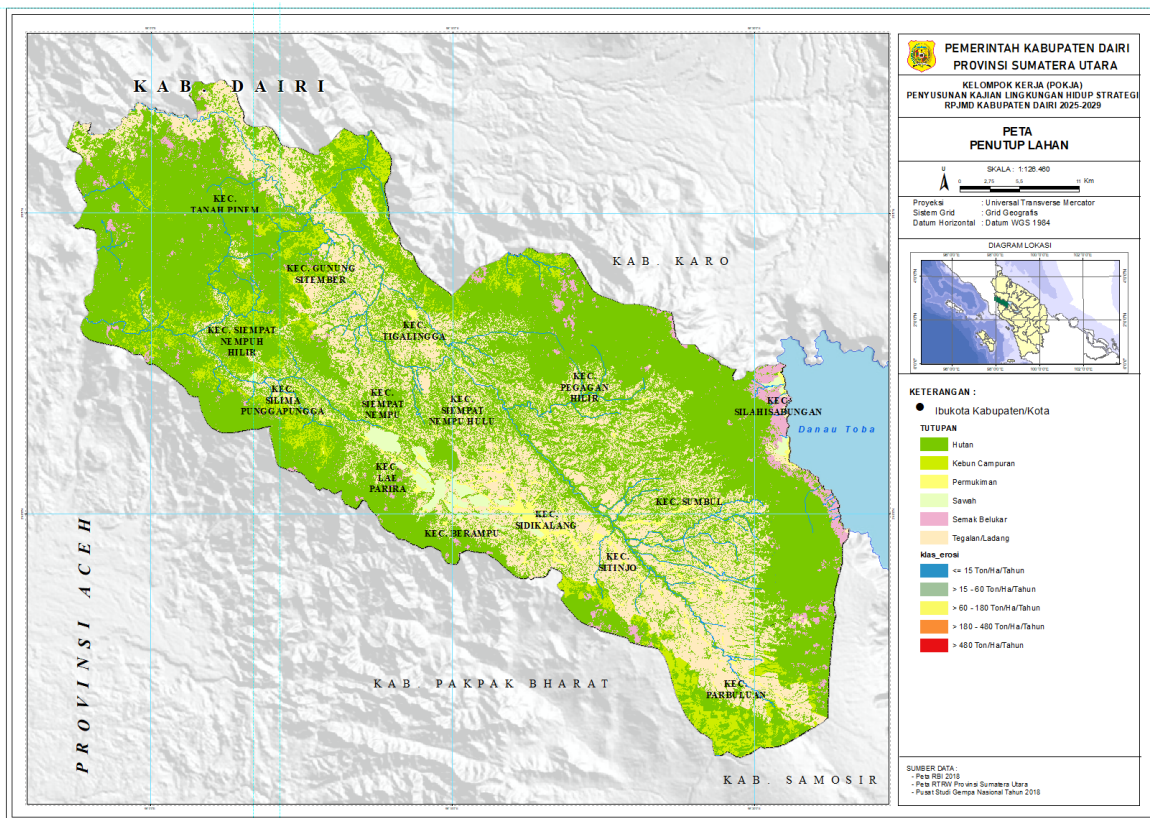
Penggunaan lahan di Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 199.826 ha dari luas wilayah Kab. Dairi, didominasi oleh hutan lahan kering (primer/sekunder) seluas 65.387,47 ha (32.722 %), Perkebunan campuran seluas 4.182,36 ha atau sekitar 2,07%, ladang seluas 82.703,92 ha atau sekitar 41,39%, Sedangkan luas lahan permukiman hanya seluas 1.887,07 ha atau sekitar 0,94% dari luas wilayah Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Dairi

NO	JENIS PENUTUPAN LAHAN	Luas	
		Ha	%
1.	Danau /Waduk	26.73	0.01
2.	Hutan Lahan Kering Primer	18,620.44	9.32
3.	Hutan Lahan Kering Sekunder	46,767.03	23.40
4.	Hutan Tanaman Industri	14,111.11	7.06
5.	Ladang	82,703.92	41.39
6.	Lahan Terbuka	335.34	0.17
7.	Pemukiman	1,887.07	0.94
8.	Pertambangan	48.28	0.02
9.	Perkebunan Campuran	4,132.86	2.07
10.	Perkebunan Kopi /Jeruk	947.44	0.47
11.	Perkebunan Kelapa Sawit	6,614.57	3.31
12.	Sungai	178.54	0.09
13.	Semak Belukar	17,742.76	8.88
14.	Sawah Irigasi	5,553.92	2.78
15.	Sawah Tadah Hujan	133.45	0.07
16.	Tambak	22.96	0.01
<b>Total Luas</b>	<b>199.826,40</b>	<b>10</b>	

Sumber: Laporan DDDTLH Kab. Dairi dan Hasil Analisa, 2022

Gambar 2.9 Peta Penggunaan Lahan



## **B. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi sumber daya alam Kabupaten Dairi cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura.

### **a. Pertanian Lahan Basah**

Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah/sawah adalah:

1. Peningkatan pelayanan irigasi dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir irigasi.
2. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, pemasaran hasil pertanian (sub terminal agribisnis).
3. Peningkatan produksi pertanian lahan basah/sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat lebih meningkat.
4. Pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
5. Insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktifitas lahan dan kinerja petani.
6. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.

### **b. Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura**

Program untuk mewujudkan rencana pola ruang pertanian lahan kering dan hortikultura diperlukan hal-hal:

1. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering.
2. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik kawasan.
3. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan dan optimasi lahan.
4. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan usaha tani, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen.
5. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.

c. Perkebunan

Jenis komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Kabupaten Dairi adalah kopi, kakao dan tanaman lainnya. Program untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah:

1. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung.
2. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.
3. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan untuk mendukung perkebunan, meliputi:
  - a. Subsistem Hulu (*up stream*): sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif).
  - b. Subsistem Usaha Tani (*on farm*): produksi pertanian primer (budidaya).
  - c. Subsistem Hilir (*down stream*): pengolahan hasil pertanian dan perdagangan.
  - d. Subsistem Kelembagaan (*supporting institution*): perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan lain-lain.

d. Peternakan

Program yang dikembangkan untuk perwujudan kawasan peternakan adalah:

1. Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu di beberapa kecamatan, khusus ternak lembu diarahkan di Kecamatan Tigalingga, Gunung Sتمبر dan Siempat Nempu Hulu. Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau.
2. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba di Kecamatan Lae Parira, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga dan Tanah Pinem, sedangkan ternak babi dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil

ini juga dibangun prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.

3. Pengembangan sentra peternakan unggas di seluruh kecamatan.
4. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan.
5. Pengembangan kawasan terintegrasi, seperti:
  - a) Kawasan integrasi peternakan-tanaman pangan dan hortikultura (*organic farm*).
  - b) Kawasan integrasi peternakan-perkebunan (kakao, karet dan lain-lain).
  - c) Kawasan integrasi peternakan-perikanan.
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
7. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian lokal.

e. Perikanan

Program yang dikembangkan untuk perwujudan kawasan perikanan adalah:

1. Pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran. Arah kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
  - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
  - b. Peningkatan akses jalan ke kawasan perikanan budidaya.
  - c. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha.
  - d. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan.
  - e. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan, pemasaran produk perikanan.
  - f. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan.
  - g. Peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank.

2. Pembangunan dermaga khusus perikanan untuk menunjang pengembangan perikanan. Arahannya kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
  - a. Melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan pelabuhan perikanan.
  - b. Melaksanakan desain teknis detail pembangunan pelabuhan perikanan.
  - c. Pembangunan fisik pelabuhan dan fasilitas penunjangnya.
  - d. Operasional dan pengelolaan dermaga perikanan.
- f. Pertambangan dan Sumber Daya Alam
  1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi. Arahannya kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
    - a. Inventarisasi sumber daya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan geologi yang berpotensi untuk dieksplorasi dan dieksploitasi dalam skala ekonomi.
    - b. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian.
    - c. Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
    - d. Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (*bussines plan*) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.
    - e. Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif, seperti panas bumi, tenaga air dan lain-lain.
    - f. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.
  2. Pengembangan energi alternatif. Arahannya kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
    - a. Melakukan kajian pengembangan energi alternatif bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan lain-lain.

- b. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif.
- c. Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik energi alternatif.

g. Pariwisata

Program yang dikembangkan untuk kawasan pariwisata adalah:

1. Pengembangan kawasan wisata terpadu yang dipusatkan di Kota Sidikalang. Arah kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
  - a. Melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata.
  - b. Melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai even promosi.
  - c. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
2. Pengembangan potensi sumber daya alam sebagai obyek-obyek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu. Arah kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
  - a. Inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai obyek wisata.
  - b. Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata.
  - c. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.

h. Industri

Program yang dikembangkan untuk kawasan industri adalah:

- a. Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/anyaman-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain.
- b. Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain.

- c. Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain.
- d. Kecamatan Silima Punggapungga, jenis industri besar, sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/anyaman-anyaman dan lain-lain.

### **C. Wilayah Rawan Bencana**

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pulau Sumatera. Ditinjau dari sisi kondisi alam dan iklim, Kabupaten Dairi berpotensi dilanda berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Tidak menutup kemungkinan terjadi bencana masif karena pada jaman purbakala tercatat letusan maha dahsyat dari Gunung Toba Purba pada 72.000 SM sebagai bencana global.

Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RPB sehingga RPB tingkat Kabupaten Dairi yang telah disusun ini akan diintegrasikan dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Data tentang kejadian bencana di Kabupaten Dairi diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia kurun waktu 2004 – 2015, dan data dari BPBD Kabupaten Dairi dalam bentuk catatan-catatan kejadian bencana. Berdasarkan data dari dua sumber data tersebut, kejadian

bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana : Gempa bumi, Banjir Bandang, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan Kebakaran Hutan dan Kebakaran Permukiman. Data kejadian bencana di Kabupaten Dairi selengkapnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2019- 2023 di Kabupaten Dairi

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	JUMLAH KEJADIAN BENCANA PER TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angin Puting Beliung	12	12	16	12	13
2	Banjir Bandang	1	0	2	0	2
3	Gempa Bumi	1	0	0	0	0
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	5	0	5	2	3
5	Kebakaran Permukiman	24	14	14	36	19
6	Tanah Longsor	44	29	42	91	53
Jumlah		87	55	79	141	90

Sumber: BPBD Kabupaten Dairi 2024

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 2019 – 2023 berdasarkan data yang tercatat dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Angin Puting Beliung

Bencana angin puting beliung di Kabupaten Dairi terjadi sebanyak 65 kali kejadian, kejadian terbanyak terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 16 kejadian. Lokasi kejadian cuaca ekstrim ini di beberapa wilayah di Kabupaten Dairi.

Tabel 2.6 Matriks Risiko Angin Puting Beliung Kabupaten Dairi

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG	<p>KEC. TANAH PINEM : Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Lau Perimbon, Balandua, Harapan, Sukadame. KEC. SUMBUL : Pangguruan, Barisan Nauli. KEC. PEG. HILIR : Laksa, Kuta Usang, Lingga Raja II. KEC. G. SITEMBER : Bukit Lau Kersik KEC. SI4N HILIR: Lae Itam, lae Markelang, Lae Luhung, Sopo Butar.</p>	<p>KEC. TANAH PINEM : Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Sinar Pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Tanah Pinem, Gunung Tua. KEC. SUMBUL : Kuta Gugung, Perjuangan, Sileuleu Parsaoran, Tanjung Beringin I, Pegagan Julu X. KEC. SIDIKALANG : Bintang KEC. TIGALINGGA : Ujung Teran, Jumagerat, Palding, Lau Sireme, Lau Pakpak. KEC. PEG. HILIR : Simanduma, Lingga raja, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan, Bukit Baru. KEC. G. SITEMBER : Gunung SiteMBER, Lau Lebah, Rantai Besi, Tumpak Raja, Kendet Liang. KEC. SI4N HILIR : Simungun, Lae Sering, Lae Haporas. KEC. SI4N HULU : Kuta Tengah, Sigambir-gambir KEC. SI4NEMPU : Soban, Gomit, Juma Teguh. KEC. SI5PP : Lae Rambong, Lae Ambat, Sumbari, Bonian, Bongkaras, Lae Pangaroan. KEC. PARBULUAN : Parbuluan I, Parbuluan II, Parb. IV. KEC. LAE PARIRA : Pandiangan KEC. BERAMPU : Karing, Pasi, Sambaliang KEC. SILAHISABUNGAN : Silalahi I, Silalahi III, Paropo I. KEC. SITINJO : Sitinjo I</p>	
	TINGGI		<p>KEC. TANAH PINEM : Liang Jering, Lau Tawar. KEC. SUMBUL : Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Pargambiran. KEC. SIDIKALANG : Kota Sidikalang, Bintang Hulu, Kalang Simbara, Kalang, Sidiangkat, Belang Malum, Huta Gambir, Bintang Marsada. KEC. TIGALINGGA : Sumbul Tengah, Sarintonu, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Bagot, Tigalingga, Lau Mil, Palding Jaya. KEC. PEG. HILIR : B. Huta Usang, Mbinanga, Perik Mbue KEC. G. SITEMBER : Batu Gunung, Gundaling. KEC. SI4N HILIR : Pardomuan, Jambur Indonesia, Janji. KEC. SI4N HULU : Tambahan, Lae Nuaha, Sungai Raya, Silumboyah, Pangaribuan, Tualang, Bakkal Julu, Sipoltong, Pandan. KEC. SI4NEMPU : Sinampang, Sihorbo, Buntu Raja, Juman Tuang, Juma Siulok, Sosor Lontung, Huta Imbaru, Maju, Adian Gupa KEC. SI5P : Lae Panginuman, Bakkal Gajah, Uruk Belin, Siboras, Tung-tung Batu, Longkotan, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi. KEC. PARBULUAN : Parbuluan V, Parbuluan III, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Lae Hole II, Bangun I. KEC. LAE PARIRA : Lae Parira, Bulu Duri, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kentara, Sumbul, Sempung Polling, Kaban Julu. KEC. BERAMPU : Berampu, Banjar Toba. KEC. SILAHISABUNGAN : Silalahi II, Paropo KEC. SITINJO : Sitinjo, Sitinjo, Sitinjo II, Panji Dabutar.</p>	<p>KEC. SUMBUL : Pegagan Julu I, KEC. SIDIKALANG : Batang Beruh, Huta Rakyat KEC. SI4NEMPU : Adian Nangka</p>

Sumber : BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2024

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 57 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 94 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana angin puting beliung.

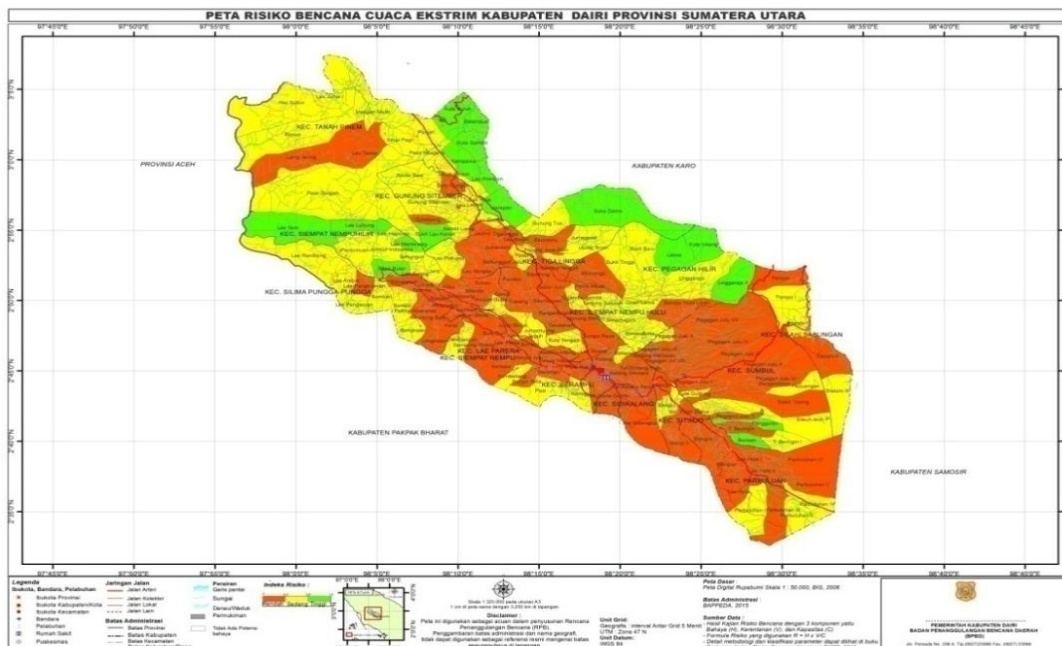
Tabel 2.7 Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM/ ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	35.234	79.595	77.283
PENDUDUK (Jiwa)	20.844	78.959	179.161
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	14.578.309.440	48.433.470.921	148.626.611.240
FASILITAS UMUM (Rp)	49.950.000.000	173.900.014.950	294.350.059.800
RUMAH PDDK (Rp)	692.750.096.100	2.508.900.297.150	5.215.701.127.600
JUMLAH RUMAH (Unit)	4.032	10.532	25.701

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 77.283 ha atau 40,09% dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 179.161 jiwa atau 57,88% dari total populasi. Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 25.458 unit atau 38,2% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.10 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko angin puting beliung, daerah dengan tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Lae Parira, Parbuluan,

Sidikalang, Sumbul, Sitingjo, dan Siempat Nempu Hulu maupun Siempat Nempu.

## 2. Banjir Bandang

Bencana banjir telah terjadi sebanyak 5 kali kejadian pada periode Tahun 2019 - 2023.

Tabel 2.8 Matriks Risiko Banjir Bandang Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH		Kec. Tigalingga : Lau Bagot, Tigalingga, Palding Jaya Kec. L Parira : Sumbul, Lae Parira	
	SEDANG		Kec. T Pinem : Sinar Pagi, Harapan, Gunung Tua, Tanah Pinem Kec. Tigalingga : Sumbul Tengah, Sarintonu, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Sireme, Lau Pakpak Kec. P Hilir :Tanjung Saluksuk, Simanduma, Bandar Huta Usang, Onan Lama, Bukit Tinggi, Simartugan, Perik Mbue, Bukit Baru Kec. S5P2 : Parongil, Palipi Kec. L Parira : Kentara, Bulu Duri, Sempung Polling, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kaban Julu Kec. Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II, Silalahi III	Kec. P Hilir : Laksa
	TINGGI		Kec. Tigalingga : Lau Mil Kec. P Hilir : Mbinanga Kec. SN Hilir : Jambur Indonesia, Sopo Butar, Lae Sering Kec. S5P2 : Uruk Belin, Longkotan	Kec. T Pinem : Lau Njuhar, Liang Jering, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Lau Primbon, Balandua, Lau Tawar, Suka Dame Kec. Tigalingga : Ujung Teran, Juma Gerat Kec. P Hilir :Lingga Raja, Lingga Raja II, Kuta Usang Kec. SN Hilir :Lae Itam, Pardomuan, Simungun, Janji, Lae Markelang, Lae Luhung, Lae Haporas Kec. S5P2 : Lae Rambong, Lae Ambat, Lae Panginuman, Sumbari, Bakal Gajah, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Siratah, Polling Anak-anak, Lae Pangaroan Kec. Silahisabungan : Paropo I, Paropo

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 32 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko

Sedang dan 36 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana banjir bandang.

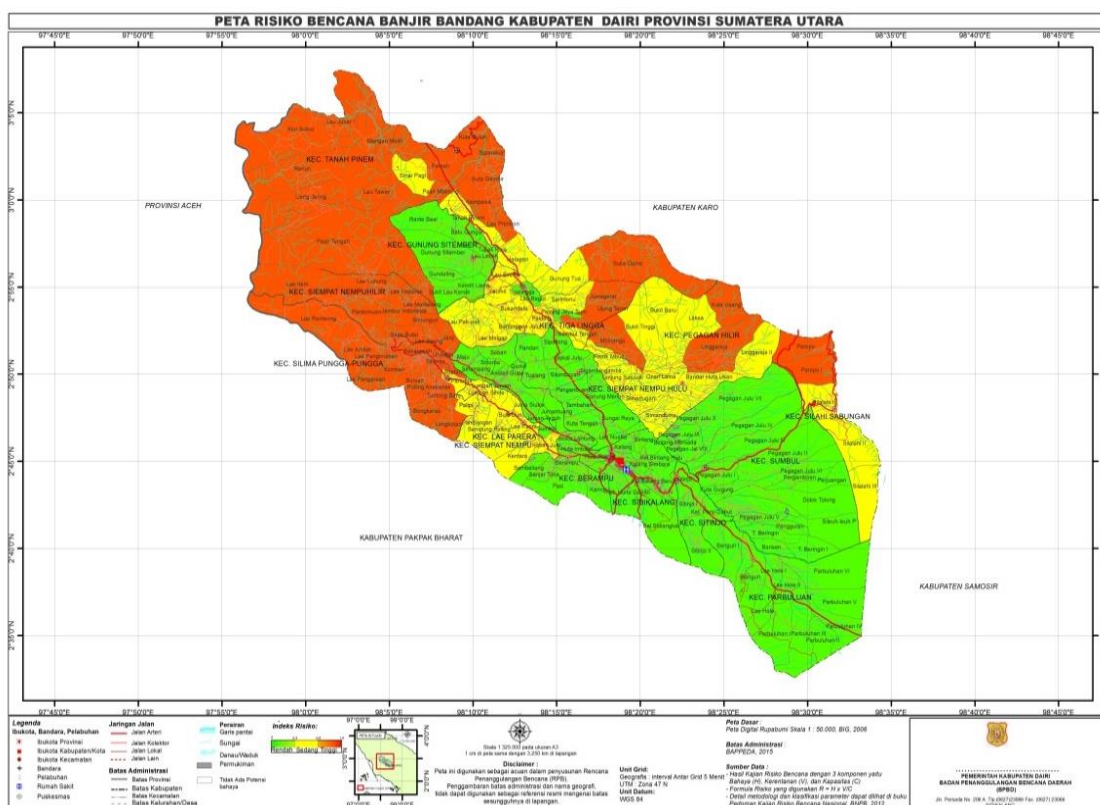
Tabel 2.9 Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BANJIR BANDANG KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	8.420	42.557
PENDUDUK (Jiwa)	-	7.915	30.015
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	23.855.969.914	59.016.084.080
FASILITAS UMUM (Rp)	-	18.674.000.000	67.671.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	291.656.000.000	1.106.765.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	2.035	7.617

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 42.557 ha atau 22,1 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 30.015 jiwa atau 10,8 % dari total populasi, Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 7.617 unit atau 11,4 % dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.11 Peta Indeks Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko banjir bandang, bisa disimpulkan daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir dan Pegagan Hilir.

### 3. Gempa Bumi

Bencana gempa bumi yang pernah terjadi di Kabupaten Dairidari kurun waktu 2019-2023 tercatat sebanyak 1 kali, Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 7 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 162 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana gempa bumi.

Tabel 2.10 Matriks Risiko Gempa Bumi Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG		KEC. TIGALINGGA : Jumagerat KEC. PEGAGAN HILIR : Laksa, Kuta Usang, Lingga Raja II KEC. GUNUNG SITEMBER : Bukit Lau Kersik KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR : Lae Markelang	
	TINGGI	KEC. TANAH PINEM : Kuta Gamber	KEC. TANAH PINEM : Lau Njuhar, Mangan Moli, Renun, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Tanah Pinem, Kempawa, , Lau Primbon, Balandua, Harapan, Gunung Tua, Suka dame KEC. SUMBUL :Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin, Pargambiran, Perjuangan, Sileu-leu Parsaoran, Pangguruan, Tanjung Beringin I, Kuta Gugung, Barisan Nauli KEC. SIDIKALANG :Bintang Hulu, Bintang, Sidiangkat, Belang Malum, Bintang Mersada KEC. TIGALINGGA :Sumbul Tengah, Ujung Teran, Sarintonu, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Bagot, Tigalingga, Lau Sireme, Lau Mil, Lau Pakpak, Palding Jaya KEC. PEGAGAN HILIR : Simanduma, Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan, Mbinanga, Bukit Baru KEC. GUNUNG SITEMBER :Gunung SiteMBER, Lau Lebah, Batu Gungun, Rante Besi, Tupak Raja, Gundaling, Kendit Liang KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR :Lae Itam,Jambur Indonesia, Simungun, Janji, Lae Luhung, Sopobutar, Lae Haporas, Lae Sering KEC. SIEMPAT NEMPU HULU :Tambahan, Kuta Tengah, Lae Nuaha, Sungai Raya, Sigambir-gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Bakal Julu, Pandan KEC. SIEMPAT NEMPU :Sinampang,Soban, Bunturaja, Gomit, Juma Antuang, Juma Siulok, Sosor Lontung, Huta Imbaru, Juma Teguh KEC. SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA :Lae Rambong, Lae Ambat,Sumbari, Bakal Gajah, Uruk Belin, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Longkotan, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi, Lae Pangaroan KEC. PARBULUAN :Parbuluan I, Parbuluan III, Parbuluan IV, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Bangun I, Parbuluan II KEC. LAE PARIRA :Kentara, Bulu Duri, Sempung Polling, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kaban Julu KEC. BERAMPU :Karing, Pasi, Sambaliang KEC. SILAHISABUNGAN : Silalahi I, Silalahi II, Silalahi III, Paropo I KEC. SITINJO :Sitinjo, Sitinjo I, Panji Dabutar	KEC. TANAH PINEM :Liang Jering, Alur Subur, Sinar Pagi, Pamah, Lau Tawar KEC. SUMBUL : Pegagan Julu I KEC. SIDIKALANG : Kota Sidikalang, Batang Beruh, Kalang Simbara, Kalang, Huta Gambir, Huta Rakyat KEC. PEGAGAN HILIR : Perik Mbue KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR : Pardomuan KEC. SIEMPAT NEMPU HULU : Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong KEC. SIEMPAT NEMPU : Sihorbo, Adian Nangka, Maju, Adian Gupa KEC. SILIMA PUNGGGA PUNGGGA : Lae Panginuman KEC. PARBULUAN : Parbuluan V, Lae Hole II KEC. LAE PARIRA : Sumbul, Lae Parira KEC. BERAMPU : Berampu, Banjartoba KEC. SILAHISABUNGAN : Paropo KEC. SITINJO : Sitinjo II

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

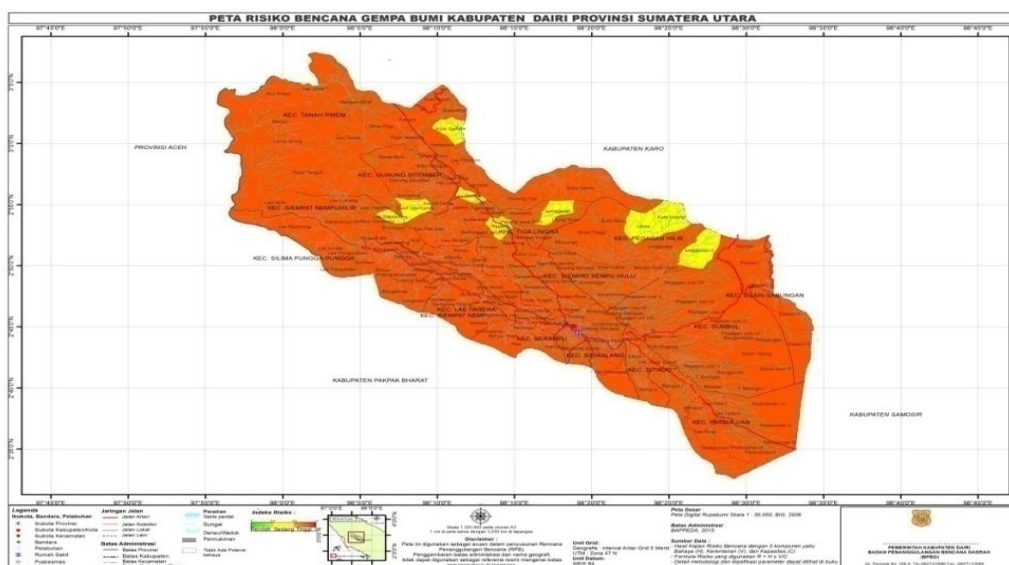
Tabel 2.11 Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	13.786	157.326
PENDUDUK (Jiwa)	-	9.005	269.956
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	3.898.272.216	215.363.355.663
FASILITAS UMUM (Rp)	-	21.800.000.000	570.790.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	340.600.000.000	9.597.600.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	2.421	64.169

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Kajian tingkat risiko bencana gempabumi menyimpulkan total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi, yaitu seluas 157.326 ha 81,60 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 269.956 jiwa atau 91,81 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi. Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 64.169 unit atau 14,51% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.12 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko, bisa dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi gempa bumi menyeluruh di Kabupaten Dairi, dan hanya sebagian kecil saja dari wilayah Kecamatan Pegagan Hilir dan Tanah Pinem yang digolongkan risiko sedang. 9 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 160 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana gempa bumi.

Sebagai tambahan, Kajian tingkat risiko bencana gempa bumi menyimpulkan total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi, yaitu seluas 157.326 ha atau 81,60 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 269.956 jiwa atau 91,81 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi. Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 64.169 unit atau 96,2% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

#### 4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Dairi selama periode 2019 – 2023 tercatat sebanyak 15 kejadian, dimana kejadian terbanyak terjadi pada Tahun 2019 dan Tahun 2021 yaitu sebanyak 5 kejadian.

Tabel 2.12 Matriks Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG	Kec. Sidikalang : Bintang Kec. P Hilir : Laksa, Simartugan Kec. SN Hilir : Lae Itam, Lae Markelang Kec. S5P2 : Lae Rambong	Kec. Tanah Pinem : Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Kuta Buluh, Tanah Pinem, Kempawa, Kuta gambar, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Sukadame Kec. Sumbul : Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Kuta Gugung, Pargambiran, Perjuangan, Sileuleu Parsaoran, Pangguruan, Barisan Nauli Kec. Sidikalang : Kalang, Belang malum, Bintang Marsada Kec. Tigalingga : Ujung Teran, Sarintonu, Jua Gerat, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Palding, Lau Bagot, Tigalingga, Laun Sereme, Palding Jaya Kec. P Hilir : Simanduma, Bandar Huta Usang, Lingga raja, Onan lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Kuta Usang, Lingga Raja II, Bukit Baru Kec. G Sitember : Gunung Sitember, Batu Gun-Gun, Tumpak Raja, Kendit Liang Kec. SN Hilir : Lae Luhung, Sopo Butar, Lae Haporas Kec. SN Hulu : Tambahan, Kuta Tengah, Bakkal Julu, , Lae Nuaha, Sungai Raya, Sigambir-Gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Pandan Kec. S Nempu : Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma Teguh, Sosor Lontung Kec. S5P2 : Lae Ambat, Lae Panginuman, Sumbari, Siboras, Bonian, Tung-tung Batu, Bongkaras, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi, Lae Pangaroan Kec. Parbuluan : Parbuluan II, Parbuluan I, Parbuluan III, Parbuluan IV, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Bangun I Kec. L Parira :Lae Parira, Bulu Duri, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kentara Kec. Berampu : Karing, Pasi, Sambaliang Kec. Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II, Paropo I Kec. Sitingjo : Panji Dabutar	

TINGKAT RESIKO	TINGKAT KAPASITAS		
	RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGGI		Kec. Tanah Pinem : Liang Jering, Alur Subur, Sinar pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Lau Tawar, Gunung Tua Kec. Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin I Kec. Sidikalang : Kota Sidikalang, Bintang Hulu, Kalang Simbara, Sidiangkat, Huta Gambir, Huta Rakyat Kec. Tigalingga : Sumbul Tengah, Lau Mil, Lau Pakpak Kec. P Hilir : Mbinanga, Perik Mbue Kec. G Sتمبر : Lau Lebah, Bukit Lau Kersik, Rantai Besi, Gundaling Kec. SN Hilir : Pardomuan, Jambur Indonesia, Simungun, Janji, Lae Sering Kec. SN Hulu : Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong Kec. S Nempu : Sinampang, Sihorbo, Adian Nangka, Buntu Raja, Juman tuang, Huta Imbaru, Maju Kec. S5P2 : Bakkal Gajah, Uruk Belin, Longkotan Kec. Parbuluan : Parbuluan V, Lae Hole II Kec. L Parira : Sumbul, Sempung Polling, Kaban Julu Kec. Berampu : Berampu, Banjartoba Kec. Silahisabungan : Silalahi III, Paropo Kec. Sijinjo : Sijinjo, Sijinjo I, Sijinjo II	Kec. Sidikalang : Batang Beruh  Kec. S Nempu : Adian Gupa

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 101 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 62 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan.

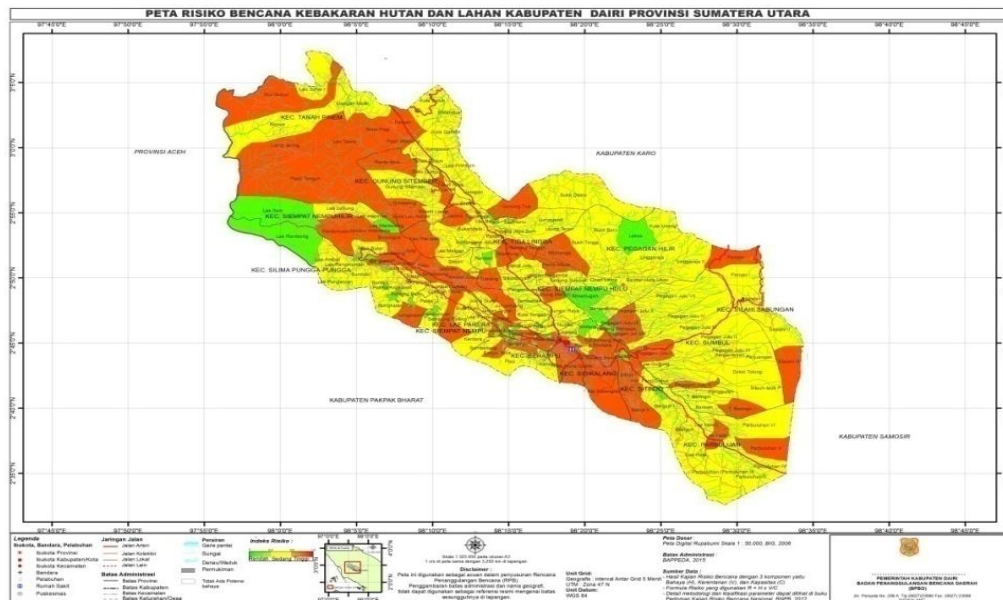
Tabel 2.13 Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	74.822	43.587
PENDUDUK (Jiwa)	-	143.918	116.336
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	69.943.046.260	130.399.124.070
FASILITAS UMUM (Rp)	-	276.850.000.000	211.250.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	5.187.050.000.000	4.095.650.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	62.724	3.320

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 43.587 ha atau 22,6 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 116.336 jiwa atau 41,7 % dari total populasi, Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 3.320 unit atau 5,0 % dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.13 Peta Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Di sisi lain, jika melihat pada peta risiko kebakaran hutan dan lahan, bisa dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi masih didominasi oleh Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hulu dan Sidikalang.

#### 5. Kebakaran permukiman

Kejadian bencana kebakaran permukiman di Kabupaten Dairi pada periode 2019 – 2023 dilaporkan terjadi sebanyak 107 kejadian, diman kejadian tebanyak terjadi pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 22 kejadian.

#### 6. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di Kabupaten Dairi pada kurun waktu periode 2019-2023 terjadi sebanyak 259 kali kejadian, kejadian tanah longsor terbanyak terjadi pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 91 kejadian dan kemudian kejadian bencana tanah longsor kedua terbanyak terjadi pada Tahun 2023, yaitu sebanyak 53 kejadian.

Tabel 2.14 Matriks Risiko Tanah Longsor Kabupaten Dairi

TINGKAT RiSIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH	<p>Kec. Sidikalang : Kota Sidikalang, Batang Beruh, Kalang Simbara, Kalang, Sidiangkat, Belang malum, Huta Gambir, Huta Rakyat, Bintang Marsada</p> <p>Kec. Tigalingga : Lau Bagot, Tigalingga, Lau Sireme, Palding Jaya</p> <p>Kec. P Hilir : Onan Lama</p> <p>Kec. G Sتمبر : Batu Gun Gun</p> <p>Kec. SN Hulu : Tambahan, Kuta Tengah, Bakal Julu, Sipoltong</p> <p>Kec. S Nempu : Adian Nangka, Buntu Raja, Sosor Lontung, Huta Imbaru</p> <p>Kec. S5P2 : Parongil</p> <p>Kec. Parbuluan : Lae Hole I, Lae Hole II</p> <p>Kec. L Parira : Sumbul, Lae Parira, Kabanjulu</p> <p>Kec. Berampu : Berampu</p> <p>Kec. Sitinjo : Panji Dabutar</p>	<p>Kec. Sumbul : Pegagan Julu IV, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VII, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Pargambiran, Perjuangan, Sileuleu Parsaoran, Tanjung Beringin I, Barisan Nauli</p>	
	SEDANG	<p>Kec. Tigalingga : Palding</p> <p>Kec. P Hilir : Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Bukit Tinggi, Simartugan, Perik Mbue</p> <p>Kec. Parbuluan : Parbuluan III, Parbuluan VI, Bangun I</p>	<p>Kec. Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu II, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Kuta Gugung, Pangguruan</p> <p>Kec. Sidikalang : Bintang Hulu, Bintang</p> <p>Kec. Tigalingga : Sumbul Tengah, Sarintonu, Bertungen Julu, Lau Molgap</p> <p>Kec. P. Hilir : Tanjung Saluksuk, Lingga Raja II, Mbinanga</p> <p>Kec. G Sتمبر : Rante Besi, Tumpak Raja</p> <p>Kec. SN Hilir : Pardomuan, Jambur Indonesia, Sopo Butar</p> <p>Kec. SN Hulu : Lae Nuaha, Sungai Raya, Silumboyah, Pangaribuan, Tualang, Pandan</p> <p>Kec. S Nempu : Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma Teguh, Maju</p>	
			<p>Kec. S5P2 : Lae Ambat, Bakkal Gajah, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi</p> <p>Kec. Parbuluan : Parbuluan II, Parbuluan I, Parbuluan V, Parbuluan IV, Lae Hole, Bangun</p> <p>Kec. L Parira : Kentara, Bulu Duri, Lumban Sihite, Lumban Toruan</p> <p>Kec. Berampu : Karing, Pasi, Sambaliang, Banjar Toba</p> <p>Kec. Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II</p> <p>Kec. Sitinjo : Sitinjo, Sitinjo I</p>	

TINGKAT RiSIKO	TINGKAT KAPASITAS		
	RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGGI		Kec. Tanah Pinem :Lau Njuhar, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Tanah Pinem, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Gunung Tua, Suka dame, Liang Jering, Alur Subur, Sinar Pagi, Pamah, Lau Tawar, Kuta Gamber Kec. Tigalingga : Ujung Teran, Juma Gerat, Sukandebi, Lau Mil, Lau Pakpak Kec. P Hilir : Simanduma, Laksa, Bukit Baru, Kuta Usang Kec. G Sitember : Bukit lau Kersik, Gunung Sitember, Gundaling, Kendit Liang, Lau Lebah Kec. SN Hilir :Lae Itam, Simungun, Janji, Lae Luhung, Lae Haporas, Lae Sering, Lae Markelang Kec. S N Hulu : Gunung Meriah, Sigambir-gambir Kec. S Nempu :Sinampang, Sihorbo, Juman tuang, Kec. S5P2 : Lae Rambong, Lae Panginuman,Sumbari, Uruk Belin, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Longkotan, Lae Pangaroan Kec. L Parira : Sempung Polling, Pandiangan Kec. Silahisabungan : Silalahi III, Paropo, Paropo I Kec. Sijinjo : Sijinjo II	Kec. T Pinem : Mangan Molih, Renun, Kempawa Kec. S Nempu : Adian Gupa

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 57 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 54 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana tanah longsor.

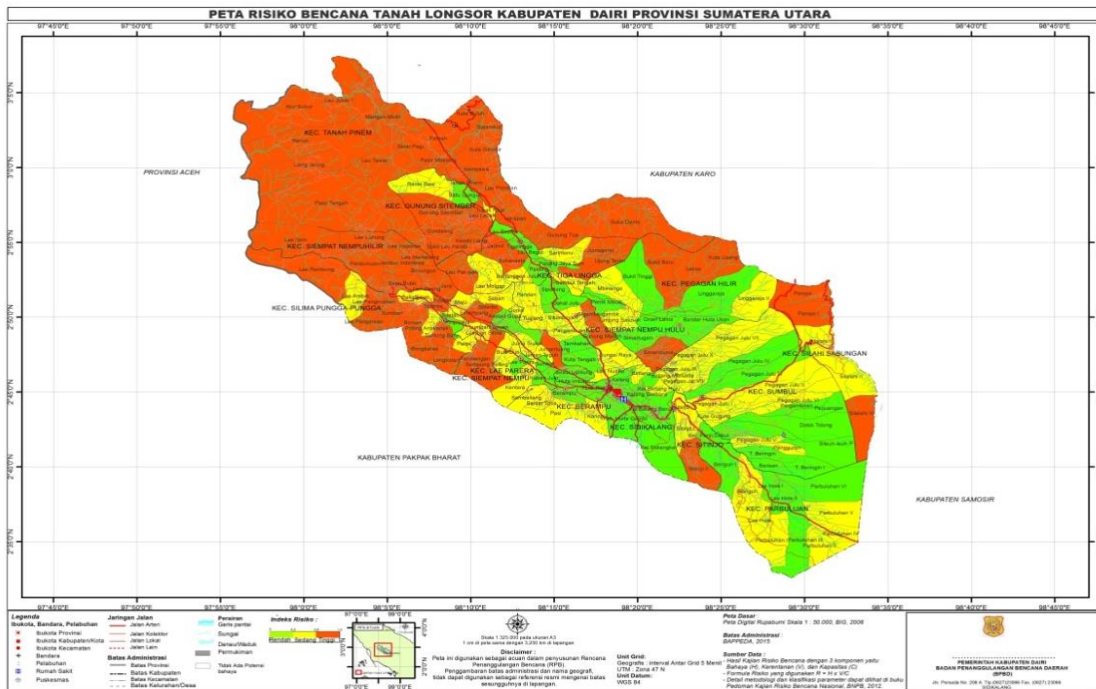
Tabel 2.15 Tingkat Keterpaparan Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO TANAH LONGSOR DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	10.627	35.765
PENDUDUK (Jiwa)	-	15.518	26.829
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	75.366.443.412	122.962.226.481
FASILITAS UMUM (Rp)	-	12.279.000.000	39.972.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	581.421.000.000	972.045.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	3.910	7.517

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi seluas 35.765 ha (18,60 %) dari total luas wilayah dan Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 26.829 jiwa atau 9,6 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.14 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Dairi



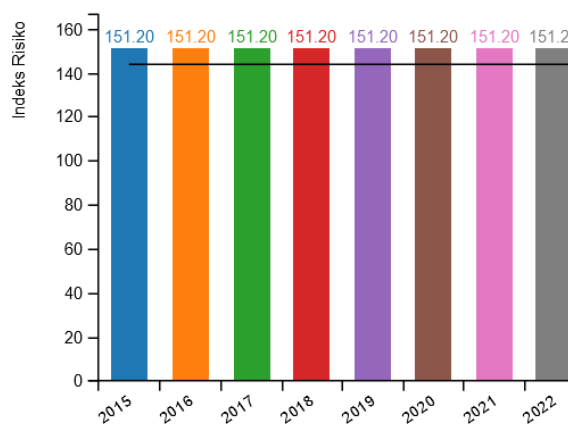
Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko tanah longsor, daerah dengan tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir, Silima Pungga-pungga dan Silahisabungan.

Persentase kejadian bencana di Kabupaten Dairi dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah bencana tanah longsor sebesar 57%, Kebakaran Permukiman 23%, Angin putting beliung sebesar 14%, kebakaran hutan dan lahan sebesar 3%, banjir bandang 1% dan gempa bumi sebesar 0,2%.

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Dairi pada Tahun 2022 sebesar 151,20 dengan trend data sebagai berikut:

Gambar 2.15 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Dairi Tahun 2015-2022



Sumber : <https://inarisk.bnppb.go.id/irbi>

#### **D. Kawasan Strategis di Kabupaten Dairi**

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi, meliputi:

##### 1. Kawasan Danau Toba

Sebagaimana telah disebutkan dimuka, Kawasan Danau Toba di Kabupaten Dairi berada di Kecamatan Silahisabungan. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Danau Toba, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

##### 2. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kabupaten Dairi merupakan kawasan hutan Delleng Simbelin Register 69, meliputi Kecamatan Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir dan Kecamatan Siempat Nempu. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

##### 3. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi

Pusat Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dipusatkan di Sitingo sebagai pusat agropolitan dan terdiri dari 3 (tiga) distrik, yaitu:

- Distrik Agropolitan Sumbul
- Distrik Agropolitan Tigalingga
- Distrik Agropolitan Parongil

Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi.

Secara lokalitas, selain Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dan terdapatnya kawasan perkotaan Siultinggil, terdapat beberapa kawasan yang dapat diusulkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (lokal), yaitu:

##### a. Kawasan Minapolitan Budi daya di Silahisabungan

Berbeda dengan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan budidaya yaitu suatu konsep perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.

Danau Toba yang luas dan banyaknya permintaan ikan air tawar bagi kota-kota di Pulau Sumatera menyebabkan prospek minaportan budidaya cukup prospektif. Selain itu juga terdapat beberapa sungai yang cukup besar dan berair sepanjang tahun dimana sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan sebagai areal perikanan darat.

b. Kawasan Ekowisata Dairi

Kabupaten Dairi memiliki keindahan panorama alam, kekayaan flora dan fauna yang mampu mempesona wisatawan, namun belum dieksploitasi dengan sentuhan kaidah wisata sehingga belum banyak mendapat kunjungan wisatawan.

Kabupaten Dairi memiliki banyak lokasi pariwisata, baik yang telah dikenal oleh masyarakat maupun yang belum dikenal dan umumnya masih bersifat potensial serta belum tersentuh pembangunan sebagaimana layaknya suatu lokasi pariwisata.

Sumber daya alam kepariwisataan yang dimiliki sangat beragam, meliputi keindahan alam, pariwisata budaya, flora dan fauna sehingga diyakini berpotensi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Dairi.

Dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan kecenderungan wisatawan dalam memilih objek atau lokasi wisata untuk dikunjungi. Wisatawan tidak lagi ingin sekedar datang untuk melihat dan menikmati daya tarik objek wisata tertentu dengan kekhasannya tetapi telah meningkat kearah yang dapat memberikan tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan baru. Model wisata seperti ini dikenal dengan istilah ekowisata (ecotourism) atau sering pula digunakan istilah wisata lingkungan, wisata konservasi, wisata eko atau wisata ekologi.

Berdasarkan sebaran lokasi berpotensi sebagai obyek ekowisata yang ditinjau dari kedekatannya dapat dikembangkan menjadi beberapa zona kawasan wisata, seperti:

- Zona kawasan wisata Sidikalang meliputi objek wisata Taman Wisata Iman, Letter S, Lae Pandaroh, Sicike-cike, Puncak Sidiangkat, Letter Z Silumboyah dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Danau Toba, meliputi Danau Toba, Kawasan Hutan, Gunung, Waduk PLTA Renun dan lain-lain.

- Zona kawasan wisata Tigalingga, meliputi Lau Belulus, Lae Simuhur, Danau/Waduk diatas gunung, Agrowisata dan lain-lain.
  - Zona kawasan wisata Parongil, meliputi Air Terjun Lae Baski, Panorama Tornaui dan lain-lain.
- c. Kawasan Agropolitan Parsiul
- Kawasan agropolitan Parsiul di Kabupaten Dairi meliputi Kecamatan Parbuluan, Sitingo dan Sumbul sebagai kawasan terpadu dalam pengembangan hortikultura, perkebunan jeruk dan kopi.
- d. Kawasan Perkotaan Siultinggil
- Kawasan perkotaan Sidikalang, Sitingo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil merupakan kota-kota di Kabupaten Dairi yang didorong perkembangannya mengingat letaknya yang strategis dilalui jalan nasional dan merupakan gerbang pintu keluar - masuk Provinsi Sumatera Utara dari/ke Provinsi Aceh dari arah sebelah Barat.
- Khusus Kota Parongil diprediksi akan berkembang pesat apabila bahan tambang seng dan timah hitam dieksploitasi sehingga diharapkan memiliki dampak ganda terhadap perkembangan Kota Parongil.

### **2.1.2 Demografi**

Jumlah penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah 324.747 jiwa, terdiri dari 162.928 jiwa penduduk laki-laki (50,17%) dan 161.819 jiwa penduduk perempuan (49,83%).

Angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Dairi adalah sebesar 100,69 persen yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat rata-rata lebih dari 100 penduduk laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dairi hampir seimbang.

Pada tabel berikut tampak bahwa dari 15 kecamatan pada Tahun 2023, terdapat sembilan kecamatan yang mempunyai angka rasio jenis kelamin 100 persen ke atas, yaitu Kecamatan Sumbul, Tanah Pinem, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Pegagan Hilir, Parbuluan, Gunung Sitember, Berampu dan Sitingo. Hal ini mempunyai arti bahwa jumlah penduduk laki-laki di kecamatan-kecamatan tersebut lebih banyak dari pada penduduk perempuan, sementara tujuh kecamatan yang lain

mempunyai angka rasio jenis kelamin kurang dari 100 persen, yang mempunyai arti bahwa jumlah penduduk perempuan di masing-masing kecamatan ini lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

Tabel 2.16 Rasio Jenis Kelamin (RJK) Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sidikalang	28.008	28.490	56.498	98,31
2	Berampu	4.838	4.558	9.396	106,14
3	Sitinjo	7.815	7.396	15.211	105,67
4	Parbuluan	13.635	13.568	27.203	100,49
5	Sumbul	24.094	23.130	47.224	104,17
6	Silahisabungan	2.841	2.970	5.811	95,66
7	Silima Punggapungga	7.502	7.816	15.318	95,98
8	Lae Parira	7.478	7.964	15.442	93,90
9	Siempat Nempu	10.541	10.550	21.091	99,91
10	Siempat Nempu Hulu	10.623	10.370	20.993	102,44
11	Siempat Nempu Hilir	6.259	6.087	12.346	102,83
12	Tigalingga	12.674	12.659	25.333	100,12
13	Gunung Sitember	5.701	5.380	11.081	105,97
14	Pegagan Hilir	8.851	9.082	17.933	97,46
15	Tanah Pinem	12.068	11.799	23.867	102,28
Jumlah		162.928	161.819	324.747	100,69

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

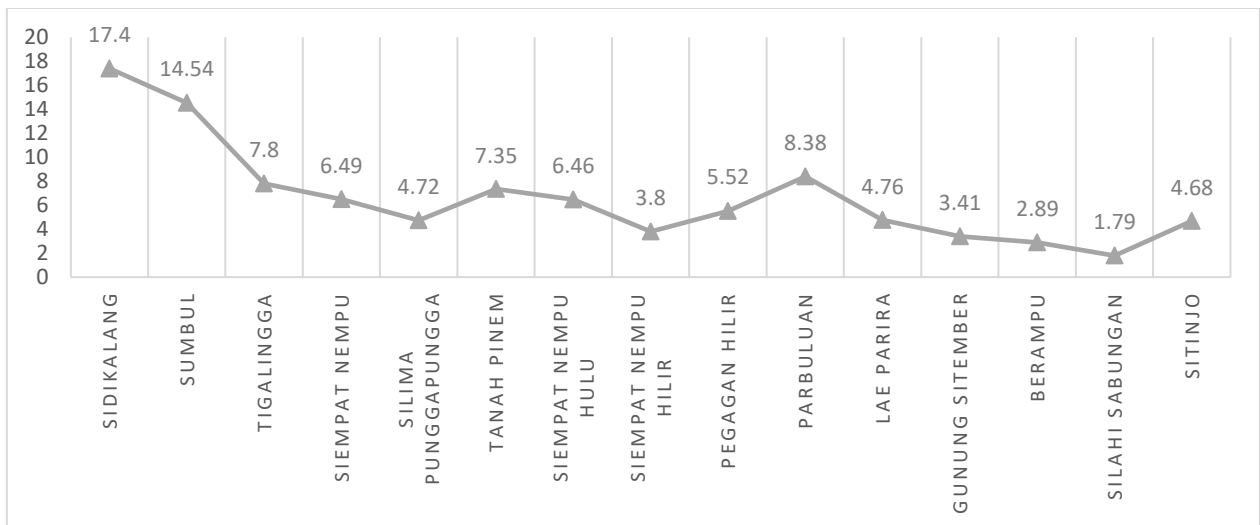
Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa wilayah yang paling padat di Kabupaten Dairi adalah Kecamatan Sidikalang dengan jumlah kepadatan sebesar 799,46 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Sidikalang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan serta sebagai ibukota dari Kabupaten Dairi. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk Kabupaten Dairi.

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk
			(Km <sup>2</sup> )	%	
1	Sidikalang	56.498	70,67	3,67	799,46
2	Berampu	9.396	192,58	9,99	230,01
3	Sitinjo	15.211	197,00	10,22	286,19
4	Parbuluan	27.203	60,15	3,12	115,56
5	Sumbul	47.224	88,35	44,58	245,22
6	Silahisabungan	5.811	439,4	22,79	76,84
7	Silima Punggapungga	15.318	93,93	4,87	173,38
8	Lae Parira	15.442	105,62	5,48	361,22
9	Siempat Nempu	21.091	155,33	8,06	350,64
10	Siempat Nempu Hulu	20.993	235,4	12,21	223,50
11	Siempat Nempu Hilir	12.346	42,75	2,22	116,89
12	Tigalingga	25.333	77,00	3,99	128,59
13	Gunung Sitember	11.081	40,85	2,12	143,91
14	Pegagan Hilir	17.933	75,62	3,92	115,45
15	Tanah Pinem	23.867	53,15	2,76	54,32
Jumlah		324.747	1.927,80	100	168,45

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Gambar 2.16 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024

Tingginya variasi penyebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan ini, selain dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana sebagian besar wilayah di masing-masing kecamatan merupakan perbukitan hingga pegunungan serta kawasan hutan, juga dipengaruhi oleh variasi kemajuan pembangunan di masing-masing kecamatan yang mengakibatkan sebagian penduduk lebih memilih tinggal di wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas yang relatif lebih baik dan memadai, khususnya di Kecamatan Sidikalang sebagai ibu kota kabupaten.

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur ini dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan berdasarkan jenis kelamin. Dari pengelompokan ini diperoleh informasi penting dan dibutuhkan dalam pengembangan kebijakan kependudukan.

Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban, yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun), persentase penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan penduduk yang kurang produktif (usia 65 tahun ke atas).

Tabel 2.18 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 (ribu jiwa)

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 4	16,48	15,72	32,20	104,83
2	5 – 9	15,19	14,35	29,53	105,85
3	10 – 14	15,96	15,16	31,12	105,28
4	15 – 19	16,13	15,37	31,50	104,94
5	20 – 24	15,78	14,92	30,70	105,76
6	25 – 29	14,40	13,24	27,65	108,76
7	30 – 34	12,02	10,78	22,80	111,50
8	35 – 39	10,49	9,67	20,15	108,48
9	40 – 44	9,76	9,21	18,97	105,97
10	45 – 49	9,07	8,75	17,82	103,66
11	50 – 54	7,66	7,97	15,62	96,11
12	55 – 59	6,47	7,40	13,87	87,43
13	60 – 64	5,28	6,50	11,78	81,23
14	65 – 69	4,05	5,56	9,61	72,84
15	70 – 74	2,49	3,81	6,30	65,35
16	75 +	1,71	3,42	5,14	50,00
Jumlah		162,94	161,83	324,76	100,69

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024

Tabel di atas menunjukkan penduduk Kabupaten Dairi sebagian besar merupakan penduduk usia produktif atau pada rentang usia 15-64 tahun, yaitu sebesar 210.860 jiwa. Usia ini merupakan usia yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan. Sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban atau pada rentang usia 0-14 tahun yaitu sebesar 92.850 jiwa dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau pada rentang usia 65 tahun keatas sebesar 20.046 jiwa. Pada umumnya rasio jenis kelamin pada kelompok umur (45-49) tahun hingga di atas 75 tahun yang semakin kecil selain disebabkan oleh tingkat *mortalitas* penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan, juga dapat disebabkan oleh *migrasi* ke luar daerah yang lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

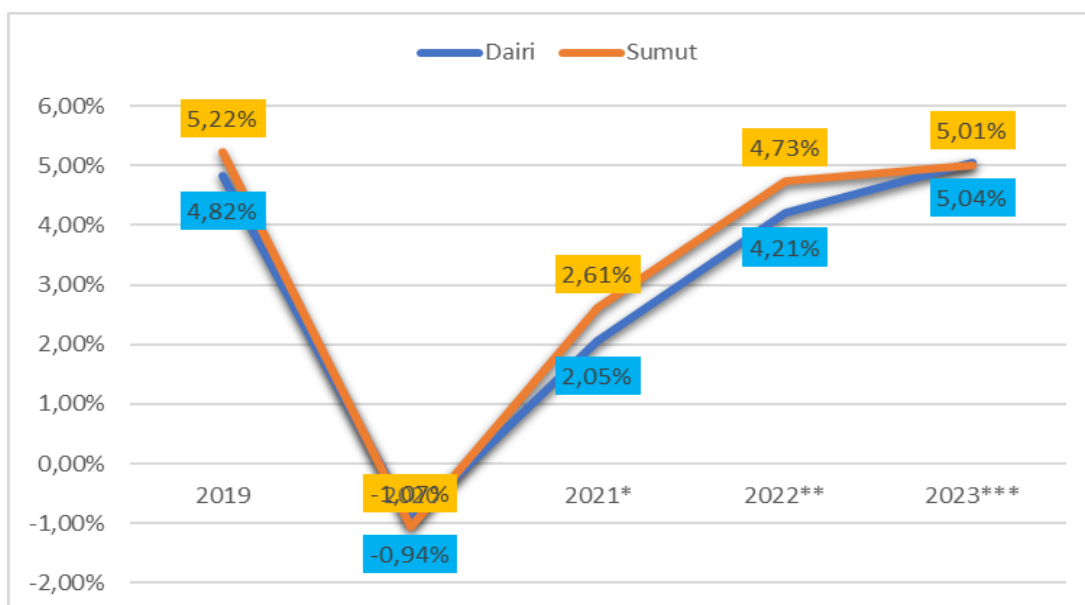
### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

#### A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi selama periode 2019-2023 menunjukkan trend fluktuatif dimana pada Tahun 2019 sebesar 4,82%. Pada Tahun 2020 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi mengalami penurunan menjadi sebesar -0,94%, hal ini dipengaruhi oleh

pandemi Covid-19, namun pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 2,05%, dan kembali meningkat di Tahun 2022 menjadi 4,21%. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami pemulihan diangka 5,04%.

Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi dan PDRB Sumatera Utara, Tahun 2019-2023 (Persen)



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional, perlu dilakukan optimalisasi atas potensi sektor ekonomi, terutama di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial serta Transportasi dan Pergudangan.

## B. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Distribusi pendapatan (*Income Distribution*) merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu mencolok dalam perekonomian daerah bersangkutan.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi, bisa berefek pada semakin melebarnya

kesenjangan antar golongan masyarakat (kaya dan miskin) atau ketimpangan antar daerah (maju dan tertinggal).

Pengukuran tingkat distribusi pendapatan antar golongan masyarakat kaya dan miskin dapat dilakukan dengan menggunakan angka Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini digunakan untuk menghitung tingkat kesenjangan pendapatan personal (rumah tangga) secara agregatif yang diterima masyarakat di atas tingkat tertentu. Perhitungan Koefisien Gini ini adalah metode yang cukup terkenal untuk mengukur distribusi pendapatan personal dalam masyarakat.

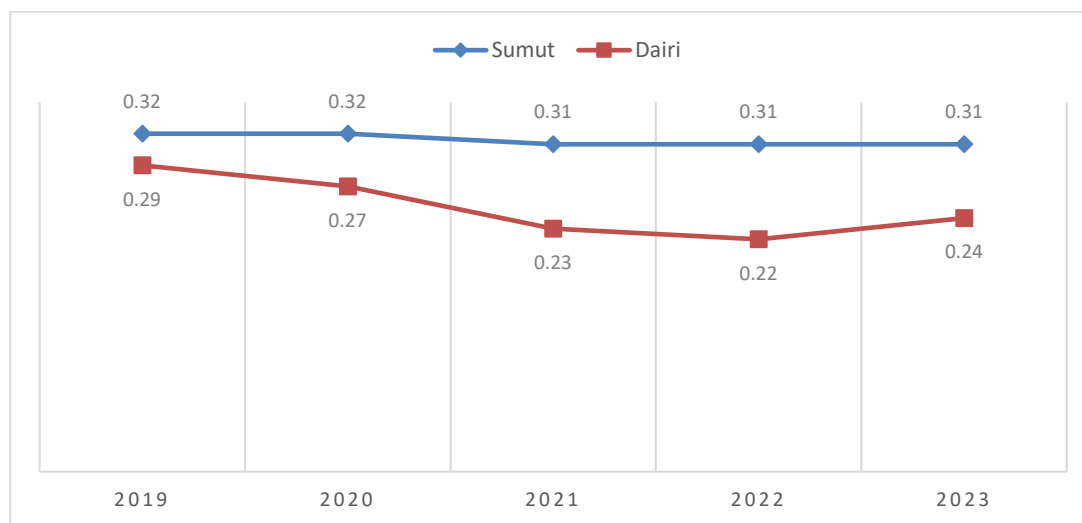
Hasil perhitungan Gini Ratio akan bergerak dari angka nol sampai dengan satu dengan pengertian umum bahwa bila angka yang diperoleh mendekati angka nol, maka distribusi pendapatan dikatakan sangat merata. Sedangkan apabila angka Gini Ratio yang diperoleh mendekati angka satu dikatakan sangat timpang. Angka Gini Ratio umumnya bervariasi, tergantung pada tingkat pembangunan suatu daerah. Kecendrungan fakta yang terjadi adalah pada daerah perkotaan Gini Ratio akan cenderung lebih tinggi karena lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang kebanyakan didominasi oleh kegiatan pertanian. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan di daerah pedesaan akan lebih merata dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Nilai Gini Ratio yang dimulai dari 0-1 dibagi dalam beberapa kategori. Jika nilai Gini Ratio,  $G=0$ , maka di daerah tersebut tidak terjadi ketimpangan pendapatan dengan kata lain terjadi pemerataan sempurna. Jika nilai Gini Ratio  $0 < G < 0,3$  maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori rendah. Jika nilai Gini Ratio,  $0,3 < G < 0,5$  maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori sedang. Jika nilai Gini Ratio,  $0,5 < G < 1$  maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori tinggi. Dan jika nilai Gini Ratio,  $G=1$  maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori ketimpangan sempurna.

Mengingat angka Gini Ratio pada dasarnya adalah perbandingan nilai pendapatan yang diterima antar rumah tangga, maka peningkatan koefisien tersebut akan berkaitan erat dengan penambahan jumlah penduduk miskin dalam daerah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa angka Gini Ratio akan cenderung tinggi bila jumlah penduduk miskin di

daerah bersangkutan juga meningkat. Demikian pula sebaliknya, angka Gini Ratio akan cenderung lebih rendah bilamana jumlah penduduk miskin berkurang.

Gambar 2.18 Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2019 -2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2024.

Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi Tahun 2019 berada pada angka 0,28, nilai gini ratio Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan gini ratio kabupaten Dairi atau berada pada angka 0,31. Nilai gini ratio sumatera utara cenderung stabil diatas angka 0,30 sedangkan nilai gini ratio kabupaten Dairi cenderung berfluktuasi di bawah angka 0,30.

Nilai Gini Ratio Kabupaten Dairi dari Tahun 2019-2023 yang tertinggi terjadi pada Tahun 2019 dengan nilai 0,28 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih dalam kategori rendah. Pada Tahun 2022 gini ratio Dairi berada pada angka 0,22 dan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan di angka 0,24.

Dalam rangka menekan angka ketimpangan/gini ratio Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan beberapa kebijakan seperti meningkatkan konektifitas antar wilayah, perbaikan infrastruktur dasar, pengembangan Kawasan pertanian terpadu, meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui layanan jemput bola langsung ke masyarakat, fasilitasi pemberian kredit usaha rakyat kepada petani dan pelaku UMKM, pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat dan kebijakan-kebijakan lainnya.

### **C. Persentase Penduduk Miskin**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

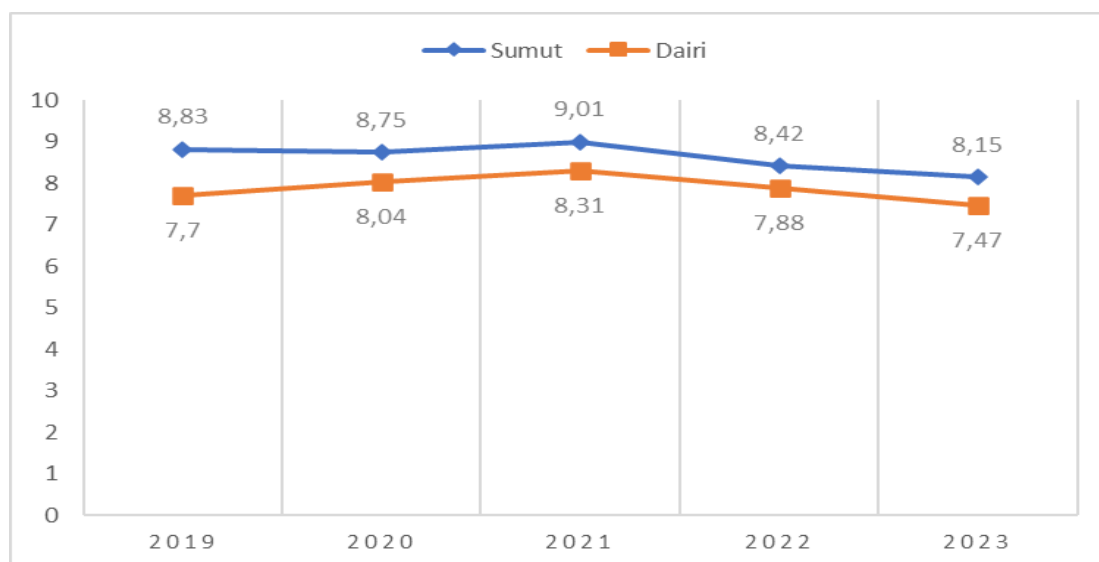
Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya.

Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kcal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada Tahun 2008 persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mencapai 11,07 persen. Angka ini cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2008 hingga Tahun 2018. Namun dalam enam tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi menunjukkan angka yang cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa karakter penduduk miskin di Kabupaten Dairi masih banyak yang dekat dengan garis kemiskinan, sehingga ketika penduduk miskin mengalami peningkatan kesejahteraan disebabkan oleh faktor ekstern pemerintah, persentase penduduk miskin akan mengalami perubahan struktur.

Gambar 2.19 Trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2019–2023 (%)



Sumber : Dairi Dalam Angka, BPS Sumatera Utara 2024.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa trend persentase kemiskinan di kabupaten Dairi dari Tahun 2019–2023 cukup fluktuatif dimana berada di angka 7,70% pada Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 naik menjadi 8,04% dan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,31% dan terjadi penurunan pada Tahun 2022 menjadi 7,88% kemudian pada Tahun 2023 kembali terjadi penurunan menjadi 7,47%. Sedangkan Trend persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2019–2023 menunjukkan penurunan atas persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dimana pada Tahun 2019 menurun menjadi 8,83% pada Tahun 2020 menurun menjadi 8,75% dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 9,01% dan kembali menurun pada Tahun 2022 ke angka 8,42%, kemudian ada Tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 8,15%.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Berdasarkan data pada tabel berikut indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 mencapai 1 0,96, pada Tahun

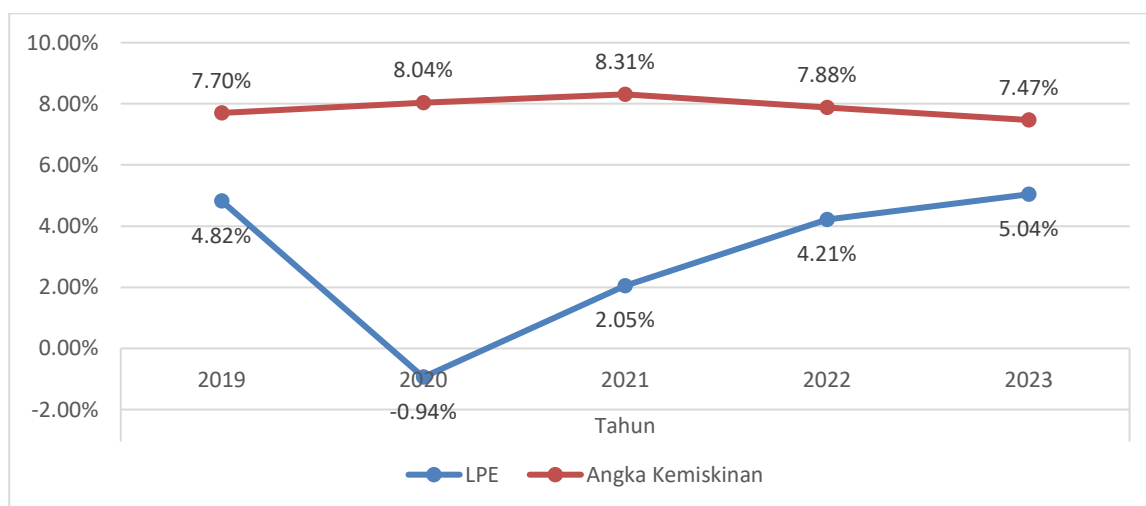
2020 mencapai 1,09, dan pada Tahun 2021 meningkat di angka 1,24 dan kembali menurun ke angka 0,65 pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,93. Dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Dairi Tahun 2018 mencapai 0,54, mencapai 0,22 pada Tahun 2019, pada Tahun 2020 mencapai 0,20 dan pada Tahun 2021 meningkat mencapai angka 0,28 dan menurun di angka 0,08 pada Tahun 2022, kemudian pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,17.

Tabel 2.19 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi, Tahun 2019 – 2023

Indeks	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,96	1,09	1,24	0,65	0,93
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,22	0,20	0,28	0,08	0,17

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Gambar 2.20 Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, namun kenyataannya hubungan ini tidak selalu linier dan dipengaruhi oleh berbagai factor lain. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 laju pertumbuhan

ekonomi menurun diakibatkan oleh pandemik Covid-19 diikuti meningkatnya angka kemiskinan. Namun pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tapi tidak diikuti penurunan angka kemiskinan, hal ini disebabkan oleh pemulihan pasca pandemic Covid-19.

Program penanganan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang menangani dan dilaksanakan dengan menerapkan pola pendampingan, kemitraan dan keberlanjutan sesuai dengan kewenangan daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.20 Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

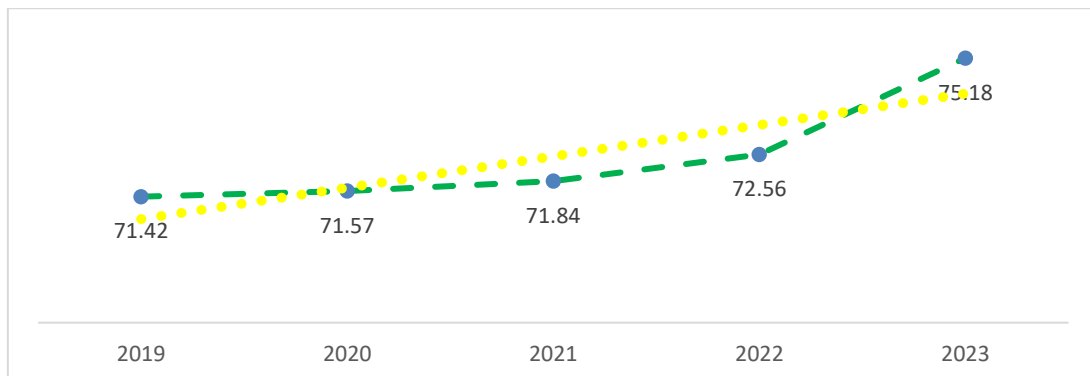
No	Perangkat Daerah	Program	Tagging Strategi
1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
4	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Rehabilitasi Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Penanganan Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Mengurangi Beban Pengeluaran
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pendapatan

No	Perangkat Daerah	Program	Tagging Strategi
	Pintu dan Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Meningkatkan Pendapatan
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan Perempuan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan Khusus Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Mengurangi Beban Pengeluaran
8	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyuluhan Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatkan Pendapatan
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

#### D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019 – 2023



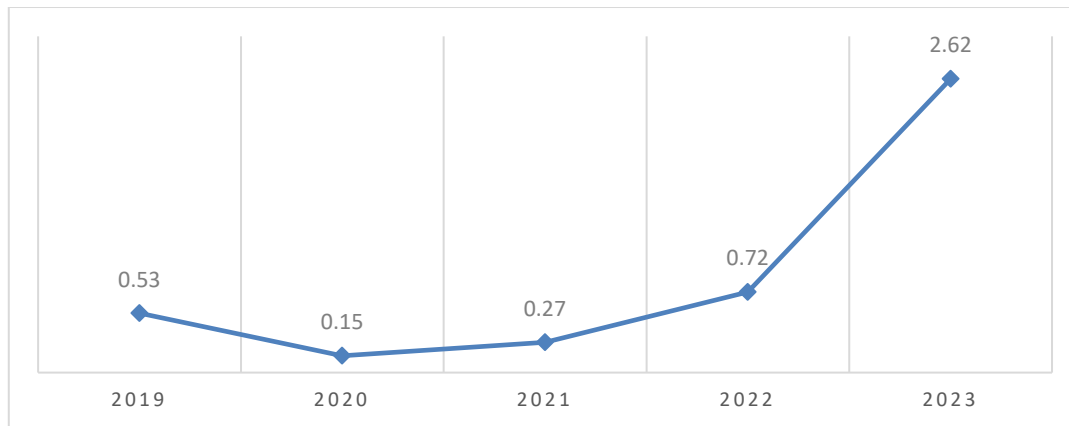
Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sebesar 71,42, sebesar 71,57 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebesar 71,84 dan pada Tahun 2022 sebesar 72,56 dan pada Tahun 2023 adalah sebesar 75,18, meningkat sebanyak 2,62 persen dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak hanya diukur dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi hanya melihat pembangunan dari satu aspek saja yaitu aspek ekonomi sedangkan aspek yang lainnya tidak diperhitungkan. Disamping itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin perbaikan taraf hidup masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah seharusnya juga dilihat dari sisi keberhasilan pembangunan manusianya. Konsep pembangunan manusia merupakan konsep yang menginginkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Kualitas hidup masyarakat yang baik mencerminkan terjadinya pemerataan pembangunan di daerah tersebut dimana semua masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tidak hanya pada segelintir orang.

Untuk dapat melihat keberhasilan pembangunan di suatu daerah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang lebih komprehensif dibandingkan hanya dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, Melalui kombinasi ini, pengukuran keberhasilan pembangunan daerah akan menjadi lebih baik.

Gambar 2.22 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023 (%)

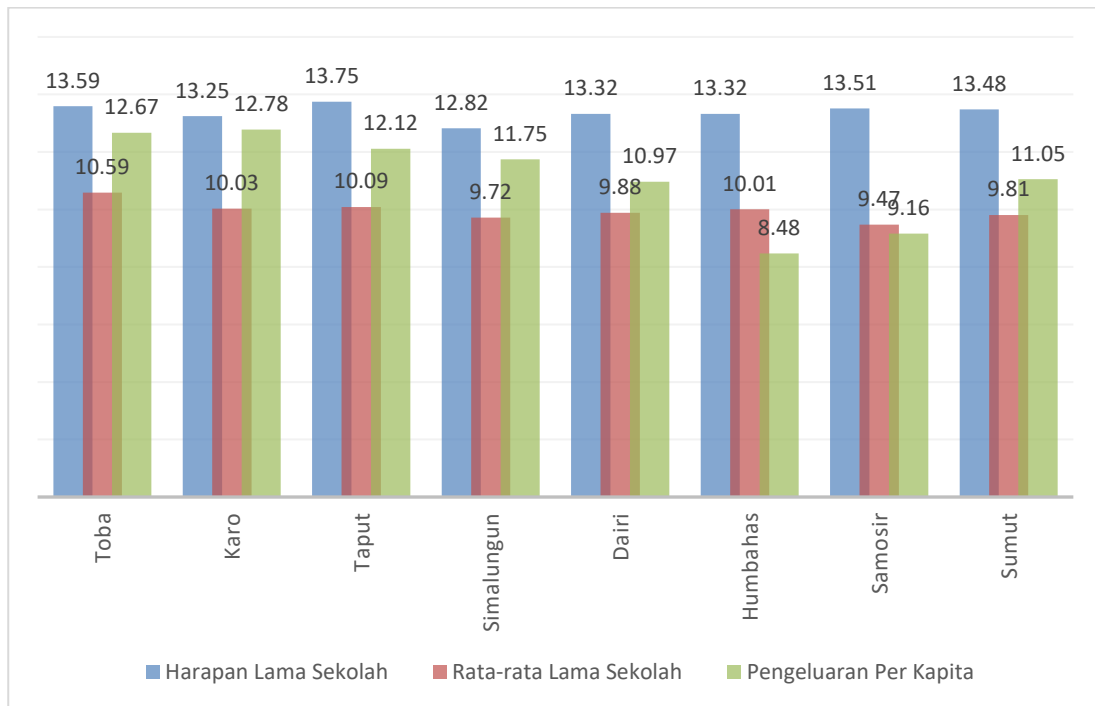


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri, hanya menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah dengan pencapaian wilayah lain juga dapat diteliti. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Kabupaten Dairi bersama enam Kabupaten lain, yakni : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir merupakan tujuh Kabupaten yang mendiami kawasan Danau Toba. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di kawasan Danau Toba, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 berada pada posisi keempat dari tujuh Kabupaten di kawasan Danau Toba. IPM Kabupaten Dairi Tahun 2022 adalah sebesar 72,56 dan pada Tahun 2023 adalah sebesar 75,18 dengan kata lain Pertumbuhan IPM Kabupaten Dairi dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 adalah sebesar 2,62.

Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten di Kawasan Danau Toba, Tahun 2023



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Tabel 2.21 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} \leq 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} \leq 80$	Tinggi
$\geq 80$	Sangat Tinggi

Sumber : BPS, IPM Kabupaten Dairi 2024

Pada Tahun 2022 IPM Kabupaten Dairi masih mencapai angka 72,56 dan berada pada status “tinggi”, dan Pada Tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi meningkat menjadi 75,18 atau meningkat 2,62 poin. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Dairi berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

Tabel 2.22 IPM dan Komponen IPM Kabupaten Dairi Tahun 2023

Komponen	Nilai
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,13
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,32
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,88
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/Tahun)	Rp. 10.969
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	75,18

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

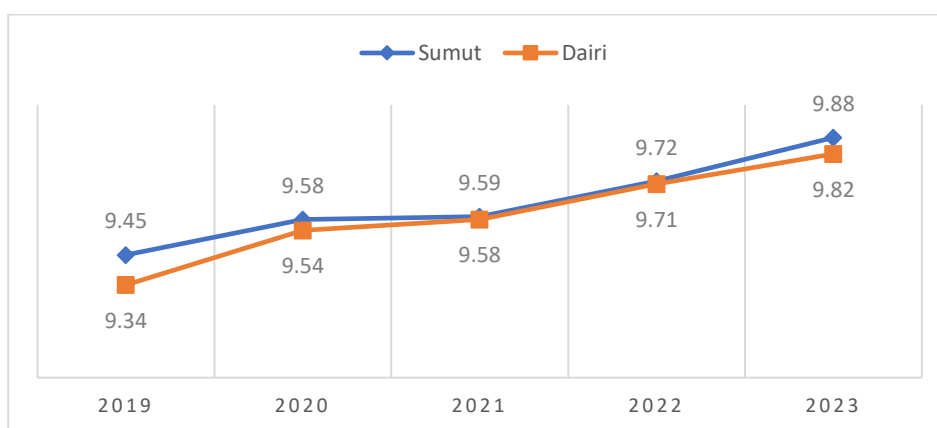
IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), kesehatan

masyarakat (Angka Harapan Hidup Waktu Lahir), dan daya beli (Pengeluaran Konsumsi).

### 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal secara rata-rata. Angka Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Dairi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.24 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Tahun)



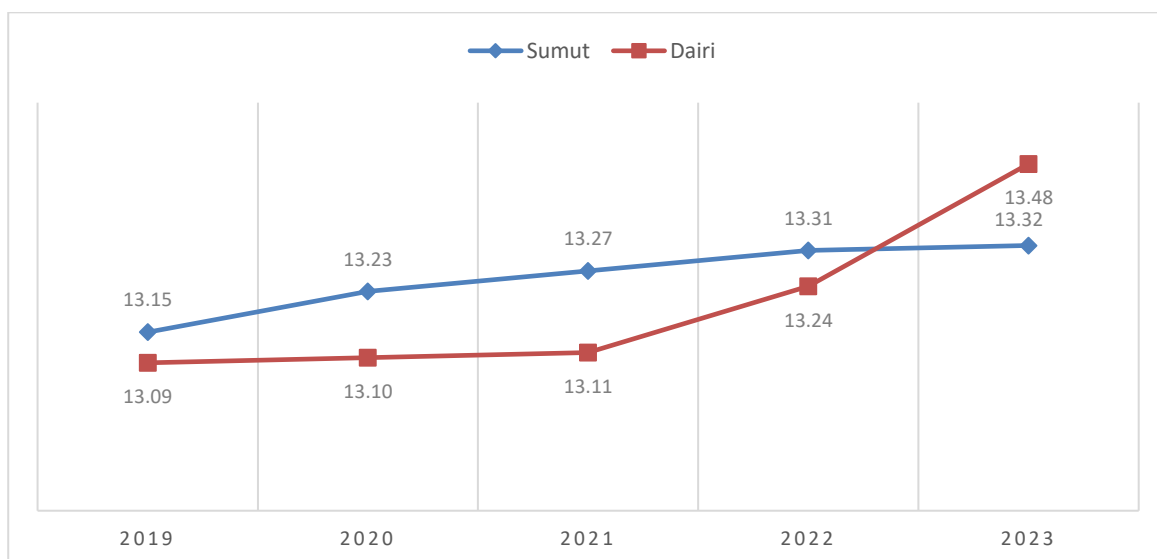
Sumber : BPS Sumatera Utara, BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 tercatat 9,34 pada Tahun 2020 tercatat diangka 9.58 dan pada Tahun 2021 tercatat di angka 9,59 dan tercatat di angka 9,72 pada Tahun 2022 sedangkan pada Tahun 2023 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dairi adalah sebesar 9,88 dan untuk Provinsi Sumatera Utara adalah 9,82. Hal ini berarti penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Dairi telah menempuh pendidikan hingga 9,82 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SLTP kelas 3.

Indikator lain IPM adalah Harapan Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai rata-rata lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, 2019–2023 (Tahun)



Sumber : BPS Sumatera Utara, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi masih 13,11, sedangkan Provinsi Sumatera Utara berada pada angka 13,27. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 13,24 sedangkan rata-rata lama sekolah milik Provinsi Sumatera Utara yaitu 13,31 dan pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 13,32 dan provinsi menjadi 13,48. Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah yang cukup signifikan ini memberi dampak yang positif kepada Kabupaten Dairi. pada Tahun 2023 harapan tersebut meningkat ke jenjang sarjana.

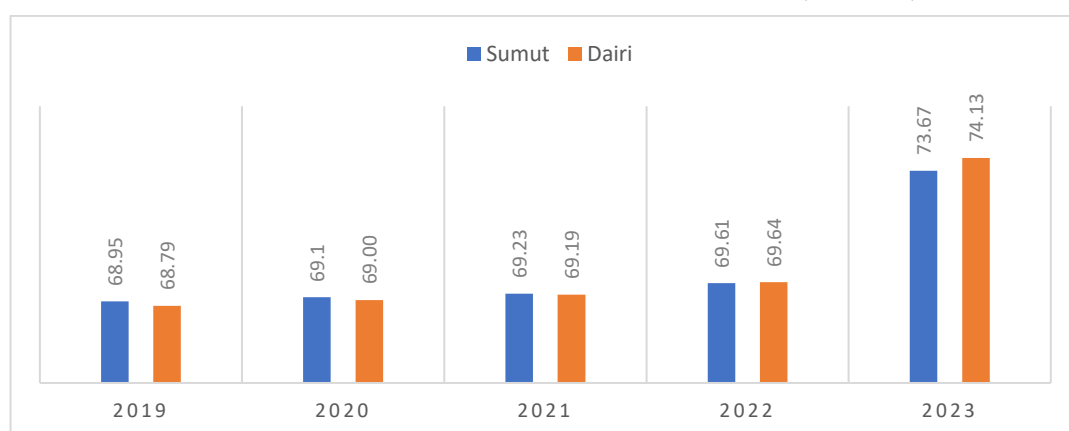
Bisa kita simpulkan dimensi pengetahuan yang merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan adanya peningkatan dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi tahun ke tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini

menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Dairi.

## 2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2023 terus meningkat sebagaimana terdapat pada gambar berikut :

Gambar 2.26 Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2019 - 2023 (Tahun)



Sumber : BPS Sumatera Utara, BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024

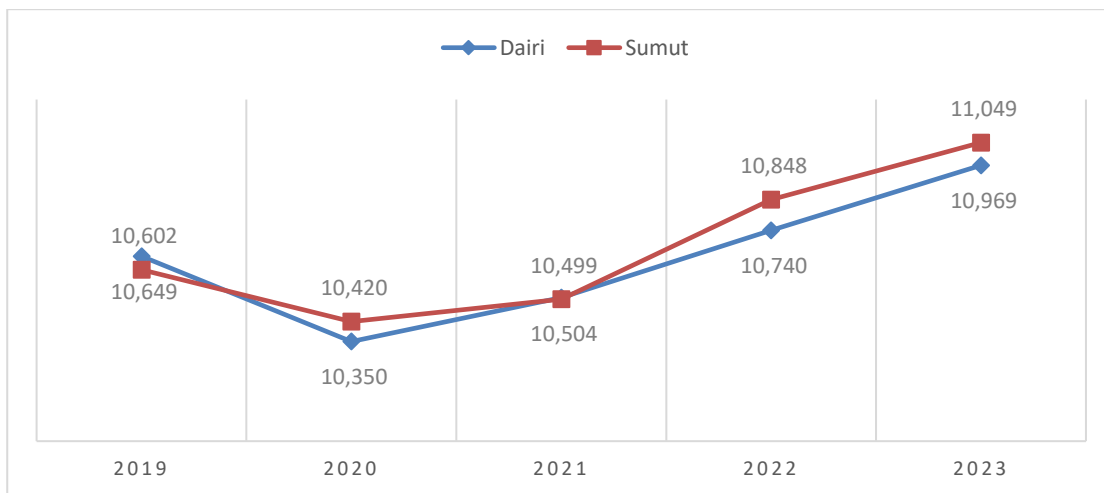
Angka Usia Harapan Hidup kabupaten Dairi pada Tahun 2023 adalah 74,13 sedikit lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yaitu 73,67. Kecenderungan angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Dairi dari Tahun 2019-2023 terus meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Dairi lebih baik dibandingkan dengan kondisi kesehatan makro Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dua tahun terakhir yang selalu lebih tinggi jika dibandingkan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

### 3. Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.27 Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Per Kapita Per Tahun 2019 -2023 (ribu rupiah)



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

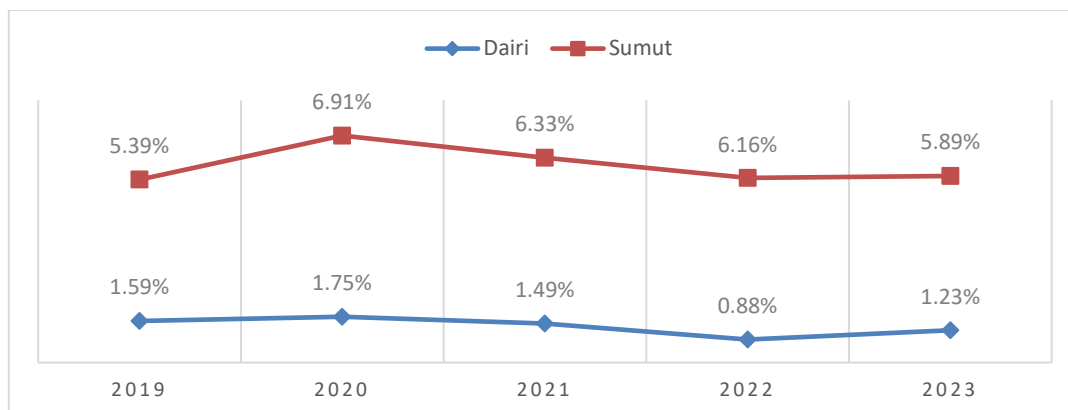
Pengeluaran per kapita di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita penduduk sekitar 10.649 pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10.350 ribu rupiah per kapita per tahun, lalu meningkat kembali pada Tahun 2021 menjadi 10.504 ribu rupiah perkapita dan meningkat kembali Tahun 2022 menjadi 10.740 ribu rupiah per kapita. Pada Tahun 2023 pengeluaran perkapita penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi Rp(x1.000) 10.969.

Dalam rangka meningkatkan IPM, Pemerintah Kabupaten Dairi mempunyai program antara lain: (1) peningkatan akses dan kualitas kesehatan melalui akses layanan kesehatan terjangkau, membangun fasilitas kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, (2) peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, pembangunan fasilitas pendidikan, bantuan Pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, (3) peningkatan standar hidup layak berupa program keluarga harapan (PKH), program rumah layak huni,

peningkatan akses sanitasi dan air minum layak dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi sebesar 1,59% pada Tahun 2019 sedangkan Sumatera Utara dengan nilai 5,39 pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,75% dan Sumatera Utara mengalami peningkatan dengan nilai 6,91% pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,49% dan kembali turun dengan signifikan Tahun 2022 menjadi 0,88% dan Sumatera Utara secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi 6,16% pada Tahun 2022 pada Tahun 2023 meningkat menjadi 1,23% sedangkan Provinsi 5,89%.

### 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

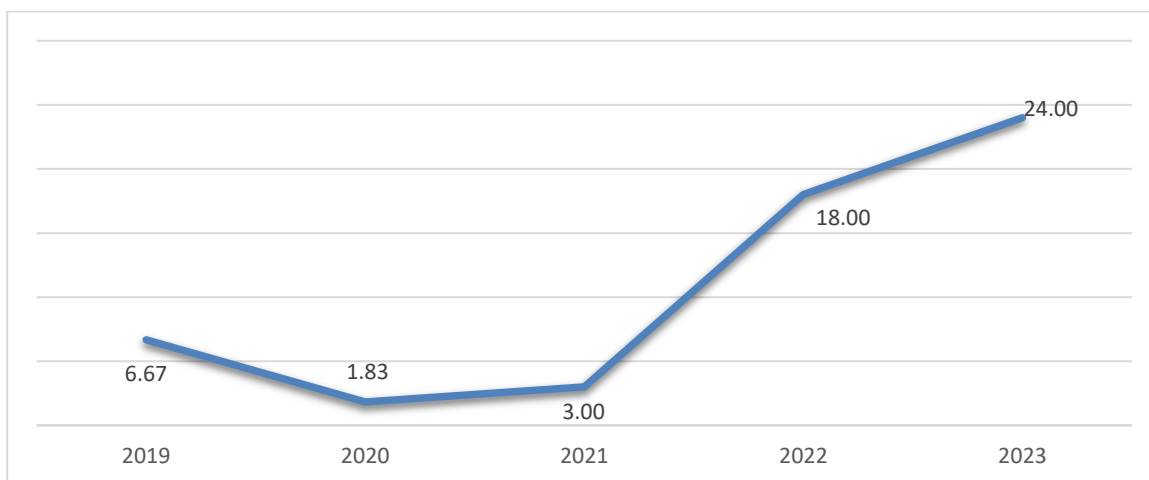
Untuk kesejahteraan sosial selain aspek penduduk miskin, beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut:

#### A. Kesehatan

##### 1. Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah Kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.29 Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023



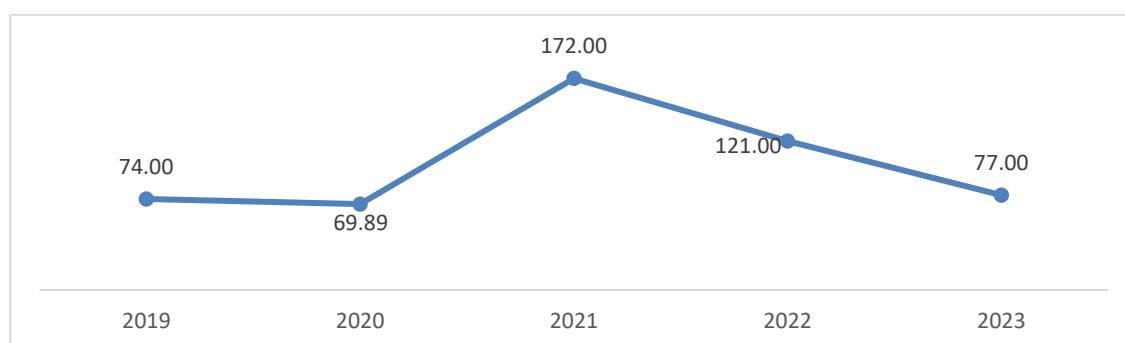
Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2024.

Jika dilihat dari perkembangannya jumlah kematian bayi pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 18 kasus, dan meningkat pada Tahun 2023 menjadi 24 kasus.

## 2. Angka Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan jumlah kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.30 Angka Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023



Catatan: Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, 2023

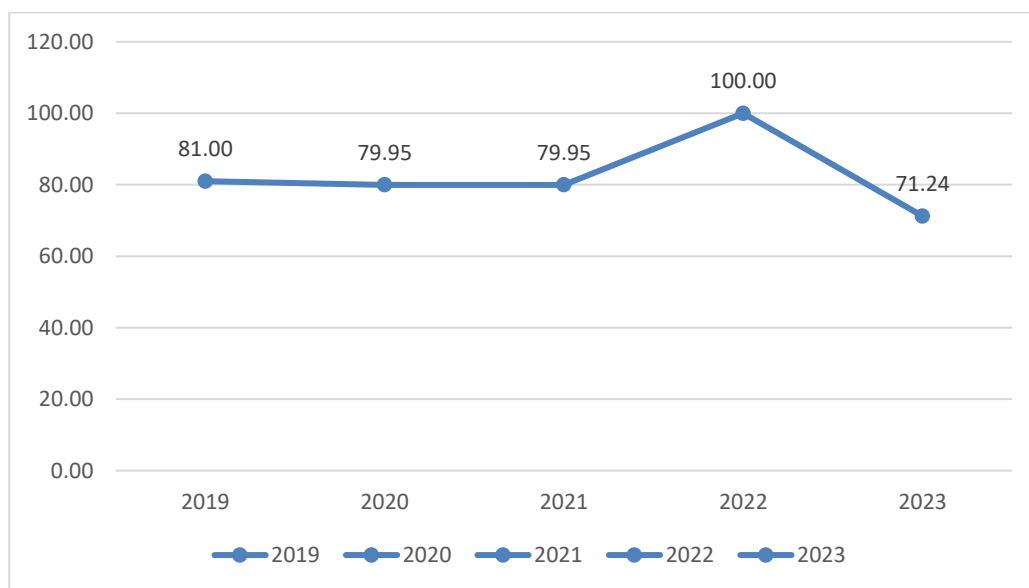
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023 sangat fluktuatif dan turun cukup tajam pada Tahun 2022. AKI paling tinggi terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 172 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada tahun berikutnya Tahun 2022 sebanyak 121 per 100.000 kelahiran hidup, dan Tahun 2023 sebanyak 77 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian tersebut cukup baik karena sudah berada dibawah target SDGs Tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran

hidup. Namun demikian, upaya penanganan kasus kematian ibu tetap perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC (*Antenatal Care*), peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS (*Postnatal Care*).

### 3. Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.31 Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

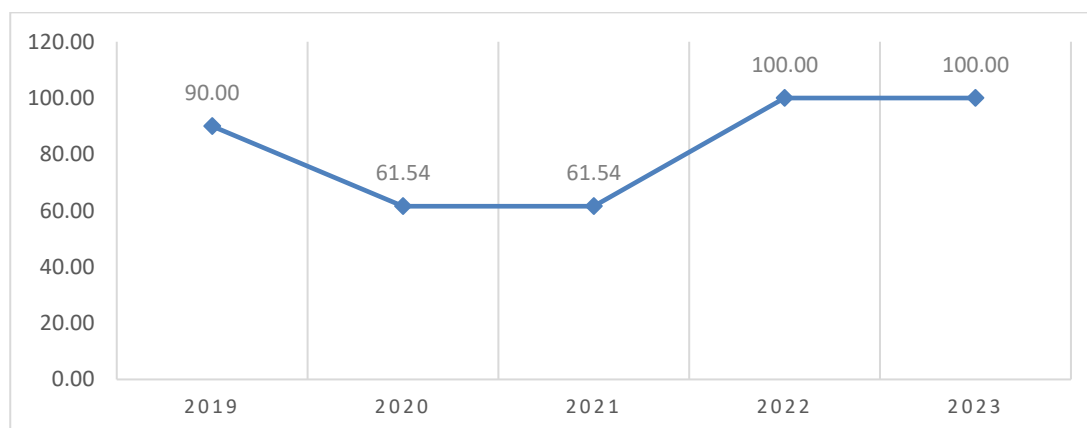
Jika dilihat dari tabel di atas pada Tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar sebesar 81,00 persen, 79,95 persen pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 79,95 persen pada Tahun 2022 sebesar 100 persen dengan Trendline 80,70 persen selama periode Tahun 2019 sampai Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 sebesar 71,24%. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan masih sangat diperlukan terutama di daerah tertinggal dan terpencil, dimana sebagian masyarakatnya masih menggunakan tenaga

dukun untuk bersalin, pengembangan tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan sangat di butuhkan di daerah daerah tersebut.

#### **4. Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**

Jika dilihat dari tabel dibawah terjadi peningkatan Pertolongan penderita penyakit TB pada Tahun 2019 sebesar 90 persen, 61,54 persen pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 61.54 persen dan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 tingkat pertolongan penderita TB menjadi sebesar 100 persen.

Gambar 2.32 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023

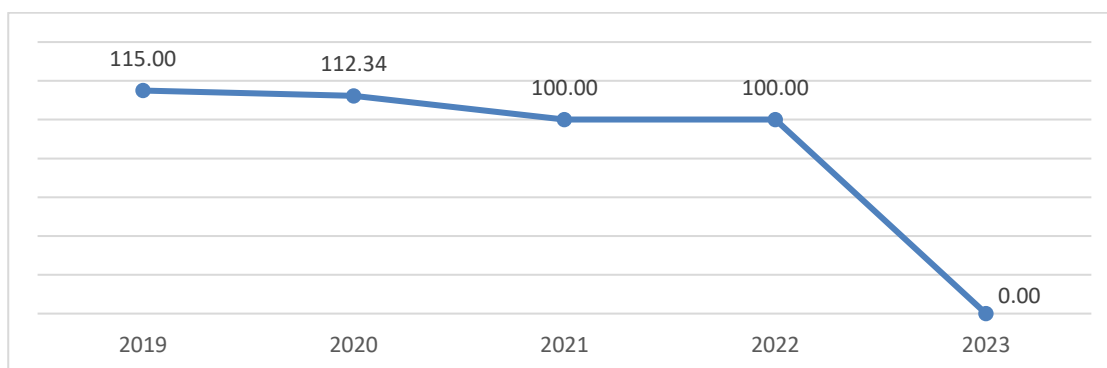


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

#### **5. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.33 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023

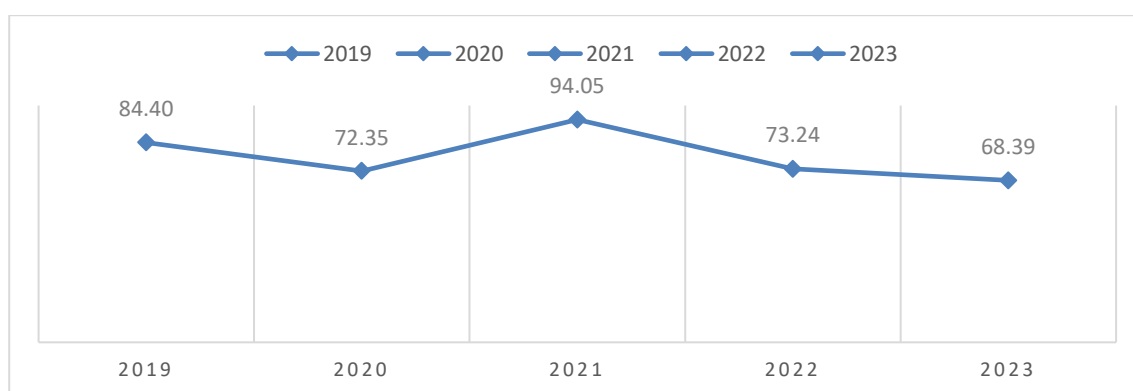


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

## 6. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun dan waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.34 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023



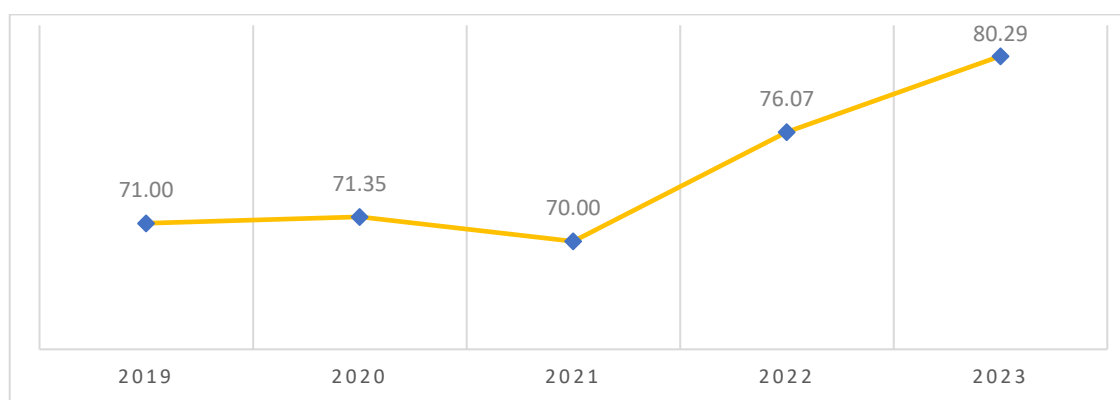
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Jika dilihat dari tabel diatas Cakupan kunjungan Bayi pada Tahun 2019 sebesar 84,40 persen, sebesar 72,35 persen pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 94,05 persen dan pada Tahun 2022 mencapai angka 73,24 persen dan pada Tahun 2023 adalah 68,39 persen.

## 7. Cakupan Pelayan Anak Balita

Persentase cakupan kunjungan anak balita pada Tahun 2019 sebesar 71%, sebesar 71,35% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 70,00%, pada Tahun 2022 meningkat sebesar 76,07% dan pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 80,29%.

Gambar 2.35 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023

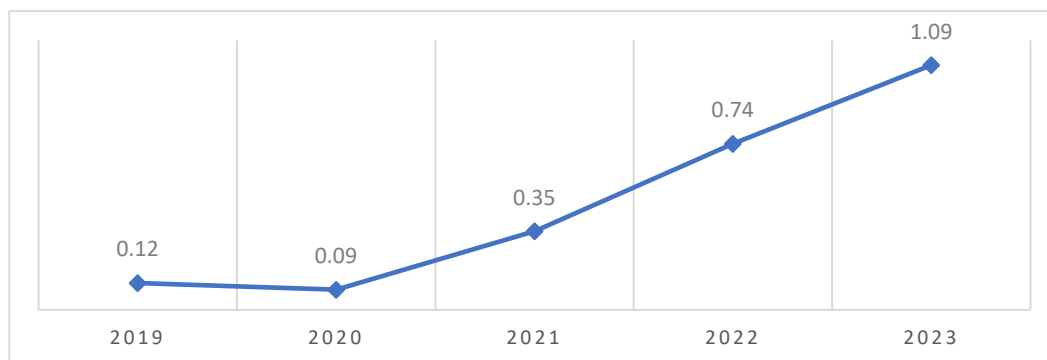


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## 8. Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi pada kelompok bayi dan balita perlu mendapat perhatian, karena tumbuh kembang yang optimal (golden period) terjadi pada usia 0-2 tahun terutama pada janin. Ketidakcukupan gizi pada masa golden period tersebut tidak akan dapat dicukupi pada masa berikutnya, yang selanjutnya dapat berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi sebagai berikut:

Gambar 2.36 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2019 – 2023 (%)



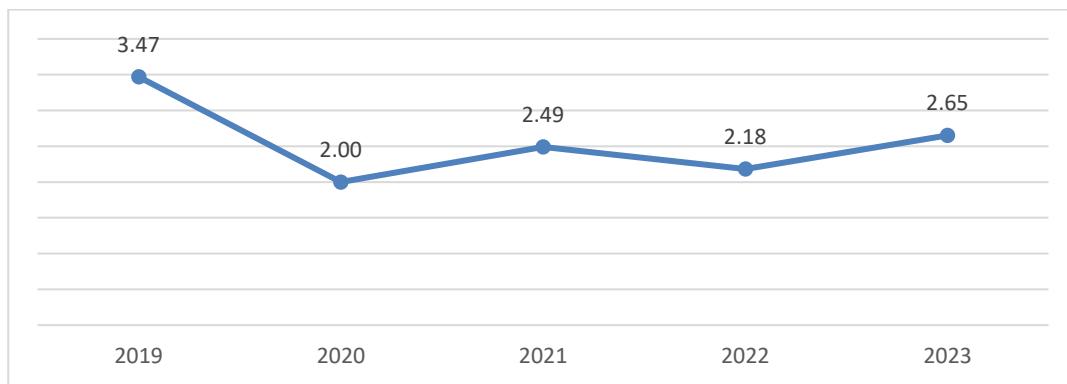
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Dairi cenderung meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2019 tercatat sebesar 0.12% kemudian naik menjadi sebesar 0,35% pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 sebesar 0,74%, pada Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,09%.

## 9. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah perbandingan antara balita yang berstatus kurang gizi dengan jumlah balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Anak kurang gizi memiliki kemungkinan risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi status kesehatannya dikemudian hari. Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk. Data perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.37 Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2019 – 2023 (%)



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat terlihat perkembangan balita Gizi Kurang di Kabupaten Dairi sejak Tahun 2019 hingga 2023 dalam kondisi yang fluktuatif. Persentase balita gizi kurang sebesar 3,47% pada Tahun 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 2% pada Tahun 2020, dan mengalami kenaikan nilai pada Tahun 2021 menjadi sebesar 2,49% dan mengalami penurunan kembali sebesar 2,18% pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 2,65%.

### **B. Indeks Kualitas Keluarga**

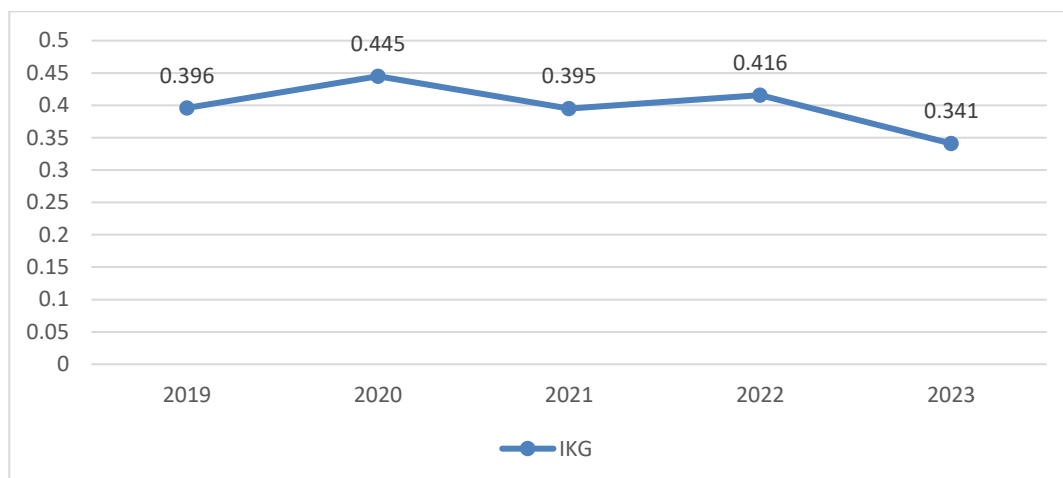
Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga disuatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum tersedia namun sebagai gambaran umum terkait kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan public dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

### **C. Indeks Ketimpangan Gender**

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IKG dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan berbasis gender, IKG mengukur ketimpangan dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi,

pemberdayaan gender, dan pasar tenaga kerja. Nilai indeks ketimpangan gender Kabupaten Dairi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar 2.38 Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kab.Dairi 2024

Pada Tahun 2023 indeks ketimpangan gender di Kabupaten Dairi mengalami penurunan sebesar 0,075, ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di Kabupaten Dairi.

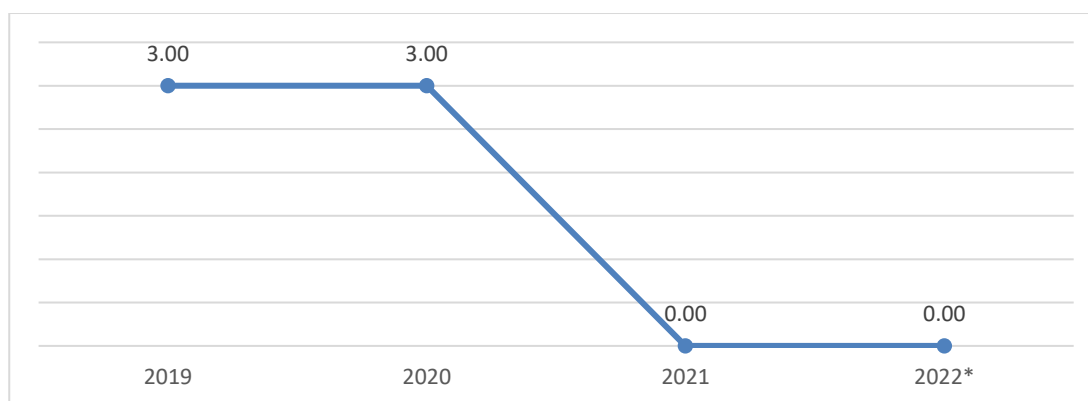
#### **D. Perkembangan Seni dan Budaya**

Dalam menilai capaian pembangunan kebudayaan ditingkat daerah dan nasional dengan indeks pembangunan kebudayaan mencakup 7 dimensi yaitu, ekonomi budaya, Pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender. Indeks pembangunan kebudayaan sebagai instrumen pembangunan kebudayaan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dalam bidang kebudayaan. Data ini secara umum tersedia pada tingkat nasional dan provinsi sehingga informasi spesifik di Kabupaten Dairi belum tersedia secara khusus.

##### **1. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya**

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Dairi, Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali namun pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan Pandemi COVID-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.39 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Kabupaten Dairi Tahun 2019-2022



Catatan: \*, Data masih progress pendataan.

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

## 2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kabupaten Dairi memiliki kekayaan adat istiadat yang sangat beragam, sehingga terdapat banyak benda, situs maupun kawasan Cagar Budaya yang dimiliki. Namun tidak semua benda cagar budaya tersebut telah dilestarikan maupun tersertifikasi.

Tabel 2.23 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Dairi Yang Dilestarikan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1. Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	31	31	31	31	31
2. Kawasan Cagar Budaya	3	3	3	3	3
3. Situs	-	-	-	-	-
4. Monumen Sejarah Perjuangan	6	6	6	6	6
5. Museum	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Tabel di atas menyajikan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Dairi yang dilestarikan. Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 31 buah, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 3 kawasan dan monumen sejarah perjuangan sebanyak 6 monumen.

## 3. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Karya Budaya Kabupaten Dairi yang sudah direvitalisasi sebanyak 40, namun masih perlu dilakukan revitalisasi karya budaya seperti Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya lainnya. Kabupaten Dairi merupakan daerah multi etnis sehingga masih banyak potensi budaya yang belum

diinventarisir. Penanganan cagar budaya di Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.24 Penanganan Cagar Budaya Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	40	40	40	40	40
2.	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	80	80	80	80	80

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

## E. Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda, indikator ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda serta dapat pula menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebesar 56.33%, dengan rincian capaian domain Pendidikan sebesar 70%, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65%, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33%, domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45%, dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 %. Capaian ini merupakan gambaran kemajuan dalam pembangunan pemuda di Kabupaten Dairi, namun masih diperlukan upaya kolaboratif untuk meningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan daerah.

### 1. Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 2.25 Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Dairi, Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Organisasi Kepemudaan	47	47	47	47	47
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	16	16	16	16	16
3.	Prasarana Olahraga	13	13	13	13	13

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Dairi dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 tidak mengalami perubahan dimana ada sebanyak 47

organisasi kepemudaan sementara untuk jumlah organisasi olahraga berjumlah 16 organisasi dan sarana prasarana olahraga sebanyak 13 unit.

## **2.3 Aspek Daya Saing Daerah**

### **2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah**

#### **A. Pertumbuhan PDRB**

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perhatian terhadap perencanaan dan pembangunan di daerah tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi dari tahun ke tahun yang mencerminkan keberhasilan daerah dalam pelaksanaan pembangunannya.

Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha wilayah/daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu (satu tahun).

Tabel 2.26 Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.875,85	3.979,48	4.162,71	4.658,34	5.161,60
Pertambangan dan Penggalian	6,43	6,42	6,70	7,22	7,67
Industri Pengolahan	35,79	36,36	39,24	41,99	44,55
Pengadaan Listrik dan Gas	6,99	7,27	7,60	8,38	8,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,13	7,33	7,46	7,61	7,85
Konstruksi	1.275,12	1.250,16	1.313,82	1.420,37	1.505,48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.577,45	1.604,32	1.704,31	1.893,21	2.069,81
Transportasi dan Pergudangan	381,23	381,03	387,54	441,06	511,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	266,93	258,10	257,47	277,97	302,14
Informasi dan Komunikasi	85,59	92,37	97,64	110,64	118,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	198,65	199,97	215,98	230,03	242,14
Real Estat	255,62	267,07	275,66	304,62	319,74
Jasa Perusahaan	6,12	6,16	6,26	6,66	7,22
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	945,44	973,58	972,56	1.030,56	1.040,76
Jasa Pendidikan	176,94	182,41	190,01	205,15	223,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,08	63,88	63,79	70,95	77,98
Jasa lainnya	2,01	1,99	2,05	2,18	2,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.166,42	9.317,91	9.710,80	10.716,94	11.651,15

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan dimana besaran pada Tahun 2019 adalah Rp. 9.166.42 kemudian pada Tahun 2020 sebesar Rp. 9.317,91 kemudian pada Tahun 2021 menjadi Rp. 9.710,80 dan menjadi 10.716,94 pada Tahun 2022, kemudian pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 11.651,15. Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp. 5.161,60 Milyar disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 2.069,81 Milyar dan (3) Kontruksi sebesar Rp. 1.505,48 (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 1.040,76 Milyar dan (5) Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 511,23 Milyar.

Tabel 2.27 Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.942,50	2.940,99	2.999,61	3.135,04	3.282,04
Pertambangan dan Penggalian	4,27	4,15	4,27	4,38	4,55
Industri Pengolahan	21,72	21,08	21,84	22,22	23,04
Pengadaan Listrik dan Gas	5,84	6,05	6,28	6,59	6,77
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,77	5,89	5,95	6,02	6,18
Konstruksi	863,95	820,89	838,79	846,19	888,94
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.108,06	1.100,57	1.146,87	1.223,31	1.296,19
Transportasi dan Pergudangan	256,58	247,11	244,55	264,18	290,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	194,78	187,50	186,66	197,53	213,61
Informasi dan Komunikasi	76,64	82,12	85,77	92,29	97,83
Jasa Keuangan dan Asuransi	131,28	133,11	137,70	141,54	147,67
<i>Real Estat</i>	175,8	179,12	179,88	186,01	190,80
Jasa Perusahaan	4,01	3,98	3,97	4,02	4,21
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	608,77	605,68	605,34	609,39	623,55
Jasa Pendidikan	126,73	127,64	132,52	139,32	148,33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41,8	40,89	400,38	42,12	44,82
Jasa lainnya	1,32	1,27	1,30	1,31	1,39
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>6.569,81</b>	<b>6.508,05</b>	<b>6.641,67</b>	<b>6.921,48</b>	<b>7.270,26</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga konstan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2019 sebesar Rp. 6.569,81, pada Tahun 2020 menjadi Rp. 6.508,05, pada Tahun 2021 turun menjadi Rp. 6.641,67 dan pada Tahun 2022 menjadi 6.921,48, kemudian pada Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan 7,270,26. Pada Tahun 2023 lima kontributor terbesar yakni pertama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berjumlah sebesar Rp. 3.282,04 disusul oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 1.296,19, Konstruksi sebesar Rp. 888,94, Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 623,55 dan Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 290,35.

Tabel 2.28 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,28	42,71	42,87	43,47	44,30
2	Pertambangan & Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3	Industri Pengolahan	0,39	0,39	0,40	0,39	0,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
6	Konstruksi	13,91	13,42	13,53	13,25	12,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,21	17,22	17,55	17,67	17,76
8	Transportasi dan Pergudangan	4,16	4,09	3,99	4,12	4,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,91	2,77	2,65	2,59	2,59
10	Informasi dan Komunikasi	0,93	0,99	1,01	1,03	1,02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17	2,15	2,22	2,15	2,08
12	Real Estat	2,79	2,87	2,84	2,84	2,74
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	10,31	10,45	10,02	9,62	8,93
15	Jasa Pendidikan	1,93	1,96	1,96	1,91	1,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,69	0,66	0,66	0,67
17	Jasa lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Distribusi persentase PDRB pada Tahun 2019-2023 atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha, kontributor terbesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada Tahun 2023, adalah sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 44,30% disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,76%, kemudian (3) Konstruksi sebesar 12,92%, dari sektor (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar 8,93%, serta (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,39 %.

Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,65	-0,05	1,99	4,51	4,69
2	Pertambangan & Penggalian	4,63	-2,78	2,95	2,64	3,67
3	Industri Pengolahan	4,79	-2,93	3,58	1,75	3,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,99	3,62	3,83	4,99	2,69
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	4,93	2,19	0,92	1,16	2,77
6	Konstruksi	6,31	-4,98	2,18	0,88	5,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5,90	-0,68	4,21	6,67	5,96
8	Transportasi dan Pergudangan	7,24	-3,69	-1,04	8,03	9,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,02	-3,73	-0,45	5,82	8,14
10	Informasi dan Komunikasi	6,75	7,15	4,44	7,60	6,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,16	1,40	3,44	2,79	4,33
12	Real Estat	5,03	1,89	0,43	3,41	2,57
13	Jasa Perusahaan	4,33	-0,88	-0,14	1,22	4,65
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	5,54	-0,51	-0,06	0,67	2,32
15	Jasa Pendidikan	5,10	0,72	3,82	5,13	6,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,64	-2,18	-1,25	4,32	6,40
17	Jasa lainnya	6,79	-3,47	2,00	0,95	5,97
	<b>PDRB</b>	<b>4,82</b>	<b>-0,94</b>	<b>2,05</b>	<b>4,21</b>	<b>5,04</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024.

Dari tabel di atas, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas Harga Konstan menurut lapangan usaha Tahun 2019-2023 yang paling berkontribusi di Tahun 2023 adalah sektor Informasi transportasi dan pergudangan sebesar 9,91%, diikuti penyediaan makanan dan akomodasi 8,14%, jasa informasi dan komunikasi sebesar 6,01%, dan berikutnya Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 5,96%.

PDRB Kabupaten Dairi menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

### 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup sub lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu, dan sub

lapangan usaha perikanan. Di Kabupaten Dairi, lapangan usaha ini masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada Tahun 2019 Lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap pembentukan PDRB total yaitu sebesar 42,28%, mengalami kenaikan di Tahun 2020 dengan nilai 42,71%, pada Tahun 2021 terjadi peningkatan atas komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 42,87% dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 43,47%, dan pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 44,30%

Dari tiga sub lapangan pada lapangan usaha ini, sub lapangan pertanian yang lebih berkontribusi pada kategori ini. Lapangan usaha Pertanian menjadi kekuatan ekonomi utama Kabupaten Dairi, oleh karena itu, diperlukan dukungan/perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor lapangan usaha ini. Mulai dari perhatian terhadap para petani yang generasi muda tidak lagi tertarik pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, alat-alat pertanian yang modern, pemberian edukasi terhadap petani, dan juga penyaluran/distribusi hasil pertanian yang tidak lagi melalui para makelar pertanian. Hal ini sangat berguna karena lahan pertanian yang lambat laun akan semakin sempit, maka dibutuhkan teknologi yang lebih baik agar pertanian di Kabupaten Dairi dapat berdampak pada kenaikan PDRB Kabupaten Dairi, karena dari lapangan usaha inilah pembentuk PDRB tertinggi. Kementerian Perindustrian mendorong industri nasional mengembangkan hilirisasi produk pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Di samping itu, melalui hilirisasi, para pelaku agribisnis akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan pasar yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, secara khusus masyarakat Kabupaten Dairi.

Tabel 2.30 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tahun 2019-2023

U R A I A N	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Nilai PDRB (milyar Rp)					
- ADHB	3.875,85	3.979,48	4.162,71	4.658,34	5.161,60
- ADHK 2010	2.942,51	2.940,99	2.999,61	3.135,04	3.282,04
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	42,28	42,71	42,87	43,47	44,30
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	3,65	-0,05	1,99	4,51	4,69

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

## 2. Pertambangan dan Penggalian

Nilai tambah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian Tahun 2023 mencapai 7,67 milyar rupiah. Sumbangannya terhadap pembentukan PDRB total relatif kecil yaitu 0.07%, kontribusinya tidak mengalami perubahan sejak Tahun 2019. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini menunjukkan nilai yang fluktuatif Tahun 2019 dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar -2,78%. Pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian Tahun 2021 adalah sebesar 2,95% dan kembali turun di Tahun 2022 menjadi 2,64%, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 3,67%

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memang tidak menjadi prioritas bagi Kabupaten Dairi, tetapi jika lapangan usaha ini mendapat perhatian lebih, maka dari lapangan usaha ini dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi PDRB Kabupaten Dairi. Pemberian fasilitas izin yang lebih mudah dan pengelolaan hasil tambang dan galian juga dibutuhkan oleh para pengusaha untuk mengembangkan usaha Pertambangan dan Penggalian. Akan lebih baik jika bahan tambang dan galian diekspor tidak dalam bentuk komoditas tetapi dalam bentuk akhir yang mendekati konsumen yang akan meningkatkan nilai tambah daerah.

Tabel 2.31 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Tahun 2019-2023

U R A I A N	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Nilai PDRB (milyar Rp)					
- ADHB	6,43	6,42	6,70	7,22	7,67
- ADHK 2010	4,27	4,15	4,27	4,38	4,55
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.07	0.07	0,07	0,07	0,07
Pertumbuhan PDRB					
(% - ADHK 2010)	4,63	-2.78	2,95	2,64	3,67

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

## 3. Industri Pengolahan

Nilai tambah lapangan usaha Industri Pengolahan pada Tahun 2023 mencapai 44,55 milyar rupiah. Kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dairi hanya sebesar 0,38 persen dan terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2019.

Laju pertumbuhan lapangan usaha ini selalu menunjukkan nilai pluktuatif dan cenderung mengalami perlambatan selama 4 tahun terakhir.

Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,68%.

Tabel 2.32 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Tahun 2019-2023

U R A I A N	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Nilai PDRB (milyar Rp)					
- ADHB	35,79	36,36	39,24	41,99	44,55
- ADHK 2010	21,72	21,08	21,84	22,22	23,04
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,39	0,39	0,40	0,39	0,38
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,79	-2,93	3,58	1,75	3,68

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Industri pengolahan ini banyak memberikan kesempatan kerja karena menyangkut usaha rumahan. Pada publikasi SE 2016 Kabupaten Dairi jumlah penyerapan tenaga kerja tertinggi ke empat setelah kategori G. Perdagangan Besar dan Eceran, kategori I. Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum, dan Kategori Jasa pendidikan, yakni sebesar 4.840 orang dari 1.436 jumlah usaha kategori industri pengolahan. Melihat jumlah tenaga kerja yang cukup banyak diserap oleh industri pengolahan serta bahan baku yang cukup memadai, maka kontribusi PDRB kategori Industri Pengolahan ini cukup memprihatinkan, sekitar 1,75. Untuk menambah nilai tambah tidak cukup hanya mengandalkan APBD/APBN saja, tetapi diperlukan promosi yang baik untuk meningkatkan ketertarikan pada pihak swasta untuk mengembangkan sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Dairi. Banyak bahan baku yang dapat diolah menjadi makanan jadi, misalnya, jeruk menjadi sirup, durian menjadi keripik durian, kopi instan, dll.

#### 4. Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,07 persen terhadap perekonomian Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 dengan nilai tambah mencapai 8,71 milyar rupiah.

Tabel 2.33 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Tahun 2019-2023

U R A I A N	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (milyar Rp)					
- ADHB	6,99	7,27	7,60	8,38	8,71
- ADHK 2010	5,84	6,05	6,28	6,59	6,77
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,99	3,62	3,83	4,99	2,69

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,69% yaitu mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

## 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan, dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dan lain-lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Nilai tambah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2023 sebesar 7,85 milyar rupiah. Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di kabupaten dairi selama Tahun 2018-2023 relatif stabil yaitu berkisar pada angka 0,07%. Sementara itu, laju pertumbuhannya pada Tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu 0,07 %.

Tabel 2.34 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Tahun 2019-2023

U R A I A N	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (milyar Rp)					
- ADHB	7,13	7,33	7,46	7,61	7,85
- ADHK 2010	5,77	5,89	5,95	6,02	6,18
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,93	2,19	0,92	1,16	2,77

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024

## 6. Konstruksi

Kontribusi lapangan usaha konstruksi pada Tahun 2023 sebesar 12,92 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Dairi. Peranan sector ini mengalami pluktuasi nilai sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2023.

Lapangan usaha ini juga memegang peranan yang cukup tinggi dalam pembentukan nilai tambah Kabupaten Dairi, porsinya selalu menduduki urutan ketiga dari lapangan usaha lainnya setelah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.35 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi Tahun 2019-2023

U R A I A N	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	1.275,12	1 250,16	1313,82	1.420,37	1.505,48
- ADHK 2010	863,95	820,89	838,79	846,19	888,94
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	13,91	13,42	13,53	13,25	13,13
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	6,31	-4,98	2,18	0,88	5,05

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami fluktuasi pada Tahun 2019 mengalami peningkatan dan kembali mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2020 dan kembali meningkat di Tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan di Tahun 2022. Tahun 2019, laju pertumbuhannya sebesar 6,31%, sedangkan pada Tahun 2023 tumbuh menjadi 5,05 persen.

## 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan lapangan usaha yang memegang peranan besar dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi. Selama 4 tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada Tahun 2023 menyumbang sekitar 17,76 % dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dairi. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Dairi Tahun 2023 mencapai 2.069,81 milyar rupiah, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada Tahun 2023 sebesar 1.296,19 milyar rupiah.

Tabel 2.36 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	1.577,44	1.604,32	1.704,31	1.893,21	2.069,81
- ADHK 2010	1.108,06	1.100,57	1.146,31	1.223,31	1.296,19
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	17,21	17,22	17,55	17,67	17,76
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	5,90	-0,68	4,21	6,67	5,96

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

## 8. Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 sub-lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Peranan lapangan usaha ini terhadap nilai tambah Kabupaten Dairi dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 hanya 4,39 persen dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 511,23 milyar rupiah dan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 290,35 milyar rupiah.

Kontribusi dan laju pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami peningkatan pada Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2019 yaitu 7,24 persen dengan pertumbuhan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari bernilai negative sebesar -1,04 persen pada Tahun 2021 menjadi 8,03 pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 9,91 persen.

Tabel 2.37 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	381,23	381,03	387,54	441,06	511,23
- ADHK 2010	256,58	247,11	244,55	264,18	290,35
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	4,16	4,09	3,99	4,12	4,39
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	7,24	-3,69	-1,04	8,03	9,91

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

## 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2022, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Dairi sebesar 2,59%. Secara keseluruhan, lapangan usaha ini mencatatkan laju pertumbuhan 8,14% pada Tahun 2023, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 yang tumbuh sebesar 4,02 persen.

Tabel 2.38 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Tahun 2019 - 2023

<i>Uraian</i>	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	266,93	258,10	257,47	277,97	302,14
- ADHK 2010	194,77	187,50	186,66	197,53	213,61
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,91	2,77	2,65	2,59	2,59
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,02	-3,73	-0,45	5,82	8,14

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

## 10. Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan lapangan usaha ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi.

Tabel 2.39 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, Tahun 2019-2023

<i>U R A I A N</i>	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	85,60	92,37	97,64	110,64	118,88
- ADHK 2010	76,64	82,12	85,77	92,92	97,83
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,93	0,99	1,01	1,03	1,02
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	6,75	7,15	4,44	7,60	6,01

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kabupaten Dairi selama Tahun 2019-2022 relatif stabil pada kisaran nilai 1,37%. Pada Tahun 2023 peranan lapangan usaha ini sebesar 1,02 persen sementara nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 118,88 milyar rupiah dan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 97,83 milyar.

Laju pertumbuhan lapangan usaha ini lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi secara keseluruhan, dengan nilai sebesar 7,61 persen pada Tahun 2023 dan mengalami peningkatan dari Tahun 2021.

### 11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Laju pertumbuhan lapangan usaha ini cenderung menurun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2019, laju pertumbuhannya mencapai 4,16%. Sedangkan Tahun 2021 laju pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 3,44% dan kembali mengalami penurunan 2,79 persen ditahun 2022 dari seluruh lapangan usaha, Pada Tahun 2023 laju pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mengalami peningkatan mencapai 4,33 persen.

Peranan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi terhadap keseluruhan PDRB hanya sekitar 2,2%. Pada Tahun 2023 peranan lapangan usaha ini sebesar 2,08 persen dengan nilai tambah nominal sebesar 242,14 milyar rupiah.

Tabel 2.40 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, Tahun 2019 - 2023

<i>Uraian</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	198,66	199,97	215,98	230,03	242,14
- ADHK 2010	131,28	133,11	137,70	141,54	147,67
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,17	2,15	2,22	2,15	2,08
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,16	1,40	3,44	2,79	2,08

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

### 12. Real Estat

Lapangan usaha real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Dairi dengan peranan sebesar kurang dari 3 persen. Pada Tahun 2019, sumbangan lapangan usaha real estat sebesar 2,79 persen sedangkan pada Tahun 2023 berada di angka 2,74 persen. Nilai tambah lapangan usaha ini pada Tahun 2023 mencapai 319,74 milyar rupiah berdasarkan harga berlaku dan 190,80 milyar rupiah berdasarkan harga konstan. Selama Tahun 2019-2023, laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019

pertumbuhannya sebesar 5,03 persen dan menurun sampai Tahun 2021 dan meningkat dengan signifikan pada Tahun 2022. Laju pertumbuhan lapangan usaha real estat pada Tahun 2022 sebesar 3,41 persen, pada Tahun 2023 laju pertumbuhan lapangan usaha ini kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 2,57 persen.

Tabel 2.41 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estat, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	255,62	267,07	275,66	304,62	319,74
- ADHK 2010	175,80	179,12	179,88	186,01	190,80
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,79	2,87	2,84	2,84	2,74
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	5,03	1,89	0,43	3,41	2,57

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

### 13. Jasa Perusahaan

Nilai tambah nominal Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Kabupaten Dairi Tahun 2022 sebesar 7,22 milyar rupiah. Nilai ini setara dengan 0,06 persen dari total perekonomian Kabupaten Dairi. Peranan lapangan usaha ini relatif kecil, dari Tahun 2018-2023 hanya berkisar 0,06 persen.

Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami penurunan yang sangat krusial dengan nilai negative pada Tahun 2020 hanya bernilai -0,88 persen dan bernilai -0,14 pada Tahun 2021 dan kembali meningkat pada Tahun 2022 menjadi 1,22 persen, pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 4,65 persen.

Tabel 2.42 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	6,12	6,16	6,26	6,66	7,22
- ADHK 2010	4,01	3,98	3,97	4,02	4,21
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,33	-0,88	-0,14	1,22	4,65

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

### 14. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga

perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Tabel 2.43 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Tahun 2019 -2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	945,44	973,58	972,56	1.030,56	1.040,76
- ADHK 2010	608,77	605,68	605,34	609,39	623,55
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	10,31	10,45	10,02	9,62	8,93
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	5,54	-0,51	-0,06	0,67	2,32

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib memiliki peranan yang besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dairi. Pada Tahun 2023 peranan lapangan usaha ini mencapai 8,93 persen. Selama Tahun 2019-2023 peranannya relative stabil di kisaran 10 persen. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini selama Tahun 2019 bernilai positif meskipun mengalami fluktuasi pada Tahun 2020 dan 2021 dimana laju pertumbuhan lapangan usaha ini menjadi negative dengan nilai -0,51 persen dan -0,06 persen dan pada Tahun 2022 kembali bernilai positif sebesar 0,67 persen, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 2,32 persen.

## 15. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2023 jasa pendidikan menyumbang sebesar 1,91 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Dairi, dengan nilai tambah nominal sebesar 223,01 milyar rupiah. Peranan ini cenderung berfluktuasi. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 memiliki nilai pertumbuhan sebesar 4,82 persen kemudian mengalami penurunan nilai berturut – turut yang sangat signifikan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 dengan nilai 0,72 persen di Tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 3,82 persen di Tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2022 menjadi 5,13 persen, pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 6,47 persen.

Tabel 2.44 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan, Tahun 2019 - 2023

<i>Uraian</i>	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	176,94	182,41	190,01	205,15	223,01
- ADHK 2010	126,73	127,64	132,52	139,32	223,01
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	1,93	1,96	1,96	1,91	1,91
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,82	0,72	3,82	5,13	6,47

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan dapat meningkatkan *multiplier effect* atau efek ganda yang akan berdampak pada ekonomi masyarakat di daerah dan akan menambah nilai tambah yang berasal dari Jasa Pendidikan. Sebagai contoh, jika Kabupaten Dairi memiliki sekolah yang bermutu nasional, seperti Sekolah Unggul Dell, SMA Negeri 1 Matauli dll, maka Kabupaten Dairi akan menjadi salah satu tujuan belajar utama masyarakat luar atau dalam kabupaten. Hal ini tidak hanya menambah nilai tambah dari sektor pendidikan saja, dari beberapa sektor juga akan meningkatkan nilai tambah Kabupaten Dairi, misalnya akan meningkatkan nilai tambah Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan lapangan Usaha Real Estat.

## 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Nilai PDRB ADHB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terus meningkat sehingga pada Tahun 2023 mencapai 77,98 milyar rupiah, sedangkan PDRB ADHK 2010 mengalami penurunan nilai sebesar 44,82 milyar rupiah. Kontribusi lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap perekonomian Kabupaten Dairi sebesar 0,67 persen dengan laju pertumbuhan mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 6,40 persen.

Tabel 2.45 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 2019-2023

<i>Uraian</i>	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,69	0,69	0,66	0,66	0,67
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,64	-2,18	-1,25	4,32	6,40

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024

## 17. Jasa Lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Dairi relatif kecil, dan dari tahun ke tahun menunjukkan stagnan. Tahun 2023, peranannya sebesar 0,02 persen dengan nilai tambah nominal sebesar 2,38 milyar rupiah. Dan laju pertumbuhan lapangan usaha jasa lainnya mengalami fluktuasi.

Tahun 2021 laju pertumbuhannya mengalami peningkatan dari Tahun 2020 dengan nilai 2,00 persen, dan mengalami penurunan dibanding Tahun 2019 yang mencapai 6,79 persen, pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 5,97 persen.

Tabel 2.46 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya, Tahun 2019-2023

<i>Uraian</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	2,02	1,99	2,05	2,18	2,38
- ADHK 2010	1,32	1,27	1,30	1,31	1,39
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	6,79	-3,47	2,00	0,95	5,97

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

### B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.47 PDRB per kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, 2019-2023 (Ribu Rupiah)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Atas Dasar Harga Berlaku	32.272.154	30.271.338	31.013.125	31.013.125	35.877.624
Atas Dasar Harga Konstan	23.130.294	21.142.880	21.211.341	21.702.725	22.387.473

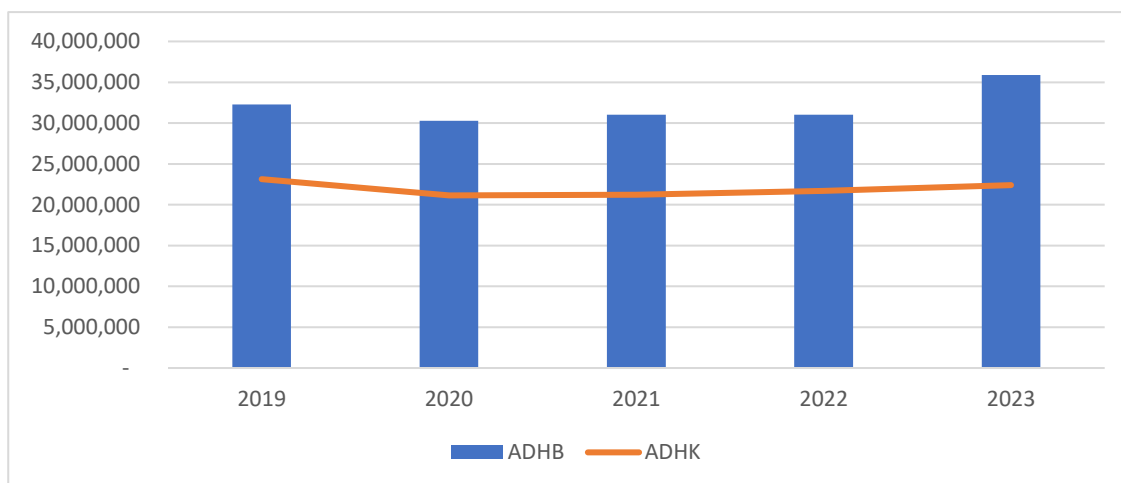
Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024

PDRB per kapita Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku pada Tahun 2019 sebesar 32.272.154 rupiah, pada Tahun 2020 sedikit berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 30.271.338, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 nilainya sama menjadi 31.013.125 ribu rupiah pada

Tahun 2023 meningkat menjadi 35.877.624, angka tersebut meningkat dari tahun ke tahun.

Sementara itu dari perhitungan harga konstan, periode Tahun 2019 sebesar 23.130.294, Tahun 2020 sebesar 21.142.880, pada Tahun 2021 sebesar 21.211.341 dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 21.702.725 dan kemudian pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 22.387.473.

Gambar 2.40 PDRB per kapita Kabupaten Dairi berdasarkan ADHB Tahun 2010 dan ADHK 2019-2023 (Rupiah)

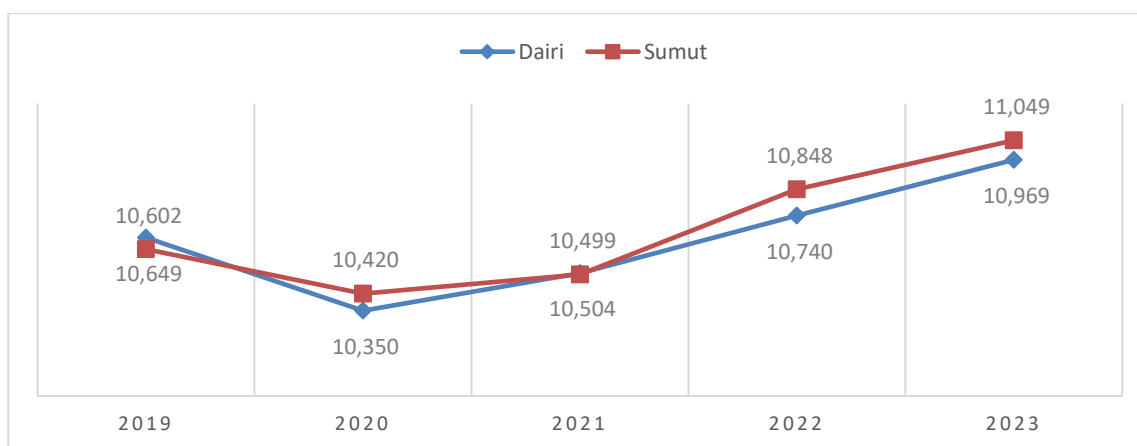


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024

### C. Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.41 Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Per Kapita Per Tahun 2019 -2023 (ribu rupiah)



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita penduduk sekitar 10.649 pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10.350 ribu rupiah per kapita per tahun, lalu meningkat kembali pada Tahun 2021 menjadi 10.504 ribu rupiah perkapita dan meningkat kembali Tahun 2022 menjadi 10.740 ribu rupiah per kapita. Pada Tahun 2023 pengeluaran perkapita penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi Rp(x1.000) 10.969.

Hal serupa juga terjadi pada Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir rata-rata nilai pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Utara terus mengalami perubahan fluktuatif namun pada Tahun 2022 pengeluaran perkapita penduduk mengalami peningkatan menjadi 10.848 ribu rupiah perkapita. Pada Tahun 2023 pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Sumatera Utara kembali mengalami peningkatan sebesar 11.049.

### **2.3.2 Sumber Daya Manusia**

#### **A. Pendidikan**

##### **1. APK (Angka Partisipasi Kasar)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/Negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan APK Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP Kabupaten Dairi dapat dilihat pada Gambar dibawah:

Tabel 2.48 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	108,98	111,00	98,24	101,79	111,34
SMP	99,66	98,24	99,10	95,82	89,12

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Angka Partisipasi kasar SD rata-rata diatas 100%, dimana pada Tahun 2019 sebesar 108,98 pada Tahun 2020 sebesar 111,00 dan pada Tahun 2021 sebesar 98,24 dan pada Tahun 2022 sebesar 101,79, pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 111,34%. Angka Partisipasi Kasar SMP rata-rata meningkat setiap tahun dimana pada Tahun 2018 sebesar 95,41 dan pada Tahun 2022 sebesar 95,82, pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 89,12 %

## 2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan, perkembangan APM Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.49 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	99,36	99,19	89,40	93,78	99,28
SMP	90,53	90,21	90,18	87,70	77,47

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024

Angka Partisipasi Murni SD pada Tahun 2019 sebesar 99,36 pada Tahun 2020 turun menjadi 99,19 dan pada Tahun 2021 turun menjadi 89,40 dan meningkat kembali pada Tahun 2022 menjadi 93,78 dan pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 99,28. Angka Partisipasi Murni SMP selama Tahun 2019-2023 dimana pada Tahun 2019 sebesar 90,53 pada Tahun 2020 menurun kembali menjadi 90,21 dan pada Tahun 2022 menurun kembali menjadi 87,70 dan menurun pada Tahun 2023 menjadi 77,47.

## 3. Angka Putus Sekolah

Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Perkembangan angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50 Angka Putus Sekolah Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	0,32	0,52	0,57	0,35	0,02
SMP	2,14	2,18	0,94	0,75	0,03

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023.

Angka Putus Sekolah SD sebesar 0,32 pada Tahun 2019, pada Tahun 2020 sebesar 0,52 dan pada Tahun 2021 sebesar 0,57 dan Tahun 2022 sebesar 0,35, pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,02. Angka Putus sekolah SMP pada Tahun 2019 sebesar 2,14, sebesar 2,18 pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 0,94 dan pada Tahun 2022 sebesar 0,75 dan pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,03.

#### 4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan jenjang pendidikan SD dan SMP dari Tahun 2019-2023 telah mencapai seratus persen, capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51 Angka Kelulusan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	100	100	100	100	100
SMP	100	100	100	100	100

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

#### 5. Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD ke SMP dan SMP ke SMA dari Tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52 Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD ke SMP	99,17	124,27	91,49	100	100
SMP ke SMA	99,97	90,33	97,03	99,57	96,62

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2023

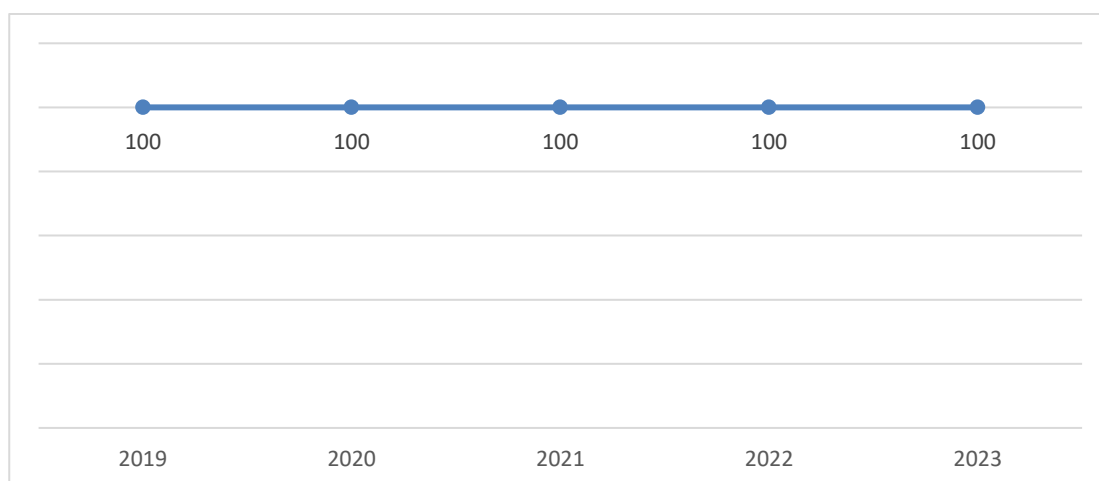
Angka Melanjutkan SD ke SMP pada, Tahun 2019 sebesar 99,17, Tahun 2020 sebesar 124,27 dan pada Tahun 2021 sebesar 91,49 dan menjadi 100 pada Tahun 2022. Angka melanjutkan dari SMP ke SMA pada Tahun 2019 sebesar 99,97, Tahun 2020 menjadi 90,33 dan pada Tahun

2021 menjadi 97,03 dan pada Tahun 2022 sebesar 99,57. Tahun 2023 angka melanjutkan jenjang Pendidikan dari SD ke SMP adalah sebesar 100 persen dan untuk yg melanjutkan dari SMP ke SMA adalah sebesar 96,62 persen.

## 6. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Dilihat dari perbandingan jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat pada gambar di bawah ini dimana ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Dairi dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 sebesar 100%.

Gambar 2.42 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

## B. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Dairi diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Dairi dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja

(TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 2.53 Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Dairi, 2019 – 2023

Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	160.261	136.573	168.261	168.291	197.395
- Bekerja	157.722	134.183	165.755	166.805	194.960
- Pengangguran	2.539	2.390	2.506	1.486	2.435
Bukan Angkatan Kerja	24.019	57.922	28.002	29.666	35.343
Jumlah	184.280	194.495	196.263	197.957	232.738

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

### 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada Tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja di Dairi adalah 181.124 orang, terdiri dari 157.038 orang angkatan kerja dan sisanya sebanyak 24.086 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya TPAK merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

TPAK Dairi Tahun 2017 adalah sebesar 86,70 persen, artinya bahwa pada Tahun 2017 sebanyak 86,70 persen penduduk usia kerja di Dairi siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Dairi menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada Tahun 2015 TPAK Dairi 86,45 persen, kemudian naik menjadi 86,70 persen pada Tahun 2017, pada Tahun 2018 naik menjadi 88,50 persen dan pada Tahun 2019 naik kembali menjadi 86,97%. Tahun 2021 persentase TPAK kabupaten Dairi sebesar 85,73% dan pada Tahun 2022 TPAK sebesar 85,01%, pada Tahun 2023 besaran TPAK Kab. Dairi sebesar 84,81%

### 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat

pengangguran terbuka di Dairi sebesar 1,66 persen pada Tahun 2018, pada Tahun 2019 sebesar 1,59 persen, pada Tahun 2020 sebesar 1,75 persen, pada Tahun 2021 sebesar 1,49 persen, dan pada Tahun 2022 sebesar 0,88 persen, untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) capaian Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 sebesar 1,23 %

Tabel 2.54 Jumlah Penduduk Dairi Berumur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Dairi menurut Kegiatan Seminggu yang lalu, 2019-2023

TAHUN	2019	2020	2021	2022	2023
TPT	1,59	1,75	1,49	0,88	1,23

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023

### **3. Karakteristik Penduduk Bekerja**

#### **a. Lapangan Pekerjaan**

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja di Dairi. Perkembangan 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada Tahun 2023 sebanyak 116.972 penduduk Dairi bekerja di sektor *agriculture*/pertanian, kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 25.589 dan diurutan ketiga bekerja pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 10.806 kemudian ada pada sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8.011 dan pada urutan kelima pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 7.930 penduduk.

Tabel 2.55 Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis kelamin, Agustus 2023

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	59.126	57.846	116.972
B	792	-	792
C	1.381	2.090	3.471
D,E	-	-	-
F	5.870	-	5.870
G	9.765	15.824	25.589
H	7.930	-	7.930
I	6.066	4.740	10.806
J,K,L	1.107	227	1.334
M,N	1.043	301	1.344
O	4.917	3.094	8.011
P	2.185	5.599	7.784
Q	-	1.082	1.082
R,S,T,U	2.089	1.886	3.975
<b>Jumlah</b>	<b>102.271</b>	<b>92.689</b>	<b>194.960</b>
Deskripsi Lapangan Pekerjaan Utama			
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing			
B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying			
C. Industri Pengolahan/Manufacturing			
D,E. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang			
F. Bangunan/Construction			
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles			
H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage			
I. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum/Accommodation and Food Service Activities			
J,K,L. Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi; Real estat/Information and Communication, Financial and Insurance Activities, Real estat activities			
M,N. Jasa Perusahaan/Business Activities			
O. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Cumpulsory Social Security			
P.Pendidikan/Education			
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities			
R,S,T,U. Jasa Lainnya/Other Services Activities			

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

#### b. Status Pekerjaan

Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 macam, yaitu berusaha sendiri tanpa batuan orang lain, berusaha dibantu/ buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar, berusaha dibantu/ buruh tetap/ buruh dibayar, buruh/ karyawan/ pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya penduduk Dairi yang bekerja sebagai berusaha sendiri tanpa batuan orang lain sebanyak 40.019, berusaha dibantu/ buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar sebanyak 48.722, berusaha dibantu/ buruh tetap/ buruh dibayar sebanyak 3.257, buruh/ karyawan/ pegawai

sebanyak 28.398, pekerja bebas di pertanian sebanyak 8.993, pekerja bebas di non pertanian sebanyak 3.298 dan pekerja keluarga tak dibayar sebanyak 62.273. Perbandingan jumlah pekerja wanita dan pria sepanjang Tahun 2023 , pria 102.271 orang dan wanita sebanyak 92.689 dari jumlah total pekerja 194.960 di kabupaten Dairi.

Tabel 2.56 Penduduk Kabupaten Dairi Berusia 15 Tahun ke-atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	19.807	20.212	40.019
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	36.412	12.310	48.722
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	2.114	1.143	3.257
Buruh/Karyawan/Pegawai <i>Employee</i>	16.576	11.822	28.398
Pekerja bebas di pertanian <i>Agriculture casual worker</i>	3.716	5.277	8.993
Pekerja bebas bukan di pertanian <i>Non-agriculture casual worker</i>	2936	362	3.298
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	20.710	41.563	62.273
Jumlah/Total	102.271	92.689	194.960

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

### 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

#### A. Pekerjaan Umum

Berdasarkan data Tahun 2023 diketahui kondisi jalan, jembatan dan luas irigasi dalam keadaan baik dalam tabel dibawah ini

##### 1. Panjang jalan

Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Dairi pada Tahun 2022 sepanjang 938.041 Km atau sebanyak 58,43%. Pada Tahun 2023 kondisi jalan mantap adalah 938.041 km atau sebesar 50,10% dari seluruh jalan yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu 1.605,30 km

Tabel 2.57  
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2023

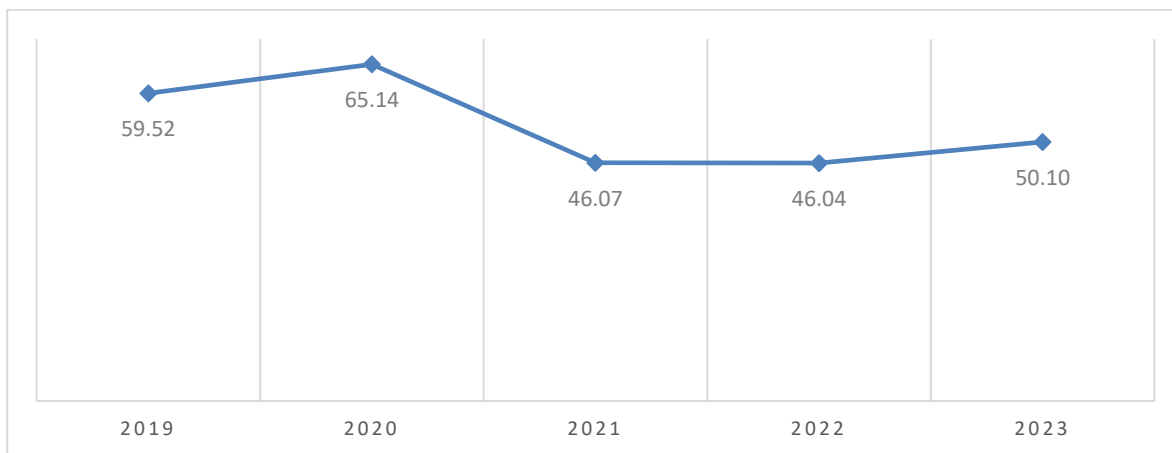
No	Keterangan	Panjang Kondisi Keadaan Baik	Persentase
1	Jalan	938.041 Km	50,1%

Sumber : LPPD Kab. Dairi 2024

## 2. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

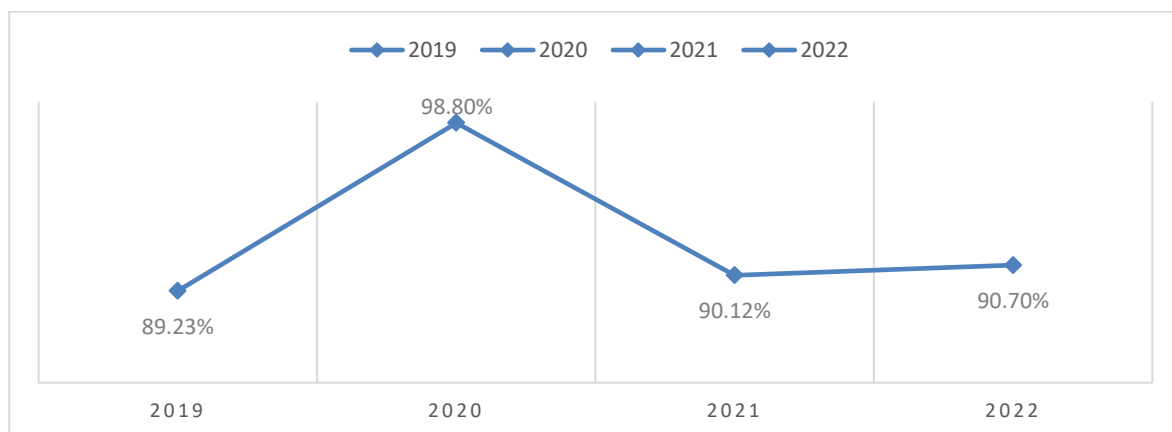
Gambar 2.43 Persentase Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa jalan dengan kondisi mantap pada Tahun 2019 sebesar 59,42 %, pada Tahun 2020 sebesar 56,51% dan pada Tahun 2021 sebesar 58,39 % dan pada Tahun 2022 menjadi 58,43%, jalan kondisi baik pada Tahun 2023, sebesar 58,43%.

Gambar 2.44 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023



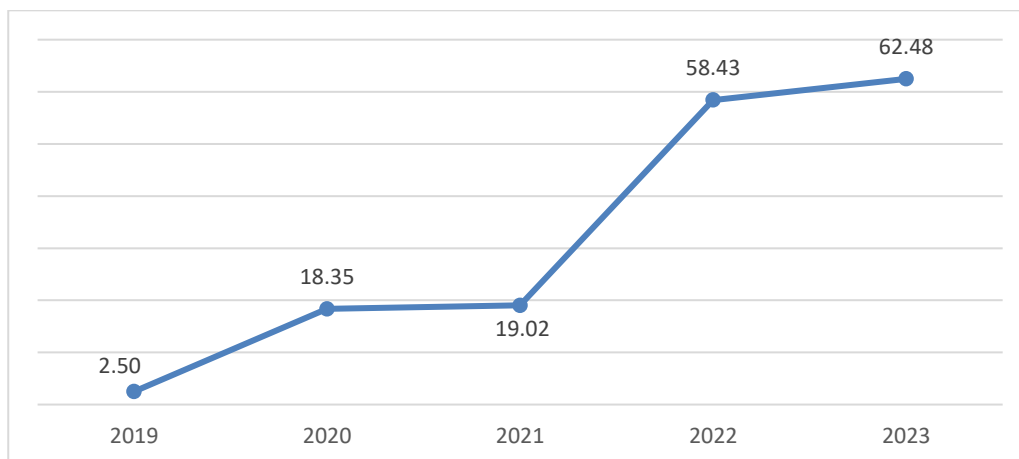
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa persentase jembatan dengan kondisi baik pada Tahun 2019 sebesar 89,23%, persentase jembatan dengan kondisi baik pada Kabupaten Dairi pada kurun waktu Tahun 2020-2023 adalah sebesar 90,12%.

### 3. Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten

Dari gambar di bawah dapat dijelaskan bahwa persentase peningkatan konstruksi jalan kabupaten pada Tahun 2019 sebesar 2,50%, Tahun 2020 sebesar 18,35%, sebesar 19,02% pada Tahun 2021, dan pada Tahun 2022 capaian kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah sebesar 938,041 Km dari total panjang jalan kabupaten 1605,291 Km atau sebesar 58,43%, pada Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 1.002,99 Km dari total panjang jalan kabupaten atau sebesar 62,48%. Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kabupaten yang dilakukan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan jalan yang terjadi sehingga tingkat kemantapan yang diperoleh belum memuaskan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dukungan pendanaan untuk penanganan jalan.

Gambar 2.45 Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023

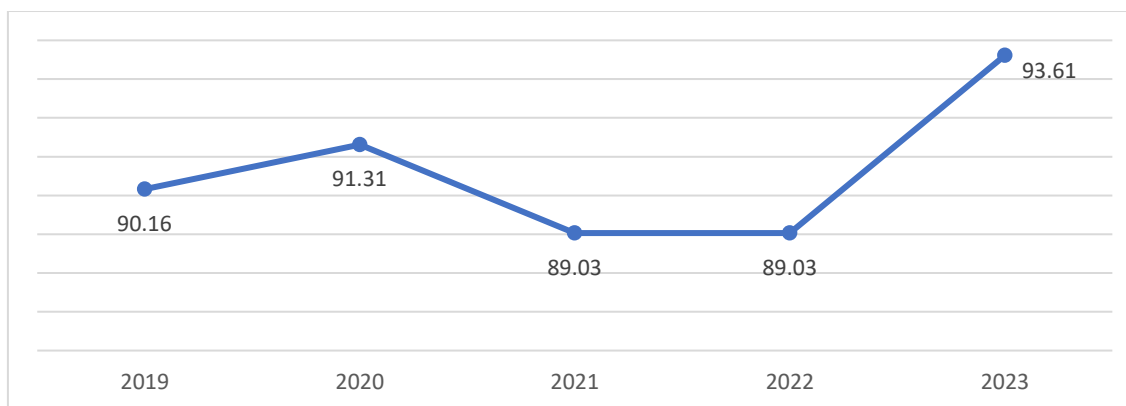


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

### 4. Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2019-2023, menunjukkan adanya peningkatan namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.46 Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Luas irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2019 adalah 90,16% dengan luasan 10.076 Ha , kemudian pada Tahun 2020 irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 91,37 % dengan luasan 10.211 Ha. Pada Tahun 2021, persentase irigasi dengan kondisi baik menjadi 89,03% dengan luasan 9.949 Ha, Tahun 2022 untuk persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 89,41%, dengan luasan 9.992 Ha dan pada Tahun 2023 persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 93,61% dengan luasan sebesar 10.461 Ha.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sebagaimana yang diharapkan antara lain disebabkan keterbatasan pendanaan untuk rehabilitasi kerusakan bangunan utama dan jaringan irigasi baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun dana perimbangan dari Pemerintah (DAK/APBN), sehingga pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi (OP Irigasi dan rawa), belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tingkat kerusakan jaringan irigasi cukup tinggi karena sebagian besar bangunan irigasi berada pada punggung perbukitan, dengan kondisi debit aliran yang tidak stabil sehingga terjadinya longsor atau kerusakan kecil tidak dapat tertangani secara menyeluruh.

## **5. Daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Kabupaten Dairi.**

Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan meliputi dari fasilitas pengangkutan (truk, gerobak dorong, gerobak motor, kontainer, TPS dan depo dan transito) sampai di TPA. Sampai dengan akhir Tahun

2023 total volume sampah yang dapat ditangani adalah sebanyak 16.352,82 Ton.

## **B. Perumahan**

### **1. Penduduk Terlayani Air Minum**

Cakupan pelayanan penduduk terlayani air minum layak, dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dibanding dengan keseluruhan penduduk Kabupaten Dairi. Perkembangan cakupan pelayanan penduduk terlayani air minum yang disalurkan oleh PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58 Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Ncihodi Kabupaten Dairi Pada Tahun 2019 - 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggan	17.717	20.817	19.934	22.451	23.060

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

Jumlah pelangga PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi sesuai dengan tabel diatas pada Tahun 2019 - 2022 meningkat. Sampai dengan Tahun 2023 jumlah pelanggan PDAM mencapai 23.060 pelanggan dengan volume air yang di distribusikan sebesar 4.663,225 m3.

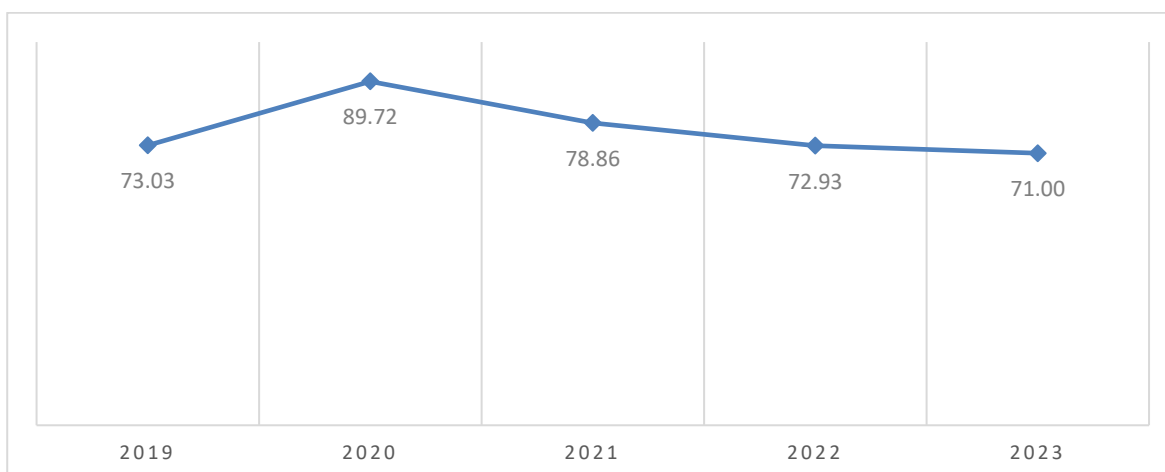
### **2. Capaian Tersedianya Akses Air Minum yang Bersih**

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini pun mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada

masyarakat. Jenis SPAM terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Gambar 2.47 Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih Tahun 2019-2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang stabil, seperti pada Tahun 2022 adalah sebesar 65.273 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 89.495 KK atau sebesar 72,93%, pada Tahun 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan semakin bertambah sebesar 66.480 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 93.630 KK atau sebesar 71,00%.

### 3. Penduduk Terlayani Aliran Listrik

Perkembangan cakupan pelayanan penduduk terlayani aliran listrik, yang disalurkan oleh PT.PLN di Kabupaten Dairi terlihat pada tabel berikut. Jumlah Pelanggan PLN Tahun 2023 mencapai 85.342 pelanggan di Kabupaten Dairi

Tabel 2.59 Jumlah Pelanggan pada PT PLN (Persero) Tahun 2019 - 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggan	75.844	79.571	82.667	84.807	85.342

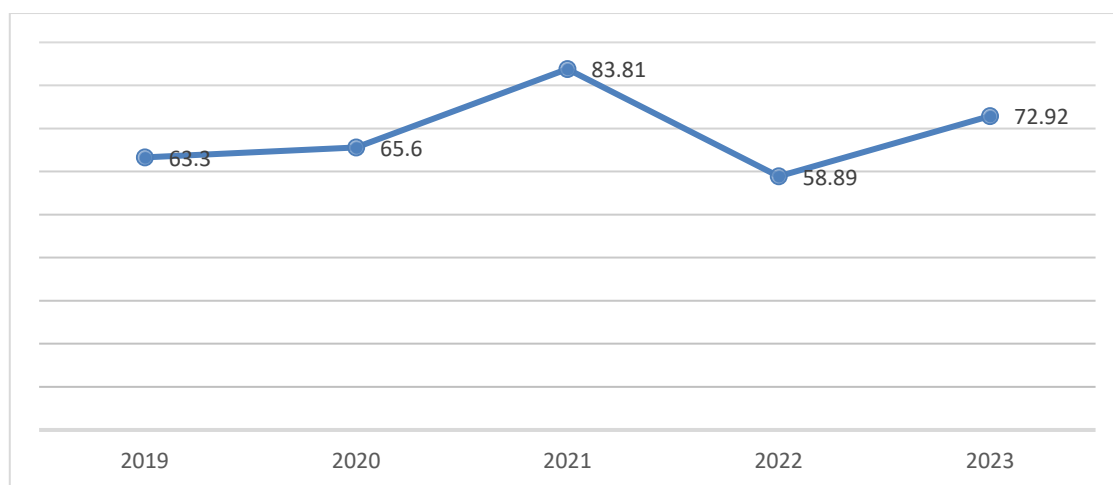
Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

### 4. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat

telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) Yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Data perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.48 Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

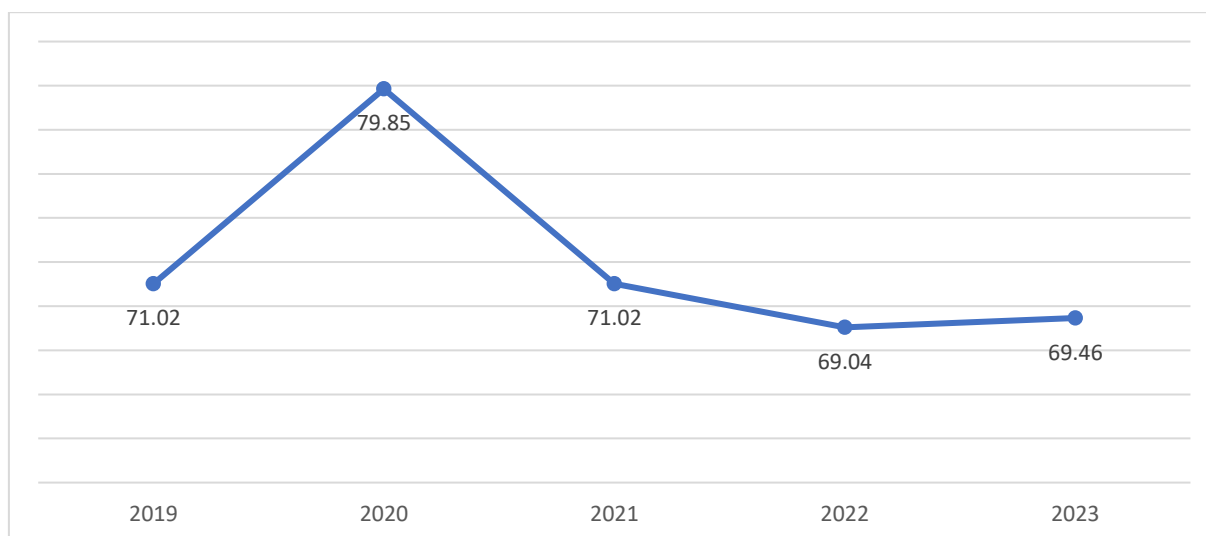
Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan setiap tahunnya pada Tahun 2019 sebesar 63,30%, sebesar 65.60% pada Tahun 2020, sebesar 83,81% pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 sebesar 58,89%. Pada Tahun 2023 persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU ditargetkan menjadi sebesar 72,92%

Belum tertanganinya kawasan kumuh secara optimal karena karena minimnya ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) permukiman yang memadai. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan dana untuk pembangunan, oleh karena hal tersebut diwacanakan dilakukan

pelimpahan sebagian aset berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk menjadi kewenangan desa sehingga penanganan PSU dapat lebih optimal dengan didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## 5. Persentase Rumah Layak Huni

Gambar 2.49 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2019-2023



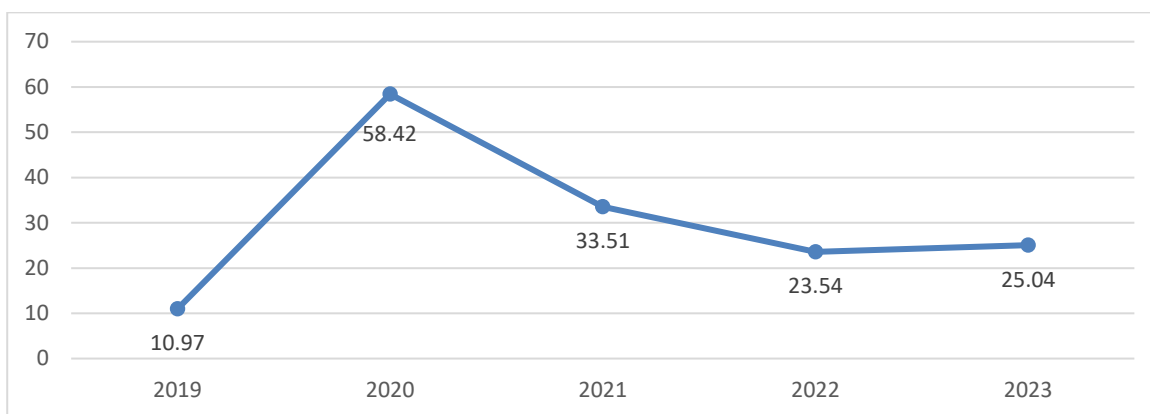
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi adalah sebesar 71,02% pada Tahun 2019, Tahun 2020 sebesar 79,85% dan pada Tahun 2021 sebesar 71,02% dan sebesar 69,04% pada Tahun 2022 pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 69,46 %

## 6. Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dari gambar dibawah dapat dilihat persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 sebesar 10,97%, sebesar 58,42% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 33,51%. Pada Tahun 2022 pengurangan kawasan kumuh menjadi 161,08 Ha atau sebesar 23,54% dan pada Tahun 2023 maka diperoleh pengurangan kawasan kumuh menjadi 171,37 Ha dari total kawasan kumuh 684,41 Ha atau sebesar 25,04%.

Gambar 2.50 Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2019-2023 %



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## 6. Infrastruktur Digital di Kabupaten Dairi

Infrastruktur digital adalah pondasi yang mendukung sistem digitalisasi, komputasi, dan terdiri dari komponen fisik dan perangkat lunak. Dalam mendukung pengembangan infrastruktur digital di kabupaten Dairi terdapat tower telekomunikasi sebagai penghubung jaringan digital, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.60 Jumlah Menara Telekomunikasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Dairi, 2023

Kecamatan	Jumlah Tower
Sidikalang	21
Berampu	4
Sitinjo	6
Parbuluan	11
Sumbul	15
Silahisabungan	4
Silima Punggapungga	10
Lae Parira	3
Siempat Nempu	4
Siempat Nempu Hulu	9
Siempat Nempu Hilir	3
Tiga Lingga	6
Gunung Sitember	2
Pegagan Hilir	3
Tanah Pinem	7
Total	108

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

### 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Untuk mendukung iklim investasi yang baik dan kondusif dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah tingkat kriminalitas di suatu daerah. Di Kabupaten Dairi dalam angka kriminalitas pada Tahun 2023 terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

#### A. Angka Kriminalitas

Tabel 2.61 Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Dairi Tahun 2023

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Dilaporkan	Diselesaikan
1.	Pembakaran / <i>Arson</i>	-	-
2.	Korupsi / <i>Corruption</i>	-	2
3.	Pemalsuan Surat / <i>Counterfeiting of Letter</i>	19	8
4.	Kejahatan Susila / <i>Rape</i>	29	18
5.	Penipuan/Penggelapan / <i>Swindle/Emblezzement</i>	38	22
6.	Perjudian / <i>Gambling</i>	1	2
7.	Pembunuhan / <i>Murder</i>	6	3
8.	Penganiayaan Berat / <i>Heavy Violence</i>	-	-
9.	Penganiayaan Ringan / <i>Light Violence</i>	-	-
10.	Curas / <i>Theft by force</i>	4	1
11.	Curat / <i>Theft and Heavy Violence</i>	36	21
12.	Pencurian Biasa / <i>Light theft</i>	58	39
13.	Curanmor / <i>Motorcycle Robbery</i>	46	28
14.	Peras/Ancam / <i>Extortion/ Threats</i>	-	-
15.	Penghinaan / <i>Contempt</i>	16	23
16.	Penggelapan / <i>Emblezzement</i>	42	29
17.	Penipuan / <i>Swindle</i>	42	19
18.	Merusak / <i>Destruction</i>	1	3
19.	Minyak dan Gas / <i>Oil and Gas</i>	1	1
20.	Perasaan Tidak Senang / <i>Displeasure</i>	-	-
21.	Pembalakan Liar / <i>Illegal Logging</i>	2	3
22.	Sengketa Tanah / <i>Land Dispute</i>	16	10
23.	Perkawinan Terlarang / <i>Forbidden Marriage</i>	-	-
<b>Jumlah Kasus</b>		<b>756</b>	<b>535</b>

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

## **B. Jumlah Demonstrasi**

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

## **C. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

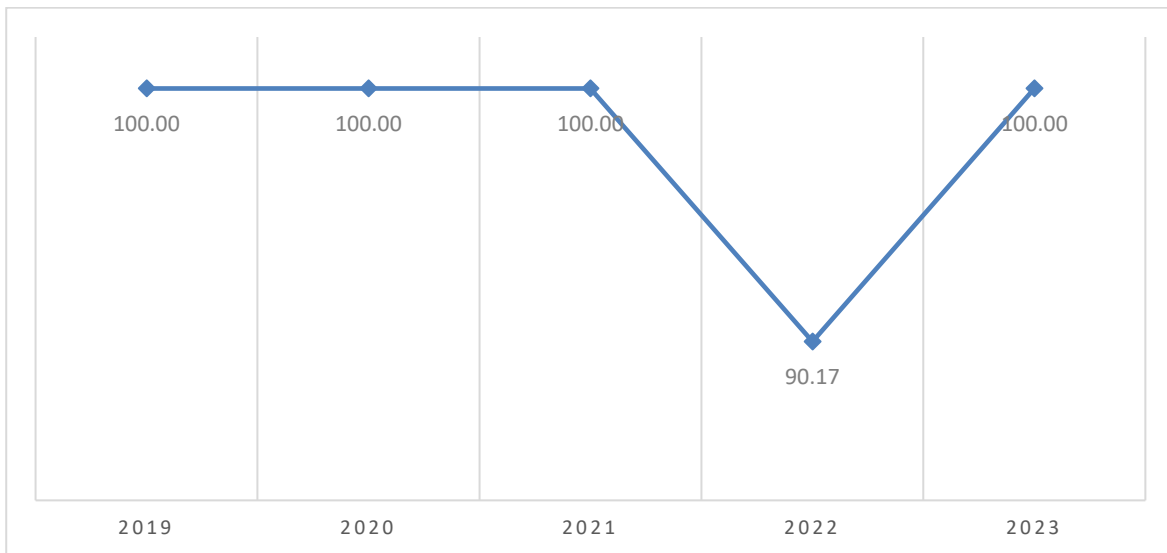
### **1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) menjadi urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Tahun 2017 sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan satuan Linmas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban dalam pemilu, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang struktur dan organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri fungsi Linmas sudah tidak ada di Kesbangpol, akan tetapi regulasi pengalihan Linmas dari Kesbangpol Kabupaten Dairi belum ada sehingga pelaksanaan kegiatan kelinmasan tidak berjalan optimal.

### **2. Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah**

Dari gambar di bawah dapat dilihat persentase penanganan pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sebesar 100% dan pada Tahun 2020 sebesar 100%, pada Tahun 2021 sebesar 100% dan sebesar 90,17% pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 sebesar 100%

Gambar 2.51 Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2019-2023

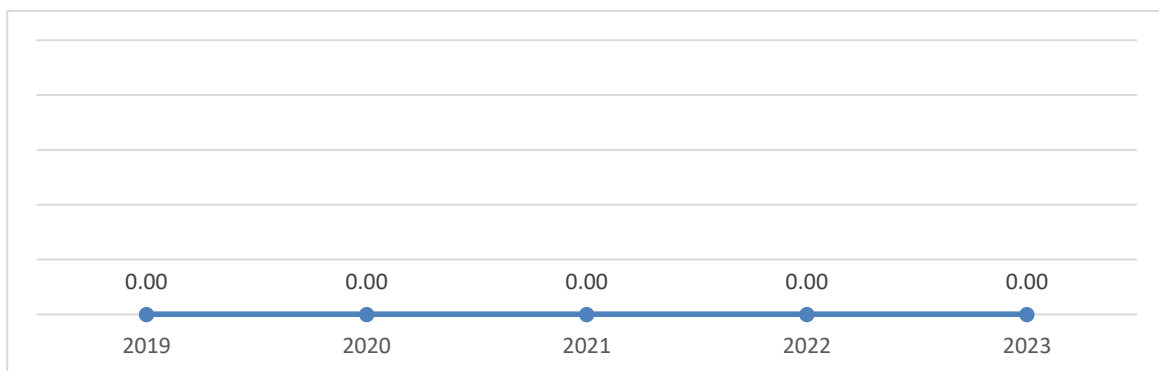


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

### 3. Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik

Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik dapat dilihat dari gambar di bawah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 data tidak tersedia.

Gambar 2.52 Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Politik Tahun 2019-2023

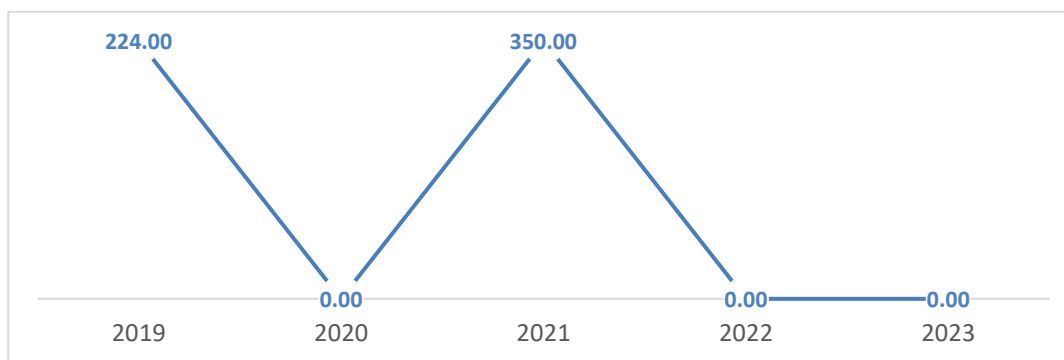


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

### 4. Tokoh Agama/Adat/Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah tokoh agama/adat/masyarakat yang mengikuti kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan, pada Tahun 2019 sebanyak 224 dan pada Tahun 2021 sebanyak 350 orang, sementara pada Tahun 2020, Tahun 2022 dan Tahun 2023 kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan tidak dilaksanakan.

Gambar 2.53 Jumlah Tokoh Agama/Adat/ Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tahun 2019-2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

#### D. Lama Perijinan

Prosedur perijinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perijinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah.

### 2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### A. Pemerintahan Umum

##### 1. Sekretariat Daerah

##### 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tabel 2.62 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019 – 2023

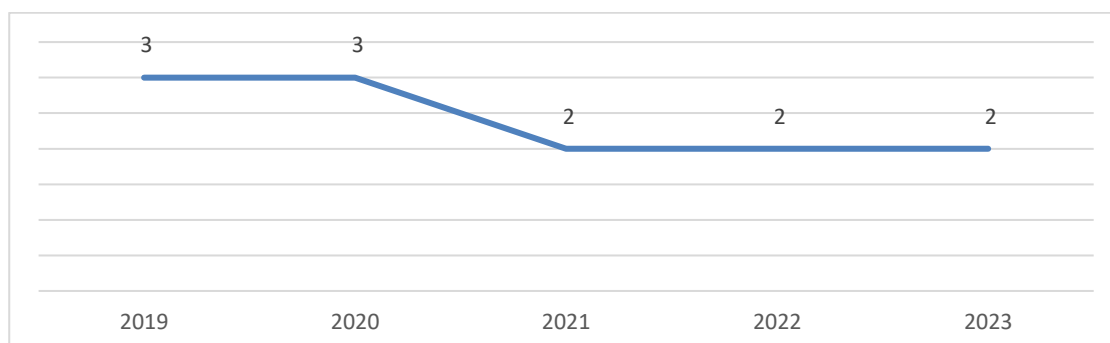
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai	C	C	CC	CC	B

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 – 2020 adalah C dan pada Tahun 2021 – 2022 menjadi CC pada Tahun 2023 Predikat SAKIP daerah Kabupaten Dairi predikat “B”.

## 2) Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah

Gambar 2.54 Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 masing – masing menjadi level 3, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 turun menjadi level 2, pada Tahun 2023 tetap berada pada level 2.

## 3) Rekomendasi LKPJ

Tabel 2.63 Rekomendasi LKPJ Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Rekomendasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada Tahun 2019 – 2023 Rekomendasi LKPJ di Kabupaten Dairi ada setiap tahunnya.

## 4) Nilai LPPD

Tabel 2.64 Nilai LPPD Tahun 2019 – 2023

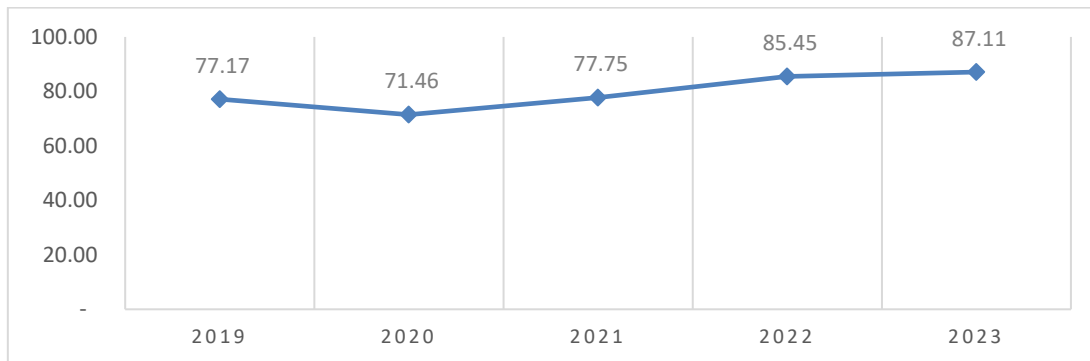
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi

Sumber : LPPD Kab.Dairi Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada Tahun 2019 Nilai LPPD Kabupaten Dairi adalah sedang dan di Tahun 2020 nilai LPPD mengalami peningkatan nilai menjadi tinggi, pada Tahun 2021 memiliki nilai sedang dan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi tinggi.

## 5) Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambar 2.55 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019–2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Dairi sebesar 77,17 poin pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebesar 71,46 poin, pada Tahun 2021 sebesar 77,75 poin dan sebesar 85,45 poin pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 87,11 poin.

## 6) Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra

Tabel 2.65 Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra Tahun 2019 – 2023

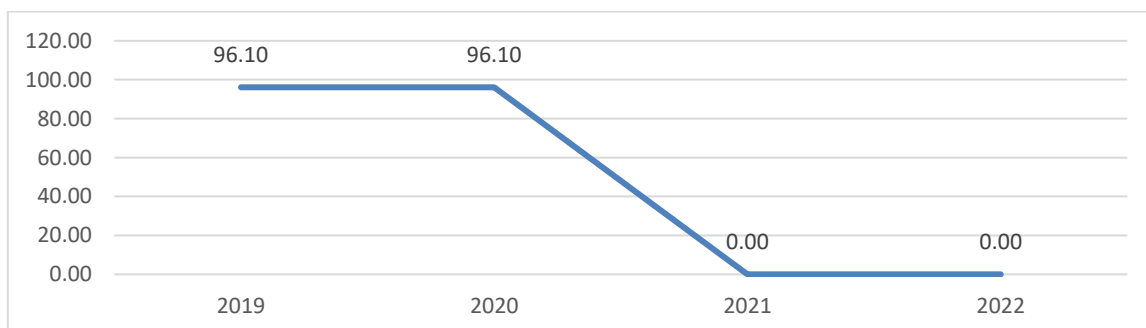
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
KK	16.525	16.525	n/a	n/a	n/a

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Banyak Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 – 2020 adalah sebanyak 16.525 KK setiap tahunnya, Tahun 2021 – 2023 data tidak tersedia.

## 7) Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik

Gambar 2.56 Persentase Paket Kegiatan yang Dilelangkan Secara Elektronik Tahun 2019 – 2023



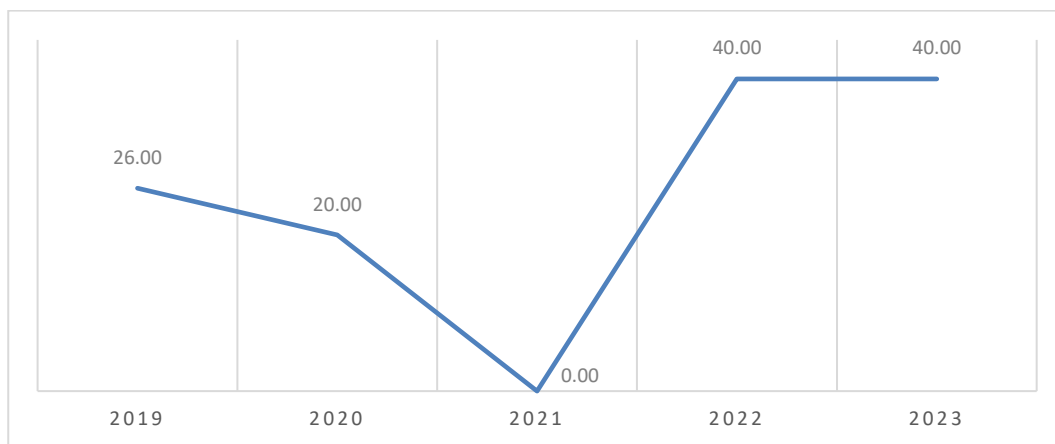
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Persentase paket kegiatan yang dilelengkan secara elektronik di Kabupaten Dairi pada Tahun 2017 – 2018 sebesar 100% setiap tahunnya dan pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020 menjadi 96,61%, data Tahun 2021- 2023 tidak tersedia.

**8) Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan**

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan banyaknya informasi publik yang dihasilkan Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebanyak 20 naskah, data Tahun 2021 data tidak tersedia, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 jumlah data sebanyak 40 data.

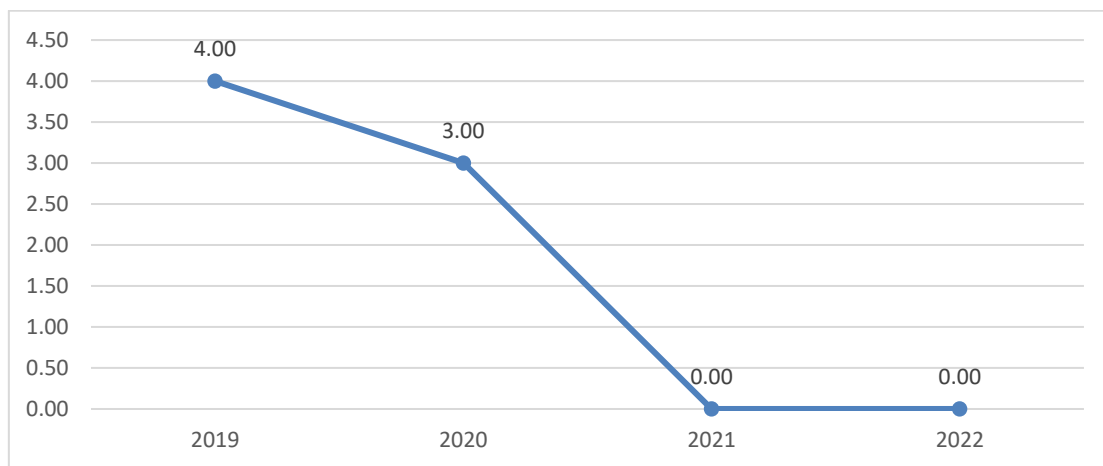
Gambar 2.57 Jumlah Informasi Publik yang Dihasilkan Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

**9) Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi**

Gambar 2.58 Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

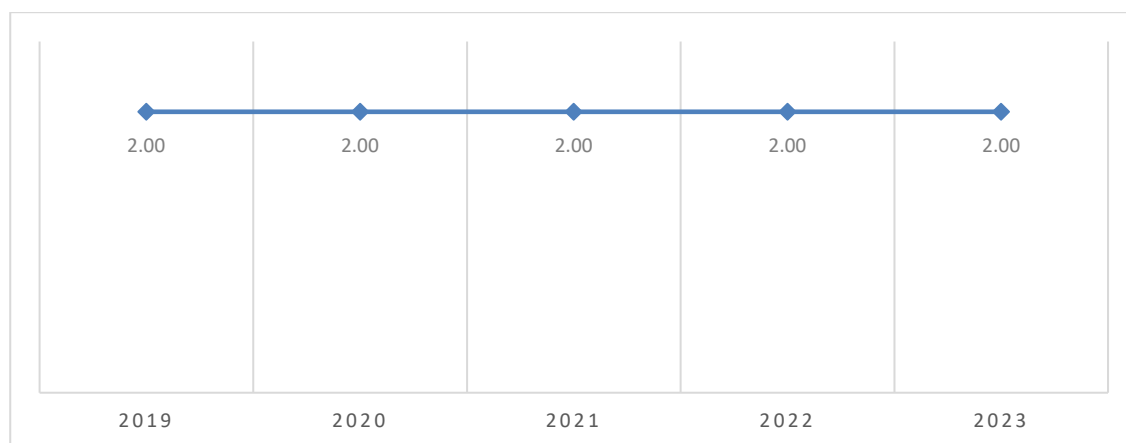
Banyaknya jenis produk hukum daerah yang terfasilitasi di

Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sebanyak 4 jenis dan pada Tahun 2020 turun menjadi 3, Tahun 2021 – 2023 data tidak tersedia.

#### **10) Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Dari gambar di bawah ini banyaknya Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimonitoring dan dievaluasi pada Tahun 2019 – 2023 adalah 2 unit setiap tahunnya.

Gambar 2.59 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

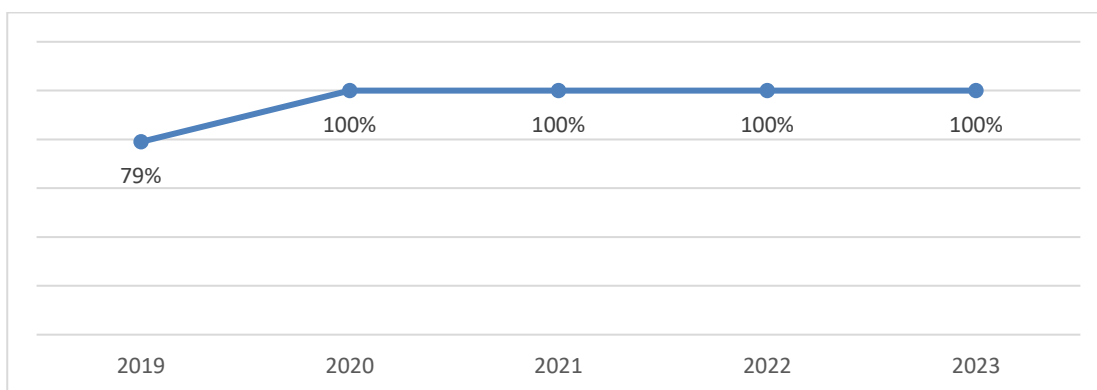
### **2. Sekretariat Dewan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

#### **1) Terfasilitasinya Persidangan di DPRD**

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan terfasilitasinya persidangan di DPRD pada Tahun 2017 – 2018 adalah terfasilitasi 100% setiap tahunnya dan pada Tahun 2019 sebesar 79% dan Tahun 2020 sampai Tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Gambar 2.60 Terfasilitasinya Persidangan di DPRD Tahun 2019– 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## 2) Peningkatan Kapabilitas APIP

Tabel 2.66 Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Level	2	3	3	3	3

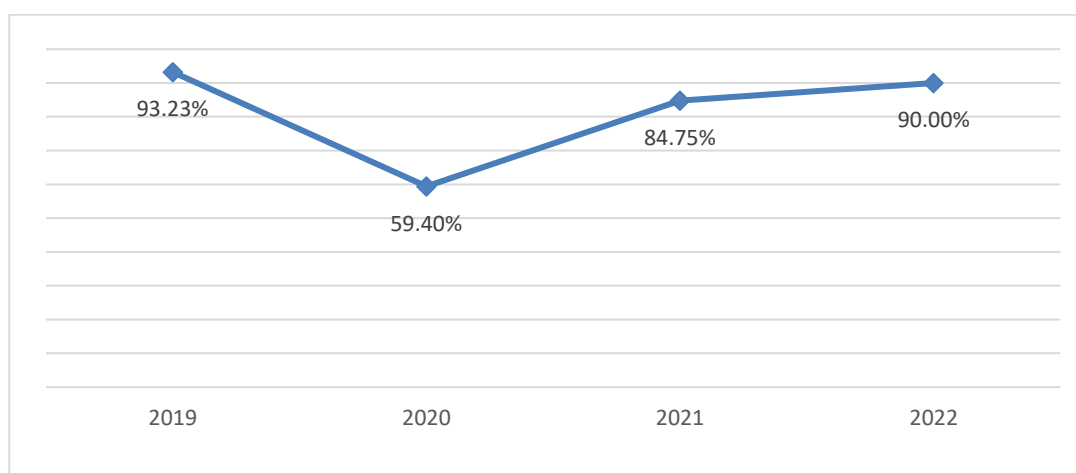
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Dairi ada di level 2 pada tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah level 3.

## 3) Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan persentase temuan aparat pengawasan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebesar 59,40%, pada Tahun 2021 sebesar 84,75% dan pada Tahun 2022 sebesar 90%.

Gambar 2.61 Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

## **B. Perencanaan Pembangunan**

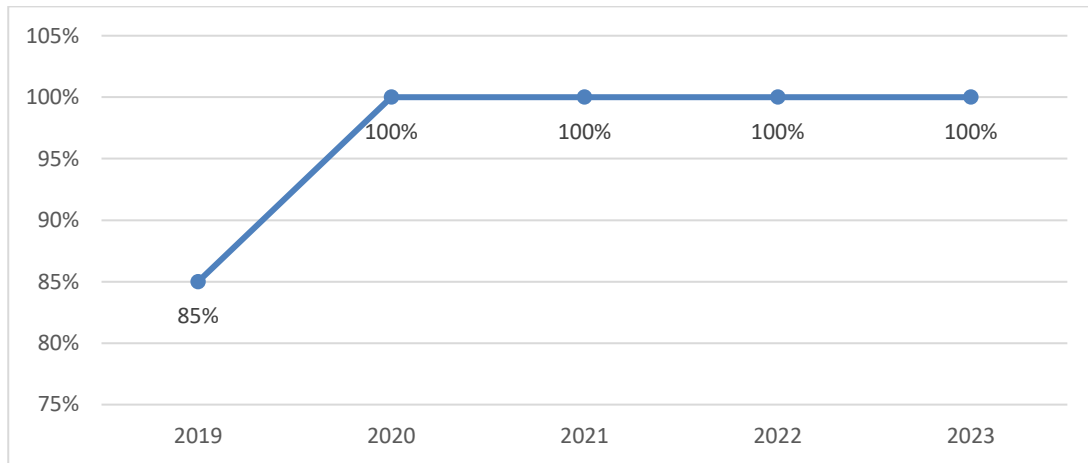
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi yang visioner dan implementatif.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel sertakonsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (*Sense of ownership*) juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

## 1. Persentase Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD

Gambar 2.62 Persentase Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Tahun 2019 – 2023



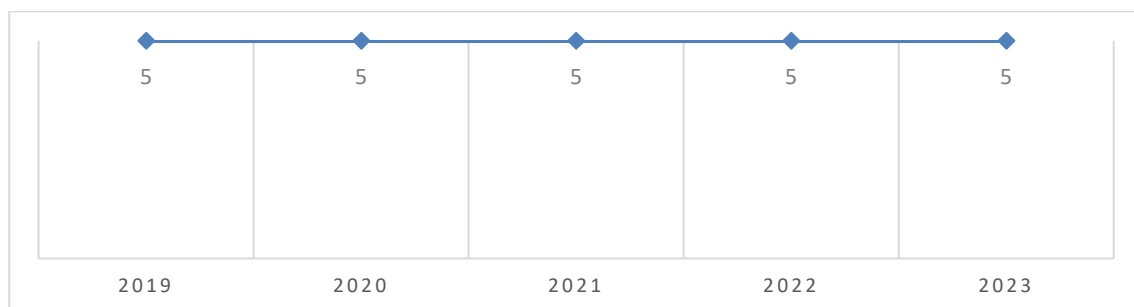
Sumber : LPPD Pemerintah Kab.Dairi 2023

Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD di Kabupaten Dairi sebesar 85% pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 100%.

## 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan

Dari gambar di bawah dapat dijelaskan tersedianya dokumen perencanaan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut pada Tahun pada Tahun 2019 sebanyak 5 dokumen, untuk Tahun 2020 sebanyak 5 dokumen ,Tahun 2021 sebanyak 5 dokumen, pada Tahun 2022 sebanyak 5 dokumen dan Tahun 2023 sebanyak 5 dokumen.

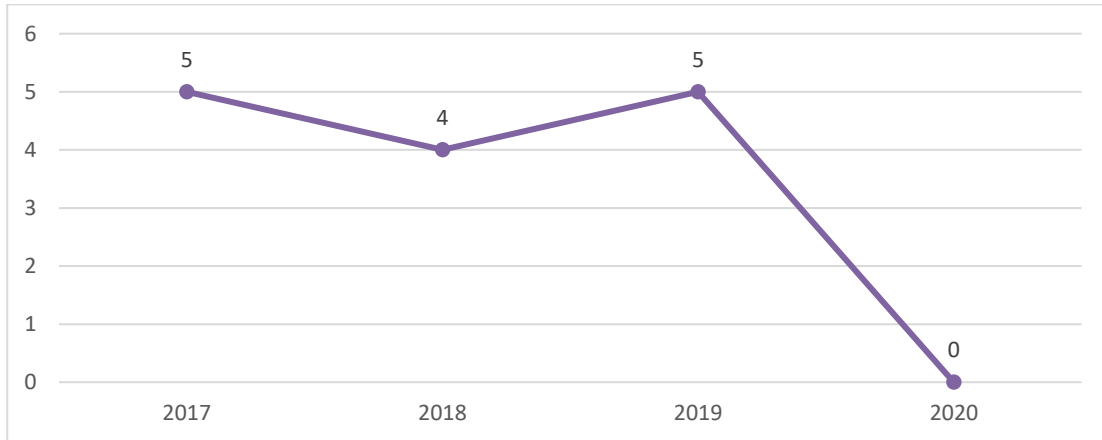
Gambar 2.63 Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2019– 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

### 3. Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan

Gambar 2.64 Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Tahun 2017 – 2023



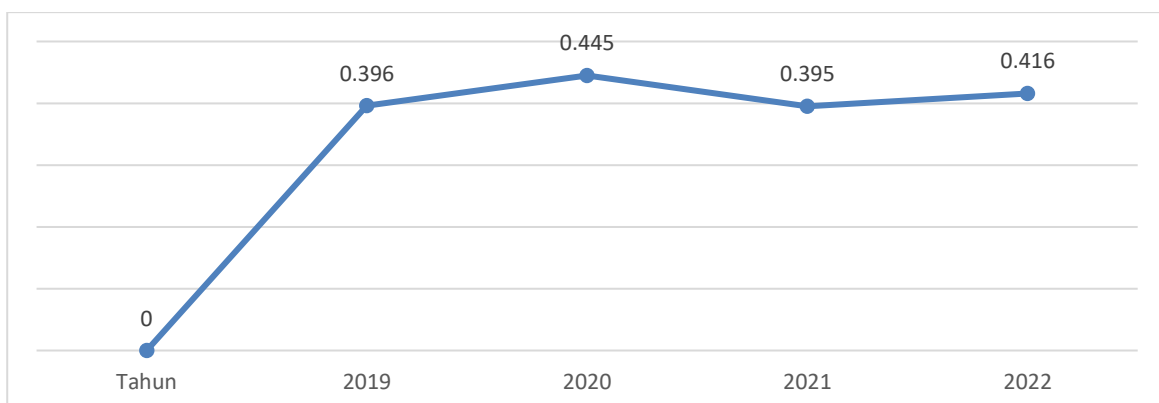
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Banyaknya dokumen pendukung perencanaan yang tersedia di Kabupaten Dairi pada Tahun 2017 sebanyak 5 unit, dan pada Tahun 2018 sebanyak 4 unit sedangkan pada Tahun 2019 sebanyak 5 unit dan untuk Tahun 2020 sampai Tahun 2023 data tidak tersedia.

### 4. Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan terbangun dan terpeliharanya sistem perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Dairi pada Tahun 2017– 2019 adalah sebanyak 1 sistem untuk masing-masing tahun dan untuk Tahun 2020-2023 aplikasi sudah tidak digunakan karena sudah menggunakan system perencanaan SIPD-RI.

Gambar 2.65 Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik Tahun 2019 – 2023

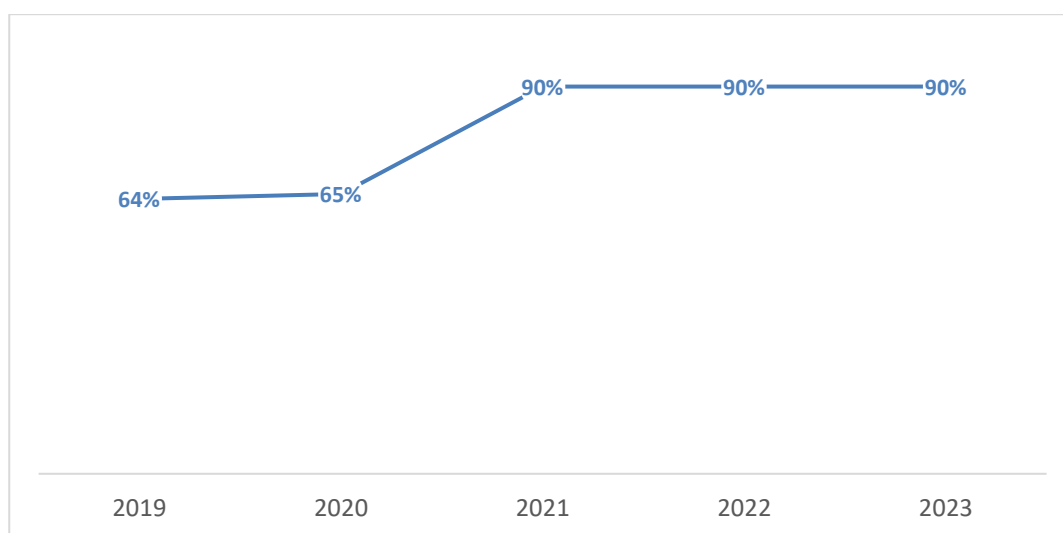


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## 5. Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten

Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten di Kabupaten Dairi pada Tahun 2017– 2018 sebesar 80% tiap tahunnya sedangkan pada Tahun 2019 sebesar 63,89% dan untuk Tahun 2020 sebesar 65% dan pada Tahun 2021 sampai Tahun 2023 sebesar 90%.

Gambar 2.66 Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2019 – 2023

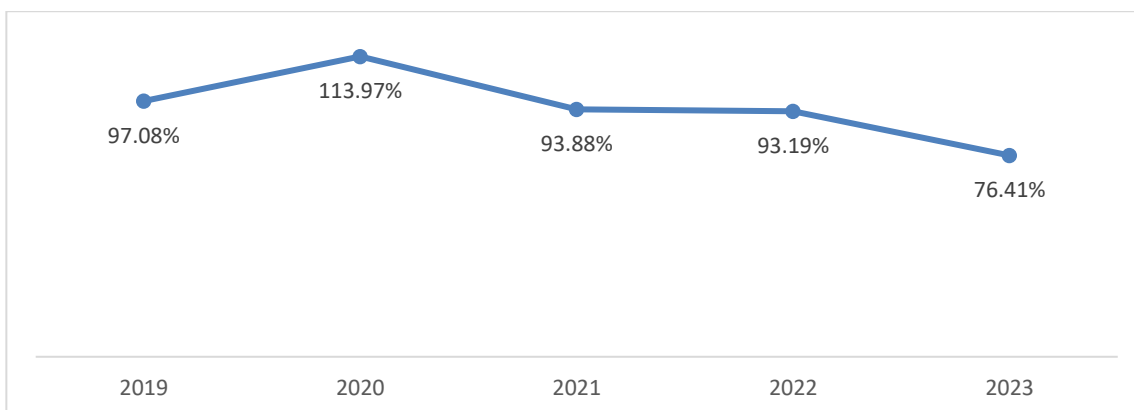


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## C. Keuangan

### 1. Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah

Gambar 2.67 Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 – 2023



Sumber :BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2023.

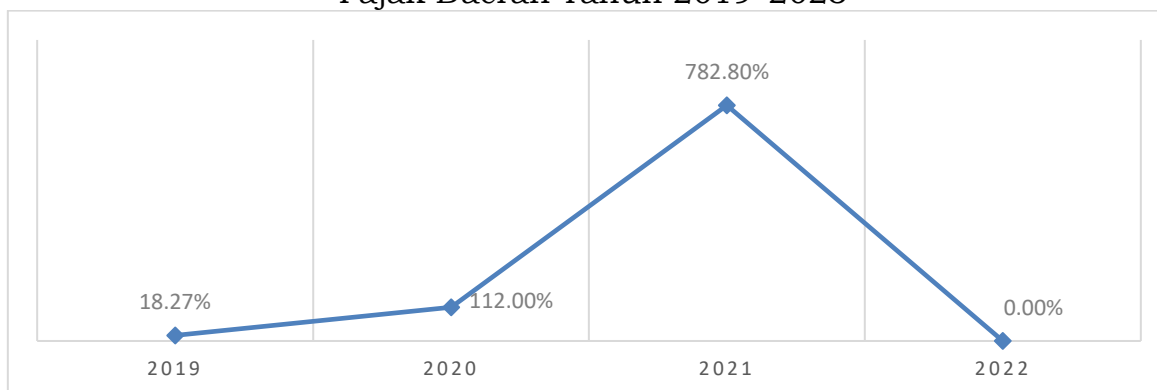
Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sebesar 97,08% dan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan ke angka 113,97% pada Tahun 2021 menjadi

93,88% dan pada Tahun 2022 menjadi 93,19% , pada Tahun 2023 sebesar 76,41%

## 2. Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Dairi pada Tahun 2017 sebesar 32,68%, pada Tahun 2018 sebesar 1,97%, sebesar 18,27% pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebesar 112% pada Tahun 2021 sebesar 782,80% dan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 data tidak tersedia.

Gambar 2.68 Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019–2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## 3. Opini Laporan Keuangan

Tabel 2.67 Opini Laporan Keuangan Tahun 2019– 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : LPPD.Dairi 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat opini laporan keuangan Kabupaten Dairi dari Tahun 2019 – 2023 adalah dengan WTP setiap tahunnya.

## 4. Penyusunan APBD Tepat Waktu

Tabel 2.68 Penyusunan APBD Tepat Waktu Tahun 2019– 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
31 Desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan untuk Penyusunan APBD Kabupaten Dairi dari Tahun 2019– 2023 adalah Tepat waktu setiap tahunnya.

## 5. Penyusunan LKPD Tepat Waktu

Tabel 2.69 Penyusunan LKPD Tepat Waktu Tahun 2019– 2023

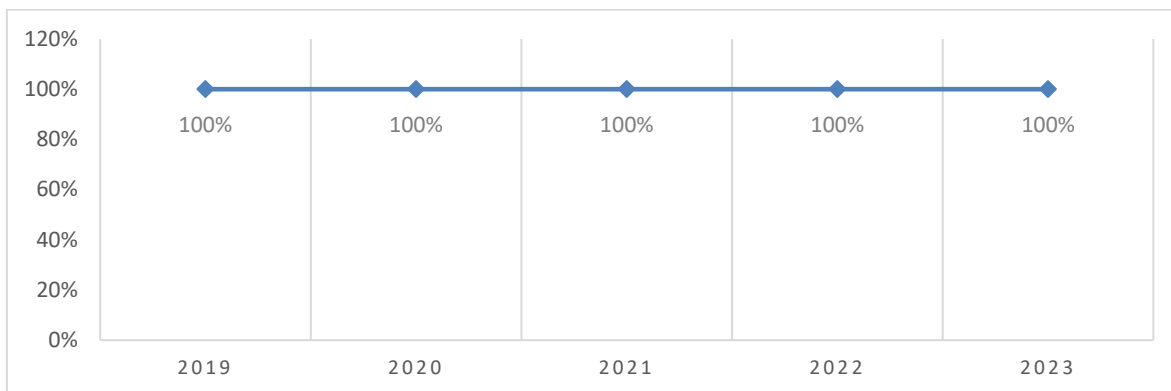
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
31 Maret	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan untuk Penyusunan APBD Kabupaten Dairi dari Tahun 2019–2023 adalah tepat waktu setiap tahunnya.

## 6. Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS

Gambar 2.69 Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS Kabupaten Dairi pada Tahun 2019–2023 adalah 100% setiap tahunnya.

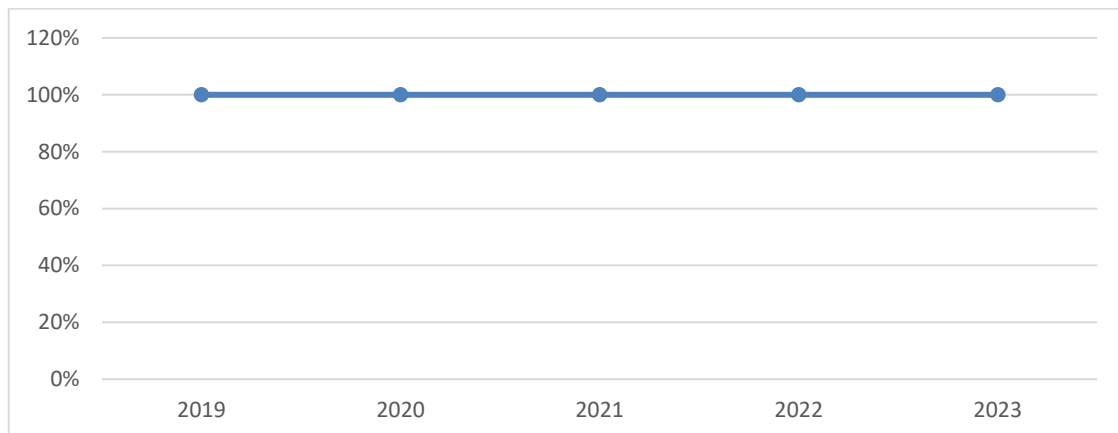
### D. Aparatur dan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

## 1. Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin

Gambar 2.70 Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin Tahun 2019–2023



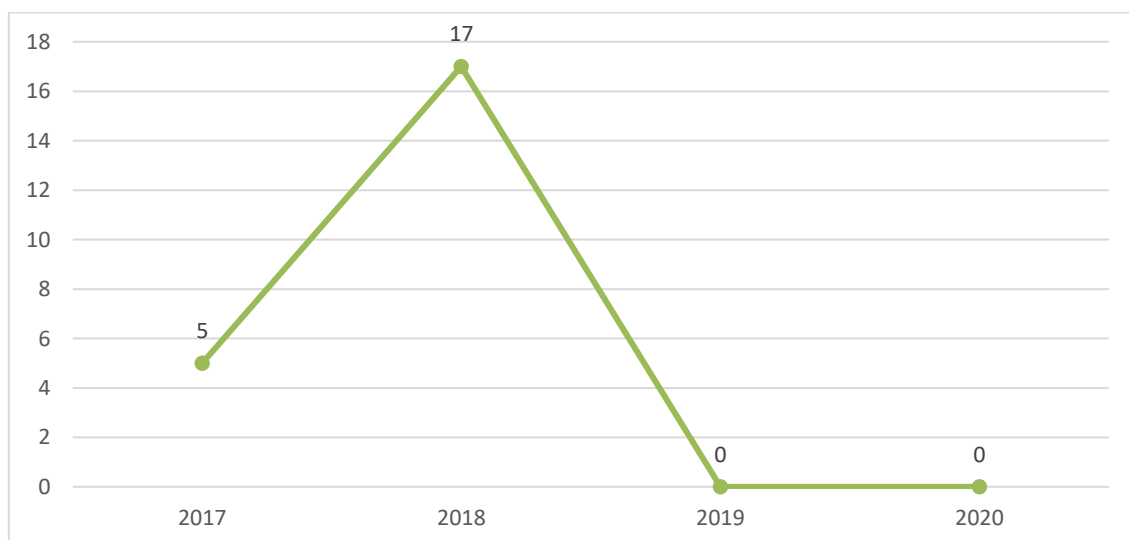
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 – 2020 adalah tercapai 100 % setiap tahunnya, dan pada Tahun 2021-2023 tercapai 100%

## 2. Jumlah Aparatur yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat kepemimpinan Kabupaten Dairi pada Tahun 2017 sebanyak 5 orang, sebanyak 17 orang pada Tahun 2018 untuk Tahun 2019-2023 data tidak tersedia.

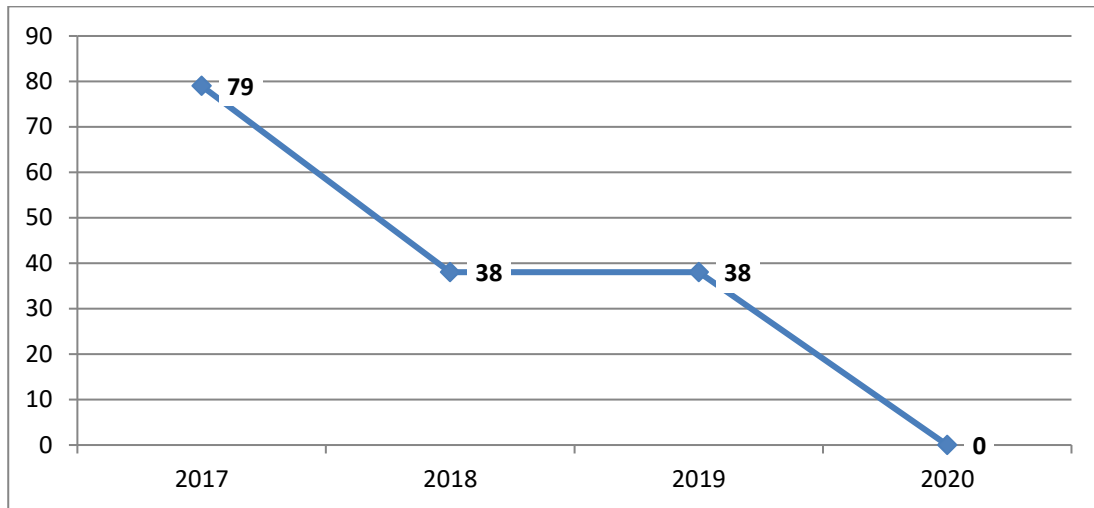
Gambar 2.71 Jumlah Aparatur yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan Tahun 2017–2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

### 3. Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)

Gambar 2.72 Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG) Tahun 2017–2023

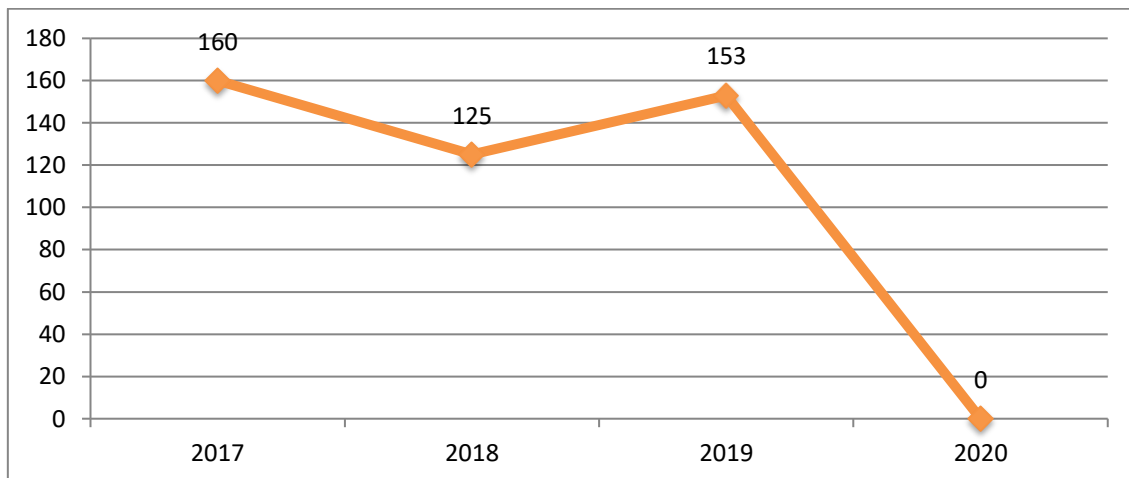


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Banyaknya guru diklat penilaian kinerja guru (PKG) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2017 sebanyak 79 Orang, sebanyak 38 Orang pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 sebanyak 38 Orang dan untuk Tahun 2020-2023 data tidak tersedia.

### 4. Jumlah PNS yang Diklat Fungsional

Gambar 2.73 Jumlah PNS yang Diklat Fungsional Tahun 2017 – 2023

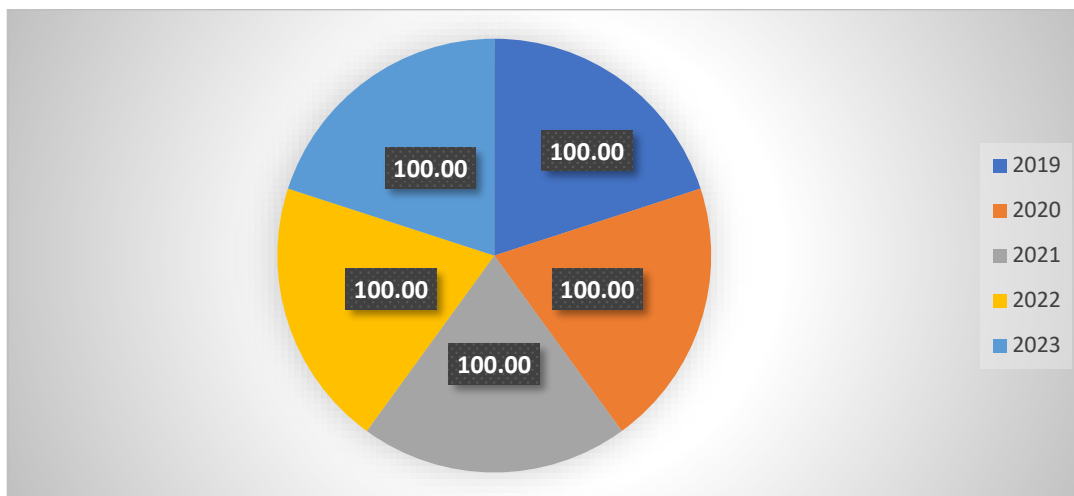


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional pada Tahun 2017 sebanyak 160 Orang, sebanyak 125 Orang pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 sebanyak 153 Orang dan untuk Tahun 2020-2023 data tidak tersedia.

## E. Capaian Terlayannya Masyarakat Dalam Mengurus IMB

Gambar 2.74 Capaian Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB Tahun 2019-2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB dari Tahun 2019-2023 tercapai 100%.

## F. Sosial

Untuk mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* pada aspek penurunan jumlah penduduk miskin melalui program pengentasan kemiskinan tertera pada Point Pertama, *no poverty*, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; Kedua, *zero hunger*, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, maka sentuhan pelayanan sosial terhadap keluarga miskin dan para PMKS umumnya adalah sesuatu yang urgen dilaksanakan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah.

Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada

pelambatan penurunan kemiskinan. Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik. Ketersediaan layanan dasar (*supply side*), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu. Penyelenggaraan perlindungan sosial dengan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan. Program asistensi sosial temporer berbasis individu, kelompok ataupun institusi yang tertata bagi kelompok masyarakat marjinal, korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi yang mendukung produktivitas.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI NO. 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan SPM lama dan tidak dipakai lagi, dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2), Dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 26), bahwa Jenis SPM Sosial Kabupaten/Kota:

- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tunasosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

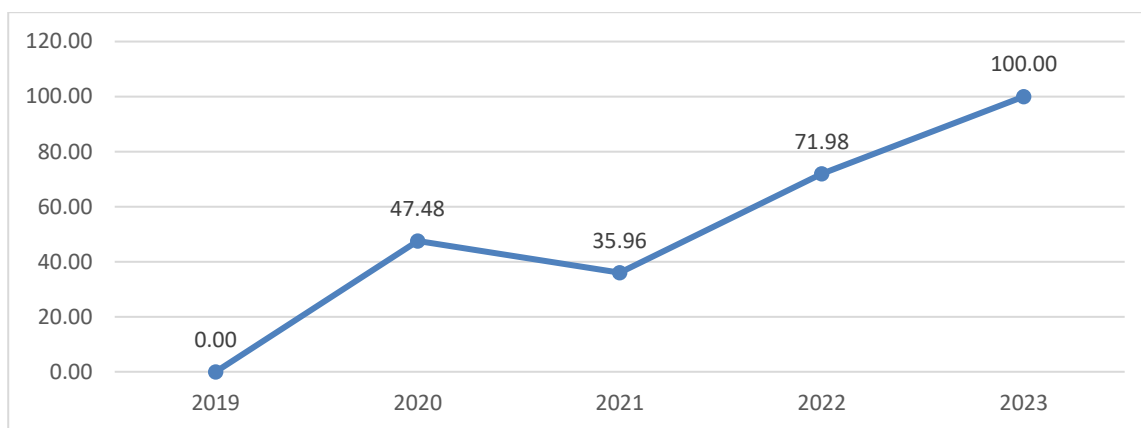
#### **1. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial**

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai mana dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS, Pembangunan kesejahteraan social ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan

dan profesionalisme lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial guna untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.75 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023



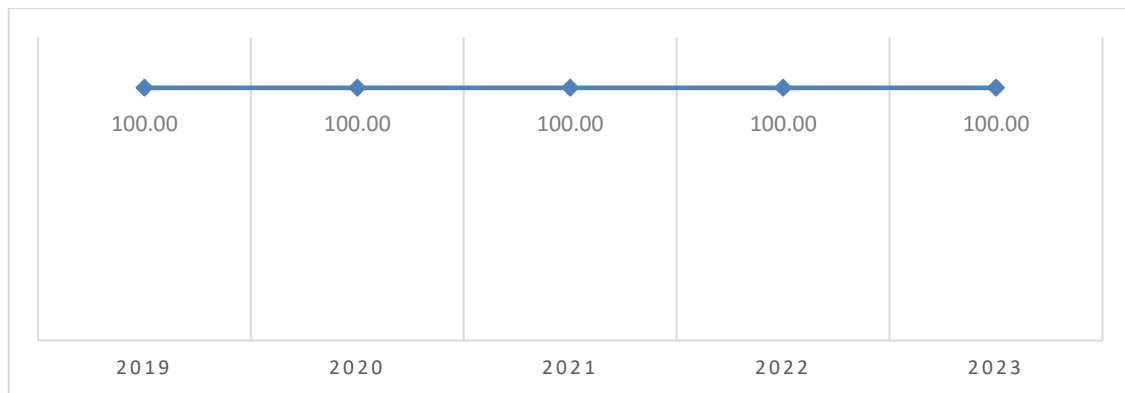
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi pada Tahun 2020 sebesar 47,48 kelompok dan Tahun 2021 sebanyak 35,96 kelompok, namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2022 meningkat menjadi 71,98% dan meningkat kembali pada Tahun 2023 menjadi 100%

## **2. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun, perkembangan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

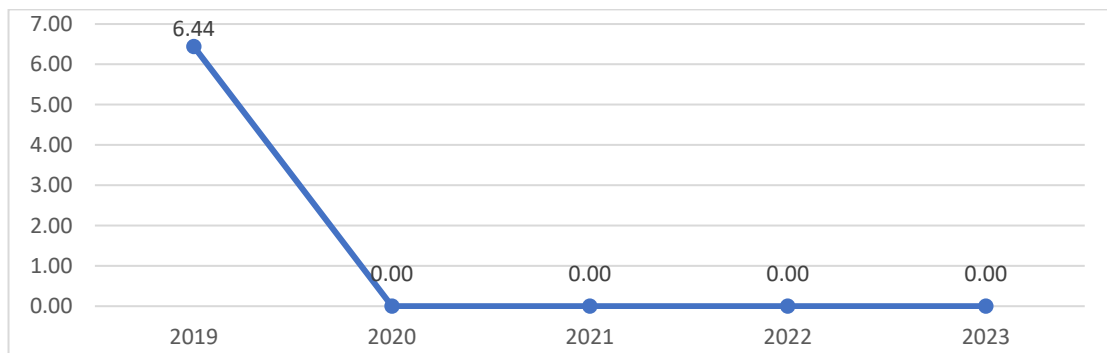
Gambar 2.76 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2019-2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

#### 4. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial

Gambar 2.77 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial Tahun 2019 -2023



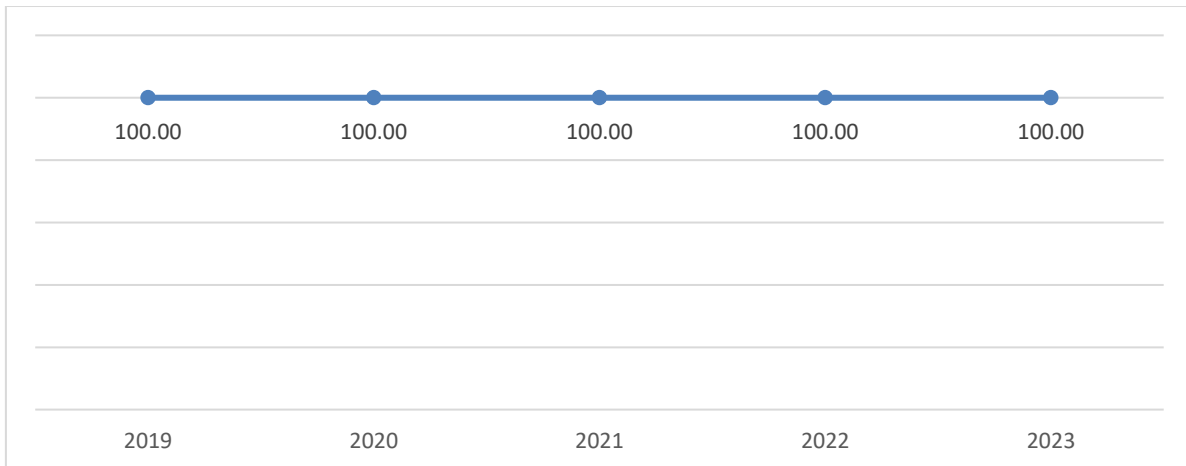
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial di kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sebesar 6,44% dan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 data tidak tersedia.

#### 5. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan bahwa persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 – 2023 adalah 100%.

Gambar 2.78 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2019-2023



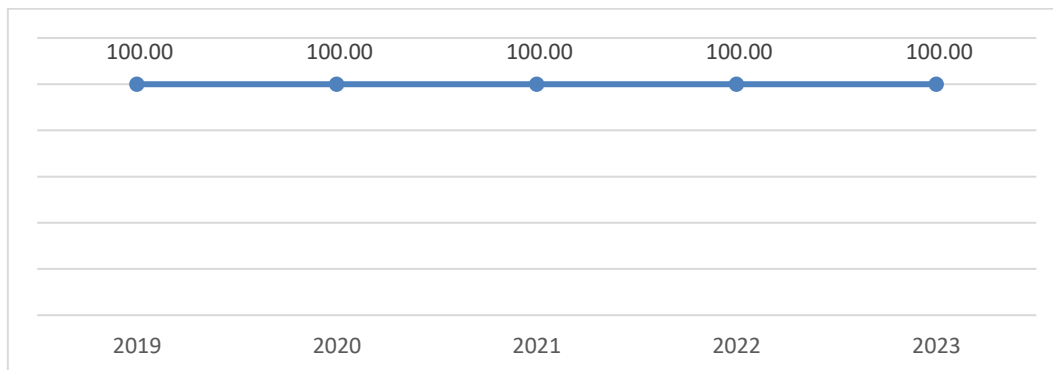
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## G. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1. Penanganan Pemberdayaan Perempuan

Persentase penanganan pemberdayaan perempuan dari Tahun 2019-2023 adalah 100%.

Gambar 2.79 Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2019-2023

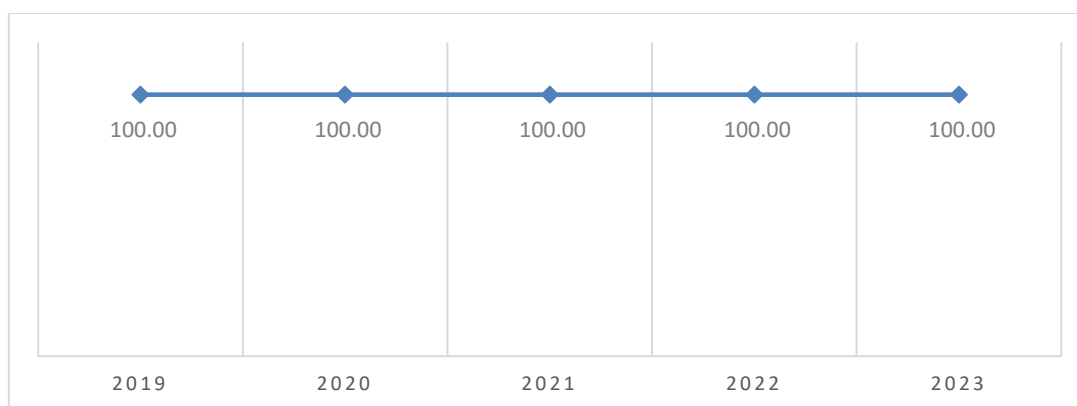


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

### 2. Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat pelayanan komprehensif dari Tahun 2019-2023 adalah 100%.

Gambar 2.80 Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif Tahun 2019-2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## H. Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan.

### 1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, data Tahun 2022 tidak tersedia, sedangkan pada Tahun 2023 ketersediaan Energi per kapita sebesar 92,32% dan jumlah ketersediaan protein per kapita adalah sebesar 97%.

Tabel 2.70 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Energi Per Kapita (%)	63,13	100,63	64,47	n/a	92,32%
Protein Per Kapita (%)	81,75	95,63	71,04	n/a	97,00%

Sumber : RPD Kab.Dairi 2025-2026

## I. Pertanahan

Status kepemilikan tanah di Kabupaten Dairi terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perkembangannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71 Status Kepemilikan Tanah di Kabupaten Dairi, 2019-2023

Tahun	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Jumlah
2019	2.966	5	29	3
2020	158	132	133	423
2021	3.291	11	45	3.347
2022	194	7	181	382
2023	2156	9	132	2297

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

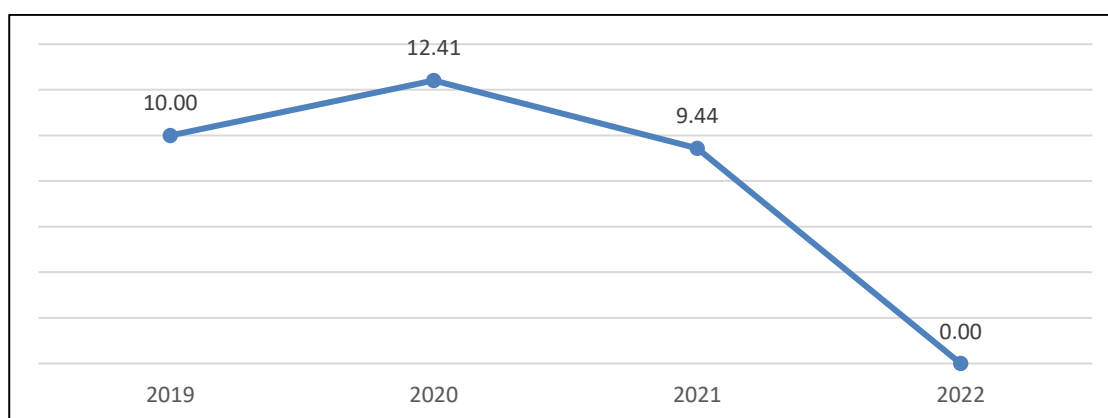
Status kepemilikan tanah di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019-2023 terbesar merupakan hak milik. Pada Tahun 2023 status kepemilikan dengan status hak milik sebanyak 2.156, hak guna bangunan 9, hak pakai sebanyak 132 dan hak pakai sebanyak 2.297 buah.

## J. Lingkungan Hidup

### 1. Lahan Kritis

Penanganan lahan kritis dan sumber daya air merupakan hal yang kompleks, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor, baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air dirasakan semakin meningkat.

Gambar 2.81 Penurunan Lahan Kritis Tahun 2019-2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

## 2. Persampahan

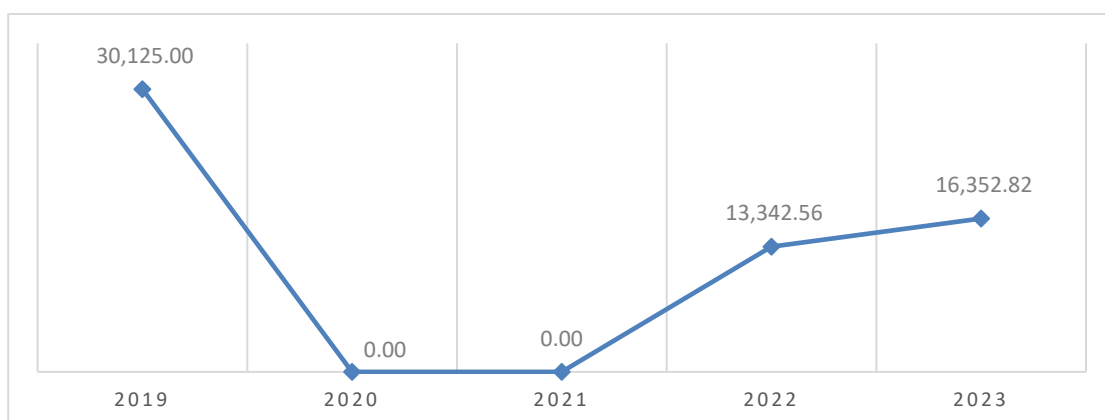
Secara umum cara pembuangan sampah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah pembuangan secara individual, seperti membuang sampah secara individu dengan metode dan cara tersendiri, kedua adalah dengan membuang sampah secara kolektif yang dikelola oleh pemerintah.

Cara pembuangan sampah di Kabupaten Dairi diarahkan secara kolektif dengan menyediakan tempat sampah, selanjutnya dibuang pada tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Pelayanan persampahan di kota-kota dan IKK di Kabupaten Dairi termasuk dalam kategori penanganan yang prioritas untuk diantisipasi, mengingat pelayanan ini termasuk pelayanan utama dari aspek penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan.

Pengelolaan persampahan ini terkait erat dengan luas dan jangkauan layanan, karakteristik manajemen persampahan, kondisi fisik TPA, prasarana dan sarannya serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan yang ada. Untuk Tahun 2022 jumlah sampah yang berhasil ditangani adalah sebanyak 13.342,56 Ton dari total 46.541,88 Ton timbunan sampah kabupaten atau sebesar 28,67% dan pada Tahun 2023 terjadi peningkatan penanganan sampah yaitu sebanyak 16.352,82 Ton sampah atau sebesar 34,34%.

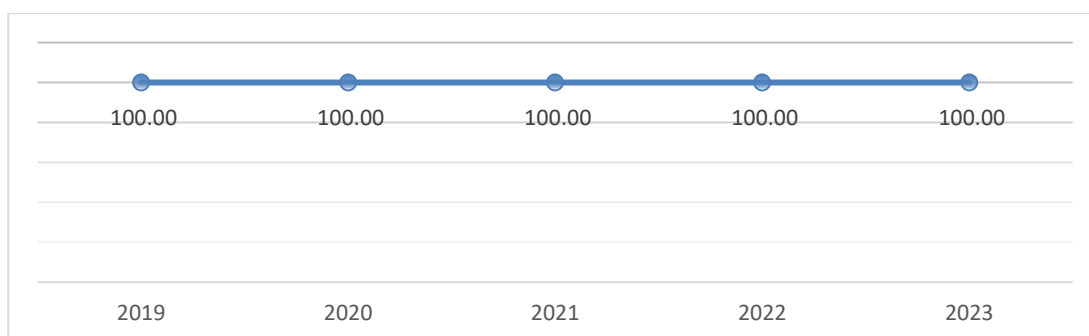
Gambar 2.82 Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

### 3. Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Gambar 2.83 Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Tahun 2019- 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

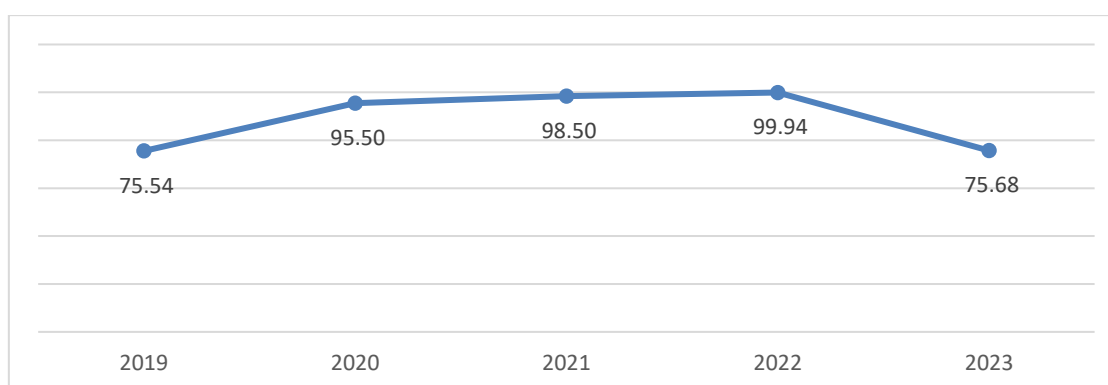
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan di Kabupaten Dairi dari Tahun 2019- 2023 adalah 100%.

#### K. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sebesar 75,54% dan pada Tahun 2020 sebesar 95,50%, pada Tahun 2021 sebesar 98,50% dan pada Tahun 2022 sebesar 99,94% dan pada Tahun 2023 sebesar 75,68%.

Gambar 2.84 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2019 - 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2022

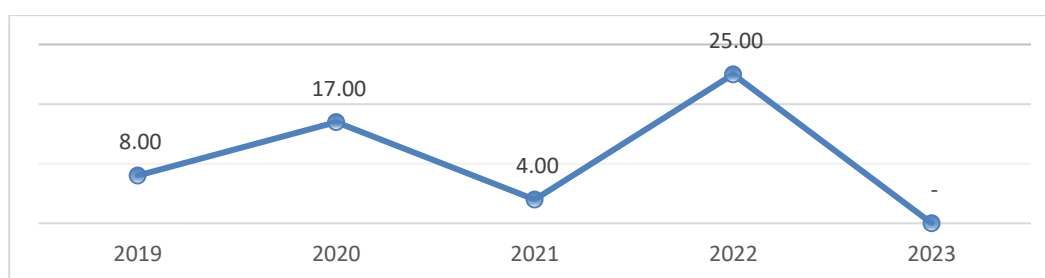
## L. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

### 1. Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan banyaknya desa yang terfasilitasi dan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebanyak 8 desa pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebanyak 17 desa, pada Tahun 2021 sebanyak 4 desa dan pada Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25 desa.

Gambar 2.85 Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2019 – 2023



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

### 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

### **3. Posyandu Aktif**

Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

### **4. LSM aktif**

LSM, ORMAS dan OKP aktif di Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan animo masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat tinggi.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung melalui beberapa program, yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program peningkatan peran perempuan di pedesaan, serta program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

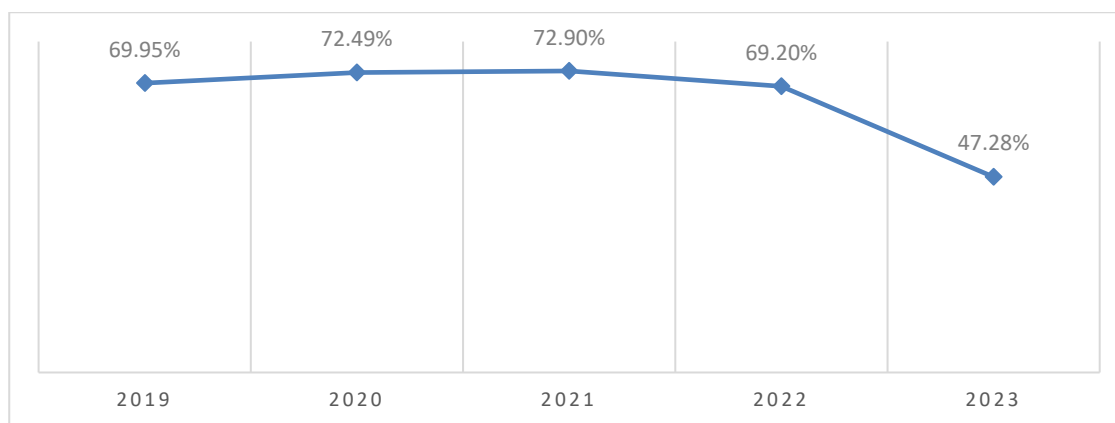
### **M. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tujuan dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengendalian penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana. Penyelenggaraan program keluarga berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak.

## 1. Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat cakupan pasangan usia subur menjadi peserta keluarga berencana aktif di Kabupaten Dairi sebesar 69,95% pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebesar 72,49%, pada Tahun 2021 sebesar 72,90% dan pada Tahun 2022 menjadi 69,20% dan pada Tahun 2023 jumlahnya menjadi 47,28%.

Gambar 2.86 Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif Tahun 2019–2023

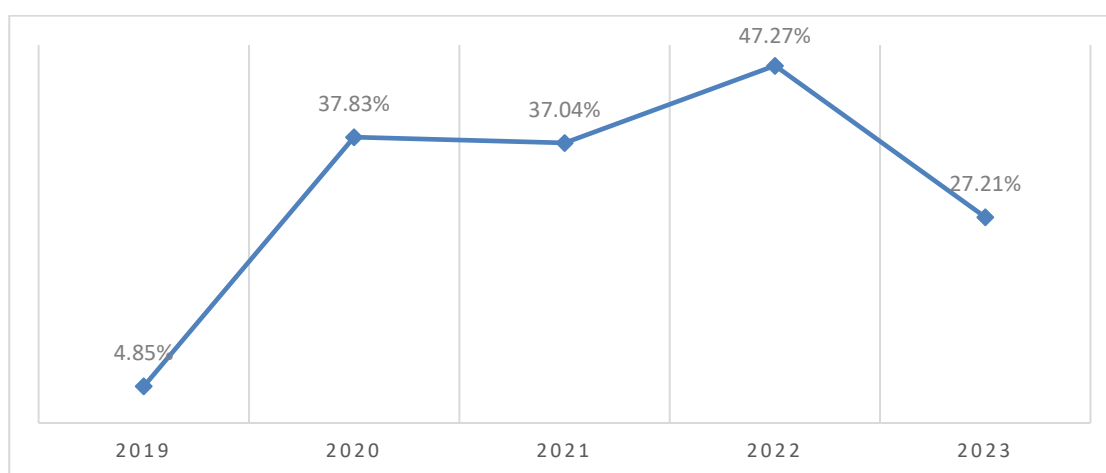


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## 2. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB Tapi Tidak Terpenuhi

Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tapi tidak terpenuhi sebesar 4,85% pada Tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 37,83%, pada Tahun 2021 sebesar 37,04% dan pada Tahun 2022 sebesar 47,27%, dan pada Tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi sebesar 27,21%.

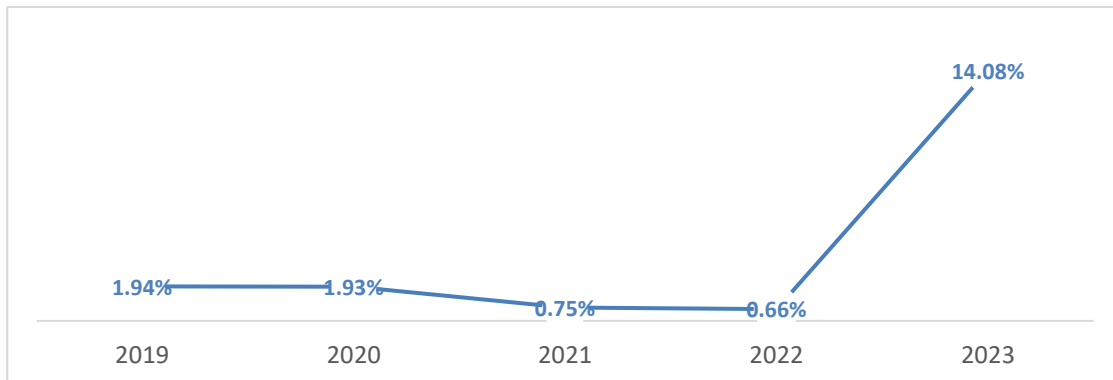
Gambar 2.87 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB tapi Tidak Terpenuhi Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

### 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Gambar 2.88 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun pada Tahun 2019 – 2023



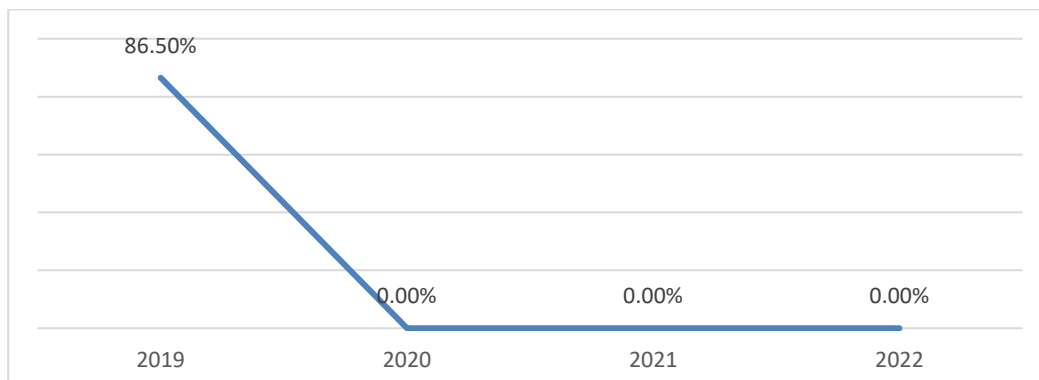
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sebesar 1,94%, sebesar 1,93% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 0,75% dan pada Tahun 2022 sebesar 0,66%, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 14,08%.

### 4. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB di Kabupaten Dairi sebesar 86,50% pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 data tidak tersedia.

Gambar 2.89 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Tahun 2019 – 2023

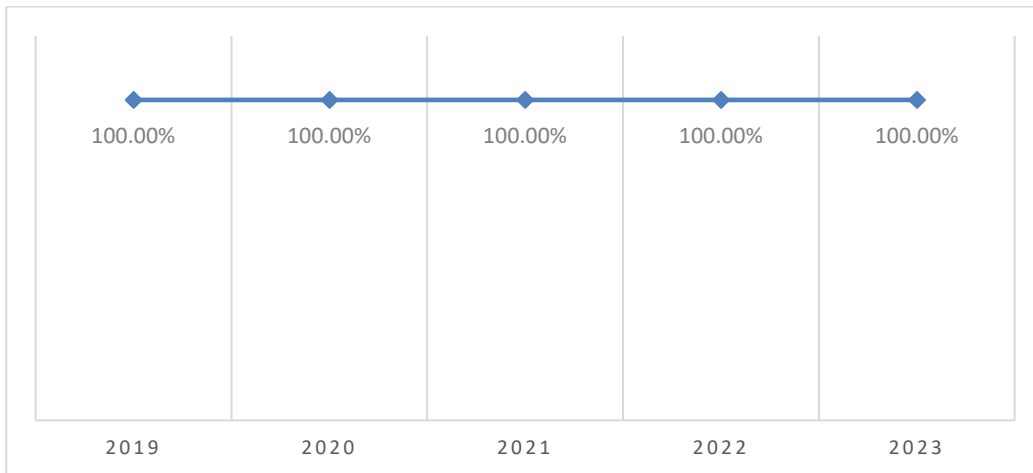


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## 5. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 – 2023 sebesar 100%.

Gambar 2.90 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2019 – 2023

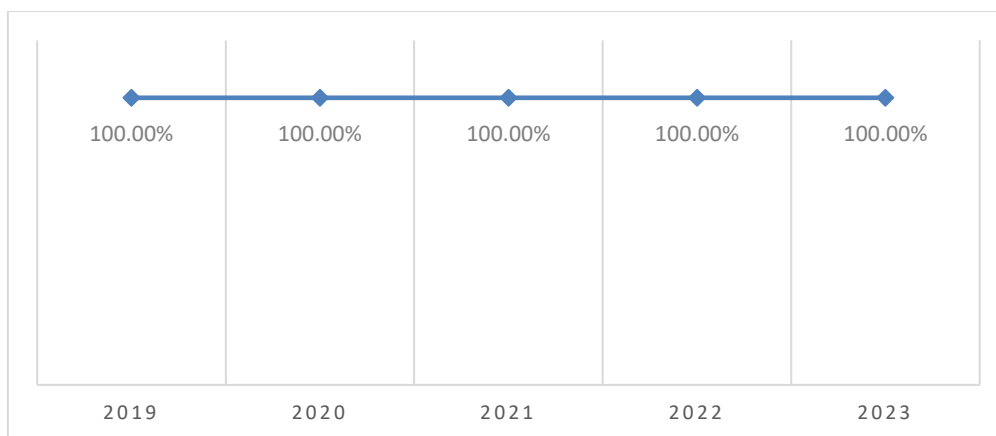


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## N. Perhubungan

### 1. Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Gambar 2.91 Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2019- 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

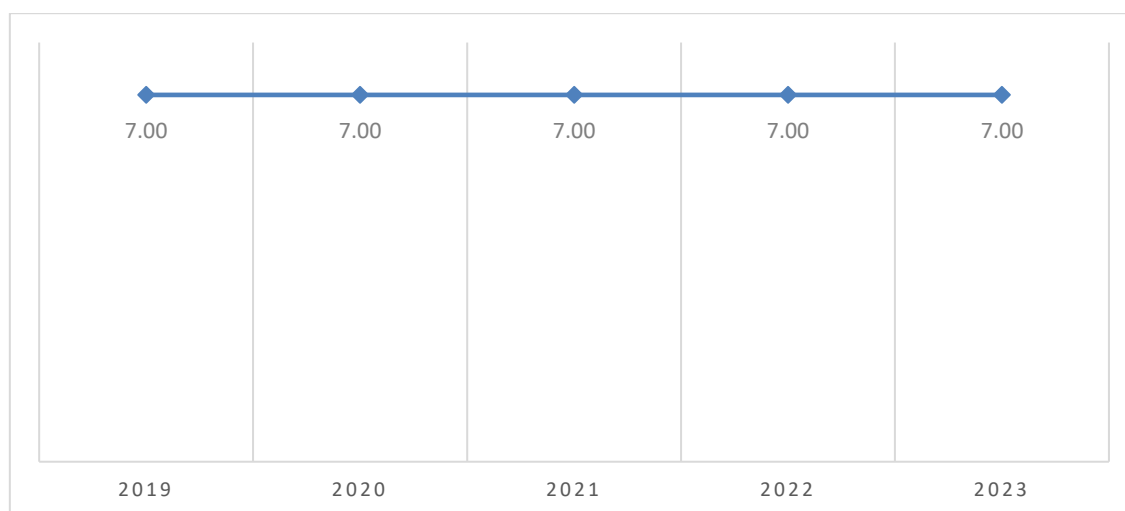
Dari gambar diatas dapat dilihat persentase penanganan fasilitas keselamatan lalu lintas di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019- 2023 sebesar 100%.

**O. Komunikasi dan Informatika**

**1. Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)**

Dari gambar dibawah dapat dijelaskan jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi (SP4N) di Kabupaten Dairi dari Tahun 2019 – 2023 adalah 7 media desiminasi informasi.

Gambar 2.92 Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N) Tahun 2019– 2023



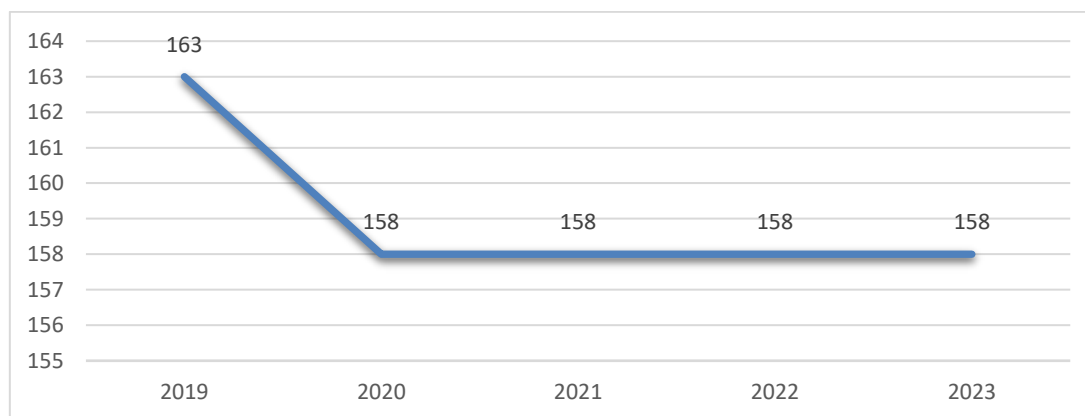
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

**P. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**1. Jumlah Koperasi Aktif**

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi pada Tahun 2016 sebanyak 25 unit, sebanyak 67 unit pada Tahun 2019 sebanyak 163 unit dan pada Tahun 2020 sampai Tahun 2023 ada sebanyak 158 unit koperasi aktif, jumlah tertinggi adalah pada kelompok koperasi serba usaha sebanyak 101 unit.

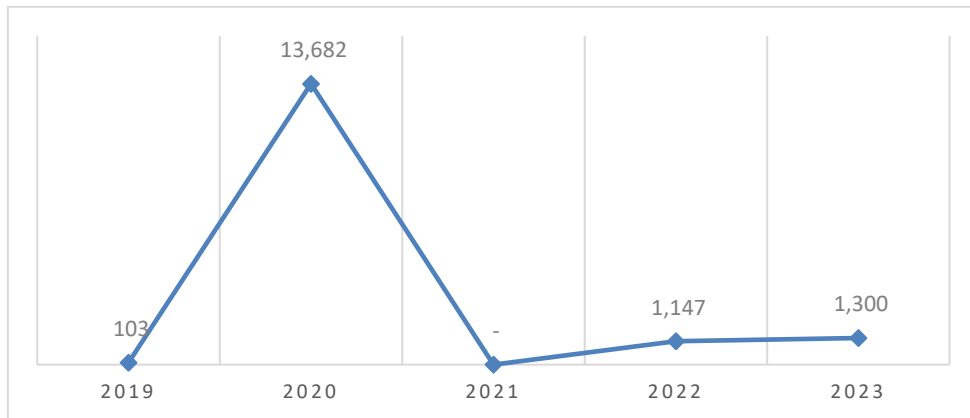
Gambar 2.93 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2019 – 2023



Sumber BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

## 2. Jumlah Usaha Mikro

Gambar 2.94 Jumlah Usaha Mikro Tahun 2019 – 2023



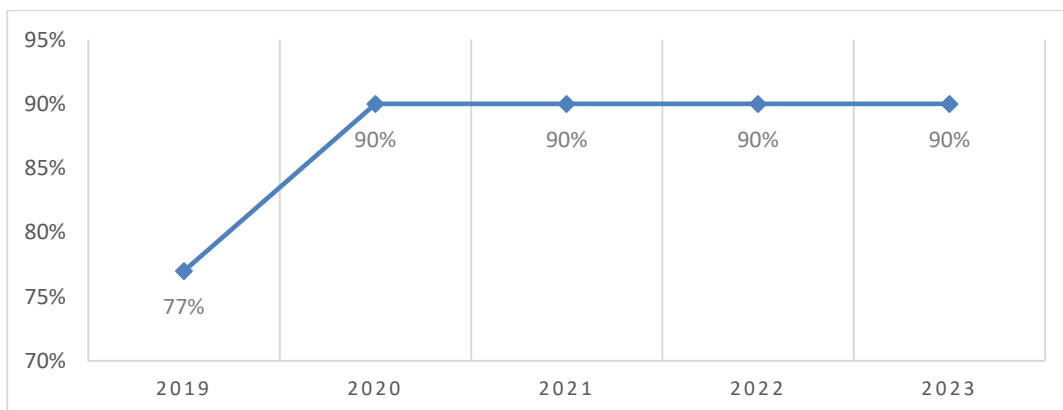
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat jumlah usaha mikro di Kabupaten Dairi, pada Tahun 2019 sebanyak 103 unit, sebanyak 103 unit pada Tahun 2020 ada sebanyak 13.682 usaha, pada Tahun 2021 data tidak tersedia dan pada Tahun 2022 terdapat 1.147 usaha dan pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 1.300 usaha.

## Q. Penanaman Modal

### 1. Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP

Gambar 2.95 Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP Tahun 2019 – 2023



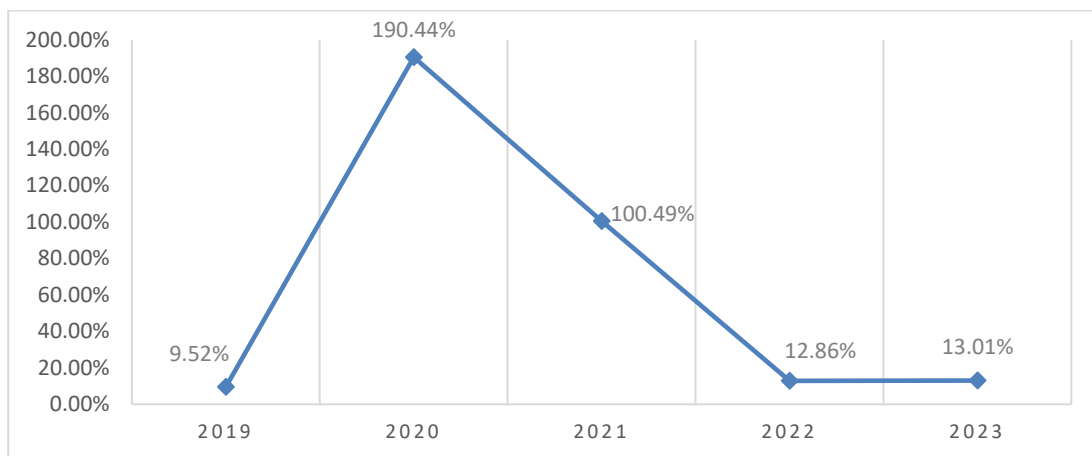
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP di Kabupaten Dairi sebesar 76,75% pada Tahun 2019 dan sebesar 90% pada Tahun 2020 sampai dengan 2023.

## 2. Persentase Peningkatan Investasi

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan persentase peningkatan investasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2016 sebesar 3,00%, sebesar 19,25% pada Tahun 2017, pada Tahun 2018 sebesar 17,42%, sebesar 9,52% pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebesar 190,44%, pada Tahun 2021 sebesar 100,49% dan pada Tahun 2022 sebesar 12,86%, terjadi peningkatan pada Tahun 2023 menjadi 13,01%

Gambar 2.96 Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2019 – 2023

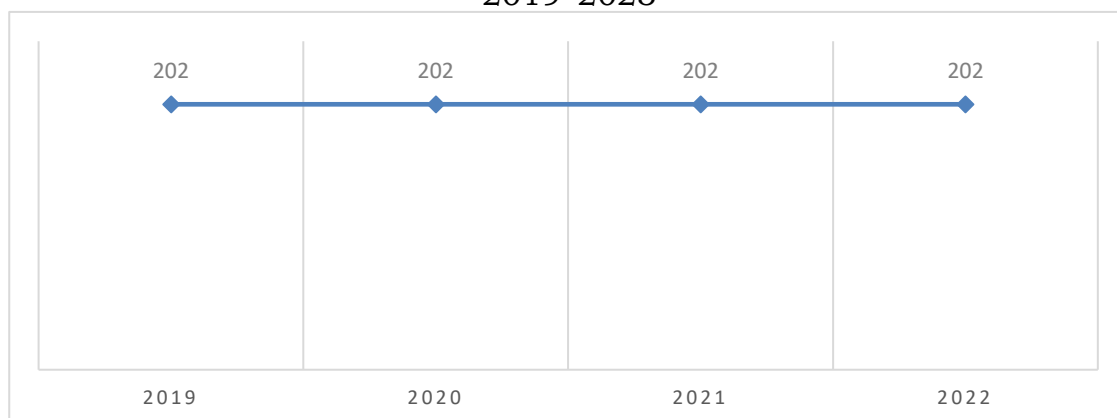


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## 3. Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan

Dari gambar di bawah dapat dilihat banyaknya jumlah izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 202 unit data Tahun 2023 tidak tersedia.

Gambar 2.97 Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan Tahun 2019–2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## R. Kepemudaan dan Olahraga

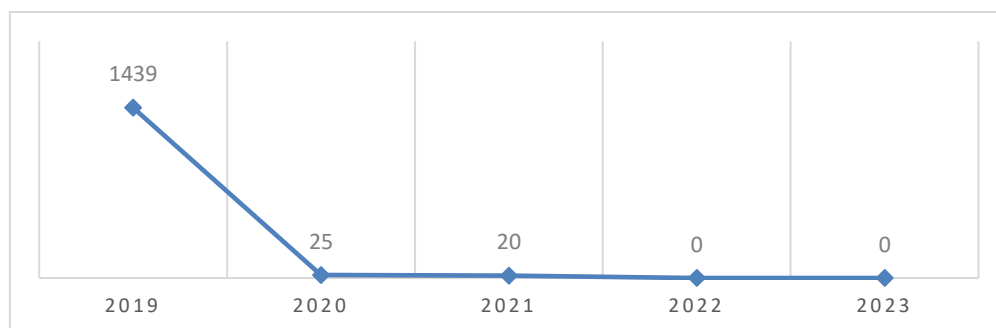
Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program, yaitu peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi pemuda dengan harapan pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup menjadi *entrepreneur* sejati yang dapat bertahan dalam persaingan di era global.

### 1. Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan

Dari gambar di bawah dapat dilihat jumlah terfasilitasinya pelayanan kepemudaan di Kabupaten Dairi sebanyak 1.439 pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebanyak 25 orang, pada Tahun 2021 sebanyak 20 orang dan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 data tidak tersedia.

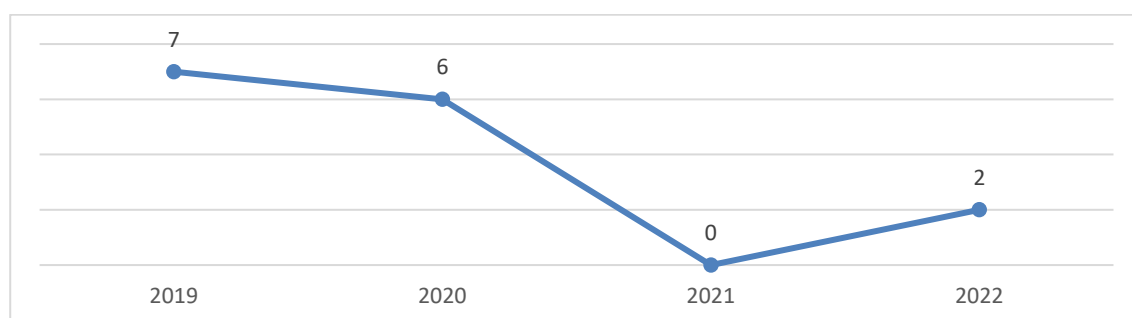
Gambar 2.98 Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

### 2. Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga

Gambar 2.99 Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tahun 2019 – 2023

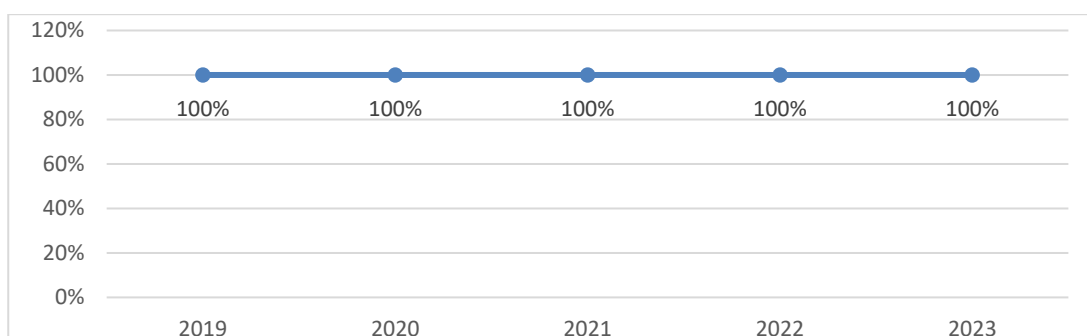


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Banyaknya kompetisi olah raga yang terselenggara di Kabupaten Dairi sebanyak 7 cabang olah raga pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebanyak 6 cabang olah raga, pada Tahun 2021 sebanyak 0 cabang olah raga dan sebanyak 2 cabang olah raga pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 data tidak tersedia.

### 3. Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga

Gambar 2.100 Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

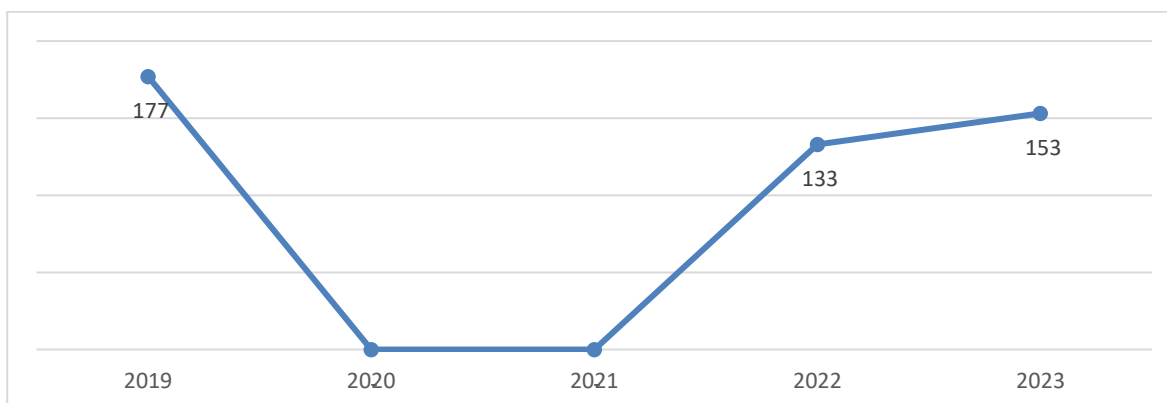
Persentase penanganan gedung olah raga/lapangan olah raga di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 – 2023 sebesar 100%.

### S. Perpustakaan dan Kearsipan

#### 1. Jumlah Arsip Yang Dilestarikan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah arsip yang dilestarikan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sebanyak 177 arsip dan Tahun 2020 sampai Tahun 2021 data tidak tersedia. Pada Tahun 2022 jumlah yang tersedia adalah 133 arsip, pada Tahun 2023 jumlahnya sebanyak 153 arsip.

Gambar 2.101 Jumlah Arsip Yang Dilestarikan Tahun 2019 – 2023

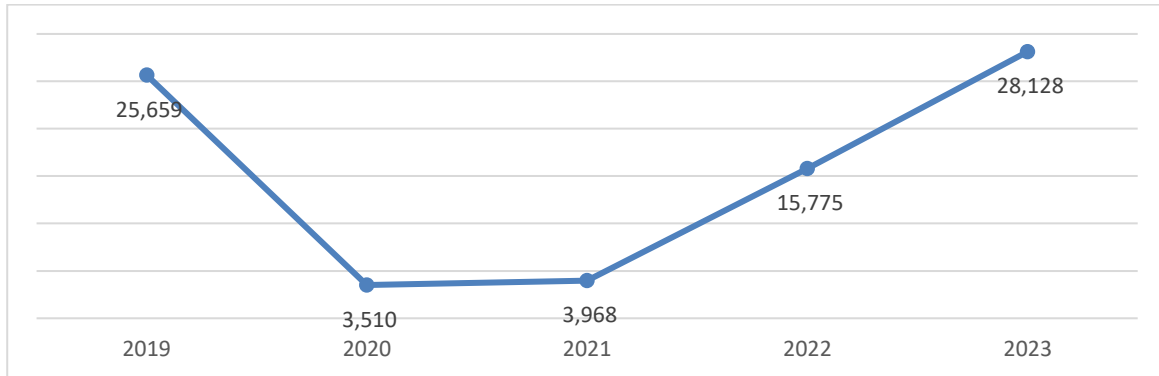


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## 2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Dairi sebanyak 25.659 Orang pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebanyak 3.510, pada Tahun 2021 sebanyak 3.968 orang dan pada Tahun 2022 sebanyak 15.775 orang, kemudian pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 28.128 orang.

Gambar 2.102 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019 – 2023

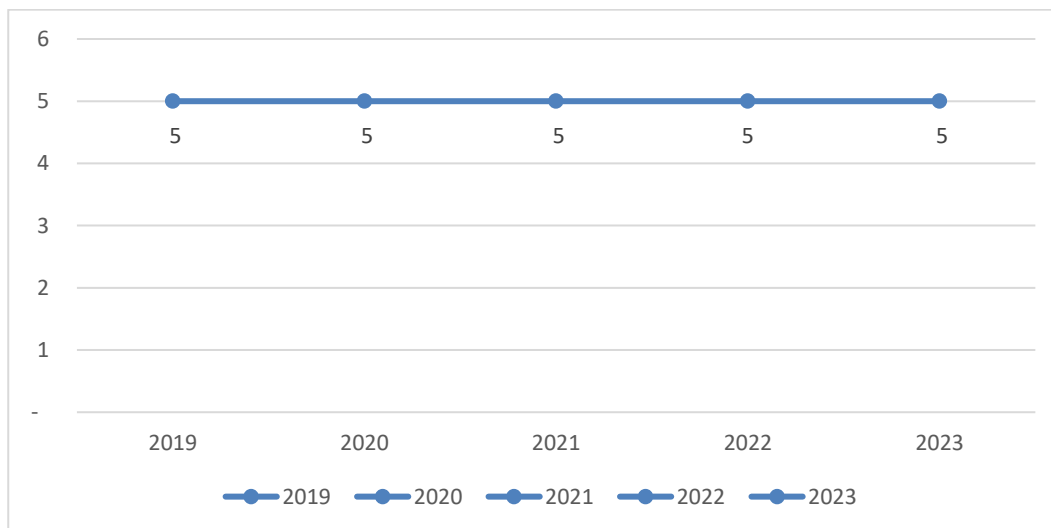


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## T. Kebudayaan

### 1. Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang Terfasilitasi

Gambar 2.103 Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang Terfasilitasi Tahun 2019 – 2023



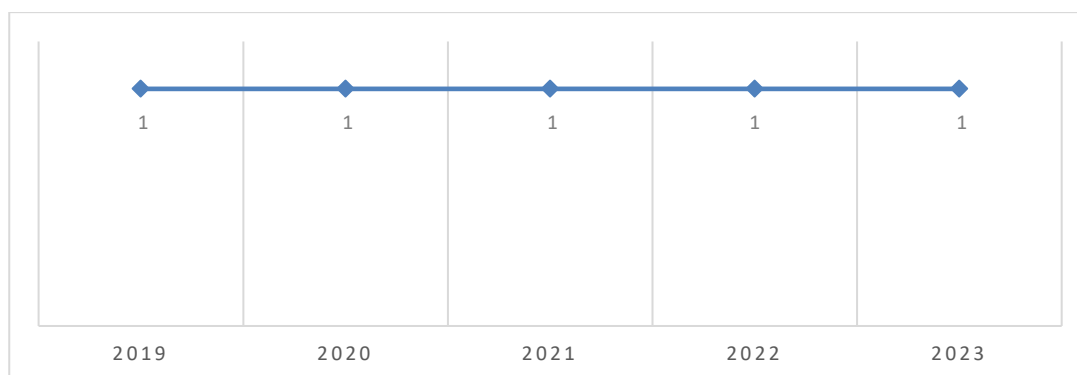
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah organisasi/lembaga yang terfasilitasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 – 2023 adalah sebanyak 5 organisasi.

## 2. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019– 2023 adalah sebanyak 1 unit.

Gambar 2.104 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## U. Pertanian

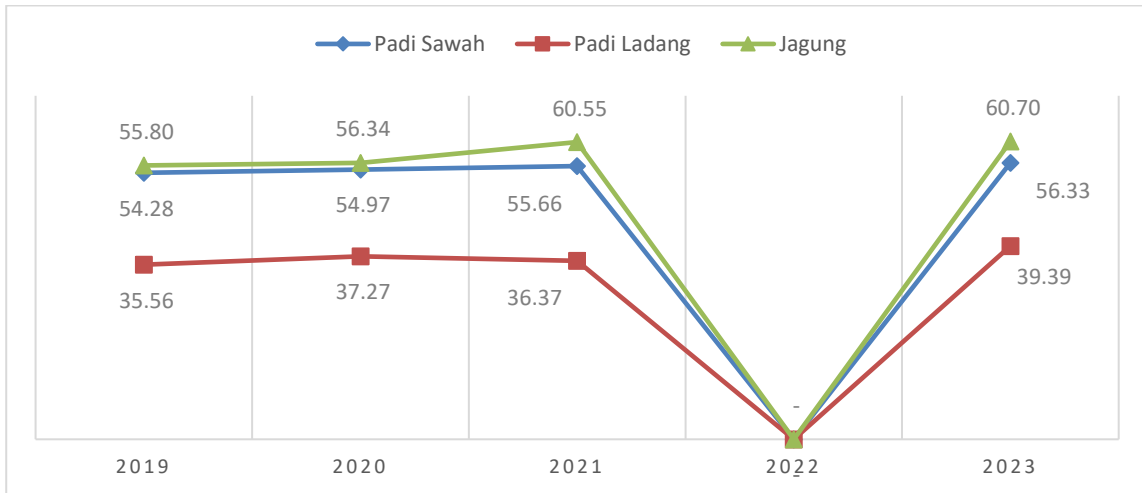
### 1. Tanaman Pangan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut padi sawah pada Tahun 2019 sebanyak 54,28 kw/ha dan pada Tahun 2020 produktivitas padi sawah menurun menjadi 54,97 kw/ha, lalu meningkat kembali pada Tahun 2021 menjadi 55,66 kw/ha dan pada Tahun 2022 data tidak tersedia dan masih dalam proses penghitungan.

Produktivitas tanaman pangan padi ladang pada Tahun 2019 sebanyak 35,56 kw/ha dan pada Tahun 2020 produktivitas padi ladang cenderung stabil dengan tahun sebelumnya dengan nilai 37,527 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi sedikit penurunan ke angka 36,37 kw/ha dan pada Tahun 2022 data tidak tersedia dan masih dalam proses penghitungan.

Produktivitas tanaman pangan jagung pada Tahun 2019 sebanyak 55,80 kw/ha dan pada Tahun 2020 produktivitas jagung cenderung stabil dengan tahun sebelumnya dengan nilai 56.34 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 60,55 kw/ha dan pada Tahun 2022 data tidak tersedia dan pada tahun 2023 produktivitas padi sawah 56,33 kw/ha, padi ladang menjadi 39,92 dan jagung menjadi 60,7.

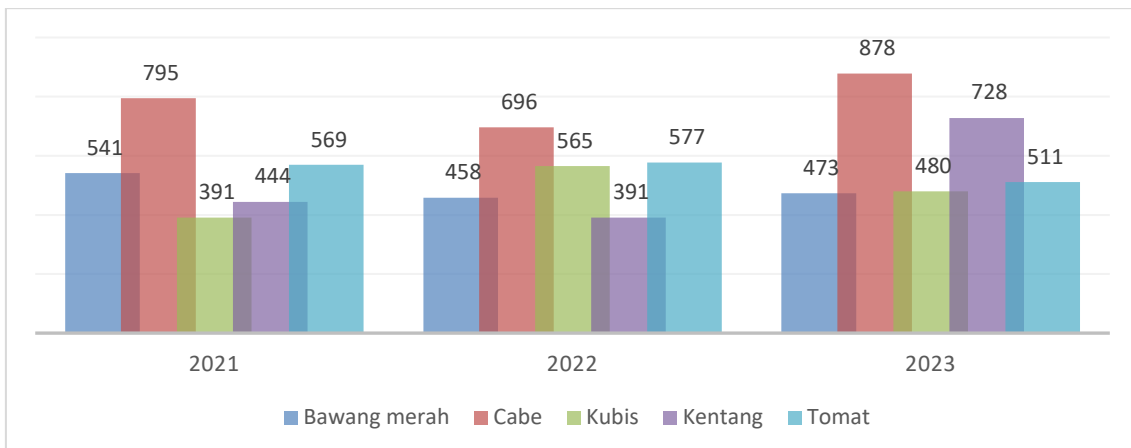
Gambar 2.105 Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

## 2. Hortikultura

Gambar 2.106 Luas panen sayur dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman Tahun 2021-2023 (Ha)

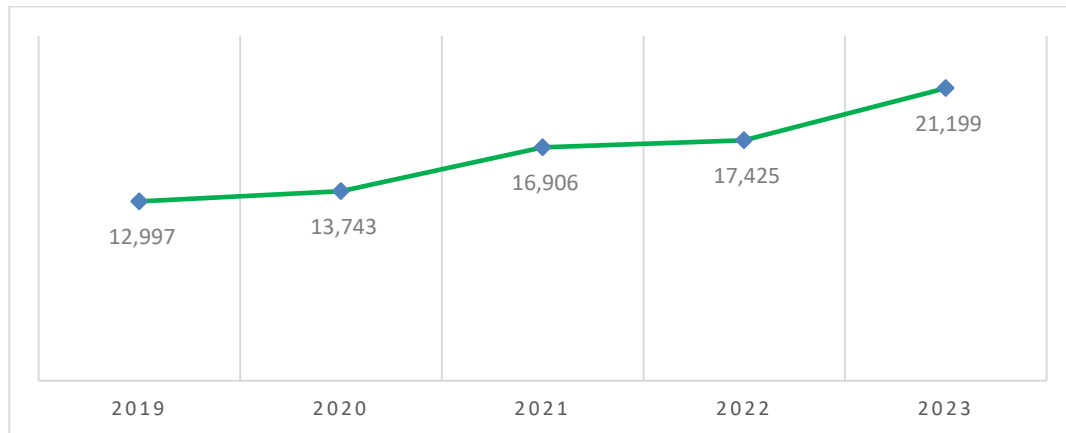


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

Luas panen tanaman sayur dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di kabupaten Dairi, pada Tahun 2021 produksi tanaman bawang merah sejumlah 541 ha, cabe 795 ha, kubis 391 ha, kentang 444 ha, tomat 569 ha. Pada Tahun 2022 produksi bawang merah adalah 458 ha, cabe 696 ha, kubis 565 ha, kentang 391 ha, tomat 577 ha. Pada Tahun 2023 produksi bawang merah adalah 473 ha, cabe 878 ha, kubis 480 ha, kentang 728 ha, dan tomat sebanyak 511 ha.

### 3. Tanaman Perkebunan Kopi

Gambar 2.107 Peningkatan Produksi Perkebunan Kopi Tahun 2019 – 2023 (ton)



Sumber : : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

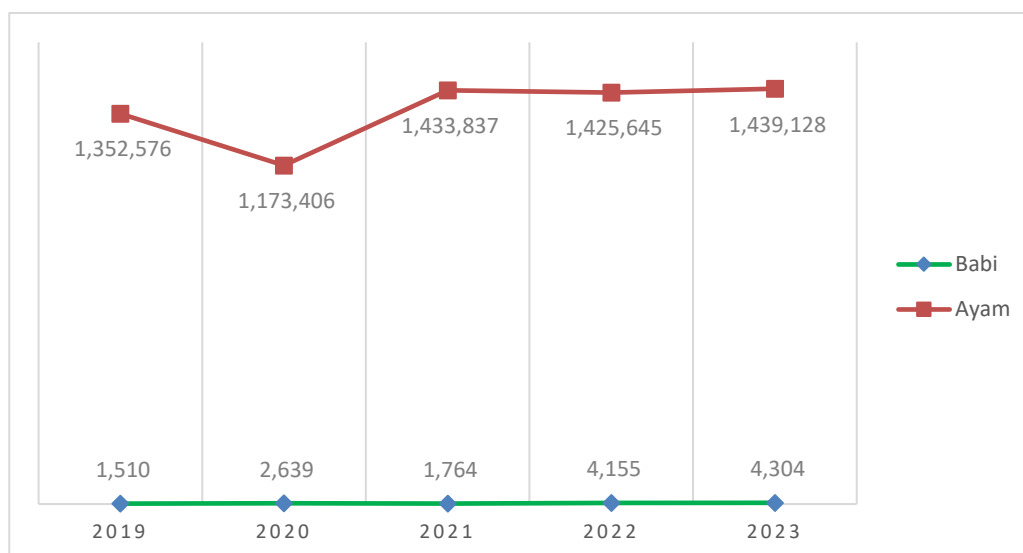
Dari gambar di atas dapat dilihat peningkatan produksi perkebunan kopi di Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2019 produksi kopi di Dairi sebesar 12.997 ton kemudian pada Tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi sebesar 13.743 pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 16.906 ton, pada Tahun 2022 produksi kopi sebesar 17.425 ton, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 21.199 ton yang terdiri dari kopi arabika sebesar 18.677,6 ton dan kopi robusta sebesar 2.521,6 ton

### 4. Peternakan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah populasi peternakan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut ternak Babi sebanyak 1.510 ekor/tahun pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebanyak 2.639 ekor/tahun, pada Tahun 2021 sebanyak 1.764 ekor/tahun, dan pada Tahun 2022 sebanyak 4.155 ekor/tahun, pada Tahun 2023 sebanyak 4.304 ekor/tahun

Jumlah populasi ternak ayam pada sebanyak 1.352.576 pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebanyak 1.173.406, pada Tahun 2021 sebanyak 1.433.837 ekor/tahun dan pada Tahun 2022 sebanyak 1.425.645 ekor/tahun, pada Tahun 2023 sebanyak 1.439.128 ekor/tahun.

Gambar 2.108 Jumlah Populasi Peternakan (ekor) Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2024.

## 5. Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/Ternak

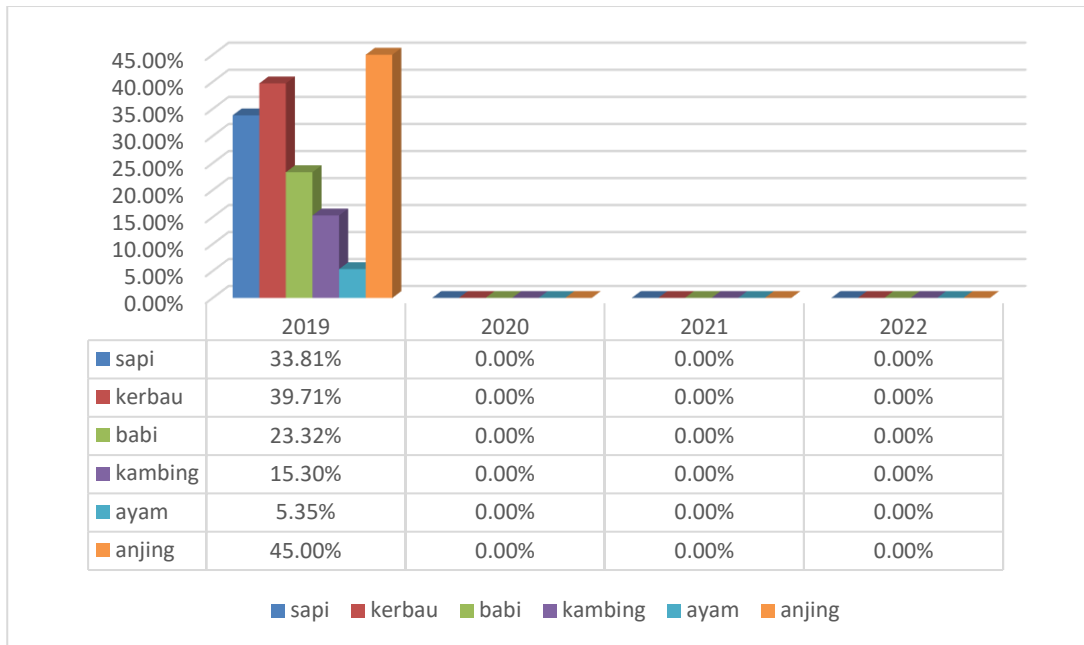
Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan persentase penanganan kesehatan hewan/ternak di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sebesar 33,81%, data Tahun 2020-2023 tidak tersedia

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak kerbau pada Tahun 2019 sebesar 39,71% data Tahun 2020-2023 tidak tersedia. Persentase penanganan kesehatan hewan/ternak babi pada Tahun 2019 sebesar 23,32%. data Tahun 2020-2023 tidak tersedia

Persentase penanganan kesehatan hewan/ternak kambing pada Tahun 2019 sebesar 15,30%. data Tahun 2020-2023 tidak tersedia. Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak ayam pada Tahun 2019 sebesar 5,35%. data Tahun 2020-2023 tidak tersedia

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak anjing pada Tahun 2019 sebesar 45%. data Tahun 2020-2023 tidak tersedia

Gambar 2.109 Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/ Ternak Tahun 2019 – 2023(%)

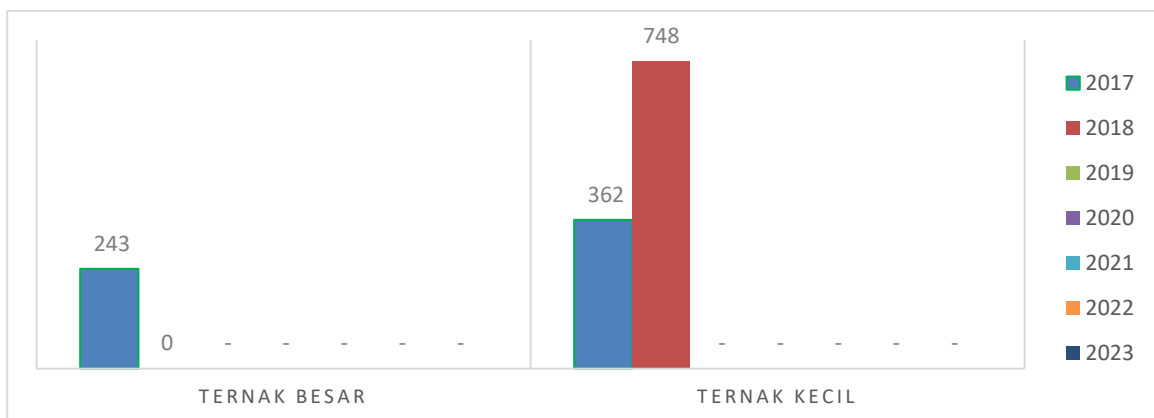


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2022

## 6. Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di RPH Sidikalang

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat jumlah pemotongan hewan ternak di RPH Sidikalang adalah sebagai berikut untuk ternak besar pada Tahun 2015 sebanyak 243 ekor/tahun, sebanyak 243 ekor/tahun pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 sebanyak 243 ekor/tahun, sebanyak 362 ekor/tahun pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 sebanyak 197 ekor/tahun. Sementara untuk ternak kecil sebanyak 748 ekor/tahun pada Tahun 2018 untuk Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 data tidak tersedia.

Gambar 2.110 Jumlah Pemotongan Ternak di RPH Sidikalang Tahun 2017 – 2023



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

## **V. Perikanan**

### **1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut ikan gabus pada Tahun 2015 sebesar 8,34%, sebesar 8,36% pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 sebesar 8,39%, mengalami penurunan sebesar (74,04)% pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan mujair pada Tahun 2015 sebesar 10,24%, sebesar 10,26% pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 sebesar 10,29%, mengalami penurunan sebesar (22,33)% pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 39,71%.

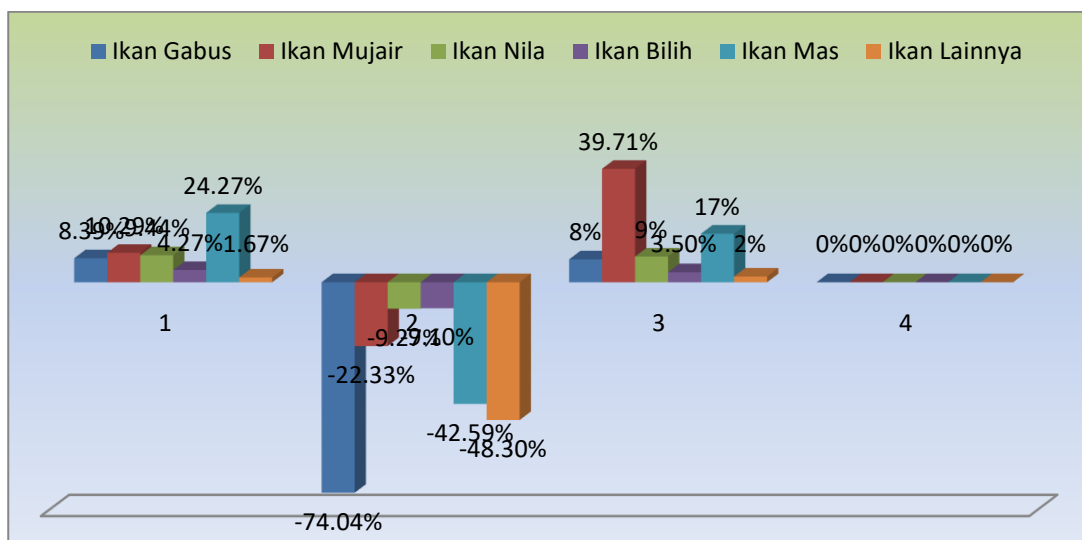
Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan nila pada Tahun 2015 sebesar 19,39%, sebesar 9,41% pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 sebesar 9,44%, mengalami penurunan sebesar (9,27)% pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 9%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan bilih pada Tahun 2015 sebesar 4,22%, sebesar 4,24% pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 sebesar 4,27%, mengalami penurunan sebesar (93,10)% pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,50%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan mas pada tahun 2015 sebesar 24,22%, sebesar 24,24% pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 sebesar 24,27%, mengalami penurunan sebesar (42,59)% pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 17%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan lainnya pada Tahun 2015 sebesar 1,62%, sebesar 1,64% pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 sebesar 1,67%, mengalami penurunan sebesar (48,34)% pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2% dan untuk Tahun 2020 data tidak tersedia.

Gambar 2.111 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017 – 2022



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

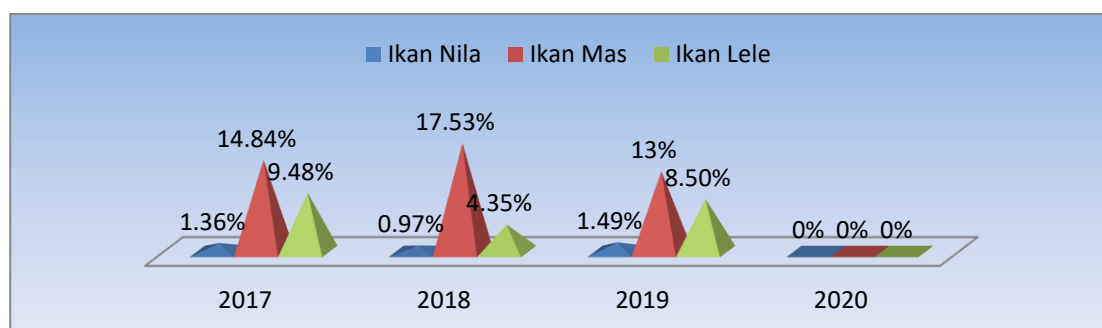
## 2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut untuk ikan nila pada Tahun 2015 sebesar 1,22%, sebesar 1,32% pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 sebesar 1,36%, sebesar 0,97% pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 sebesar 1,49%.

Peningkatan produksi perikanan budidaya untuk ikan mas pada Tahun 2017 sebesar 14,84%, sebesar 17,53% pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 sebesar 13% dan untuk Tahun 2020 data tidak tersedia.

Peningkatan produksi perikanan budidaya untuk ikan lele pada Tahun 2017 sebesar 9,48%, sebesar 4,35% pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 sebesar 8,50% dan untuk Tahun 2020 sampai Tahun 2023 data tidak tersedia.

Gambar 2.112 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017 – 2023 (%)



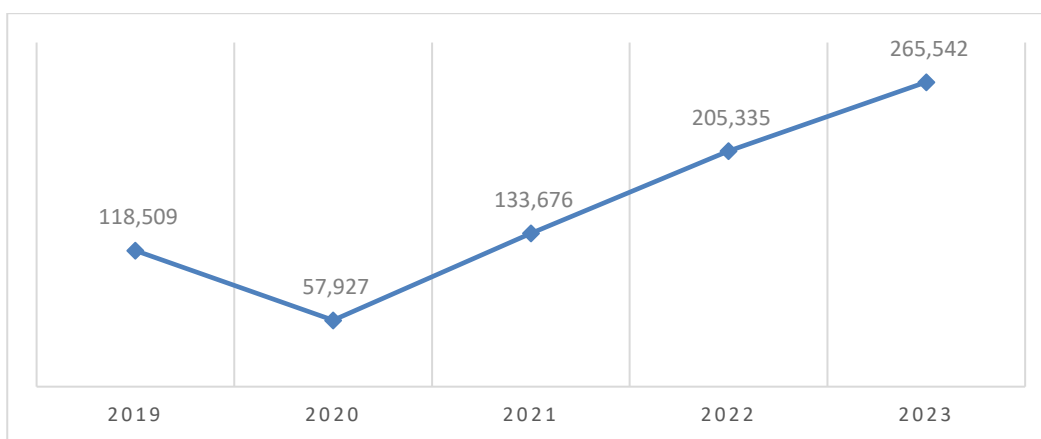
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2022

## W. Pariwisata

### 1. Kunjungan Wisata

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan kunjungan wisata di Kabupaten Dairi sebesar 118.509 pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebanyak 57.927 orang, pada Tahun 2021 sebanyak 133.676 orang, pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 205.335 orang dan pada Tahun 2023 kunjungan wisata ke Dairi sebanyak 265.542 orang.

Gambar 2.113 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Dairi Tahun 2019–2023



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka 2024

### 2. Objek Wisata di Kabupaten Dairi

Tabel 2.72 Objek Wisata di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Dan Jarak Dari Sidikalang Tahun 2023

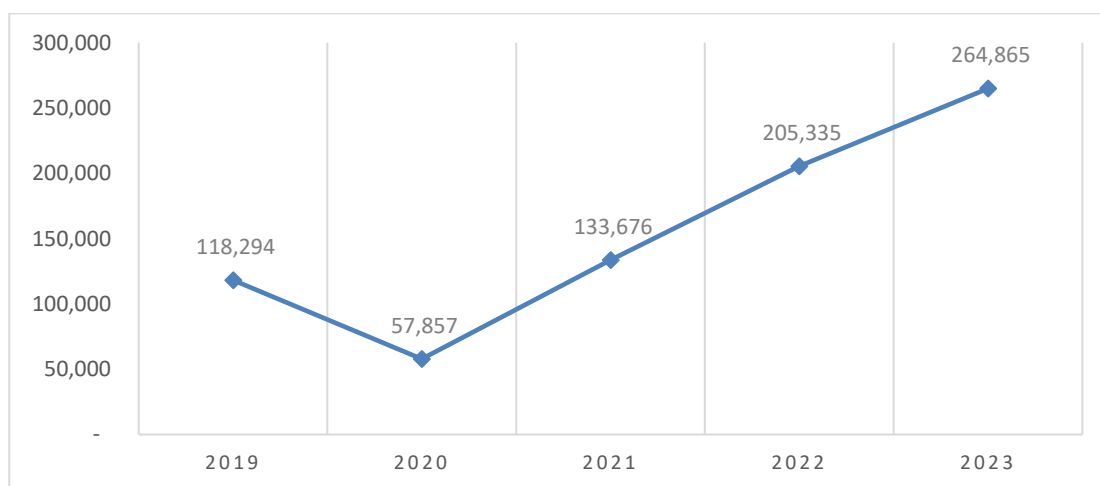
Nama Objek Wisata	Kecamatan	Jarak dari Kota Sidikalang (km)
(1)	(2)	(3)
Gedung Djauli Manik (Pusat Aktifitas Seni Budaya)	Sidikalang	0,0
Taman Kota Sidikalang (Stadion Lama)	Sidikalang	0,5
Panorama Indah Puncak Sidiangkat	Sidikalang	5,0
Taman Wisata Iman (TWI)	Sitinjo	10,0
Taman Tugu TB Simatupang Dan Liberty Manik	Sitinjo	10,0
Air Terjun Lae Pandaroh, Air Terjun Sampedabah	Sitinjo	12,0
Simergatep	Parbuluan	12,0
Leter Z	Siempat Nempu Hulu	12,0
Parhonasan	Lae Parira	21,0
Pemandian Lau Bagot	Tigalingga	30,0

Nama Objek Wisata	Kecamatan	Jarak dari Kota Sidikalang (km)
(1)	(2)	(3)
Gua Kendet Liang	Gunung Sitember	42,0
Pantai Danau Toba/Tao Silalahi	Silahisabungan	44,0
Air Terjun Sampuren Desa Gundaling	Gunung Sitember	45,0
Situs Budaya Marga Silahisabungan (Aek Sipaulak Hosa, Batu Sigadap, Pagar Parorot, Pansur Napitu, Tugu Silahisabungan)	Silahisabungan	46,0
Pemadian Lau Timah	Tanah Pinem	80,0

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka 2024

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa total objek wisata potensial di Kabupaten Dairi berjumlah 15 objek wisata. Dan dari tabel tersebut kita juga mengetahui nama objek wisata, letak serta jarak objek wisata dari kota Sidikalang, dapat kita lihat bahwa Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo memiliki sebanyak 3 objek wisata, Silahisabungan dan Gunung Sitember 2 objek wisata, Parbuluan, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Tigalingga dan Tanah Pinem masing-masing memiliki 1 objek wisata

Gambar 2.114 Data Wisatawan Nusantara Tahun 2019 – 2023



Sumber : Kabupaten Dairi dalam Angka, 2024.

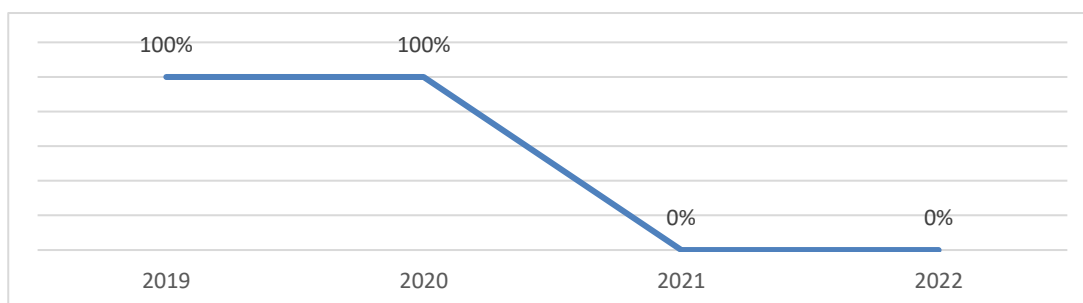
Gambar di atas menjelaskan bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Dairi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 terdapat 118.294 pengunjung, di Tahun 2020 dikarenakan covid-19 terjadi penurunan menjadi 57.857 pengunjung kemudian di tahun berikutnya Kabupaten Dairi kembali berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara, seperti Tahun 2021

meningkat menjadi 133.676, Tahun 2022 menjadi 205.335 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 264.865 pengunjung

## X. Perindustrian dan Perdagangan

### 1. Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis

Gambar 2.115 Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis Tahun 2019– 2022



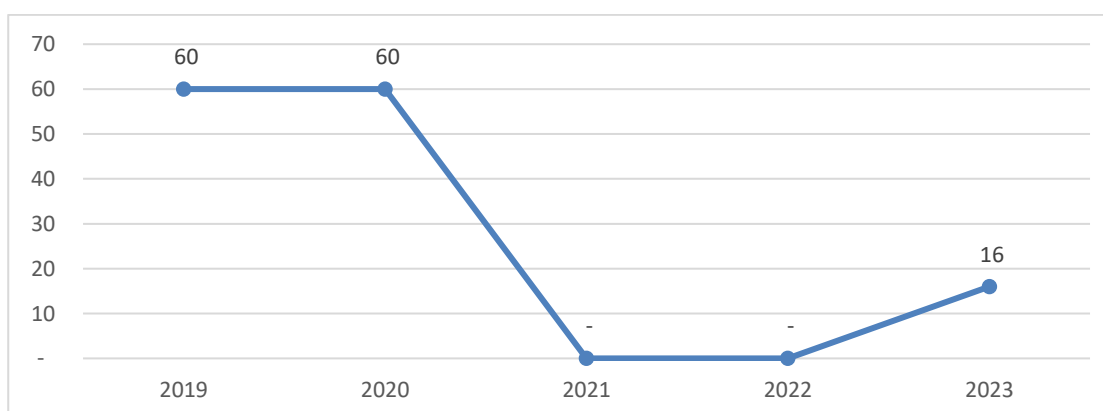
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Persentase Peningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 – 2020 stagnan yaitu sebesar 100% tiap tahunnya, data Tahun 2021-2023 tidak tersedia.

### 2. Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah produk ikm bidang agribisnis yang terfasilitasi dalam pengurusan sertifikasi di Kabupaten Dairi pada 2019 dan 2020 masing – masing sebanyak 60 produk, data Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak tersedia dan pada 2023 sebanyak 16.

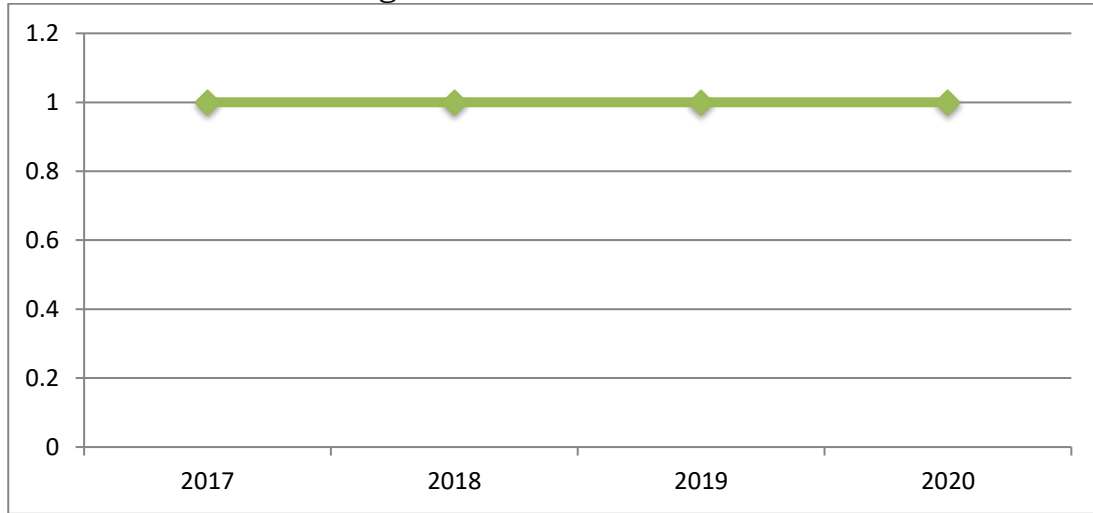
Gambar 2.116 Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikat Produk Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

### 3. Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok

Gambar 2.117 Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok Tahun 2017 – 2023

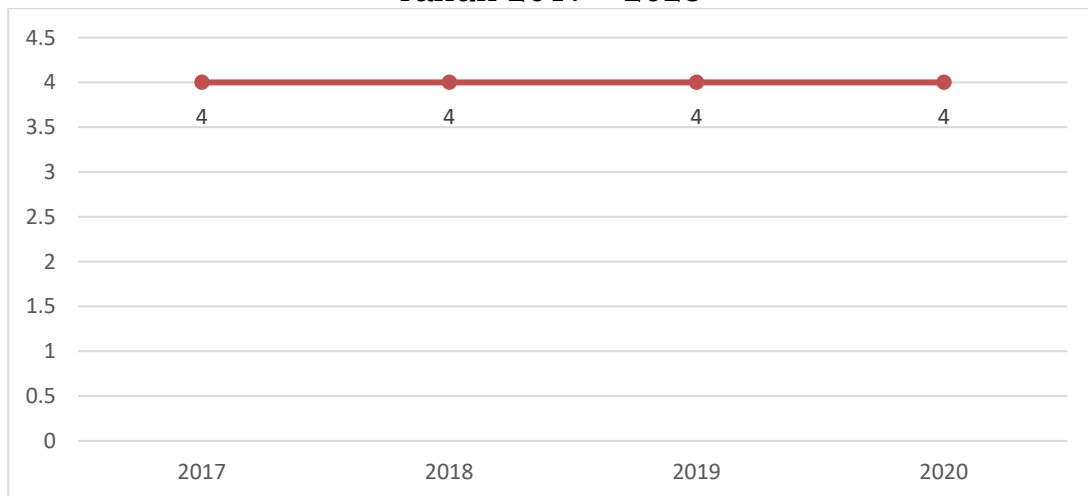


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar di atas dapat dijelaskan tersedianya dokumen informasi harga dan ketersediaan barang pokok di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 – 2020 adalah 1 dokumen setiap tahunnya dan untuk Tahun 2021 dan Tahun 2023 data tidak tersedia.

### 4. Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan

Gambar 2.118 Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan Tahun 2017 – 2023

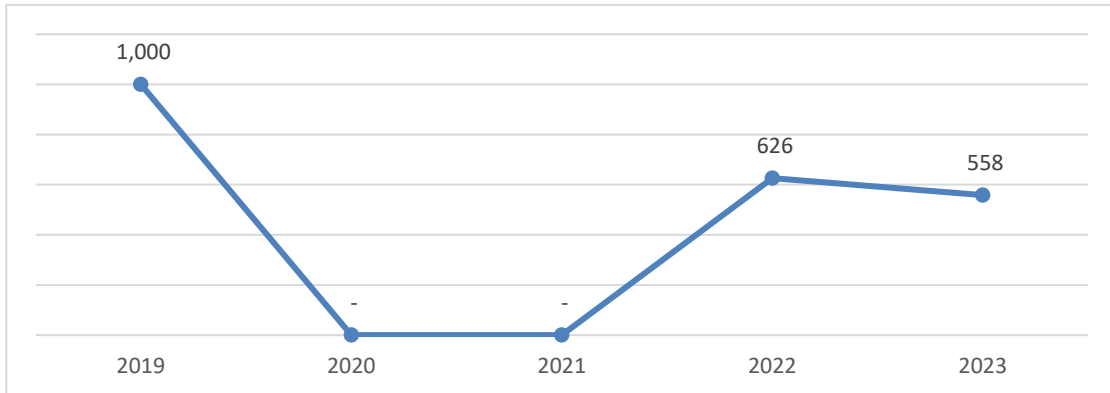


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, 2023

Dari gambar di atas dapat dijelaskan jumlah produk bidang agribisnis yang dipromosikan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 – 2020 adalah sebanyak 4 produk setiap tahunnya, data untuk Tahun 2021 dan Tahun 2023 tidak tersedia.

## 5. Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang

Gambar 2.119 Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

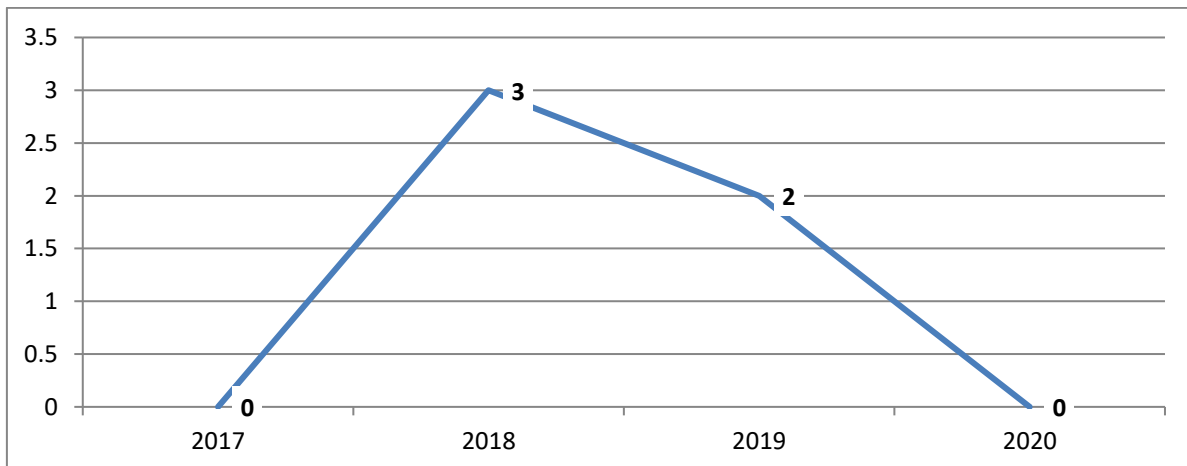
Jumlah alat UTTP yang ditera/teraulang di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sebanyak 1000 unit dan untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 data tidak tersedia sementara untuk Tahun 2022 ada sebanyak 626 unit, pada Tahun 2023 sebanyak 558 unit.

### Y. Penanggulangan Bencana Daerah

#### 1. Tersedianya Bahan Kebijakan Teknis Kelitbangan Daerah Yang Dilaksanakan

Dari gambar di bawah dapat dijelaskan tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Dairi pada Tahun 2018 sebanyak 3 dokumen dan sebanyak 2 dokumen pada Tahun 2019 dan untuk Tahun 2020-2023 data tidak tersedia.

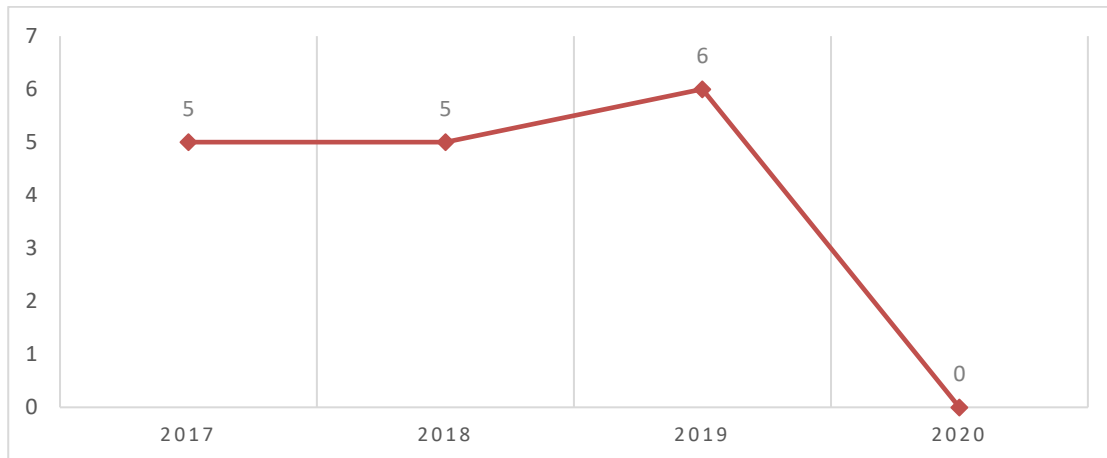
Gambar 2.120 Tersedianya Bahan Kebijakan Teknis Kelitbangan Daerah Yang Dilaksanakan Tahun 2017 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

## 2. Terbentuknya Desa Tangguh Bencana

Gambar 2.121 Terbentuknya Desa Tangguh Bencana Tahun 2017 – 2023



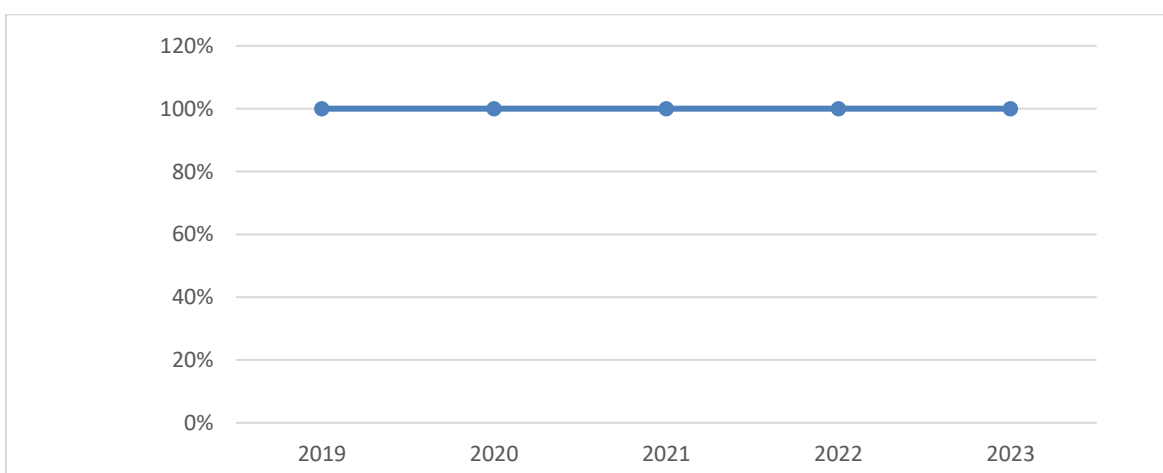
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Banyaknya desa tangguh bencana yang terbentuk di Kabupaten Dairi pada Tahun 2017 – 2018 adalah sebanyak 5 desa dan sebanyak 6 desa pada Tahun 2019 dan untuk Tahun 2020-2023 data tidak tersedia.

## 3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana

Dari gambar di bawah dapat dilihat persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana saat tanggap darurat bencana di Kabupaten Dairi sebesar 99,32% pada Tahun 2019 dan di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 kembali dengan nilai 100%.

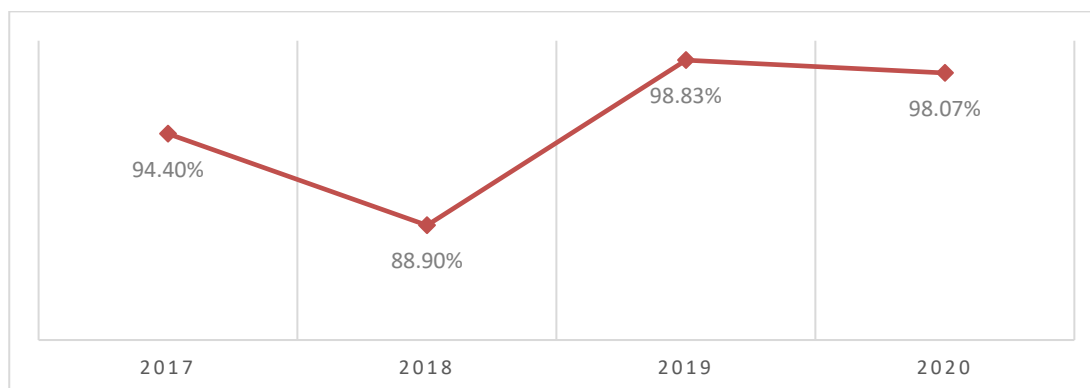
Gambar 2.122 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana Tahun 2019 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

#### 4. Terpenuhiya Pemulihan Dampak Bencana

Gambar 2.123 Terpenuhiya Pemulihan Dampak Bencana Tahun 2017 – 2023



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Persentase terpenuhinya pemulihan dampak bencana di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019 sebesar 98,83% dan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 data tidak tersedia.

#### Z. Capaian Aspek Pelayanan Umum.

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2.73 Capaian Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Dairi, 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	44,84	51,6	65,72
2	Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	2,87	3,645	2,82
3	Indeks Inovasi Daerah	N/A	63	18,52	46,90	25,04
4	Indeks SPBE	1,42	1,42	2,07	2,05	2,67

Sumber : BPS, Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Data Diolah, 2023

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah telah memperbaiki tata kelola pemerintahan. Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi selalu berupaya melakukan pembaruan dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Indeks Pelayanan Publik adalah tolok ukur untuk menilai kualitas

pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Dairi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Dairi.

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Indeks ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Walaupun data yang tersaji bersifat fluktuatif yang disebabkan oleh metode pengukuran yang berbeda setiap tahunnya namun kondisi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Dairi selalu meningkat.

Indeks SPBE adalah nilai yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di suatu instansi. Pada data di atas nilai Indeks SPBE Kabupaten Dairi menunjukkan adanya peningkatan.

## **2.5 Ringkasan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025**

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Utara yang secara geografis berada di dataran tinggi provinsi tersebut. Berbagai dinamika pembangunan daerah telah dilalui, baik dinamika yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pembangunan daerah. Refleksi hasil pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 menunjukkan berbagai keberhasilan maupun kegagalan pembangunan daerah telah dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi. Hasil pembangunan yang telah diraih tersebut menjadi modal penting dalam menggapai tujuan pembangunan ke depan.

Aspek kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui indeks pembangunan manusia memiliki kinerja baik yang ditandai dengan realisasi IPM yang memiliki tren kenaikan hingga memasuki awal tahap 4 RPJPD (2022). Adanya penurunan IPM dari Tahun 2009 ke Tahun 2010 lebih disebabkan oleh perubahan metode perhitungan. Capaian kinerja pembangunan SDM tersebut menjadi representasi dari perbaikan dari tahun ke tahun terkait harapan hidup, akses terhadap pendidikan, dan standar hidup layak. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu perbaikan. Penanganan stunting meskipun memiliki prevalensi

yang menurun dengan angka 13,24% pada Tahun 2022, namun masih terdapat kenaikan di beberapa kecamatan.

Selain itu, indikator tingkat kemiskinan sudah berkinerja baik. Secara umum, tingkat kemiskinan Kabupaten Dairi mengalami tren penurunan atau berkinerja baik. Kenaikan kemiskinan terjadi pada 2 tahun berturut-turut di masa Pandemi Covid-19. Kenaikan tingkat kemiskinan di luar masa pandemi terjadi pada Tahun 2015. Adapun kondisi setelah pandemi atau pada Tahun 2022, Dairi mampu menurunkan kembali tingkat kemiskinan. Kabupaten Dairi memiliki tingkat kemiskinan terendah di kawasan Danau Toba. Capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan dibentuk oleh kinerja bantuan sosial, akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemberdayaan masyarakat.

Aspek lain yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara umum pengangguran di Dairi mengalami tren fluktuatif, namun memiliki kinerja baik. Dairi memiliki tingkat pengangguran di bawah 2 persen sejak Tahun 2012 hingga 2022. Tahun 2021 masih berada pada masa pandemi dan terjadi kenaikan kemiskinan, namun tingkat pengangguran justru menurun dari Tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemulihan kondisi ekonomi yang memiliki kinerja baik. Kondisi tingkat pengangguran makin baik pada Tahun 2022, bahkan berada di bawah 1 persen. Menurunnya tingkat pengangguran dibentuk oleh akses terhadap lapangan pekerjaan, keterampilan/kompetensi pencari kerja yang memenuhi syarat, serta perlindungan sumber penghidupan masyarakat.

Kinerja perekonomian daerah direpresentasikan dari pertumbuhan ekonomi secara umum memiliki tren fluktuatif selama periode RPJPD. Terjadi beberapa kali tren penurunan dari tahun sebelumnya di luar kondisi pandemi, yakni Tahun 2006, 2008, 2010, 2014, 2017, dan 2019. Meskipun demikian, kondisi akhir telah menunjukkan kinerja yang baik dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan demikian, peningkatan produksi, investasi, pendapatan, dan kesempatan kerja telah menunjukkan kinerja yang baik di Kabupaten Dairi. Dari sisi PDRB perkapita Kabupaten Dairi mengalami tren kenaikan setiap periode. Meskipun demikian, PDRB perkapita sempat mengalami penurunan pada masa pandemi, yakni Tahun 2020. Namun, pada Tahun 2021 dan Tahun

2022 mengalami kenaikan meskipun belum memiliki angka yang sama dengan kondisi sebelum pandemi.

Adapun distribusi pendapatan masyarakat Dairi yang direpresentasikan melalui indeks gini mengalami tren fluktuatif. Kondisi kenaikan ketimpangan pendapatan beberapa kali berkoincidence dengan kenaikan angka pengangguran, yakni pada Tahun 2008, 2011, dan 2018. Meskipun indeks gini memiliki tren fluktuatif, namun kondisi di Kabupaten Dairi masih berada dalam level moderat.

Refleksi pembangunan 20 tahun yang lalu di atas, menunjukkan bahwa banyak keberhasilan pembangunan daerah yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Dairi mulai dari bidang SDM dan kesejahteraan, bidang ketenagakerjaan, bidang perekonomian, maupun pencapaian dalam pemerataan pembangunan daerah. Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan, seperti memastikan keberlanjutan kinerja pembangunan yang diraih seperti memperkuat kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, memastikan data kemiskinan yang akurat yang mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan, dan meningkatkan sumber penghidupan yang layak bagi masyarakat, dan penguatan perekonomian yang lebih kokoh berbasis sektor potensial, seperti UMKM, pariwisata, dan sebagainya. Selain itu, setiap pembangunan harus mempertimbangkan lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan ancaman terhadap generasi berikutnya. Seluruh pembangunan tersebut harus ditopang oleh kualitas tata kelola yang profesional, integritas, adaptif, dan kolaboratif.

## **2.6 Proyeksi Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana**

### **2.6.1 Asumsi Dasar**

Proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana Kabupaten Dairi dilakukan dengan mengacu hasil proyeksi penduduk Kabupaten/Kota untuk Tahun 2020-2035 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS ini didasarkan pada hasil kuesioner sensus penduduk yang lebih rinci yang selanjutnya disebut sebagai Long Form Sensus Penduduk 2020. Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi tersebut menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi Rural Urban Projection (RUP). Metode ini

menggunakan beberapa asumsi, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator Total Fertility Rate (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator Infant Mortality Rate (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator Age-Specific Net Migration Rate (ASNMR) yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020.

Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 – 2035 yang telah dipublikasikan oleh BPS, kemudian digunakan sebagai acuan dalam melakukan proyeksi penduduk pada tahun 2036 – 2045. Proyeksi penduduk untuk Tahun 2036-2045 dilakukan dengan menggunakan aplikasi spectrum yang dikembangkan oleh Avenir Health. Hasil yang diperoleh dari penggunaan aplikasi ini adalah proyeksi penduduk Kabupaten Dairi pada Tahun 2025 – 2045 melalui modul DemProj (Demography Project) serta dampak yang dihasilkan dari pertumbuhan penduduk melalui modul RAPID (Resources for the Awareness of Population Impacts on Development).

### **2.6.2 Proyeksi Demografi 20 Tahun Mendatang**

Proyeksi demografi Kabupaten Dairi difokuskan dalam rangka menganalisis perkembangan jumlah dan laju kependudukan, penduduk berdasarkan jenis kelamin, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur. Data dasar ini yang kemudian dianalisis lebih detail dan mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Bonus demografi yang akan dialami Kabupaten Dairi memerlukan strategi khusus untuk memastikan bahwa usia produktif dapat terserap oleh lapangan kerja yang memadai. Diperlukan kebijakan yang mengedepankan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja untuk menyiapkan tenaga kerja yang unggul di masa depan. Adapun hasil proyeksi kependudukan dijabarkan sebagai berikut:

#### **A. Proyeksi Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk**

Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Dairi dilakukan guna memprediksi jumlah penduduk Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045. Analisis hasil proyeksi ini digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk di Kabupaten Dairi terus mengalami kenaikan hingga Tahun

2045 nanti. Proyeksi penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 2.74

Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Orang)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Sidikalang	56.498	58.170	63.220	67.920	73.330	79.530
2	Sitinjo	15.211	15.070	16.380	17.870	18.910	19.990
3	Berampu	9.396	10.110	11.240	12.400	13.330	14.270
4	Parbuluan	27.203	28.030	30.860	33.560	35.440	36.830
5	Sumbul	47.224	49.610	53.570	57.280	60.270	62.850
6	Silahisabungan	5.811	5.980	6.690	7.360	8.070	8.830
7	Silima Punggapungga	15.318	15.860	17.430	19.080	20.660	22.430
8	Lae Parira	15.442	15.880	16.960	17.940	18.730	19.330
9	Siempat Nempu	21.091	22.130	24.000	25.630	27.060	28.180
10	Siempat Nempu Hulu	20.993	21.750	23.420	24.920	26.090	26.960
11	Siempat Nempu Hilir	12.346	13.110	14.450	15.780	17.100	18.530
12	Tigalingga	25.333	26.010	27.810	29.440	30.530	31.210
13	Gunung Sitember	11.081	11.490	12.450	13.310	13.970	14.460
14	Pegagan Hilir	17.933	18.760	20.500	22.060	23.290	24.150
15	Tanah Pinem	23.867	24.460	26.110	27.690	28.680	29.360
Kabupaten Dairi		324,747	324.747	336.400	365.090	392.220	415.470

Sumber: Olah Data, 2023

Total penduduk Kabupaten Dairi diproyeksikan meningkat untuk setiap periodenya yang mencapai 436,88 ribu jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,30 persen selama 20 tahun mendatang. Pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi pada Tahun 2025, yaitu sebesar 9,46 persen atau bertambah sebanyak 29,07 ribu jiwa. Pada periode Tahun 2030 dan Tahun 2035, jumlah penduduk diproyeksikan tumbuh masing-masing sebesar 8,53 persen dan 7,43 persen yang mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Pada periode ketiga dan keempat, jumlah penduduk Kabupaten Dairi mengalami laju pertumbuhan yang sedikit menurun, dengan penambahan penduduk masing-masing sebanyak 23,25 ribu jiwa dan 21,41 ribu jiwa.

Proyeksi persebaran penduduk setiap kecamatan, penduduk paling banyak berada di Kecamatan Sidikalang, yaitu sebanyak 79,53 ribu jiwa dengan proporsi sebesar 18,20 persen dari total penduduk. Sementara, kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil berada di Kecamatan Silahisabungan yaitu sebanyak 8,83 ribu jiwa dengan proporsi sebesar 2,02 persen dari total penduduk. Proporsi penduduk ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk Kabupaten Dairi relatif merata dan tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pola kependudukan secara

keseluruhan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Dairi juga tidak mengalami perubahan mendasar, baik pergeseran pola persebaran penduduk maupun proyeksi jumlah penduduknya.

#### **B. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Proyeksi terhadap penduduk berdasarkan jenis kelamin dilakukan dalam rangka merumuskan kebijakan yang tidak bias gender. Melalui gambaran penduduk berdasarkan jenis kelamin ini, maka proses perumusan kebijakan diharapkan akan lebih bisa akurat dan tepat sasaran. Adapun hasil proyeksi kependudukan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Dairi bisa dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.75  
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Dalam Jiwa) Penduduk

No	KECAMATAN	Tahun 2023			Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin														
					2025			2030			2035			2040			2045		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sidikalang	28.008	28.490	56.498	28.570	29.590	58.170	30.570	32.640	63.220	32.470	35.460	67.930	34.600	38.730	73.330	36.960	42.570	79.530
2	Sitinjo	7.815	7.396	15.211	7.750	7.320	15.070	8.490	7.890	16.380	9.350	8.520	17.870	10.050	8.860	18.910	10.860	9.120	19.990
3	Berampu	4.838	4.558	9.396	5.050	5.060	10.110	5.470	5.780	11.240	5.840	6.570	12.400	6.060	7.270	13.330	6.160	8.100	14.270
4	Parbuluan	13.635	13.568	27.203	14.260	13.770	28.030	15.860	15.000	30.860	17.370	16.190	33.560	18.560	16.880	35.440	19.550	17.280	36.830
5	Sumbul	24.094	23.130	47.224	25.190	24.430	49.610	27.390	26.180	53.570	29.430	27.840	57.280	31.080	29.190	60.270	32.460	30.380	62.840
6	Silahisabungan	2.841	2.970	5.811	3.010	2.970	5.980	3.380	3.310	6.690	3.720	3.640	7.360	4.080	3.990	8.070	4.460	4.370	8.830
7	Silima Punggapungga	7.502	7.816	15.318	7.870	7.990	15.860	8.690	8.740	17.430	9.550	9.530	19.080	10.410	10.250	20.660	11.420	11.000	22.430
8	Lae Parira	7.478	7.964	15.442	7.930	7.950	15.880	8.520	8.440	16.960	9.030	8.900	17.940	9.550	9.180	18.730	10.040	9.290	19.330
9	Siempat Nempu	10.541	10.550	21.091	10.970	11.160	22.130	11.890	12.110	24.000	12.640	12.990	25.630	13.260	13.800	27.060	13.650	14.530	28.180
10	Siempat Nempu Hulu	10.623	10.370	20.993	11.100	10.650	21.750	12.080	11.340	23.420	12.970	11.950	24.920	13.760	12.330	26.090	14.460	12.500	26.960
11	Siempat Nempu Hilir	6.259	6.087	12.346	6.600	6.510	13.110	7.290	7.160	14.450	7.950	7.830	15.780	8.630	8.470	17.100	9.330	9.190	18.520
12	Tigalingga	12.674	12.659	25.333	12.860	13.150	26.010	13.780	14.040	27.810	14.630	14.810	29.440	15.150	15.380	30.530	15.460	15.740	31.200
13	Gunung Sitember	5.701	5.380	11.081	5.910	5.580	11.490	6.470	5.980	12.450	6.980	6.330	13.310	7.400	6.570	13.970	7.740	6.710	14.460
14	Pegagan Hilir	8.851	9.082	17.933	9.450	9.310	18.760	10.370	10.130	20.500	11.190	10.870	22.060	11.890	11.390	23.290	12.460	11.690	24.150
15	Tanah Pinem	12.068	11.799	23.867	12.400	12.050	24.460	13.370	12.740	26.110	14.300	13.390	27.690	14.930	13.750	28.680	15.410	13.950	29.360
KABUPATEN DAIRI		162.928	161.819	324.747	168.920	167.480	336.400	183.610	181.480	365.090	197.410	194.810	392.220	209.420	206.040	415.470	220.440	216.440	436.880

Sumber: Olah Data, 2023

Proyeksi terhadap penduduk pada Tahun 2025 hingga Tahun 2045 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Meskipun demikian, perbedaan jumlah penduduknya tidak jauh berbeda. Laju pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki juga sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan laki-laki sebesar 7,46 persen, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan perempuan sebesar 7,14 persen. Dari sisi rasio jenis kelamin, akan mengarah pada kesimbangan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan di Kabupaten Dairi mendatang. Perimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut akan berpengaruh pada kebijakan daerah terutama kebijakan yang berwawasan gender dan bisa meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.

### **C. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Proyeksi penduduk berdasarkan umur penting untuk dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi seperti bonus demografi, tingkat ketergantungan penduduk, dan sebagainya. Bonus demografi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi pertambahan penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan rentang usia 15-64, sementara penduduk belum produktif adalah penduduk dengan rentang usia 0-14 dan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk dengan usia 65 keatas. Setiap kenaikan masing-masing penduduk tersebut memiliki implikasi yang berbeda sehingga perlakuan juga harus berbeda. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi harus sesuai dengan pola kependudukan yang terjadi. Sebelum menganalisis bonus demografi, diperlukan juga analisis penduduk berdasarkan umur sebagai bahan dalam menganalisis bonus demografi Kabupaten Dairi.

Tabel 2.76  
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Dalam Jiwa)  
Penduduk

No.	Kelompok Usia	TAHUN					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	0-4	32.197	35.880	37.635	38.415	37.510	38.290
2	5-9	29.525	28.580	35.895	37.590	38.330	37.220
3	10-14	31.115	30.440	28.675	35.965	37.570	38.115
4	15-19	31.500	31.560	30.445	28.640	35.860	37.215
5	20-24	30.700	31.050	31.490	30.350	28.570	35.680
6	25-29	27.650	29.530	31.080	31.460	30.250	28.310
7	30-34	22.800	24.400	29.530	31.000	31.360	29.870
8	35-39	20.150	21.070	24.270	29.320	30.850	31.080
9	40-44	18.970	19.100	20.890	24.020	29.080	30.500
10	45-49	17.820	18.530	18.810	20.550	23.730	28.530
11	50-54	15.620	16.120	18.090	18.360	20.110	23.170
12	55-59	13.870	14.520	15.560	17.460	17.720	19.450
13	60-64	11.780	12.160	13.740	14.720	16.470	16.790
14	65-69	9.610	10.230	11.120	12.580	13.390	15.090
15	70-74	6.300	7.140	8.800	9.590	10.750	11.560
16	75+	5.140	6.090	9.060	12.200	13.920	16.010

Sumber: Olah Data, 2023

### C. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Dairi memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat ini bisa dirumuskan dengan dasar kondisi kependudukan, terutama terkait dengan kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk ini dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Pengukuran kepadatan penduduk juga memberikan gambaran tentang sejauh mana wilayah tersebut dihuni, dan dapat memberikan wawasan penting dalam merencanakan penggunaan lahan serta pengelolaan sumber daya. Tingkat kepadatan penduduk juga merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Adapun hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Dairi bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77  
Tabel Proyeksi Kepadatan Penduduk

No	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km2)	Tahun 2023 (jiwa/Km2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Sidikalang	70,67	799	823	895	961	1.038	1.125
2	Sitinjo	53,15	286	283	308	336	356	376
3	Berampu	40,85	230	248	275	304	326	349
4	Parbuluan	235,40	116	119	131	143	151	156
5	Sumbul	192,58	245	258	278	297	313	326
6	Silahisabungan	75,62	77	79	88	97	107	117
7	Silima Punggapungga	88,35	173	180	197	216	234	254
8	Lae Parira	42,75	361	372	397	420	438	452
9	Siempat Nempu	60,15	351	368	399	426	450	469
10	Siempat Nempu Hulu	93,93	223	232	249	265	278	287
11	Siempat Nempu Hilir	105,62	117	124	137	149	162	175
12	Tigalingga	197,00	129	132	141	149	155	158
13	Gunung Sitember	77,00	144	149	162	173	181	188
14	Pegagan Hilir	155,33	115	121	132	142	150	155
15	Tanah Pinem	439,40	54	56	59	63	65	67
KABUPATEN DAIRI		1927,80	168	174	189	203	216	227

Sumber: Olah Data, 2023

Proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Dairi terpusat di Kecamatan Sidikalang. Tingkat kepadatan penduduk paling rendah yaitu Kecamatan Tanah Pinem dan Kecamatan Silahisabungan. Pola kepadatan penduduk dari hasil proyeksi diatas sejalan dengan pola kepadatan penduduk eksisting saat ini. Kepadatan penduduk tertinggi ini berkorelasi dengan kondisi Kecamatan Sidikalang sebagai ibukota Kabupaten Dairi yang juga merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Dairi. Sementara itu, kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah merupakan kecamatan-kecamatan yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan wilayah ibukota.

Kepadatan penduduk yang tinggi berimplikasi terhadap intervensi jasa lingkungan yang juga semakin meningkat, sehingga menyebabkan daya dukung daya tampung lingkungan menurun. Diperlukan beberapa upaya untuk mengantisipasi dan mengendalikan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Dairi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya pengendalian pemanfaatan lahan, penumbuhan sektor ekonomi potensial, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Harapannya, hal ini dapat mengontrol kepadatan penduduk di setiap kecamatan dan mendorong distribusi penduduk di Kabupaten Dairi secara lebih merata.

#### **D. Proyeksi Struktur Penduduk**

Proyeksi struktur penduduk merupakan proyeksi mengenai komposisi dan distribusi penduduk di Kabupaten Dairi selama kurun waktu 20 tahun mendatang. Proyeksi ini bisa memberikan informasi tentang perkembangan penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Dairi. Selain itu, proyeksi struktur penduduk ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial karena bisa membantu dalam mempersiapkan sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk mendukung populasi yang berkembang.

## **E. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur**

Hasil proyeksi terhadap penduduk umur 0-4 tahun mengalami penambahan mulai Tahun 2025 hingga Tahun 2035. Pada Tahun 2025, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 35,89 ribu jiwa, mengalami peningkatan menjadi 37,64 ribu jiwa dan 38,42 ribu jiwa pada Tahun 2030 hingga 2035. Namun pada Tahun 2040, diproyeksikan mengalami penurunan menjadi 37,5 ribu jiwa atau menurun sebesar 0,77 persen dan kemudian kembali meningkat pada Tahun 2045 menjadi 38,3 ribu jiwa. Meskipun terjadi penambahan, namun laju pertumbuhannya lambat dan fluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang diproyeksikan menurun yang berpengaruh terhadap penduduk umur 0-14 tahun.

Saat ini proporsi penduduk usia 0-14 tahun mewakili 9,3 persen dari total populasi pada Tahun 2020. Namun, pada Tahun 2045, diproyeksikan proporsi penduduk usia tersebut mengalami penurunan dari total populasi. Hasil proyeksi menunjukkan proporsi penduduk usia 0-14 tahun mengalami penurunan setiap periode dan pada Tahun 2045 memiliki proporsi dari total populasi yaitu hanya sebesar 8,76 persen. Dari sisi laju pertumbuhan, secara tren proporsi penduduk usia 0-14 tahun juga mengalami penurunan.

Penduduk umur 15-64 tahun yang merupakan penduduk usia kerja diproyeksi mengalami penambahan setiap periode. Pada Tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 199,55 ribu jiwa, meningkat menjadi 280,59 ribu jiwa pada Tahun 2045. Meskipun terjadi penambahan, namun laju pertumbuhannya mengalami penurunan setiap periode. Pada Tahun 2025, laju pertumbuhan proporsi terhadap total populasi penduduk usia tersebut sebesar 9,25 persen dan diproyeksi menurun menjadi sebesar 6,28 persen pada Tahun 2045.

Berbeda halnya dengan penduduk umur 65 tahun keatas, yang notabene penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk tidak produktif. Dari sisi proporsi terhadap total populasi, jumlah penduduk dengan usia tersebut paling kecil dibandingkan dengan penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 15-64 tahun. Meskipun proporsi paling kecil, namun proporsinya mengalami pertumbuhan setiap periode dari 5,66 persen pada Tahun 2020 menjadi 9,76 persen pada Tahun 2045. Hal yang sama juga terjadi di laju pertumbuhannya, menunjukkan tren peningkatan yang

signifikan di setiap periode dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,95 persen. Secara absolut penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2020 sebanyak 17,44 ribu jiwa meningkat menjadi 42,66 ribu jiwa pada Tahun 2045. Pertambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kabupaten Dairi semakin baik ke depan. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi juga mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan mereka.

#### **F. Proyeksi Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi**

Rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran penduduk usia kerja dengan ukuran penduduk usai tidak bekerja. Rasio ketergantungan dihitung dari perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Tabel 2.78  
Proyeksi Rasio Ketergantungan (persen) di Kabupaten Dairi  
Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Tahun 2020	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (persen)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Umur 0-14	29,41	28,22	28	28,55	27,29	26,01
Umur 15-64	64,93	64,81	64,07	62,69	63,55	64,22
Umur 65+	5,66	6,97	7,93	8,76	9,16	9,76
Rasio Ketergantungan	54,01	54,30	56,08	59,52	57,36	55,70

Sumber: Olah Data, 2023

Rasio ketergantungan Kabupaten Dairi menunjukkan tren yang fluktuaksi namun cenderung menurun di setiap periodenya. Pada Tahun

2020 sebagai data dasar menunjukkan rasio ketergantungan, yaitu sebesar 54,01 persen meningkat menjadi 55,70 pada Tahun 2045. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2020, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 54 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif, sedangkan pada Tahun 2035, penduduk usia produktif menanggung bebas 59-60 penduduk tidak produktif. Kemudian pada Tahun 2045 rasio ketergantungannya menurun, dengan setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 54 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif. Kondisi di atas menandakan bahwa semakin besar rasio ketergantungan maka semakin mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan kerja memengaruhi penduduk yang produktif. Selain itu, rasio ketergantungan yang tinggi juga mempengaruhi kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan di Kabupaten Dairi tersebut disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif.

Kabupaten Dairi saat ini sedang memiliki peluang bonus demografi yang cukup bagus hingga di periode Tahun 2045. Artinya dari Tahun 2020 hingga Tahun 2045, Kabupaten Dairi harus mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Meskipun demikian, tetap harus memperhatikan jumlah penduduk usia produktif yang semakin berkurang, sementara penduduk usia non produktif semakin meningkat. Kondisi ini membuat beban tanggungan terhadap penduduk tidak produktif semakin tinggi yang kemudian memengaruhi perekonomian daerah karena dapat menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Dairi harus mampu memanfaatkan sekaligus mengantisipasi dinamika kependudukan selama 20 tahun ke depan.

#### **G. Proyeksi Penduduk Lanjut Usia**

Perubahan komposisi penduduk Kabupaten Dairi di atas berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertility dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 ke atas. Pada Tahun 2020, jumlah lansia sebanyak 28,62 ribu jiwa dan mengalami penambahan secara

signifikan menjadi 59,45 ribu jiwa pada Tahun 2045 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 15,88 persen. Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Dairi karena di satu sisi Pemerintah Kabupaten Dairi harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi mereka. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri.

#### **G. Proyeksi Penduduk Usia Sekolah**

Perubahan komposisi penduduk Kabupaten Dairi juga berdampak pada penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah merupakan penduduk dengan usia 0-6 tahun untuk PAUD, penduduk dengan usia 7-12 tahun untuk SD/ sederajat, dan penduduk usia 13-15 tahun untuk SMP/ Sederajat. Secara keseluruhan penduduk usia sekolah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 1,65 persen.

Penduduk usia sekolah PAUD menunjukkan tren yang berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada Tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk usia sekolah yang masuk PAUD sebesar 14,84 persen dan menurun sangat drastis yaitu sebesar 16 persen pada Tahun 2040. Kemudian pada Tahun 2045 kembali meningkat sebesar 1,41 persen.

Penduduk usia sekolah yang masuk SD/ Sederajat menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada Tahun 2025, penduduk usia sekolah yang masuk SD/ Sederajat sebesar -4,54 persen meningkat drastis sebesar 18,20 persen pada Tahun 2035. Namun, pada Tahun 2040 dan Tahun 2045, terjadi penurunan cukup signifikan masing-masingnya menjadi sebesar 3,15 persen dan -0,71 persen.

Seperti halnya penduduk usia sekolah PAUD, penduduk usia sekolah yang masuk SMP juga menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun. Pada Tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk usia sekolah tersebut mengalami penurunan, yaitu sebesar -0,06 persen. Kemudian pada Tahun 2030, laju pertumbuhan penduduk usia tersebut kembali naik signifikan yaitu sebesar 0,26 persen. Namun pada Tahun 2035 hingga Tahun 2045 terjadi penurunan yaitu sebesar 0,96 persen.

### **2.6.3 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana**

Pertumbuhan jumlah penduduk yang diproyeksikan sebelumnya hadir dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Dairi. Kebutuhan sarana dan prasarana mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang diperlukan terkait ketersediaan air bersih, listrik, serta penanganan akan timbulan sampah yang berpotensi dihasilkan oleh penduduk di Kabupaten Dairi. Seluruh kebutuhan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan wilayah untuk masa 20 tahun mendatang menurut hasil proyeksi penduduk. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana berkaitan erat dengan beberapa hal seperti jumlah penduduk dan hasil proyeksinya, standar minimal kebutuhan akan fasilitas yang diperlukan, dan standar kebutuhan ruang untuk masing-masing sarana prasarana. Berbagai kebutuhan sarana prasarana tersebut akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

#### **A. Proyeksi Sarana Prasarana Infrastruktur**

Sub bab ini akan memuat analisis mengenai kebutuhan sarana prasarana infrastruktur kedepannya. Analisis bagi kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Dairi terdiri dari kebutuhan sarana prasarana infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut diantaranya adalah kebutuhan air bersih, timbulan sampah, listrik dan fasilitas sarana ruang terbuka. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang perlu dibangun kedepannya dalam menghadapi laju pertumbuhan penduduk.

##### **1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal**

Rencana Pemanfaatan Rumah meliputi lokasi, luas, tipologi dan jumlah rumah yang ditangani Rencana Pemanfaatan Rumah difokuskan pada wilayah yang berkembang baik perkotaan dan perdesaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi, secara pemanfaatan saat ini jumlah rumah eksisting 74.344 unit. Kebutuhan rumah di Kabupaten Dairi sampai dengan tahun 2045 akan berjumlah sekitar 115.131 unit. Jumlah tersebut menunjukkan dalam kurun waktu 20 tahun, Kabupaten Dairi akan mengalami peningkatan kebutuhan rumah sebanyak 50.205 unit. Dengan total lahan yang diperlukan untuk permukiman sekitar 1.668,92 hektare. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.79  
Proyeksi Kebutuhan Rumah dan Lahan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Tahun									
		2.025		2.030		2.035		2.040		2.045	
		Kebutuhan Rumah (Unit)	Kebutuhan Lahan (Ha)	Kebutuhan Rumah (Unit)	Kebutuhan Lahan (Ha)	Kebutuhan Rumah (Unit)	Kebutuhan Lahan (Ha)	Kebutuhan Rumah (Unit)	Kebutuhan Lahan (Ha)	Kebutuhan Rumah (Unit)	Kebutuhan Lahan (Ha)
1	Sidikalang	11.147	0,02	12.863	0,03	14.843	0,03	17.129	0,03	19.767	0,03
2	Berampu	1.898	33,22	2.190	38,33	2.528	44,24	2.917	51,05	3.367	58,91
3	Sitinjo	3.103	54,30	3.580	62,65	4.131	72,31	4.768	83,44	5.502	96,28
4	Parbuluan	5.374	94,06	6.203	108,55	7.158	125,26	8.260	144,55	9.531	166,81
5	Sumbul	9.613	168,22	11.093	194,13	12.800	224,00	14.771	258,51	17.047	298,30
6	Silahisabungan	1.107	19,38	1.278	22,36	1.474	25,81	1.702	29,78	1.963	34,37
7	Silima Pungga-Pungga	3.037	53,15	3.504	61,33	4.043	70,77	4.667	81,67	5.386	94,24
8	Lae Parira	3.016	52,77	3.480	60,90	4.016	70,27	4.633	81,08	5.347	93,57
9	Siempat Nempu	4.243	74,25	4.896	85,67	5.650	98,87	6.520	114,10	7.523	131,66
10	Siempat Nempu Hulu	4.243	74,25	4.897	85,68	5.650	98,87	6.520	114,10	7.523	131,66
11	Siempat Nempu Hilir	2.463	43,10	2.842	49,73	3.280	57,39	3.783	66,22	4.367	76,42
12	Tigalingga	5.132	89,81	5.922	103,64	6.833	119,59	7.887	138,01	9.100	159,25
13	Gunung Sitember	2.266	39,64	2.614	45,76	3.017	52,80	3.482	60,93	4.018	70,31
14	Pegagan Hilir	3.514	61,51	4.057	70,98	4.680	81,90	5.401	94,52	6.233	109,08
15	Tanah Pinem	4.770	83,48	5.504	96,33	6.352	111,16	7.330	128,28	8.459	148,03
<b>Jumlah</b>		64.926	941,15	74.922	1.086,05	86.458	1.253,27	99.770	1.446,24	115.131	1.668,92

Sumber : Data PUTR, Diolah, 2024

## **2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih**

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Oleh karena itu, penyediaan air bersih menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Dairi dalam jangka panjang. Analisis kebutuhan air bersih bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan air bersih hingga Tahun 2045, sehingga proyeksi kebutuhan tersebut dapat menjadi basis bagi besaran penyediaan air bersih kedepannya. Analisis kebutuhan air bersih dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6728.1:2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam. Hasil analisis kebutuhan air bersih di Kabupaten Dairi hingga Tahun 2045 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80  
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	TAHUN 2020		TAHUN 2025		TAHUN 2030		TAHUN 2035		TAHUN 2040		TAHUN 2045	
		Jml Penduduk (RibU jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)
1	Sidikalang	52,11	-	58,17	5234,9 - 6398,2	63,22	5689,4 - 6953,8	67,92	6113,2 - 7471,6	73,33	6599,6 - 8066,2	79,53	7157,8 - 8748,4
2	Sitinjo	14,30	-	15,07	904,1 - 1356,1	16,38	982,8 - 1474,2	17,87	1072,3 - 1608,5	18,91	1134,5 - 1701,8	19,99	1199,1 - 1798,7
3	Berampu	8,80	-	10,11	606,7 - 910	11,24	674,6 - 1011,9	12,40	744 - 1116	13,33	800 - 1200,1	14,27	856 - 1283,9
4	Parbuluan	25,19	-	28,03	2522,3 - 3082,8	30,86	2777,3 - 3394,5	33,56	3020,1 - 3691,3	35,44	3190 - 3898,8	36,83	3314,6 - 4051,2
5	Sumbul	45,65	-	49,61	4465,1 - 5457,3	53,57	4821,6 - 5893	57,28	5154,8 - 6300,3	60,27	5424,7 - 6630,1	62,85	5656,1 - 6913
6	Silahisabungan	5,22	-	5,98	359 - 538,5	6,69	401,2 - 601,8	7,36	441,4 - 662,1	8,07	484,2 - 726,3	8,83	529,8 - 794,7
7	Silima Punggapungga	14,38	-	15,86	951,6 - 1427,4	17,43	1045,6 - 1568,4	19,08	1144,8 - 1717,2	20,66	1859 - 2272,2	22,43	2018,6 - 2467,2
8	Lae Parira	14,51	-	15,88	953 - 1429,6	16,96	1017,8 - 1526,8	17,94	1076,2 - 1614,2	18,73	1123,7 - 1685,5	19,33	1159,9 - 1739,8
9	Siempat Nempu	20,27	-	22,13	1991,3 - 2433,8	24,00	2160,1 - 2640,1	25,63	2306,5 - 2819,1	27,06	2435,6 - 2976,8	28,18	2536,6 - 3100,2
10	Siempat Nempu Hulu	20,20	-	21,75	1957,2 - 2392,2	23,42	2107,7 - 2576,1	24,92	2243 - 2741,4	26,09	2348 - 2869,8	26,96	2426 - 2965,2
11	Siempat Nempu Hilir	11,80	-	13,11	786,5 - 1179,7	14,45	866,7 - 1300,1	15,78	946,7 - 1420	17,10	1025,8 - 1538,7	18,53	1111,5 - 1667,3
12	Tigalingga	24,54	-	26,01	2340,7 - 2860,9	27,81	2502,8 - 3059	29,44	2649,3 - 3238,1	30,53	2748,1 - 3358,7	31,21	2808,5 - 3432,6
13	Gunung Sitember	10,70	-	11,49	689,5 - 1034,2	12,45	747,1 - 1120,7	13,31	798,7 - 1198	13,97	838,2 - 1257,3	14,46	867,5 - 1301,2
14	Pegagan Hilir	16,82	-	18,76	1125,4 - 1688,1	20,50	1844,9 - 2254,9	22,06	1985,2 - 2426,4	23,29	2095,7 - 2561,4	24,15	2173,3 - 2656,3

15	Tanah Pinem	22,86	-	24,46	2201 - 2690,1	26,11	2350,2 - 2872,4	27,69	2491,7 - 3045,4	28,68	2581,6 - 3155,2	29,36	2642,4 - 3229,6
KABUPATEN DAIRI		307,33	-	336,40	27088,1 - 34878,7	365,09	29989,9 - 38247,6	392,22	32187,8 - 41069,5	415,47	34688,6 - 43899	436,88	36457,5 - 46149,1

Sumber: Olah Data, 2023

Berdasarkan data yang telah disajikan, proyeksi kebutuhan air menunjukkan peningkatan hingga Tahun 2045 yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Dairi. Pada Tahun 2025 diproyeksi akan dibutuhkan air bersih dalam rentang 27.088,1 m<sup>3</sup>/hari hingga 34.878,7 m<sup>3</sup>/hari untuk memenuhi kebutuhan penduduk sejumlah 336,40 ribu jiwa. Lebih lanjut pada Tahun 2045 diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan 436,88 ribu jiwa penduduk dibutuhkan air bersih sebesar 36457,5 m<sup>3</sup>/hari hingga 46149,1 m<sup>3</sup>/hari. Peningkatan kebutuhan air bersih yang didorong oleh peningkatan jumlah penduduk perlu direspon melalui kebijakan yang menysasar peningkatan ketersediaan dan pengoptimalan penyaluran dan jaringan air bersih yang ada di Kabupaten Dairi. Selain itu diperlukan upaya berkelanjutan untuk perlindungan dan konservasi sumber air baku serta proses sirkular dalam manajemen sumber daya air.

### **3. Proyeksi Kebutuhan Listrik**

Proyeksi kebutuhan listrik di masa depan memungkinkan perencanaan infrastruktur yang sesuai dan tepat sasaran. Beberapa tantangan yang perlu direspon terkait dengan pembangunan pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan penyimpanan energi. Proyeksi yang tepat diharapkan dapat membantu dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik. Hal ini penting agar tidak terjadi kekurangan energi yang dapat mengganggu kestabilan jaringan listrik. Acuan standar untuk proyeksi kebutuhan listrik Tahun 2025-2045 adalah Perpres No 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana mencapai 1.400 KWh/ per kapita atau 1,4 MWh. Proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.81

## Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2020		Proyeksi Kebutuhan Listrik									
				2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh
1	Sidikalang	52.109	N/A	58.165	81.431,00	63.216	88.502,40	67.924	95.093,60	73.329	102.660,60	79.531	111.343,40
2	Sitinjo	14.296	N/A	15.068	21.095,20	16.380	22.932,00	17.872	25.020,80	18.909	26.472,60	19.985	27.979,00
3	Berampu	8.803	N/A	10.111	14.155,40	11.243	15.740,20	12.400	17.360,00	13.334	18.667,60	14.266	19.972,40
4	Parbuluan	25.185	N/A	28.025	39.235,00	30.859	43.202,60	33.557	46.979,80	35.444	49.621,60	36.829	51.560,60
5	Sumbul	45.647	N/A	49.612	69.456,80	53.573	75.002,20	57.275	80.185,00	60.274	84.383,60	62.845	87.983,00
6	Silahisabungan	5.223	N/A	5.983	8.376,20	6.687	9.361,80	7.357	10.299,80	8.070	11.298,00	8.830	12.362,00
7	Silima Punggapungga	14.380	N/A	15.860	22.204,00	17.427	24.397,80	19.080	26.712,00	20.656	28.918,40	22.429	31.400,60
8	Lae Parira	14.510	N/A	15.884	22.237,60	16.964	23.749,60	17.936	25.110,40	18.728	26.219,20	19.331	27.063,40
9	Siempat Nempu	20.274	N/A	22.125	30.975,00	24.001	33.601,40	25.628	35.879,20	27.062	37.886,80	28.184	39.457,60
10	Siempat Nempu Hulu	20.197	N/A	21.747	30.445,80	23.419	32.786,60	24.922	34.890,80	26.089	36.524,60	26.956	37.738,40
11	Siempat Nempu Hilir	11.798	N/A	13.108	18.351,20	14.445	20.223,00	15.778	22.089,20	17.097	23.935,80	18.525	25.935,00
12	Tigalingga	24.536	N/A	26.008	36.411,20	27.809	38.932,60	29.437	41.211,80	30.534	42.747,60	31.205	43.687,00
13	Gunung Sitember	10.701	N/A	11.491	16.087,40	12.452	17.432,80	13.311	18.635,40	13.970	19.558,00	14.458	20.241,20
14	Pegagan Hilir	16.816	N/A	18.757	26.259,80	20.499	28.698,60	22.058	30.881,20	23.285	32.599,00	24.148	33.807,20
15	Tanah Pinem	22.859	N/A	24.455	34.237,00	26.113	36.558,20	27.685	38.759,00	28.684	40.157,60	29.360	41.104,00
KABUPATEN DAIRI		307.334	N/A	336.399	470.958,60	365.087	511.121,80	392.220	549.108,00	415.465	581.651,00	436.882	611.634,80

Sumber: Olah Data, 2023

Kebutuhan listrik di Kabupaten Dairi diproyeksikan terus mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada Tahun 2045 kebutuhan listrik diproyeksikan mencapai 611.634 MWh. Rentang di setiap lima tahunnya adalah mulai dari 29.983 MWh hingga 40.163 MWh. Dengan proyeksi yang akurat, diharapkan dapat menjadi acuan untuk memutuskan investasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa depan secara efisien. Hal ini membantu menghindari investasi berlebihan atau kekurangan dalam pembangunan infrastruktur. Dan yang utama dapat diprioritaskan pengembangan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan yang telah diantisipasi sebelumnya.

#### **4. Proyeksi Persampahan**

Melakukan proyeksi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di suatu wilayah diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk pengelolaan lingkungan. Hal ini memungkinkan perencanaan yang proaktif dalam mengantisipasi peningkatan volume limbah sekaligus memitigasi potensi dampak lingkungan. Proyeksi timbulan sampah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia. Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia, volume sampah yang dihasilkan oleh kota kecil berkisar pada 2,75 hingga 3,25 liter per orang per hari dan berat sampah pada 0,70 hingga 0,80 kg per orang per hari. Melalui standar tersebut, pada tingkat kecamatan, Sidikalang diproyeksikan akan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak pada Tahun 2045, dilanjutkan dengan Kecamatan Sumbul dan Kecamatan Parbuluan. Dengan demikian, ketiga kecamatan tersebut diprediksi akan menghasilkan volume dan berat sampah terbanyak di Kabupaten Dairi. Maka dari itu, kebijakan pengelolaan sampah yang lebih inovatif perlu diterapkan untuk memastikan lingkungan Kabupaten Dairi yang lebih tangguh. Kebijakan ini dapat menyasar pada proses sirkularisasi limbah hasil kegiatan perekonomian serta pengurangan sampah berbasis masyarakat.

Tabel 2.82

## Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	2025		2030		2035		2040		2045	
		Volume (M3/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (M3/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (M3/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (M3/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (M3/hari)	Berat (Ton/hari)
1	Sidikalang	160 - 189	40,7 - 46,5	173,8-205,5	44,3 - 50,6	186,8-220,8	47,5-54,3	201,7-238,3	51,3-58,7	218,7-258,5	55,7-63,6
2	Sitinjo	41,4 - 49	10,5 - 12,1	45 - 53,2	11,5 - 13,1	49,1-58,1	12,5-14,3	52-61,5	13,2-15,1	55-65	14-16
3	Berampu	27,8 - 32,9	7,1 - 8,1	30,9 - 36,5	7,9 - 9	34,1-40,3	8,7-9,9	36,7-43,3	9,3-10,7	39,2-46,4	10-11,4
4	Parbuluan	77,1 - 91,1	19,6 - 22,4	84,9 - 100,3	21,6 - 24,7	92,3-109,1	23,5-26,8	97,5-115,2	24,8-28,4	101,3-119,7	25,8-29,5
5	Sumbul	136,4 - 161,2	34,7 - 39,7	147,3-174,1	37,5 - 42,9	157,5-186,1	40,1-45,8	165,8-195,9	42,2-48,2	172,8-204,2	44-50,3
6	Silahisabungan	16,5 - 19,4	4,2 - 4,8	18,4 - 21,7	4,7 - 5,3	20,2-23,9	5,1-5,9	22,2-26,2	5,6-6,5	24,3-28,7	6,2-7,1
7	Silima Punggapungga	43,6 - 51,5	11,1 - 12,7	47,9 - 56,6	12,2 - 13,9	52,5-62	13,4-15,3	56,8-67,1	14,5-16,5	61,7-72,9	15,7-17,9
8	Lae Parira	43,7 - 51,6	11,1 - 12,7	46,7 - 55,1	11,9 - 13,6	49,3-58,3	12,6-14,3	51,5-60,9	13,1-15	53,2-62,8	13,5-15,5
9	Siempat Nempu	60,8 - 71,9	15,5 - 17,7	66 - 78	16,8 - 19,2	70,5-83,3	17,9-20,5	74,4-88	18,9-21,6	77,5-91,6	19,7-22,5
10	Siempat Nempu Hulu	59,8 - 70,7	15,2 - 17,4	64,4 - 76,1	16,4 - 18,7	68,5-81	17,4-19,9	71,7-84,8	18,3-20,9	74,1-87,6	18,9-21,6
11	Siempat Nempu Hilir	36 - 42,6	9,2 - 10,5	39,7 - 46,9	10,1 - 11,6	43,4-51,3	11-12,6	47-55,6	12-13,7	50,9-60,2	13-14,8
12	Tigalingga	71,5 - 84,5	18,2 - 20,8	76,5 - 90,4	19,5 - 22,2	81-95,7	20,6-23,5	84-99,2	21,4-24,4	85,8-101,4	21,8-25
13	Gunung Sitember	31,6 - 37,3	8 - 9,2	34,2 - 40,5	8,7 - 10	36,6-43,3	9,3-10,6	38,4-45,4	9,8-11,2	39,8-47	10,1-11,6
14	Pegagan Hilir	51,6 - 61	13,1 - 15	56,4 - 66,6	14,3 - 16,4	60,7-71,7	15,4-17,6	64-75,7	16,3-18,6	66,4-78,5	16,9-19,3
15	Tanah Pinem	67,3 - 79,5	17,1 - 19,6	71,8 - 84,9	18,3 - 20,9	76,1-90	19,4-22,1	78,9-93,2	20,1-22,9	80,7-95,4	20,6-23,5
KABUPATEN DAIRI		925,1 - 1.093,3	235,5 - 269,1	1.004 - 1.186,5	2.55,6 - 292,1	1.078,6 - 1.274,7	274,6 - 313,8	1.142,5 - 1.350,3	290,8 - 332,4	1.201,4 - 1.419,9	305,8 - 349,5

Sumber: Olah Data, 2023

## **5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Ruang Terbuka**

Proyeksi kebutuhan fasilitas sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga juga memiliki signifikansi yang besar dalam perencanaan jangka panjang. Fasilitas tersebut menjadi fokus bagi komunitas lokal, menciptakan kesempatan untuk berinteraksi, dan membangun hubungan yang kuat antar masyarakat. Selain itu fasilitas olahraga juga digunakan untuk mengembangkan bakat bagi masyarakat. Fasilitas ruang terbuka selain sebagai sarana rekreasi juga dapat digunakan sebagai tempat pembelajaran alam terbuka. Data yang disajikan pada tabel di bawah ini menunjukkan peningkatan kebutuhan pada level RT sebagai satuan terkecil masyarakat mencapai 1.748 unit taman. Sedangkan fasilitas olahraga di level kelurahan diproyeksikan sejumlah 15 unit.

Tabel 2.83  
 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2020	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olah Raga				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	307,33	336,40	365,09	392,22	415,47	436,88
Proyeksi Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga						
1. Taman untuk unit RT (unit)		1346	1460	1569	1662	1748
2. Taman untuk unit RW (unit)		135	146	157	166	175
3. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan (unit)		11	12	13	14	15
4. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kecamatan (unit)		3	3	3	3	4
5. Kuburan/TPU (unit)		3	3	3	3	4

Sumber: Olah Data, 2023

Proyeksi kebutuhan fasilitas ini membantu dalam perencanaan penggunaan lahan yang efisien untuk memastikan ruang terbuka yang memadai di tengah perkembangan Kabupaten Dairi. Fasilitas ini dapat mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan dengan menyediakan ruang terbuka yang hijau, mendukung keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak lingkungan. Penting untuk memastikan bahwa fasilitas ini tersedia secara merata bagi semua lapisan masyarakat, memastikan kesetaraan akses kelompok rentan terhadap ruang terbuka dan berbagai fasilitas pendukungnya.

## **B. Proyeksi Sarana Prasarana Kesehatan**

Ketersediaan sarana dan prasarana mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya terkait urusan pendidikan, tetapi juga dari ranah kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu urusan wajib dengan standar pelayanan minimal (SPM). Setidaknya terdapat dua aspek sarana prasarana kesehatan yang perlu diperhatikan, yakni ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana pada urusan kesehatan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2025 hingga Tahun 2045.

Tabel 2.84  
 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Dairi  
 Tahun 2025-2045

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	336,40	365,09	392,22	415,47	436,88
Proyeksi Fasilitas Kesehatan					
1. Tempat Tidur RS (unit)	336	365	392	415	437
2. Puskesmas/Pustu (unit)	15	15	15	15	15
3. Posyandu (unit)	269	292	314	332	350
4. BKIA/Klinik Bersalin (unit)	11	12	13	14	15
5. Apotik/Rumah Obat (unit)	11	12	13	14	15
6. Tempat Praktek Dokter	67	73	78	83	87
7. Dokter (orang)	336	365	392	415	437
8. Perawat (orang)	807	876	941	997	1049

Sumber: Olah Data, 2023

Sarana prasarana pada ranah kesehatan terbagi menjadi dua, yakni fasilitas kesehatan yang meliputi puskesmas atau puskesmas pembantu (pustu), posyandu, klinik bersalin, apotik, tempat praktek dokter, tempat tidur RS, dan tenaga kesehatan yang mencakup dokter serta perawat. Fasilitas kesehatan digunakan untuk memenuhi upaya pelayanan kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pada pelayanan kesehatan yang diberikan, fasilitas kesehatan menawarkan layanan medis dasar seperti pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan medis. Tanpa adanya fasilitas kesehatan, maka pelayanan kesehatan prima sulit untuk dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu, penting untuk membuat perencanaan yang memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Dairi.

Hasil proyeksi kebutuhan tempat tidur RS menyesuaikan pada standar yang telah ditetapkan oleh WHO, yakni satu tempat tidur idealnya diperuntukkan untuk 1.000 penduduk. Dalam hal ini, kebutuhan tempat tidur RS juga mengacu pada jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan, sehingga berimplikasi pada bertambahnya jumlah tempat tidur RS yang diperlukan di Kabupaten Dairi. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan sebesar 101 tempat tidur RS selama periode 2025 hingga 2045. Hal itu dikarenakan terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 100,48 ribu jiwa pada rentang tahun yang sama.

Peningkatan kebutuhan sarana prasarana berupa fasilitas kesehatan juga tampak dari posyandu, klinik bersalin, apotek, dan tempat praktik

dokter. Ketersediaan akan posyandu menjadi fasilitas kesehatan kedua setelah tempat tidur RS yang memiliki angka kebutuhan terbanyak, yakni diproyeksikan sebanyak 269 unit pada Tahun 2025 dan meningkat sebesar 81 unit pada Tahun 2045. Hal itu disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah penduduk usia 0-4 tahun. Pada sisi lain, terdapat acuan standar yang ditetapkan oleh SNI 03-1733-2004, yakni satu posyandu untuk 1.250 penduduk. Kebutuhan akan sarana prasarana pada usia 0-4 tahun juga tampak dari peningkatan kebutuhan klinik bersalin dari yang semula 11 unit menjadi 15 unit pada Tahun 2045. Dari segi acuan standar juga mengatur bahwa idealnya satu klinik bersalin disediakan untuk 30.000 penduduk, sehingga sudah menjadi konsekuensi logis ketika kebutuhan terhadap klinik bersalin juga bertambah. Tren serupa terjadi pada kebutuhan akan tempat penyediaan obat seperti apotik dan tempat praktik dokter yang juga bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk secara keseluruhan selama dua puluh tahun mendatang.

Hasil proyeksi puskesmas di Kabupaten Dairi memanfaatkan data dasar yang telah tersedia pada Tahun 2020. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Dairi secara umum tersebar kurang merata jika melihat perbandingan jumlah fasilitas kesehatan dengan luas kecamatan yang ada dan kepadatan penduduk setiap kecamatan, namun standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SNI 03-1733-2004 adalah setidaknya terdapat satu puskesmas untuk satu kecamatan, sehingga apabila terdapat 15 kecamatan, maka minimal terdapat 15 puskesmas di Kabupaten Dairi selama 20 tahun mendatang. Apabila melihat kondisi eksisting pada Tahun 2020, Kabupaten Dairi telah memiliki 18 puskesmas dan 122 puskesmas pembantu yang tersebar di 15 kecamatan. Kondisi tersebut sesungguhnya telah memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan jika hanya mengacu dari standar minimal, namun apabila ingin melakukan peningkatan pelayanan, maka perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan standar ideal rasio puskesmas dan/atau puskesmas pembantu, yakni satu untuk 30.000 penduduk.

Hal yang tidak kalah penting dari adanya fasilitas kesehatan adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil proyeksi menunjukkan angka kebutuhan dari fasilitas kesehatan yang tersedia, namun pemerintah Kabupaten Dairi berkewajiban untuk turut memastikan kualitas dari

fasilitas kesehatan yang tersedia. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas kesehatan dapat sejalan dengan kualitas pelayanan yang diberikan.

Kebutuhan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Dairi tidak hanya terbatas pada fasilitas kesehatan, tetapi juga tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan secara strategis menentukan keberhasilan dari peningkatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Dairi, serta perlu ditunjang dengan adanya fasilitas kesehatan yang mumpuni. Begitu krusialnya peran tenaga kesehatan menghasilkan urgensi bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Hasil proyeksi kebutuhan jumlah tenaga kesehatan selama dua puluh tahun mendatang di Kabupaten Dairi memanfaatkan data eksisting beberapa tahun sebelumnya sebagai basis proyeksi dengan standar rasio 1 dokter per 1000 penduduk dan 2,4 perawat per 1000 penduduk. Standar tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di dalam Dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan pada Tahun 2022. Hasil proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2025 hingga Tahun 2045 secara umum menunjukkan peningkatan. Hal itu sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk selama dua puluh tahun mendatang.

Peningkatan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan pada Tahun 2025 yang cukup jauh dibandingkan kondisi eksisting pada Tahun 2022, yakni dari 53 dokter dan 326 perawat yang tersedia pada Tahun 2022, kemudian membutuhkan 336 dokter dan 807 perawat pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebelumnya kebutuhan tersebut cenderung belum mampu dipenuhi oleh daerah. Kondisi tersebut perlu segera ditangani mengingat kebutuhan akan tenaga kesehatan terus meningkat selama dua puluh tahun mendatang, yakni 437 dokter dan 1.049 perawat diperlukan pada Tahun 2045. Penyesuaian perlu dilakukan terutama ketika melihat ketersediaan fasilitas kesehatan telah memenuhi kebutuhan, namun belum diiringi dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup dan mumpuni.

Tenaga kesehatan yang diperlukan di Kabupaten Dairi setidaknya meliputi dokter umum dan perawat. Pada kondisi eksisting maupun proyeksi keduanya menunjukkan bahwa kebutuhan akan perawat lebih banyak dibandingkan dokter. Hal itu sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa jika 1 dokter idealnya menangani 1000 penduduk, maka 1 perawat menangani 417 penduduk.

Hal itu dikarenakan interaksi perawat dengan pasien jauh lebih banyak dan lebih intens dibandingkan dokter, sehingga dalam proses pemberian layanan kesehatan, perawat secara otomatis juga menghabiskan waktu lebih lama dengan pasien dibandingkan dokter. Penyesuaian kebijakan perlu untuk dilakukan agar standar pelayanan minimal pada sektor kesehatan dapat tetap dijalankan dan diterima oleh masyarakat.

Ketersediaan dokter dan perawat selaku tenaga kesehatan juga harus disertai dengan kualitas dan kompetensi yang baik. Tenaga kesehatan yang cukup dan berkualitas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, sehingga mampu mewujudkan percepatan kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Dairi. Dengan kinerja pembangunan kesehatan yang lebih baik, kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Dairi juga semakin baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik pula, serta menunjang peningkatan IPM.

### **C. Proyeksi Sarana Prasarana Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu aspek dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sarana dan prasarana menjadi hal yang vital dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan urusan pendidikan, salah satunya kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang menunjang urusan pendidikan salah satunya adalah gedung sekolah dan tenaga pendidik. Kebutuhan sarana prasarana pendidikan bergantung pada hasil proyeksi anak usia sekolah yang berimplikasi pada jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil proyeksi anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85  
Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

No.	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Sidikalang	7.371	5.474	2.962	9.118	5.503	2.535	11.210	6.463	1.933	12.895	7.603	1.741	14.319	8.369	1.381	17.156	8.334	914
2	Sitinjo	2.060	2.039	929	2.190	1.900	882	2.434	2.173	863	2.465	2.691	1.026	2.374	2.975	1.185	2.318	3.087	1.292
3	Berampu	1.350	976	492	1.478	1.054	543	1.640	1.245	581	1.677	1.602	740	1.660	1.749	924	1.710	1.786	1.080
4	Parbuluan	3.632	3.556	1.672	3.936	3.253	1.715	4.148	3.539	1.745	3.917	4.253	2.034	3.385	4.526	2.414	2.662	4.581	2.629
5	Sumbul	6.219	5.974	2.925	7.169	5.331	2.951	7.740	5.471	2.946	7.707	6.272	3.347	7.367	6.247	3.924	7.213	5.922	4.222
6	Silahisabungan	646	611	302	803	584	304	944	611	288	1.047	696	315	1.146	701	352	1.366	661	364
7	Silima Punggapungga	1.926	1.795	841	2.250	1.707	865	2.618	1.845	852	2.857	2.184	979	3.071	2.286	1.135	3.564	2.250	1.221
8	Lae Parira	1.835	1.723	868	2.178	1.655	834	2.343	1.694	743	2.298	1.869	770	2.112	1.854	802	1.914	1.730	768
9	Siempat Nempu	2.491	2.420	1.296	2.895	2.205	1.246	3.108	2.162	1.161	3.056	2.312	1.208	2.844	2.177	1.321	2.661	1.927	1.305
10	Siempat Nempu Hulu	2.379	2.445	1.334	2.845	2.344	1.296	3.047	2.403	1.241	2.961	2.711	1.350	2.696	2.705	1.520	2.401	2.559	1.566
11	Siempat Nempu Hilir	1.501	1.475	758	1.867	1.425	747	2.174	1.507	708	2.371	1.724	766	2.534	1.775	852	2.922	1.716	869
12	Tigalingga	2.843	2.789	1.526	3.258	2.657	1.577	3.416	2.723	1.586	3.217	3.098	1.764	2.793	3.095	2.076	2.249	2.950	2.209

No.	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
13	Gunung Sitember	1.242	1.226	686	1.453	1.137	684	1.552	1.148	683	1.507	1.273	739	1.368	1.254	861	1.212	1.175	895
14	Pegagan Hilir	2.164	2.106	1.021	2.454	2.055	1.055	2.600	2.203	1.031	2.462	2.562	1.150	2.119	2.693	1.316	1.654	2.681	1.377
15	Tanah Pinem	2.810	2.648	1.326	3.216	2.618	1.435	3.417	2.825	1.489	3.266	3.346	1.719	2.882	3.528	2.070	2.388	3.535	2.256
KABUPATEN DAIRI		40.469	37.257	18.938	47.110	35.428	18.669	52.391	38.012	17.850	53.703	44.196	19.648	52.670	45.934	22.133	53.390	44.894	22.967

Sumber: Olah Data, 2023

Hasil proyeksi anak usia sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di setiap kecamatan di Kabupaten Dairi menunjukkan hasil yang berbeda-beda satu sama lain. Anak usia sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kelompok dengan jumlah tertinggi pada kondisi eksisting Tahun 2020 hingga proyeksi Tahun 2045. Penurunan jumlah anak usia sekolah dari jenjang pendidikan PAUD hingga Sekolah Menengah Pertama sederajat (SMP) menunjukkan bahwa tidak semua anak yang menempuh PAUD melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang mengindikasikan adanya permasalahan pada urusan pendidikan, seperti sulitnya akses pendidikan. Hal itu harus menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Dairi karena pendidikan menjadi salah satu pondasi awal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, mengingat Kabupaten Dairi terus mengalami penurunan persentase penduduk yang berusia 0-14 tahun, maka sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan agar tetap mampu mempertahankan juga meningkatkan kualitas SDM melalui sektor pendidikan.

Proyeksi jumlah anak usia sekolah hingga Tahun 2045 secara umum mengalami fluktuasi di setiap kecamatan. Hal itu dapat mengindikasikan bahwa kondisi demografi di Kabupaten Dairi cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun demikian, kebijakan yang berbeda harus diambil oleh pemerintah Kabupaten Dairi untuk penyesuaian sistem pendidikan yang dijalankan dua puluh tahun kedepan, misalnya terkait peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan disertai dengan penyelenggaraan sistem pendidikan yang lebih baik. Harapannya kondisi demografi tersebut mampu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Jika mengacu pada jumlah anak usia sekolah per wilayah, Kecamatan Sidikalang menduduki posisi teratas dengan jumlah anak usia sekolah tertinggi, sedangkan Kecamatan Silahisabungan berada di posisi terakhir dengan jumlah anak usia sekolah yang tidak sampai setengah dari Kecamatan Sidikalang. Hal itu sejalan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Dairi yang juga memiliki urutan per kecamatan yang sama. Meskipun demikian, tidak semua anak usia sekolah otomatis dapat terdata menjadi data siswa di suatu daerah. Hal itu dikarenakan usia

sekolah yang ditetapkan secara nasional adalah pada rentang 6 hingga 12 tahun, sedangkan ada kemungkinan anak yang berusia di bawah 6 tahun yang sudah memulai studi, maupun anak yang sudah berada pada rentang usia tersebut belum atau tidak menempuh studi pada jenjang pendidikan apapun. Oleh karena itu, diperlukan data aktual yang presisi terkait jumlah siswa untuk melihat tingkat kebutuhan sarana prasarana pada urusan pendidikan. Berikut merupakan proyeksi jumlah siswa selama 20 tahun kedepan di Kabupaten Dairi.

Tabel 2.86  
Proyeksi Jumlah Siswa di Kabupaten Dairi pada Tahun 2025-2045

No.	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Sidikalang	683	6.626	4.244	912	5.503	2.535	1.121	6.463	1.933	1.289	7.603	1.741	1.432	8.369	1.381	1.716	8.334	914
2	Sitinjo	50	1.252	627	219	1.900	882	243	2.173	863	246	2.691	1.026	237	2.975	1.185	232	3.087	1.292
3	Berampu	24	991	532	148	1.054	543	164	1.245	581	168	1.602	740	166	1.749	924	171	1.786	1.080
4	Parbuluan	97	4.210	1.995	394	3.253	1.715	415	3.539	1.745	392	4.253	2.034	339	4.526	2.414	266	4.581	2.629
5	Sumbul	186	6.646	3.401	717	5.331	2.951	774	5.471	2.946	771	6.272	3.347	737	6.247	3.924	721	5.922	4.222
6	Silahisabungan	27	716	381	80	584	304	94	611	288	105	696	315	115	701	352	137	661	364
7	Silima Punggapungga	84	2.025	906	225	1.707	865	262	1.845	852	286	2.184	979	307	2.286	1.135	356	2.250	1.221
8	Lae Parira	-	1.836	972	218	1.655	834	234	1.694	743	230	1.869	770	211	1.854	802	191	1.730	768
9	Siempat Nempu	-	2.602	1.091	290	2.205	1.246	311	2.162	1.161	306	2.312	1.208	284	2.177	1.321	266	1.927	1.305
10	Siempat Nempu Hulu	25	2.050	1.138	285	2.344	1.296	305	2.403	1.241	296	2.711	1.350	270	2.705	1.520	240	2.559	1.566
11	Siempat Nempu Hilir	-	1.668	944	187	1.425	747	217	1.507	708	237	1.724	766	253	1.775	852	292	1.716	869
12	Tigalingga	51	2.976	1.942	326	2.657	1.577	342	2.723	1.586	322	3.098	1.764	279	3.095	2.076	225	2.950	2.209
13	Gunung Sitember	-	1.170	277	145	1.137	684	155	1.148	683	151	1.273	739	137	1.254	861	121	1.175	895
14	Pegagan Hilir	23	2.316	1.184	245	2.055	1.055	260	2.203	1.031	246	2.562	1.150	212	2.693	1.316	165	2.681	1.377
15	Tanah Pinem	-	2.755	887	322	2.618	1.435	342	2.825	1.489	327	3.346	1.719	288	3.528	2.070	239	3.535	2.256
KABUPATEN DAIRI		1.250	9.839	0.521	4.713	5.428	18.669	5.239	38.012	17.850	5.372	44.196	19.648	5.267	45.934	22.133	5.338	44.894	22.967

Sumber: Olah Data, 2023

Jumlah siswa di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 didominasi oleh siswa yang bersekolah di Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Sumbul pada setiap jenjang pendidikan. Tren peningkatan pada hasil proyeksi dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045 yang terjadi pada jenjang pendidikan PAUD di Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Sumbul tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah. Meskipun begitu, kesadaran tersebut masih harus terus dipupuk terutama ketika melihat penurunan jumlah siswa sekolah yang melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dibandingkan jenjang pendidikan di bawahnya di setiap kecamatan.

Hasil proyeksi terkait jumlah siswa di Kabupaten Dairi tampak berfluktuasi menyesuaikan struktur demografi dan tren dari data dasar yang digunakan. Penurunan jumlah siswa secara kontinyu tampak dari Tahun 2025 dan terus mengalami penurunan hingga Tahun 2045. Penurunan tersebut terjadi di seluruh kecamatan, meskipun persebaran di jenjang pendidikannya yang berbeda, seperti Kecamatan Sidikalang yang mengalami penurunan hanya pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama sederajat sejak Tahun 2025, dan terdapat pula kecamatan yang mengalami penurunan di semua jenjang pendidikan pada Tahun 2045, seperti Kecamatan Lae Parira dan Siempat Nempu. Penurunan jumlah siswa sekolah pada hasil proyeksi dikarenakan adanya perubahan struktur penduduk secara umum di Kabupaten Dairi, yakni kelompok usia 0-14 tahun mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Kondisi yang demikian menuntut adanya kebijakan khusus yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dijalankan, sehingga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan selama dua puluh tahun mendatang tidak turut menurun seiring berkurangnya jumlah siswa yang ada.

Perubahan struktur penduduk secara keseluruhan turut serta memengaruhi persebaran sarana dan prasarana yang dibutuhkan di tiap kecamatan. Hal itu menuntut adanya perencanaan terkait penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan selama dua puluh tahun mendatang dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga perencanaan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran. Salah satu cara

untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana dasar di Kabupaten Dairi adalah dengan melakukan proyeksi untuk dua puluh tahun mendatang.

Salah satu sarana prasarana dasar yang diperlukan pada urusan pendidikan adalah ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten. Peran tenaga pendidik, seperti guru sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah. Hal itu dikarenakan guru tidak hanya berperan untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada siswa, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu mengajarkan nilai-nilai yang baik, serta mempersiapkan seorang siswa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Peran guru yang begitu krusial menghadirkan urgensi untuk memberikan perhatian yang cukup pada proses pembentukan perencanaan di suatu daerah, terutama terkait ketersediaan jumlah guru yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut merupakan proyeksi jumlah guru yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem pembelajaran yang ideal di Kabupaten Dairi selama dua puluh tahun mendatang.

Tabel 2.87

## Proyeksi Jumlah Kebutuhan Guru di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Sidikalang	43	366	234	61	275	127	75	323	97	86	380	87	95	419	69	114	417	46
2	Sitinjo	4	66	35	15	95	44	16	109	43	16	135	51	16	149	59	15	154	65
3	Berampu	3	57	37	10	53	27	11	62	29	11	80	37	11	87	46	11	89	54
4	Parbuluan	43	199	117	26	163	86	28	177	87	26	213	102	23	226	121	18	229	131
5	Sumbul	10	355	169	48	266	147	52	274	147	51	314	167	49	312	196	48	296	211
6	Silahisabungan	1	44	23	5	29	15	6	31	14	7	35	16	8	35	18	9	33	18
7	Silima Punggapungga	6	135	48	15	85	43	17	92	43	19	109	49	20	114	57	24	113	61
8	Lae Parira	-	131	35	15	83	42	16	85	37	15	93	38	14	93	40	13	87	38
9	Siempat Nempu	-	180	69	19	110	62	21	108	58	20	116	60	19	109	66	18	96	65
10	Siempat Nempu Hulu	1	143	64	19	117	65	20	120	62	20	136	67	18	135	76	16	128	78
11	Siempat Nempu Hilir	-	112	51	12	71	37	14	75	35	16	86	38	17	89	43	19	86	43
12	Tigalingga	3	204	106	22	133	79	23	136	79	21	155	88	19	155	104	15	148	110
13	Gunung Sitember	-	74	23	10	57	34	10	57	34	10	64	37	9	63	43	8	59	45
14	Pegagan Hilir	4	118	61	16	103	53	17	110	52	16	128	57	14	135	66	11	134	69
15	Tanah Pinem	-	173	54	21	131	72	23	141	74	22	167	86	19	176	104	16	177	113
KABUPATEN DAIRI		118	2.357	1.126	31 4	1.771	933	349	1.900	891	356	2.211	980	351	2.297	1.108	355	2.246	1.147

Sumber: Olah Data, 2023

Hasil proyeksi kebutuhan jumlah guru selama dua puluh tahun mendatang pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Dairi memanfaatkan pola eksisting yang telah ada sebelumnya, sedangkan pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) menggunakan asumsi rasio dari kebijakan PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru yaitu 1 guru untuk 20 siswa. Penggunaan asumsi rasio antara guru dan siswa berimplikasi pada persamaan tren yang dihasilkan oleh proyeksi jumlah siswa dengan proyeksi kebutuhan guru. Semakin banyak jumlah murid yang diproyeksikan, maka semakin banyak pula jumlah guru yang dibutuhkan di suatu wilayah, begitu juga sebaliknya. Penggunaan asumsi rasio 1 guru untuk 20 murid berguna untuk menjaga efektivitas dan kualitas dari sistem pembelajaran yang dijalankan di Kabupaten Dairi.

Jumlah guru pada kondisi eksisting pada rentang Tahun 2009 hingga 2022 pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menunjukkan ketercukupan dari jumlah guru yang dibutuhkan di Kabupaten Dairi, kecuali untuk jenjang pendidikan anak usia dini yang masih memerlukan tambahan jumlah guru pada Tahun 2025. Hal itu tampak dari hasil proyeksi yang menunjukkan penurunan jumlah kebutuhan guru yang diperlukan oleh jenjang pendidikan Sekolah Dasar sederajat dan Sekolah Menengah Pertama sederajat dan peningkatan jumlah pada jenjang PAUD pada Tahun 2025. Selain itu, apabila melihat rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan SD dan SMP yang telah berada di angka 0,06 mengindikasikan bahwa 1 guru mengampu 17 murid atau dapat dikatakan dalam kondisi ideal. Namun, perlu diperhatikan pula terkait persebaran dari guru yang tersedia karena proyeksi yang dihasilkan berskala kecamatan, dan ada potensi guru yang tersedia di sekolah favorit lebih banyak dibandingkan sekolah lainnya. Selain itu, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah memastikan guru yang tersedia juga memiliki kompetensi yang sesuai standar, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pengajaran dari guru sesuai dengan jumlah ideal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga tetap mendapatkan kualitas dari pengajaran tersebut.

Sarana dan prasarana pendidikan lain yang diperlukan oleh penduduk adalah ketersediaan gedung sekolah. Ketersediaan akan gedung sekolah menjadi penting dalam proses penyelenggaraan sistem pendidikan karena menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hasil proyeksi kebutuhan gedung sekolah di Kabupaten Dairi per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88

## Proyeksi Jumlah Kebutuhan Sekolah di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Sidikalang	11	28	10	22	33	12	23	37	12	25	46	12	25	49	13	26	47	13
2	Sitinjo	2	5	2	5	7	3	5	8	3	5	11	3	5	12	4	5	11	4
3	Berampu	1	7	1	3	8	1	3	9	1	3	11	1	3	12	2	3	12	2
4	Parbuluan	2	20	6	7	23	7	7	25	7	8	30	8	8	31	9	8	30	9
5	Sumbul	3	42	12	11	47	14	12	50	13	13	57	14	13	59	16	13	58	17
6	Silahasabungan	1	6	2	2	7	2	2	7	2	2	8	2	2	8	2	2	8	2
7	Silima Punggapungga	1	18	2	4	20	3	4	21	3	4	24	3	4	25	4	4	24	4
8	Lae Parira	-	13	3	3	15	4	3	16	4	3	18	4	3	19	4	3	19	4
9	Siempat Nempu	-	20	3	3	22	4	3	23	4	3	26	4	3	27	5	3	27	5
10	Siempat Nempu Hulu	1	16	3	4	18	4	4	19	4	4	22	4	4	23	5	4	22	5
11	Siempat Nempu Hilir	-	15	3	2	16	4	2	17	4	2	19	4	2	20	5	2	20	5
12	Tigalingga	1	22	6	5	25	7	5	27	7	5	31	7	5	32	8	5	31	8
13	Gunung Sitember	-	9	1	2	10	2	2	11	2	2	12	2	2	12	3	2	12	3
14	Pegagan Hilir	1	17	5	4	19	6	4	20	6	4	23	6	4	24	7	4	23	7
15	Tanah Pinem	-	22	4	4	25	5	4	27	5	4	31	5	4	32	6	4	31	6
Kabupaten Dairi		24	260	63	81	295	78	83	317	77	87	369	79	87	385	93	88	375	94

Sumber: Olah Data, 2023

Jumlah kebutuhan gedung sekolah yang diproyeksikan di lima belas kecamatan di Kabupaten Dairi secara umum memiliki tren peningkatan selama dua puluh tahun mendatang. Hal itu mengindikasikan bahwa jumlah gedung sekolah yang tersedia, baik pada jenjang pendidikan PAUD, SD, maupun SMP masih perlu menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Penurunan jumlah gedung sekolah di Kabupaten Dairi diproyeksikan terjadi pada Tahun 2045, yakni di Kecamatan Sidikalang, Sitingo, Parbuluan, Sumbul, Silimapunggapungga, Siempat Nempu Hulu, Tigalingga, Pegagan Hilir, dan Tanah Pinem.

Penurunan kebutuhan jumlah gedung sekolah dalam hasil proyeksi tidak dapat dimaknai sebagai kebutuhan untuk mengurangi jumlah gedung sekolah yang tersedia melainkan diperlukan kebijakan pengurangan jumlah rombongan belajar atau kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan peraturan terbaru terkait rombongan belajar melalui Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023. Jumlah rombongan belajar yang ditetapkan pada peraturan tersebut mencakup angka minimal dan maksimal rombongan belajar pada tiap jenjang pendidikan. Hal itu memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi atau menambah jumlah rombongan belajar di wilayahnya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang ada.

Jumlah rombongan belajar yang ideal di setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh kemendikbudristek, yakni 1-16 rombel untuk jenjang PAUD, 6-24 rombel untuk SD sederajat, dan 6-30 rombel untuk SMP sederajat. Pada masing-masing rombongan belajar juga diatur terkait jumlah siswa yang dapat ditampung, yakni maksimal 10-15 siswa untuk jenjang PAUD tergantung pada usia anak yang mengikuti PAUD, kemudian maksimal 28 untuk SD sederajat, dan 32 untuk SMP sederajat. Apabila dalam satu rombel telah melebihi kapasitas siswa yang dapat ditampung, maka perlu penambahan rombel. Logika serupa juga berlaku pada gedung sekolah, apabila dalam satu gedung sekolah terdapat lebih dari jumlah rombel maksimal yang telah ditetapkan, maka hadir kebutuhan untuk menambah gedung sekolah agar efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran tetap terjaga. Kebijakan penambahan gedung sekolah berdasarkan hasil proyeksi tersebut yang harus diambil oleh enam kecamatan selama dua puluh tahun mendatang, yakni Kecamatan

Berampu, Silahisabungan, Lae Parira, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hilir, dan Gunung Sitember.

Kebijakan yang berbeda harus diambil oleh sembilan kecamatan lain, yakni Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan, Sumbul, Silimapunggapungga, Siempat Nempu Hulu, Tigalingga, Pegagan Hilir, dan Tanah Pinem. Hasil proyeksi yang menunjukkan adanya penurunan jumlah gedung sekolah tidak berarti bahwa gedung sekolah yang telah tersedia dimusnahkan, melainkan pemerintah daerah perlu menyesuaikan kembali rombongan belajar yang ditetapkan sebelumnya pada sembilan kecamatan tersebut, dalam konteks ini dilakukan pengurangan jumlah rombongan belajar. Jumlah siswa yang lebih sedikit pada suatu rombongan belajar akan meningkatkan efektivitas dari pemahaman siswa terhadap informasi yang diterima oleh siswa. Konsekuensi dari pengurangan jumlah siswa di dalam suatu rombongan belajar adalah jumlah rombongan belajar yang tetap, sehingga gedung yang tersedia dapat tetap digunakan.

#### **2.6.4 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

##### **A. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Berdasarkan RTRW**

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi merupakan arahan perwujudan ruang yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi berdasarkan dokumen RTRW Tahun 2014-2034 bertujuan untuk "mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan".

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Adapun strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah yang diwujudkan menjadi langkah-langkah operasional. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi meliputi berbagai kebijakan dan antara lain sebagai berikut ini.

Tabel 2.89  
Kebijakan dan strategi RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

No.	Kebijakan RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034	Strategi RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034
1	Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar wilayah	Peningkatan interaksi kawasan untuk perkembangan ekonomi dengan pengembangan jaringan jalan, sarana dan prasarana daerah lainnya
2	Pengembangan wilayah pusat-pusat permukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah	<p>Peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri melalui pola intensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan</p> <p>Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian</p> <p>Peningkatan pengembangan agroindustri berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya</p> <p>Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan sektor primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja</p>
3	Peningkatan fungsi Kawasan Perkotaan Sidikalang sebagai PKW dan Kawasan Perkotaan Sumbul, Tigalingga dan Parongil sebagai PKLp	<p>Pengembangan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah</p> <p>Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal</p> <p>Peningkatan prasarana transportasi dalam rangka untuk</p>

No.	Kebijakan RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034	Strategi RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034
		menunjang pengembangan ekonomi daerah
4	Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan lindung dan lain-lainnya	<p data-bbox="854 468 1419 667">Penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi</p> <p data-bbox="854 667 1419 867">Penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat</p> <p data-bbox="854 867 1419 1066">Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan</p> <p data-bbox="854 1066 1419 1265">Penggalangan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung</p> <p data-bbox="854 1265 1419 1415">Pengaturan penduduk yang berada dalam kawasan lindung dalam bentuk enclave dan relokasi</p> <p data-bbox="854 1415 1419 1540">melarang aktifitas penduduk dalam hutan lindung</p>
5	Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan	<p data-bbox="854 1540 1419 1789">Peningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan</p> <p data-bbox="854 1789 1419 2038">Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat</p> <p data-bbox="854 2038 1419 2252">Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang</p>

No.	Kebijakan RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034	Strategi RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034
		<p>lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi</p> <p>Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan</p>
6	Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan	<p>Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis)</p> <p>Peningkatan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif</p> <p>Peningkatan keterkaitan fungsional pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama pertanian untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah</p> <p>Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana</p> <p>Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat pada pusat permukiman</p> <p>Pemabngunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu</p>

No.	Kebijakan RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034	Strategi RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034
		mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berimbang

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Rencana struktur ruang di Kabupaten Dairi disebutkan terbagi menjadi sistem perkotaan, transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumberdaya air dan jaringan prasarana wilayah lainnya. Sistem perkotaan Kabupaten Dairi mencakup pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL) dan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp). Adapun distribusi masing – masing pusat kegiatan tersebut disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 2.90

## Struktur Ruang Kabupaten Dairi

PKW	PPK	PPL	PKLp
Perkotaan Sidikalang	Perkotaan Bunturaja, Sumbul, Paronggil, dan Tigalingga	Kutabuluh di Kecamatan Tanah Pinem	Perkotaan Sumbul, Paronggil dan Tigalingga
		Silalahi di Kecamatan Silahisabungan	
		Sigalingging di Kecamatan Parbuluan	
		Berampu di Kecamatan Berampu	
		Lae Parira di Kecamatan Lae Parira	
		Silumboyah di Kecamatan Siempat Nempu Hulu	
		Tigabaru di Kecamatan Pegagan Hilir	
		Sopobutar di Kecamatan Siempat Nempu Hilir	
		Gunung Sitember di Kecamatan Gunung Sitember	

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Struktur ruang wilayah Kabupaten Dairi juga dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana, salah satunya sistem jaringan transportasi. Terdiri dari jaringan transportasi darat lengkap dengan jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan angkutan danau. Jaringan transportasi udara di Kabupaten Dairi akan dikembangkan dengan tujuan mendukung pergerakan angkutan udara.

Pembentuk struktur ruang Kabupaten Dairi lainnya terdiri dari sistem jaringan energi, yang mencakup pembangkit tenaga listrik dan

jaringan transmisi tenaga listrik. Jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan terestrial yang mencakup sistem kabel dan nirkabel, serta jaringan satelit. Sistem jaringan sumber daya air mencakup jaringan sumber daya air dan prasarana sumber daya air. Adapun sistem jaringan prasaran wilayah lainnya, terdiri dari sistem pengelolaan sampah, sistem drainase, jaringan air limbah, tempat pemakaman umum dan jalur evakuasi bencana.

Berbeda dengan struktur ruang wilayah yang terdiri dari sistem jaringan sarana dan prasarana, pola ruang wilayah Kabupaten Dairi mengatur terkait penggunaan lahan yang terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang dapat dikembangkan. Luas hutan lindung yang merupakan dari bagian kawasan lindung di Kabupaten Dairi sebesar 56.068 Ha dan tersebar di 13 kecamatan. Wilayah lain Kabupaten Dairi merupakan kawasan budidaya yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah. Rencana pemanfaatan ruang kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi seluas terbatas 61.805Ha dan hutan produksi tetap 12.639 Ha, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian yang mencakup lahan basah pertanian 10.824,86 dan lahan kering 51,373 Ha, kawasan peruntukan perkebunan seluas 3.281,97 Ha, kawasan peruntukan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah menunjukkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja. Seperti yang dijabarkan pada Bab II, kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi sudah cukup baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan tercapainya beberapa target indikator. Namun demikian, hasil tersebut masih perlu ditingkatkan terutama beberapa urusan yang belum memenuhi target. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal yang dirumuskan dalam sebuah pemetaan masalah. Pendekatan ini mengidentifikasi kondisi riil yang diperkuat dengan analisis data capaian kinerja dari Pemerintah Kabupaten Dairi selama 20 tahun terakhir. Pemetaan ini untuk memberikan gambaran dalam merumuskan tema setiap periode rencana pembangunan jangka menengah dan intervensi arah kebijakan.

##### **3.1.1 Permasalahan Pembangunan Sosial**

###### **A. Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Pendidikan**

Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS dan HLS menggambarkan kondisi akses layanan pendidikan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka RLS dan HLS menunjukkan semakin tinggi kesempatan untuk mengakses layanan pendidikan. Selama periode 2010-2023, angka RLS dan HLS Kabupaten Dairi menunjukkan trend yang meningkat. Pada Tahun 2023, RLS Kabupaten Dairi sebesar 9,88 atau setara kelas 3 SMP, sedangkan HLS sebesar 13,32 atau setara jenjang D1. Meskipun mengalami peningkatan, namun jika dibanding dengan wajib belajar 12 tahun atau setara kelas 3 SMA, capaian tersebut masih cukup jauh sehingga dengan kebijakan yang akan diterapkan, pada Tahun 2045 dapat mencapai angka target untuk RLS menjadi 13,27 atau setara jenjang D1 dan untuk HLS menjadi 15,10 atau setara dengan D3. Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) khususnya pada perguruan tinggi capaiannya masih tergolong rendah yakni 26,83%

(2022). Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan pada semua jenjang di Kabupaten Dairi masih perlu dioptimalkan pada periode pembangunan berikutnya.

Dari segi peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan layanan pendidikan di Kabupaten Dairi juga masih mengalami kendala diantaranya jumlah guru pada pendidikan dasar cenderung menurun selama sepuluh tahun terakhir (2010-2023), sedangkan jumlah guru pada pendidikan menengah dan atas relatif meningkat. Selain dari segi jumlah, sebaran guru berkompeten pada pada setiap jenjang pendidikan perlu ditingkatkan. Guru merupakan agen perubahan untuk mendukung perkembangan anak didik secara menyeluruh. Dari segi jumlah sekolah di Kabupaten Dairi cukup memadai dan mengalami peningkatan selama periode Tahun 2009-2023. Namun, dari segi fasilitas pembelajaran seperti bahan ajar, alat pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran masih perlu ditingkatkan untuk mendukung hasil pembelajaran yang optimal.

## **B. Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Kesehatan**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Masyarakat yang sehat merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Kualitas pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi stunting, kondisi fasilitas kesehatan, dan ketersediaan sumber daya kesehatan.

Selama satu dekade (2013-2023), capaian AHH Kabupaten Dairi menunjukkan trend meningkat dan berhasil naik 4,49 tahun dari Tahun 2022. Pada Tahun 2023, AHH Kabupaten Dairi sebesar 74,13. Angka tersebut lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,98. Meskipun capaian AHH Kabupaten Dairi cukup bagus, namun dari segi pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan dan dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang akan diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Dairi AHH diharapkan dapat mencapai angka 79 pada Tahun 2045. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, dan prevalensi stunting. Pada Tahun 2022, angka kematian ibu 121 per 100.000 kelahiran hidup dan

menurun pada Tahun 2023 menjadi 77 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada Tahun 2023 angka kematian bayi 6 per 1.000 kelahiran hidup dan prevalensi stunting 13,19% pada Tahun 2023. Masih adanya kasus tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bayi, dan balita masih perlu ditingkatkan melalui pemantauan kesehatan ibu hamil dan bayi, edukasi kepada masyarakat baik mengenai menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi, peningkatan kualitas layanan persalinan, penyediaan bantuan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak bayi, serta edukasi pola dan keterampilan penyediaan pangan sehat dan bergizi bagi keluarga, serta sosialisai kesadaran sanitasi rumah tangga yang sehat dan aman.

Dari segi fasilitas kesehatan, Kabupaten Dairi memiliki 1 rumah sakit umum yakni RSUD Sidikalang dan 1 unit rumah sakit swasta. Rumah sakit tersebut menjadi tempat rujukan bagi masyarakat Kabupaten Dairi yang tersebar di 15 kecamatan. Terbatasnya jumlah dan tipe rumah sakit yang ada di Kabupaten Dairi mengakibatkan beberapa pasien harus dirujuk ke daerah lain seperti Medan dan Kabanjahe yang memiliki fasilitas kesehatan lebih memadai. Fasilitas kesehatan yang lainnya seperti Puskesmas dan Pustu memiliki jumlah yang cukup memadai. Namun, berdasarkan dokumen LPPD Kabupaten Dairi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana, serta alat kesehatan yang sesuai standar masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dari segi ketersediaan SDM kesehatan juga perlu ditingkatkan, terutama dokter spesialis, serta pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan puskesmas dan tenaga penunjang manajemen.

### **C. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan**

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dengan demikian tujuan utama dari kesejahteraan yaitu menurunnya tingkat kemiskinan. Indikatornya adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu umum baik secara global, nasional maupun daerah yang urgen untuk diselesaikan. Kemiskinan juga merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan hidup atau kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten

Dairi selama periode Tahun 2019 hingga Tahun 2023 memiliki tren fluktuatif. Pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan karena dampak COVID-19. Namun pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 persentase penduduk miskin menurun di Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi terus berupaya untuk menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi dengan berbagai program dan kebijakan yang dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dairi.

Tabel 3.1  
Permasalahan Pembangunan Sosial

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1.	Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan	Belum optimalnya akses pendidikan dasar
		Belum optimalnya jumlah dan sebaran guru yang berkualitas
		Sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan
2.	Belum optimalnya akses dan kualitas kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bayi, dan balita
		Terbatasnya jumlah dan tipe rumah sakit
		Sarana dan prasarana, serta alat kesehatan yang sesuai standar masih perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya ketersediaan SDM kesehatan, terutama dokter spesialis, serta pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan puskesmas dan tenaga penunjang manajemen
3.	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan	Belum memadainya sumber penghidupan yang layak
		Belum optimalnya pelayanan sosial bagi PPKS
		Masih rendahnya penghasilan PPKS

### 3.1.2 Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Permasalahan pembangunan daerah bidang ekonomi merujuk pada kondisi perekonomian Kabupaten Dairi yang masih menghadapi tantangan antara lain kondisi perekonomian belum optimal, pendapatan per kapita masih rendah, pengelolaan sektor unggulan dan potensi daerah serta investasi daerah belum optimal. Berikut hasil analisis terhadap masing-masing permasalahan pembangunan daerah bidang ekonomi secara rinci, sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Permasalahan Pembangunan Ekonomi

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1.	Perekonomian daerah belum optimal	Pertumbuhan sektor unggulan belum optimal
		Iklim investasi daerah belum optimal
		Pendapatan per kapita masih rendah

Salah satu permasalahan dalam bidang ekonomi yang dialami oleh Kabupaten Dairi dalam jangka panjang adalah belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2023, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Dairi tercatat mengalami tren peningkatan, dengan LPE pada Tahun 2009 sebesar 4,72 persen meningkat ke angka 5,04 persen pada LPE Tahun 2023. Selain perihal laju pertumbuhan ekonomi, angka PDRB ADHB Kabupaten Dairi juga masih menunjukkan angka yang dibawah Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi ini memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan sektor unggulan yang belum optimal. Perekonomian Kabupaten Dairi sejauh ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB tercatat mencapai rata-rata sebesar 43,19 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Meskipun dominan, sektor pertanian belum dapat mendorong perekonomian Kabupaten Dairi secara lebih lanjut. Hal ini disebabkan masih belum adanya proses hilirisasi produk pertanian, penggunaan metode konvensional sehingga produk-produk pertanian yang dihasilkan masih sebatas bahan mentah yang belum bisa memberikan banyak nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Berikutnya, sektor utama lainnya untuk menunjang perekonomian di Kabupaten Dairi, adalah melalui sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Dairi telah berhasil menajlin kerja sama dan menjadi salah satu tuan rumah *event* Internasional seperti *Aqua Bike*, namun dirasa masih perlu untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Dairi melalui promosi dan kerjasama pariwisata dengan daerah dan pelaku wisata lainnya, peningkatan diversifikasi atraksi wisata alam, wisata budaya (pagelaran seni dan budaya lokal), wisata buatan (olahraga), dan wisata kuliner (berbahan lokal), peningkatan akses, amenitas, dan atraksi wisata, serta peningkatan edukasi dan vokasi pariwisata sehingga diharapkan

perekonomian daerah di Kabupaten Dairi dapat ditingkatkan melalui sektor unggulan pariwisata.

Selanjutnya, iklim investasi daerah yang masih belum optimal juga menjadi salah satu faktor masih belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, realisasi investasi di Kabupaten Dairi menunjukkan tren yang positif dengan adanya kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan per kapita masyarakat yang selisih cukup jauh dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 2023, PDRB per Kapita Kabupaten Dairi sebesar Rp. 35.877.624,16, sedangkan PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 68.305.712,44, (BPS Sumut, 2024).

Masih belum optimalnya iklim investasi daerah yang berdampak pada perekonomian masyarakat disebabkan karena upaya pengembangan promosi investasi dan peningkatan pelayanan publik dibidang penanaman modal masih belum optimal. Untuk itu, pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada pembangunan di periode yang mendatang. Selain itu, faktor pendukung lainnya yang perlu ditingkatkan yakni kualitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia, dan menjaga kondusifitas daerah.

Rendahnya pendapatan perkapita di Kabupaten Dairi disebabkan oleh rendahnya akselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama akselerasi pertumbuhan di ekonomi sektor unggulan dan potensial. Pertumbuhan ekonomi tersebut harus didukung oleh peningkatan realisasi investasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang merata untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi. Peningkatan kinerja sektor pertanian dan industri olahan juga harus dikejar dengan melibatkan kolaborasi antar *stakeholders* secara berkesinambungan dan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

### 3.1.3 Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 3.3  
Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1.	Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi	Penerapan akuntabilitas kinerja belum optimal
		Kualitas pelayanan publik belum optimal
		Manajemen ASN belum optimal

Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) di Kabupaten Dairi belum berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan predikat RB Kabupaten Dairi Tahun 2023, yaitu B atau “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAHLAK dengan ASN yang professional. Kebijakan yang direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi antara lain penambahan cakupan indikator SDGs terpilih dan relevan, perluasan *coverage* jaringan internet ke seluruh wilayah, pengembangan sistem database terpadu yang melibatkan seluruh wali data, peningkatan akses, kualitas dan kelengkapan data dan statistik pembangunan daerah yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh wali data, pengembangan website statistik daerah yang *userfriendly*, serta peningtan SDM ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan predikat opini BPK WTP. Artinya bahwa pelaporan pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan baik.

#### **3.1.4 Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup menjadi salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Artinya, dalam sebuah proses pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakatnya, harus dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Kabupaten Dairi mendapatkan predikat baik untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Tahun 2023. Predikat tersebut memiliki nilai capaian yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 sebesar 70,20 dan meningkat menjadi 78,96 pada Tahun 2023. Namun, Kabupaten Dairi masih memiliki permasalahan dalam urusan lingkungan hidup pada beberapa sektor. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dairi diantaranya terkait pengelolaan persampahan yang belum optimal di fasilitas pengolahan sampah dimana diharapkan dengan upaya berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Dairi diharapkan pengolahan timbulan sampah dapat di maksimalkan, serta masalah sarana dan prasarana yang belum tersedia secara merata melayani di setiap

kecamatan di Kabupaten Dairi dapat dipenuhi sehingga permasalahan terkait area pelayanan persampahan dapat diselesaikan. Selain itu, rasa kepedulian masyarakat di Kabupaten Dairi terkait penanganan sampah juga dinilai masih kurang. Kondisi tersebut yang menjadikan capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Dairi belum optimal hingga Tahun 2023. Berikut disajikan secara lebih terperinci permasalahan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Dairi.

Tabel 3.4  
Permasalahan pembangunan lingkungan hidup

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya pengendalian dan pengelolaan sampah
		Ketersediaan sarana prasarana persampahan yang belum lengkap
		Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah
		Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup

### 3.1.5 Permasalahan Pembangunan Infrastruktur

Perkembangan wilayah salah satunya diukur dengan pembangunan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur wilayah yang memadai akan mampu memenuhi hak dasar masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar daerah dengan terpenuhinya sarana prasarana pendukung perekonomian. Permasalahan pada aspek infrastruktur berbeda-beda di setiap wilayah karena tantangan yang dihadapi juga bervariasi. Permasalahan pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Dairi diantaranya belum optimalnya kualitas infrastruktur. Secara lebih rinci penyebab dari masalah pembangunan infrastruktur tersebut disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 3.5  
Permasalahan pembangunan infrastruktur

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1.	Kualitas infrastruktur belum optimal	Sarana prasarana air bersih yang belum menjangkau seluruh masyarakat
		Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
		Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman Akses layanan transportasi yang belum menjangkau seluruh daerah

Infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang mutlak bagi pengembangan sebuah wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik, penataan wilayah perumahan dan permukiman, penanganan sanitasi dan ketersediaan air bersih serta kelengkapan fasilitas publik dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah. Pelayanan air bersih, kualitas infrastruktur jalan yang memadai, dan transportasi belum sepenuhnya dapat diakses dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian, peningkatan intervensi yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap akses masyarakat perlu untuk diperkuat, sehingga masyarakat di Kabupaten Dairi dapat mengakses kualitas infrastruktur yang lebih berkualitas.

### 3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Dairi mempertimbangkan pada isu global, isu nasional dan isu pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang perlu direspons dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi.

#### 3.2.1 Isu Global

Isu global yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

##### A. Ekonomi Global

Perekonomian dunia saat ini menghadapi beberapa isu yang perlu ditinjau. Prospek pemulihan global menurut Laporan *World Economic Situation and Prospects* yang dirilis PBB di Tahun 2023 ini masih cukup suram yang diiringi dengan inflasi, kenaikan suku bunga, dan meningkatnya ketidakpastian untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dampak Pandemi COVID-19, perang, krisis iklim dan kondisi makroekonomi yang berubah sangat cepat menjadi tantangan untuk mencapai tujuan SDGs, bahkan terdapat beberapa isu ekonomi global yang menurut PBB perlu menjadi perhatian, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi global dan PDB per kapita diperkirakan tumbuh lambat di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia

dan diperkirakan memperkuat tren kinerja ekonomi yang lemah dalam jangka panjang; (2) perekonomian dunia menghadapi risiko pertumbuhan di bawah standar yang kemungkinan terjadi secara berkepanjangan karena dampak pandemi, perang, struktur makroekonomi, lemahnya investasi, dan meningkatnya kerentanan utang; (3) inflasi yang masih sangat tinggi di banyak negara berkembang; (4) pasar tenaga kerja di banyak negara maju yang terus menunjukkan ketahanan dengan tingkat pengangguran yang rendah dan kekurangan pekerja yang berulang akibat penggunaan sistem kerja jarak jauh dan pengaturan jam kerja yang fleksibel; (f) pengetatan moneter global yang memperburuk kerentanan fiskal dan utang di negara-negara berkembang.

Kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara terutama dalam hal pengembangan sektor perkebunan dan industri yang berorientasi ekspor. Krisis ekonomi global juga dapat memperlambat investasi sektor ekonomi di Sumatera Utara termasuk investasi untuk pembangunan infrastruktur.

## **B. Pariwisata Global (Sustainable Tourism)**

Menurut laporan terbaru dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pariwisata global telah pulih hampir 90% dari tingkat sebelum pandemi pada akhir Tahun 2023. Sekitar 975 juta wisatawan melakukan perjalanan internasional antara Januari dan September 2023, meningkat 38% dibandingkan periode yang sama Tahun 2022. Pada kuartal ketiga Tahun 2023, kedatangan wisatawan internasional mencapai 91% dari tingkat sebelum pandemi, dan mencapai 92% pada bulan Juli, bulan terbaik sejak dimulainya pandemi. Secara keseluruhan, pariwisata telah pulih sebesar 87% dari tingkat sebelum pandemi pada periode Januari-September 2023, menempatkan sektor ini pada jalur pemulihan hampir 90% pada akhir tahun. Penerimaan pariwisata internasional diperkirakan mencapai USD 1,4 triliun pada Tahun 2023, sekitar 93% dari USD 1,5 triliun yang diperoleh pada Tahun 2019. Ini menunjukkan pariwisata internasional hampir sepenuhnya pulih, hal ini potensi besar dan penting bagi destinasi, bisnis, dan komunitas yang bergantung pada sektor pariwisata yang akan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan *Travel & Tourism Development Index 2024*, Sumatera Utara ada di urutan 14 dengan hasil penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) 3.548

dengan indikator di bidang pariwisata terdapat 18 indikator dan bidang lainnya terdapat 43 indikator.

### **C. Demografi Global**

Menurut data *World Population Prospects (2022)* Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9.7 miliar jiwa pada Tahun 2050. Hal ini menjadi tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin Panjang. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada Tahun 2045 tumbuh menjadi 9.5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir. Di sisi lain terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Selain itu bertambahnya penduduk lanjut usia dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran, sementara itu perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga menjadi tantangan bagi keluarga dalam menjalankan fungsinya.

### **D. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi Global**

Menurut laporan *World Urbanization Prospects, The 2018 Revision* yang dirilis PBB memproyeksikan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar pada Tahun 2030 dan 9,7 miliar pada Tahun 2050. Diperkirakan bahwa dalam periode Tahun 2015-2050, setengah dari pertumbuhan

penduduk dunia diperkirakan terkonsentrasi di sembilan negara: India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia dan Uganda. Pada Tahun 2018 diperkirakan 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 68% di Tahun 2050.

Di beberapa negara jumlah penduduk usia kerja semakin meningkat dan perlu direspons dengan memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan promosi peluang kerja produktif dan pekerjaan layak. Pertumbuhan penduduk di atas usia 65 tahun diperkirakan juga semakin meningkat di seluruh dunia dan negara-negara dengan populasi lanjut usia harus menyesuaikan layanan kesehatan, sistem perawatan jangka panjang, serta meningkatkan keberlanjutan sistem jaminan sosial dan pensiun.

Kondisi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi global tersebut juga diperkirakan terjadi di Sumatera Utara di mana berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Tahun 2045 diperkirakan akan meningkat. Begitu juga halnya dengan urbanisasi yang kemungkinan terjadi karena perkembangan Wilayah Metropolitan Medan. Urbanisasi juga kemungkinan terjadi dengan berkembangnya kawasan perkotaan baru yang tumbuh akibat adanya pusat kegiatan ekonomi baru.

#### **E. Disrupsi Teknologi**

Disrupsi teknologi telah dirasakan secara global dan terjadi dengan mengganggu pasar dan industri yang ada karena mengubah cara bisnis beroperasi, menciptakan model bisnis baru, dan mendisrupsi model bisnis tradisional. Disrupsi teknologi dapat menjadi tantangan bagi usaha dan industri yang telah berjalan, namun menjadi peluang baru terciptanya wirausaha dan *startup*. Bangkitnya *e-commerce* yang bahkan memiliki jangkauan pasar dunia mengganggu perdagangan konvensional dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cara baru. Perkembangan teknologi *blockchain* juga mendisrupsi sistem keuangan yang mengakibatkan terbentuknya sistem transaksi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan yang dirasakan di seluruh dunia. Inovasi dan disrupsi memiliki dampak kompleks yang perlu dipahami untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi baru. Inovasi dan disrupsi

teknologi yang terjadi secara global berdampak pada perkembangan Provinsi Sumatera Utara di berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam sektor ekonomi tetapi juga mobilitas penduduk dan akses pelayanan publik.

#### **F. Perubahan iklim global**

Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran tersebut dapat terjadi secara alami, namun sejak Tahun 1800-an aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim. Sebagai langkah dalam menghadapi ancaman dampak perubahan iklim yang berjalan semakin cepat, *Intergovernmental Negotiating Committee/INC* yang kemudian pada Tahun 1992 INC mengadopsi sebuah kerangka hukum yaitu *United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC* dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi di dalamnya dengan tujuan akhir yaitu *Common but Differentiated Responsibilities Principle*. Dalam keikutsertaannya, Indonesia telah meratifikasi perjanjian paris (*Paris Agreement*) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim yang merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim, pada tataran nasional dengan keikutsertaan *Paris Agreement* akan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat menjadi ramah lingkungan serta adaptif terhadap dampak perubahan iklim, ribuan ilmuwan dan pengawas pemerintah sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C. Namun, kebijakan yang ada saat ini menunjukkan kenaikan suhu sebesar 3°C pada akhir abad ini.

Emisi yang menyebabkan perubahan iklim berasal dari seluruh belahan dunia dan berdampak pada semua orang, namun beberapa negara menghasilkan lebih banyak emisi dibandingkan negara lain. Tujuh negara penghasil emisi terbesar (Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Indonesia, Federasi Rusia, dan Brasil) menyumbang sekitar setengah dari seluruh emisi gas rumah kaca global pada Tahun 2020. Beberapa kerangka dan perjanjian global telah dimiliki dengan tiga kategori tindakan yang harus dilakukan, yaitu: pengurangan emisi; adaptasi terhadap dampak iklim; dan pendanaan untuk penyesuaian yang diperlukan.

## **G. Sumber energi alternatif**

Pemanfaatan sumber energi alternatif menjadi inti tantangan perubahan iklim yang dihadapi dunia. Untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim, berdasarkan *Paris Agreement* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Indonesia berkomitmen untuk ambil bagian mengatasi dampak perubahan iklim global dengan melakukan mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% bila dilakukan dengan usaha sendiri, atau 41% dengan bantuan dunia internasional. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil perlu diakhiri karena telah menyumbang hingga lebih dari 75% emisi GRK dan 90% emisi karbon dioksida. Investasi pada sumber energi alternatif yang bersih, mudah diakses, terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan menjadi tantangan ke depan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berupaya mempercepat pengembangan energi alternatif salah satunya melalui kebijakan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan kebijakan yang relevan lainnya.

## **H. Geopolitik dan Geoekonomi di Samudera Hindia**

Samudera Hindia sangat penting bagi nasib geopolitik dan ekonomi negara-negara pesisir dan kekuatan di luarnya. Samudera Hindia menjadi jalur pelayaran kapal kontainer, penumpang, dan angkatan laut untuk melintasi rute perdagangan yang membentang di seluruh dunia mulai dari Afrika hingga Timur Tengah, Asia, dan Australia. Sebagai tempat bertemunya kekuatan-kekuatan besar di dunia, Samudera Hindia adalah salah satu kawasan perdagangan dan geopolitik paling berharga di dunia dengan lebih dari 80% minyak dunia melewati perairan Samudera Hindia. Hal ini tidak hanya menjadi titik tumpu persaingan strategis antar negara, seperti Tiongkok-India, namun juga merupakan serangkaian peluang ekonomi dan pembangunan yang berharga. Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakan "*Declaration of The Indian Ocean Rim Association on the Principles for Peaceful, Productive and Sustainable Use of The Indian Ocean and Its Resources*" Tahun 2013 yang memuat tentang kerja sama keselamatan dan keamanan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi,

manajemen perikanan, manajemen risiko bencana, kerjasama akademik dan sains teknologi, serta pertukaran pariwisata dan budaya.

### **3.2.2 Isu Strategis Nasional**

Isu nasional yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

#### **A. Bonus Demografi**

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak Tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020- 2035, di mana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Di sisi lain penduduk usia produktif yang dominan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*). Masyarakat ini perlu diimbangi dengan pemenuhan sisi produksi dan investasi di dalam negeri agar pasar domestik tetap dapat terkuasai. Bonus demografi juga diperkirakan akan terjadi di Sumatera Utara dengan hasil proyeksi penduduk di Tahun 2045 yang menunjukkan adanya peningkatan penduduk usia kerja.

#### **B. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung**

Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari Tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia dan di Tahun 2045 di sebagian wilayah Sumatera diperkirakan berada pada tingkat langka atau kritis. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan diperkirakan juga akan semakin menurun dengan meningkatnya alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lahan dan air.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran perubahan iklim, dan persebaran jenis asing invasif (JAI). Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Di sisi lain daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia cukup besar namun belum sepenuhnya teroptimalkan.

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun dan mengakibatkan krisis air bersih dengan setidaknya 82% dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar. Daya tampung kualitas udara juga telah melampaui standar mutu dengan peningkatan konsentrasi polutan setiap tahunnya. Daya tampung lingkungan laut juga mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. Daya tampung lahan juga mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas.

Sumatera Utara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan ekonomi yang memicu pembangunan fisik secara masif ke depan perlu dilakukan dengan tetap memperhitungkan kondisi lingkungan hidup Sumatera Utara. Pertumbuhan penduduk kedepannya juga akan memicu peningkatan kebutuhan air dan energi yang perlu dikelola secara optimal.

### **C. Pembangunan IKN**

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Dengan ditetapkannya UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah dimulai. Pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi (*superhub*) ekonomi. Pembangunan IKN diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern. Pembangunan IKN sebagai *superhub* ekonomi melalui pengembangan klaster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif perlu menjadi pertimbangan ke depan terutama juga untuk menciptakan konektivitas logistik dan rantai pasok ekonomi secara nasional. IKN yang direncanakan

akan menjadi *superhub* dengan klaster ekonomi baru akan mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara karena perubahan konektivitas logistik dan rantai pasok yang saat ini terjadi antara Sumatera dan Jawa.

#### **D. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)**

Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal kedepannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

#### **E. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah**

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dalam kurun waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2022 yang disebabkan banyak faktor, misalnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

#### **F. Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Pemanfaatan potensi pariwisata sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan terus mengukuhkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru, menjadikannya barometer terdepan dalam arena ekonomi kreatif global. Dengan mengangkat kekayaan budaya, seni, dan kearifan lokal, serta mendorong kreativitas talenta Sumatera Utara, kita membuka peluang untuk memberikan nilai tambah yang tinggi secara global.

#### **G. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut**

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber

daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication (SLoC)* dan ALKI menyebabkan kontribusi PDB kemaritiman masih berada di kisaran 7,60%. Selain itu, masih juga terdapat tantangan degradasi lingkungan laut, tingginya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF)*, dan belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

## **H. Produktivitas Tenaga Kerja**

Produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu Tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal, dengan nilai US\$7.274,9 per pekerja dan berada di bawah rata-rata pekerja di kawasan ASEAN. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dihadapkan dengan rendahnya kualitas SDM, yang masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Tantangan lainnya ialah ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja yang belum baik, dan pasar kerja Indonesia yang belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

### **3.2.3 Isu Strategis dalam Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara**

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan Isu Global, isu Nasional dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2023 serta tantangan yang mungkin dihadapi 20 tahun yang akan datang, isu strategis Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Isu-isu strategis Sumatera Utara yang diharapkan dapat teratasi dalam pembangunan jangka panjang (2025–2045) diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Pada Tahun 2045 pembangunan manusia dihadapkan pada transisi demografi dan proyeksi peningkatan jumlah penduduk yang dapat meningkatkan rasio ketergantungan dan peningkatan jumlah Lanjut Usia. Transisi demografi yang diiringi dengan perilaku dan pola hidup tidak sehat mengakibatkan meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular serta permasalahan gizi dan permasalahan Kesehatan mental. Selain itu, Layanan kesehatan masyarakat juga belum menjangkau seluruh lapisan

masyarakat dan jumlah tenaga kesehatan belum tersebar secara merata di setiap daerah. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan kesehatan menjadikan tantangan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan) di seluruh Kabupaten/Kota. Sementara itu sektor Pendidikan dihadapkan pada belum optimalnya aksesibilitas (fisik dan non-fisik), kualitas tenaga pendidik, dan peserta didik. selain itu Kualitas pendidikan juga masih rendah yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, kualitas, kuantitas dan distribusi guru masih terbatas dengan sedikitnya guru yang memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan serta pendidikan non-formal yang berkualitas yang belum memadai, kualifikasi pendidikan yang masih rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja.

Kondisi di atas merupakan tantangan yang besar bagi Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas dan daya saing, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial agar tersedia pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan (termasuk lansia dan disabilitas). Isu utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Isu ini menyangkut dua aspek, yakni pertumbuhan ekonomi dan kualitas tenaga kerja. PDB Sumatera Utara berdasarkan lapangan usaha terutama didukung oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti oleh industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim. Oleh sebab itu keberlanjutan sektor ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

## **B. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam peningkatan daya tarik destinasi wisata, misalnya festival budaya, galeri seni dan pertunjukan musik. Ekonomi kreatif mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam industri pariwisata, dengan demikian ekonomi kreatif diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan sosial dan lingkungan.

### **C. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan**

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimal terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatera dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi,

banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di mana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurang-tersediaan air akan menyebabkan ketidak-tercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

#### **D. Pembangunan antar Daerah serta Desa-Kota**

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan, tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi *pull factor* manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

#### **E. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan**

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara

umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan *green waste* dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan Kepulauan Nias.

Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

#### **F. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur**

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

#### **G. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif**

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan *core value*.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil

diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

### **3.2.4 Isu Strategis Daerah**

#### **A. Penguatan Kabupaten Dairi sebagai Daerah Hub**

Kabupaten Dairi terletak pada lintasan yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Jalan lintas provinsi tersebut berpotensi besar menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Dairi jika dimanfaatkan dengan baik. Perlintasan tersebut melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dapat dikembangkan sebagai koridor pantai barat Pulau Sumatera sebagai jalur pelayanan logistik barang maupun jasa. Pembangunan prasarana vital seperti *rest area* yang tertata dan pergudangan dapat memantik lokasi-lokasi kegiatan baru yang menjadi daya pikat pertumbuhan ekonomi.

Penguatan Kabupaten Dairi sebagai daerah hub merupakan suatu upaya untuk mengembangkan Kabupaten Dairi menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, atau pengembangan infrastruktur yang penting dalam wilayah regional. Sebagai daerah hub, Kabupaten Dairi akan berperan sebagai pusat pertumbuhan dan koordinasi untuk wilayah sekitarnya. Isu tersebut perlu diintervensi dengan pendekatan kolaborasi. Pendekatan tersebut memerlukan serangkaian langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya.

#### **B. Diversifikasi komoditas dan hilirisasi sektor agro**

Diversifikasi komoditas dan hilirisasi sektor agro merupakan salah satu isu strategis Kabupaten Dairi. Diversifikasi komoditas dan hilirisasi sektor agro merupakan dua hal yang sangat penting untuk dilakukan. Selain untuk mengembangkan potensi ekonomi, juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Diversifikasi adalah upaya untuk membentuk keberagaman dalam suatu aktivitas, sehingga diversifikasi komoditas merupakan strategi yang digunakan dalam konteks pertanian dan ekonomi untuk mengurangi resiko dan meningkatkan keberagaman produksi atau investasi dengan memasukkan berbagai jenis komoditas atau produk pertanian dalam portofolio. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu jenis komoditas

atau pasar tunggal, sehingga apabila satu komoditas mengalami penurunan harga atau gangguan produksi, dampaknya tidak akan terlalu merugikan. Sedangkan, hilirisasi sektor agro bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk pertanian.

Dalam konteks Kabupaten Dairi yang merupakan wilayah agraris dan memiliki berbagai potensi pertanian yang dapat dioptimalkan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, sektor pertanian yang sudah lama berjalan di Kabupaten Dairi masih didominasi dengan pertanian tunggal atau monokultur dimana hampir seluruh petani hanya menanam satu jenis komoditas pertanian dalam luas lahan yang besar secara bersamaan. Hal ini menyebabkan petani sangat tergantung pada kesuksesan atau kegagalan tanaman tersebut. Selain itu, fluktuasi harga atau gangguan dalam produksi tanaman tentu akan memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Kedua, masih banyak petani dan produsen masih belum mengetahui upaya dan manfaat hilirisasi produk pertanian sehingga meskipun produksi panen tanaman dalam kuantitas besar namun tidak menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi dari hasil penjualan.

Kabupaten Dairi yang memiliki kondisi geografis yang beragam, termasuk dataran tinggi dan pegunungan yang bisa menciptakan peluang untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, dan lain sebagainya. Ini akan memiliki dampak positif pada banyak hal seperti peningkatan produktivitas tanaman dan kesuburan tanah, mengurangi resiko penyakit dan hama pada tanaman dan resiko kerugian akibat faktor cuaca, meningkatkan pendapatan petani, serta bisa menciptakan lapangan kerja tambahan. Diversifikasi komoditas bisa memberikan kontribusi yang positif pada keamanan pangan dengan menyediakan beragam sumber makanan bagi penduduk lokal dan membantu mencapai kemandirian pangan yang lebih baik di Kabupaten Dairi.

Di samping diversifikasi komoditas, hilirisasi sektor agro di Kabupaten Dairi juga merupakan sebuah langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah pada produk pertanian lokal. Ini melibatkan pengolahan dan pemrosesan produk dari tahap awal hingga menjadi produk jadi yang siap untuk dikonsumsi atau dijual. Proses hilirisasi sektor agro melibatkan berbagai tahap misalnya pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran produk-produk pertanian. Sehingga, sektor pertanian juga tumbuh melalui proses modernisasi perekonomian yang

semula hanya menghasilkan bahan mentah saja dan diserap pasar dengan harga yang murah menjadi sektor pertanian yang bisa menghasilkan produk olahan yang dihasilkan melalui industri pengolahan melalui upaya hilirisasi, dan bisa terserap pasar dengan harga yang lebih tinggi dengan jaringan distribusi perdagangan yang menguntungkan petani sebagai produsen.

Dalam upaya mengembangkan hilirisasi sektor agro sangat penting dalam memperhatikan beberapa aspek seperti pengembangan infrastruktur pengolahan yang modern, pelatihan teknis untuk petani dan pekerja industri pengolahan, serta promosi produk-produk hilir lokal. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan riset juga bisa mendukung inovasi dalam pengembangan produk dan proses pengolahan yang lebih efisien. Hilirisasi sektor agro juga tetap harus memperhatikan praktik pertanian berkelanjutan yang bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi, masyarakat, petani, dan lingkungan.

### **C. Peningkatan kualitas infrastruktur berketahanan**

Peningkatan kualitas infrastruktur berketahanan adalah langkah penting dalam memajukan sebuah daerah seperti Kabupaten Dairi. Infrastruktur yang baik membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan berbagai sektor. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan syarat penting dalam menghubungkan masyarakat dengan pusat kegiatan. Kabupaten Dairi telah memiliki akses jalan yang menghubungkan antar kecamatan, namun mobilitas masyarakat masih terkendala karena infrastruktur jalan yang belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah terutama di wilayah pedesaan. Jaringan jalan yang mantap dan merata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mudah dalam mengakses pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.

Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar diantara yang lainnya yakni pengelolaan sumberdaya air. Kabupaten Dairi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat bahkan beberapa wilayah di Kabupaten Dairi terkategori wilayah rawan kekeringan. Selain pemenuhan air bersih untuk masyarakat, pemenuhan layanan sanitasi, jaringan drainase, persampahan, dan kebencanaan di Kabupaten Dairi saat ini juga belum terealisasikan dengan optimal. Sehingga, pembangunan

infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kabupaten Dairi perlu untuk terus ditingkatkan dan perlu direspon dengan baik guna menjamin masyarakat dapat hidup dengan layak. Terlebih lagi, adanya potensi penambahan jumlah penduduk hingga Tahun 2045, juga perlu diantisipasi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai.

#### **D. Peningkatan keunggulan kompetitif pariwisata**

Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Dairi menjadi salah satu fokus sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi. Hal ini seiring dengan menguatnya peluang pengembangan pariwisata di level nasional dan global. Kebijakan pemerintah pusat yang memfokuskan pada pembangunan pariwisata melalui kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024 – 2044, memberikan peluang dan harapan untuk mengakselerasi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Dairi. Pengembangan pariwisata KSPN Danau Toba memberikan mandat bagi Kabupaten Dairi untuk memfokuskan pada pengembangan wisata Tao Silalahi Kecamatan Silahisabungan. Selain itu, hal ini sekaligus untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata lain di Kabupaten Dairi, yaitu: Taman Wisata Iman (TWI) Sitingo dan Taman Wisata Alam (TWA) Sicike-cike dalam satu kawasan strategis destinasi wisata meliputi Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitingo, Kecamatan Silahisabungan, dan Kecamatan Sidikalang sebagai wilayah pendukung.

Pengembangan sektor pariwisata berbasis keindahan alam, pertanian, dan budaya diharapkan dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effects*) yang mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat sekaligus menjadi lokomotif penarik gerbong dalam peningkatan produksi dan pemasaran sektor lain misalnya industri kerajinan, pengolahan produk pertanian, usaha kuliner, penginapan, dan berbagai bentuk ekonomi kreatif lainnya.

Sektor pariwisata juga perlu dikembangkan dalam koridor pembangunan pariwisata berbasis masyarakat misalnya dengan pengembangan desa wisata yang mengintegrasikan pendekatan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), pariwisata berbasis ekowisata (*eco-tourism*), pariwisata berbasis komunitas dan budaya (*community-based* dan

*culture-based*). Hal ini memerlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari level pemerintah (pusat, daerah, dan desa), swasta, LSM, dan masyarakat.

#### **E. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan**

Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khususnya alinea keempat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Pasal 28 H ayat ( 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan sebagai hak kemudian diwujudkan melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan. Secara umum, pembangunan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Dairi sudah cukup baik dan menunjukkan peningkatan. Namun, peningkatan tersebut masih perlu dioptimalkan pada periode pembangunan mendatang.

#### **F. Perlindungan sosial adaptif**

Aspek perlindungan sosial perlu diperhatikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Aspek perlindungan sosial secara umum memberikan jaminan terhadap beberapa hal, meliputi kebutuhan dasar, layanan sosial, serta pemberdayaan bagi individu maupun kelompok rentan. Dalam perkembangannya, perlindungan sosial perlu skema yang lebih adaptif dalam merespon kelompok rentan yang sebelumnya tidak menjadi perhatian, seperti korban bencana. Oleh karena itu dihadirkan perlindungan sosial adaptif yang mampu memberikan perlindungan dari kerentanan secara luas.

Perlindungan sosial adaptif didukung dengan pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, perempuan, pemuda, dan individu maupun kelompok rentan lainnya. Pemenuhan hak anak belum optimal, rendahnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga terkait kemiskinan, belum optimalnya upaya pemberdayaan dan bantuan sosial pada kelompok rentan, serta belum optimalnya kebijakan yang ramah difabel.

## **G. Optimalisasi manajemen ASN dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi**

Optimalisasi manajemen ASN dan inovasi pelayanan publik berbasis digital menjadi isu strategis ke depan. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks ini output yang diharapkan adalah ASN yang profesional dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi manajemen ASN didasarkan pada *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK. ASN BerAHKLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core values* tersebut menjadi titik tonggak penguatan ASN di Kabupaten Dairi saat ini dan di masa mendatang.

Inovasi pelayanan publik berbasis digital menjadi tuntutan di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat dan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut supaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih berkualitas. Inovasi dalam pelayanan publik menjadi instrumen dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi dibutuhkan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berkualitas melalui ide-ide yang kreatif dari ASN. Sementara digitalisasi pemerintahan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan responsifitas terhadap pelayanan publik. Hal penting yang perlu diperhatikan dari digitalisasi, yaitu digitalisasi dilihat sebagai instrumen bukan tujuan, sehingga penerapan inovasi dan digitalisasi dalam pemerintahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## **H. Transformasi digital**

Transformasi digital berperan penting sebagai akselerator dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Urgensi transformasi digital juga diperkuat dengan tingginya potensi nilai ekonomi digital yang bisa direalisasikan dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, adanya bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif yang paham digital (*digital savvy*) dan pengguna internet yang meningkat tiap tahun

menjadi modal utama pemerintah Kabupaten Dairi dalam mewujudkan transformasi digital. Untuk mempercepat pencapaian transformasi digital, diperlukan penguatan aspek fundamental seperti infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan kebijakan pemerintah daerah yang adaptif, lincah (*agile*), dan melihat ke depan (*forward looking*).

Pemerintah Kabupaten Dairi perlu mengembangkan infrastruktur digital untuk menjamin konektivitas internet dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Dairi, misalnya pembangunan jaringan fiber optik, perluasan jangkauan 4G, dan pengembangan 5G. Hal lain yang perlu juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi ialah penyiapan SDM yang memiliki keterampilan dan kapasitas di bidang digital. Selain itu, perlu juga diciptakan ekosistem digital yang kondusif salah satunya melalui implementasi regulasi yang menjamin keamanan, kelancaran, dan keberlanjutan aktivitas perekonomian berbasis digital. Dengan demikian, percepatan transformasi digital di Kabupaten Dairi dapat diwujudkan melalui upaya berikut: 1) Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, 2) penyiapan peta jalan (*roadmap*) transformasi digital di sektor unggulan, 3) percepatan integrasi data yang berkaitan dengan sektor unggulan, 4) penyiapan SDM talenta digital (Industri Kecil Menengah, *start-up* sektor unggulan), dan 5) penyediaan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan yang mendukung transformasi digital

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI DAERAH**

Visi merupakan cita-cita dan harapan bersama seluruh komponen pembangunan Kabupaten Dairi, sedangkan Misi merupakan agenda besar dalam rangka mencapai visi. Perumusan visi dan misi harus memiliki keterkaitan dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara, keselarasan dengan kebijakan tata ruang, dan merespon berbagai isu strategis.

#### **4.1 Visi Kabupaten Dairi 2025-2045**

Visi pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2025–2045 merupakan wujud Kabupaten Dairi yang ingin dicapai untuk rentang waktu 20 tahun dan diharapkan mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat yang berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Dengan memperhatikan kondisi capaian masa lalu serta memperhatikan proyeksi dan modal dasar pembangunan maka Visi Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

#### **”Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**

Visi pembangunan tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Maju**

Pada Tahun 2045, Kabupaten Dairi menjadi kabupaten yang maju yang memiliki Sumber Daya Manusia berkualitas dan menguasai IPTEK yang mendukung penciptaan inovasi di berbagai sektor. Kemajuan Kabupaten Dairi juga tercipta melalui keadilan yang merata yang dirasakan oleh seluruh penduduk dalam seluruh aspek kehidupan, seperti akses terhadap layanan publik, peluang pekerjaan, akses pendidikan dan kesehatan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan fasilitas sosial.

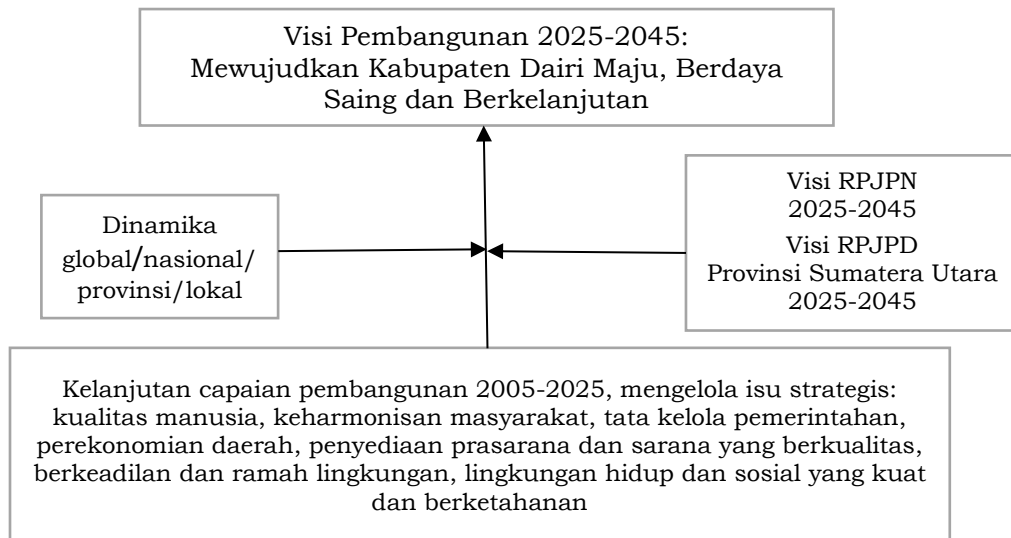
## **Berdaya Saing**

- Berdaya Saing dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industri khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) secara signifikan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Berdaya Saing dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
- Berdaya Saing dalam standar dan kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Kondisi Kabupaten Dairi yang memiliki keunggulan untuk menghadapi persaingan dimasa depan yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan menempatkan diri unggul, mampu membuka diri terhadap tindakan inovatif baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

## **Berkelanjutan**

Kabupaten Dairi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga Tahun 2045 mewujudkan komitmen nasional dan global untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta keseimbangannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjaminnya pelaksanaan tahapan pembangunan selanjutnya oleh generasi mendatang

Gambar 4.1  
Latar Belakang Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Dairi  
Tahun 2025-2045



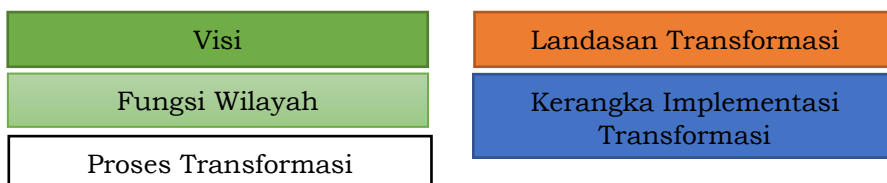
Sumber: Bappeda Kabupaten Dairi, 2024 (diolah)

Gambar 4.2  
Kerangka Pikir Pembangunan Kabupaten Dairi  
Tahun 2025-2045



Sumber: Bappeda Kabupaten Dairi, 2024 (diolah)

**Keterangan:**



Visi RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 mendukung pencapaian “**Visi Indonesia Emas 2045 : Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**”. Daerah menjadi bagian dari upaya mencapai kondisi **berdaulat** yang mengandung arti Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya. Berdaulat mengandung makna ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Daerah juga mendukung upaya Indonesia mencapai kondisi **maju** yang memiliki arti Indonesia menjadi negara yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil, sehingga memiliki daya saing tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Daerah menjadi penopang pula untuk mencapai kondisi **berkelanjutan**, yaitu lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik, selain itu Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, berkontribusi pada Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata global.

#### **4.2 Sasaran Visi**

Upaya mewujudkan “Kabupaten Dairi yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan” tercermin dalam sasaran visi, sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan Per Kapita Penduduk

Pendapatan per kapita Kabupaten Dairi diperkirakan meningkat senilai Rp 120 Juta di Tahun 2045. Peningkatan perekonomian didukung oleh kontribusi PDRB sektor pertanian menjadi 36% dan peningkatan sektor industri Pengolahan sekitar 12,34%. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran utama pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu *Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju*.

##### 2. Tingkat Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

Perekonomian Kabupaten Dairi yang semakin berkembang meningkatkan pendapatan penduduk dan menurunkan kemiskinan hingga mencapai nilai 0,67-0,17% di Tahun 2045. Ketimpangan pendapatan antar penduduk juga menurun dengan Rasio Gini mencapai hingga 0,180. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran utama pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu *Kemiskinan Menurun dan*

### *Ketimpangan Berkurang*

#### 3. Peran dan Posisi di Tingkat Regional dan Nasional Meningkatkan

Kemajuan pembangunan meningkatkan nilai peran dan posisi Kabupaten Dairi di tingkat regional dan nasional yang diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah dengan nilai 4,75 di Tahun 2045. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran utama RPJPN 2025-2045 yaitu *Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkatkan*.

#### 4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan

Daya saing sumber daya manusia Kabupaten Dairi memiliki peningkatan kualitas secara adil dan merata dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 82,39 di Tahun 2045. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran utama pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu *Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan*.

#### 5. Penurunan Angka Emisi Gas Rumah Kaca

Kabupaten Dairi meningkatkan komitmen di tingkat nasional dan global dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 79,85% di Tahun 2045. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran utama pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu *Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission*.

Tabel 4.1  
Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 dan RPJP  
Nasional Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025*	Target 2045*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	74,01 - 74,02	454,83 - 534,21	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB Per Kapita (Rp Juta)	38,32	120,00
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	58,77	532,92		b. Kontribusi Sektor Pertanian (%)	44,30	36,00
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	19,18 - 19,27	27,14 - 28,34		c. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)	0,395-0,399	10,14-12,34
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	0,17 - 0,42	Tingkat kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7,47-7,37	0,67-0,17
		b. Rasio Gini (indeks)	0,303 - 0,305	0,241 - 0,264		b. Rasio gini (Indeks)	0,219	0,18
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	5,03	5,91		Kontribusi PDRB KTI (%)	-	-
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peran posisi di tingkat regional dan nasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,04	4,75
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,53	0,72	Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat	IPM	75,50	82,39
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK	1,00	90,39	Emisi GRK menurun	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	19,04	79,85
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,42	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,90	83,49

Catatan: \* merupakan proyeksi Tim

Tabel 4.2  
Target Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE		TARGET			
		2023	2025*	2029*	2034*	2039*	2045*
Peningkatan Per Kapita Penduduk	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	35,877	38,32	47,47	62,64	83,43	120,00
	Kontribusi Sektor Pertanian (%)	-	44,30	42,2	40,10	38,15	36,00
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)	0,35	0,395-0,399	2,8	5,2	7,6	10,14-12,34
Tingkat Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	7,47	7,47-7,37	5,24	3,75	1,25	0,67 – 0,17
	Rasio Gini	0,221	0,219	0,210	0,195	0,190	0,180
Peran dan Posisi di Tingkat Nasional dan Global Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,03	3,04	3,46	3,88	4,30	4,75
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	IPM	75,18	75,50	77,20	78,90	80,65	82,39
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	19,04	34,24	49,45	64,70	79,85
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	76,90	78,55	80,20	81,85	83,49

Catatan: \* merupakan proyeksi Tim

### 4.3 Misi

Untuk mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, maka ditetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan meliputi antara lain:

1. Mewujudkan **transformasi sosial** untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kesehatan prima, pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera.

Pembangunan Kabupaten Dairi hingga Tahun 2045 pada dasarnya ditujukan untuk menjadikan masyarakat Dairi yang sejahtera. Transformasi sosial dilakukan agar penduduk dapat menjadi manusia yang sejahtera karena memiliki kesehatan yang prima dan pendidikan yang berkualitas. Penduduk Kabupaten Dairi juga memiliki daya saing dibandingkan dengan penduduk di wilayah lainnya di Indonesia. Kabupaten Dairi akan memperkuat kapasitas SDM melalui peningkatan akses pendidikan tinggi serta penguatan tenaga pendidik dan medis untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan berdaya saing, guna mendukung daerah yang maju dalam jangka panjang,

serta berkontribusi pada visi Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata global.

2. Mewujudkan **transformasi ekonomi** melalui peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik serta perdesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Transformasi ekonomi di Kabupaten Dairi yang didukung juga dengan transformasi sosial menjadi kunci pendorong peningkatan produktivitas perekonomian. Transformasi ekonomi juga tercipta dengan dorongan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang kemudian menggeser perekonomian Kabupaten Dairi yang lebih bergerak pada sektor primer (pertanian, perkebunan) ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa). Selain itu, transformasi digital dan pembangunan perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi lainnya juga semakin mendorong keberhasilan transformasi ekonomi Kabupaten Dairi melalui industrialisasi. Kabupaten Dairi akan memanfaatkan IPTEK dan mengembangkan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta meningkatkan produktivitas daerah, sejalan dengan visi Sumatera Utara sebagai pusat ekonomi bioindustri global."

3. Mewujudkan **transformasi tata kelola** pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas dan prima

Transformasi sosial dan transformasi ekonomi di Kabupaten Dairi tidak dapat terwujud tanpa adanya transformasi tata kelola dengan menjalankan *good governance*. Kabupaten Dairi akan mengoptimalkan tata kelola berbasis digital dan meningkatkan transparansi pemerintahan untuk menciptakan sistem yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang mendukung daya saing dan investasi. Transformasi tata kelola diharapkan akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan pemerataan dan keadilan bagi seluruh penduduk. Transformasi tata kelola juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4. Mewujudkan masyarakat **demokratis dengan penciptaan lingkungan aman** dan **stabilitas ekonomi makro**

Pemerintah Kabupaten Dairi akan memastikan supremasi hukum yang transparan dan kepemimpinan yang demokratis untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta iklim investasi yang kondusif. Pemantapan supremasi hukum, stabilitas keamanan, dan stabilitas ekonomi diharapkan dapat mendukung pembangunan Kabupaten Dairi menjadi lebih merata dan berkeadilan.

5. Mewujudkan **ketahanan sosial, budaya dan ekologi** dengan penciptaan ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan

Masyarakat yang tangguh baik dalam individu, keluarga, maupun komunitas masyarakat menjadi landasan utama untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan masyarakat beserta alam dan lingkungan sekitarnya diperlukan untuk terus beradaptasi dan menjaga keseimbangan untuk membentuk ketahanan sosial budaya dan ekologi. Kabupaten Dairi akan membangun ketahanan sosial budaya yang harmonis dan inklusif, dengan mengedepankan pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai agama sebagai modal sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta menarik wisatawan dan mendukung industri pariwisata global di Sumatera Utara.

6. Mewujudkan **pembangunan kewilayahan** yang **merata dan adil** berbasis karakteristik wilayah

Pembangunan berbasis karakteristik wilayah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah. Kabupaten Dairi akan memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi, untuk menciptakan masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis Sumatera Utara.

7. Mewujudkan pembangunan **sarana dan prasarana** yang berkualitas dan ramah lingkungan

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor pendukung utama pengembangan wilayah Kabupaten Dairi dan menjadi pilar transformasi yang diharapkan

terwujud di Tahun 2045. Dukungan sarana dan prasarana yang perlu dibangun di Kabupaten Dairi adalah berkaitan dengan konektivitas, teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana dasar di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Misi ini juga mendukung misi ke-7 RPJPN 2025-2045 yaitu *mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan* dan mendukung Sumatera Utara sebagai pusat pariwisata global, serta mengurangi dampak lingkungan.

8. Mewujudkan **kesinambungan pembangunan** melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan dan peningkatan akuntabilitas pemerintah

Kesinambungan pembangunan di Kabupaten Dairi terwujud melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten, penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Misi ini sesuai dengan misi ke-8 RPJPN 2025-2045 yaitu *kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas*. Perwujudan misi ke-8 jangka panjang Kabupaten Dairi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perwujudan kaidah pelaksanaan RPJPN 2025-2045 dan mendukung Sumatera Utara sebagai pusat pariwisata global, serta mengurangi dampak lingkungan.

Berikut ditampilkan persandingan misi RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 dengan misi RPJPN Tahun 2025-2045.

Tabel 4.3  
Penyelarasan Misi RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJP  
Nasional Tahun 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 2045
No	Agenda	No	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Transformasi Indonesia</b>	1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial
		2	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
		3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
2	<b>Landasan Transformasi</b>	4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Masyarakat Demokratis dengan Penciptaan Lingkungan Aman dan Stabilitas Ekonomi Makro
		5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3	<b>Kerangka Implementasi Transformasi</b>	6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Adil Berbasis Karakteristik Wilayah
		7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
		8	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

## **BAB V**

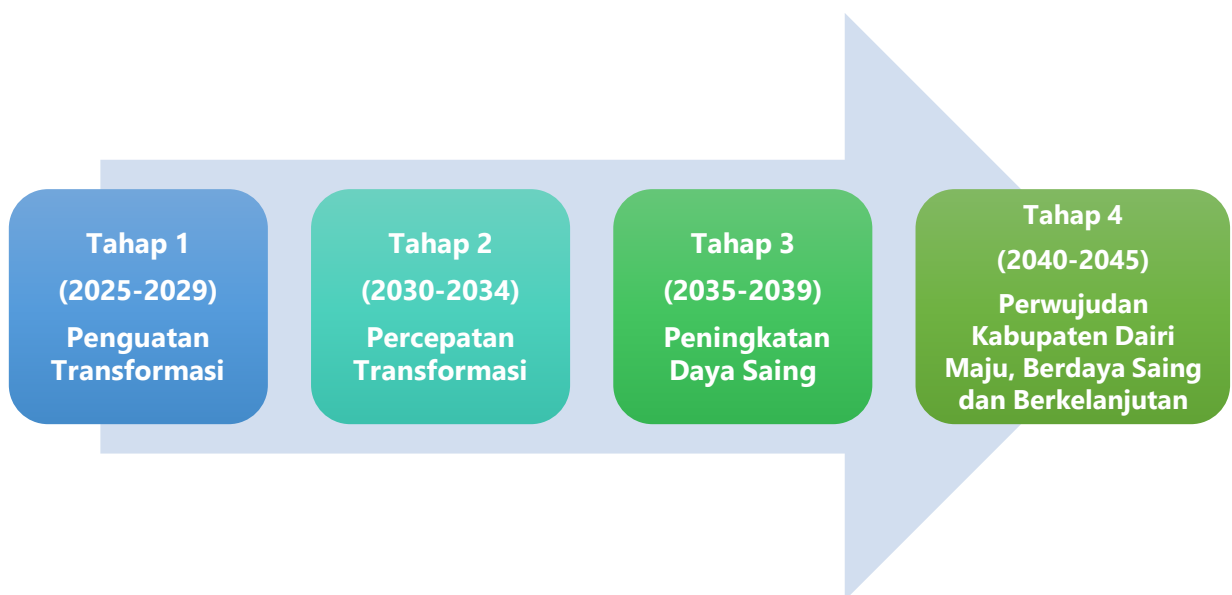
### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Arah kebijakan memiliki posisi sebagai tema pembangunan tahap 1 hingga 4 di dalam RPJPD Tahun 2025-2045, serta sebagai penjabaran dari tema pembangunan dan misi. Tema pembangunan merupakan pentahapan yang berkesinambungan hingga mencapai visi di akhir periode RPJPD. Tema pembangunan juga mengindikasikan prioritas pembangunan di dalam setiap periode pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, tema pembangunan menjadi kerangka bagi rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas RPJMD.

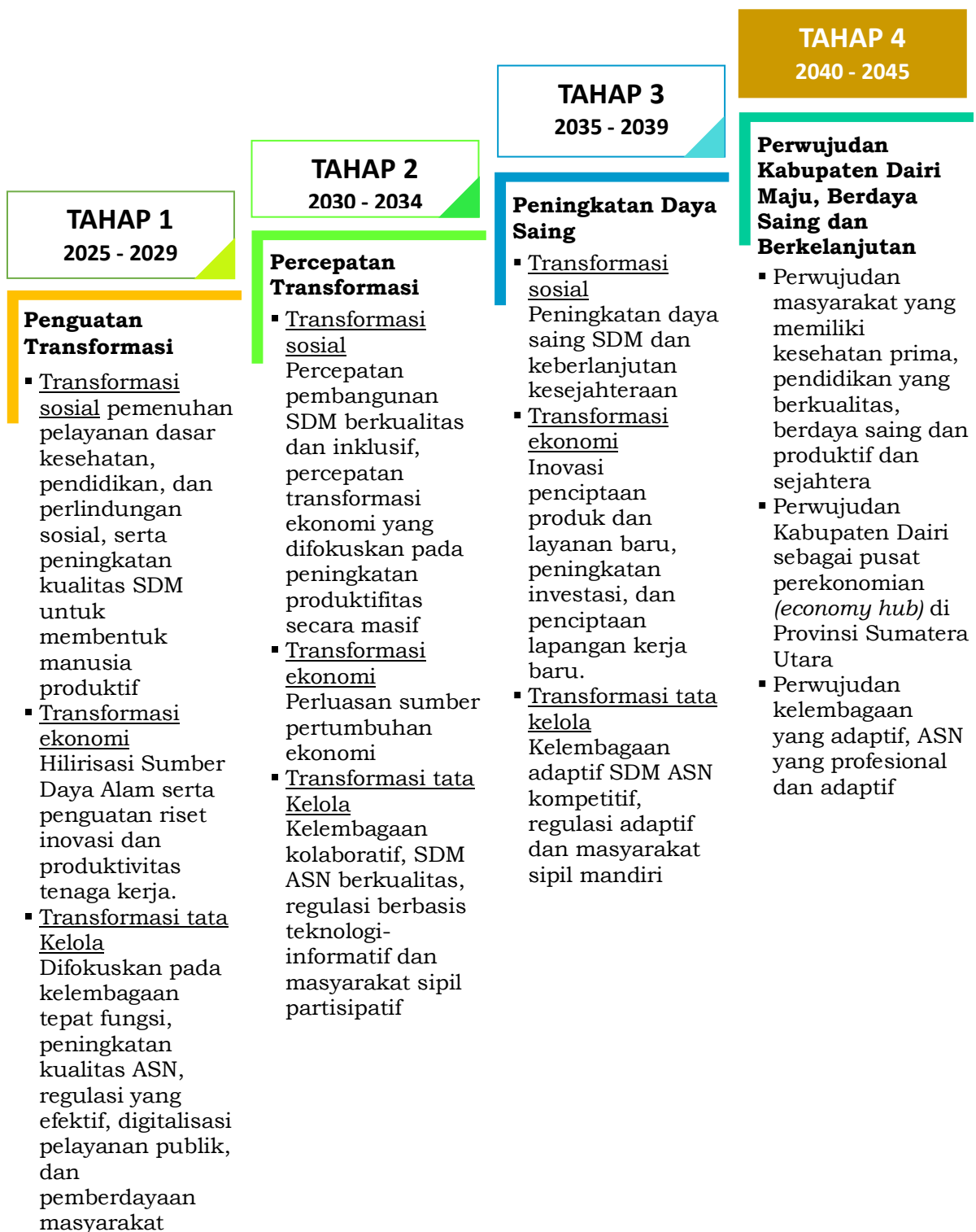
#### **5.1 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 diturunkan ke dalam 4 tahap berdasarkan periode jangka menengah dengan tema periode sebagai berikut.

Gambar 5. 1  
Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045



Gambar 5. 2  
Arah Kebijakan Per Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Dairi  
Tahun 2025-2045



Pada bagan alir diatas setiap periode jangka menengah telah dibagi dalam 4 tahap dimana tahap I adalah penguatan transformasi yang bertujuan menjadi landasan perubahan atau transformasi yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan. Lalu tahap II yaitu percepatan transformasi berfokus pada percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif, tahap

III adalah Peningkatan daya saing yang berfokus pada perwujudan daya saing daerah dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin kokoh dan tahap IV berfokus pada pembangunan diagendakan sebagai perwujudan Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

#### **5.1.1 Arah Kebijakan Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Transformasi**

Penguatan *transformasi sosial* difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan. Aspek yang belum optimal pada pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan di periode sebelumnya perlu segera ditingkatkan pada periode ini. Peningkatan tersebut tidak hanya pada aspek ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pelayanan, melainkan juga peningkatan mutu/kualitas pelayanan.

Penguatan *transformasi ekonomi* dititikberatkan pada optimalisasi produktivitas komoditas unggulan dan mengawal agar proses hilirisasi komoditas tersebut dapat berdampak pada penguatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan stabilitas ekonomi daerah. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan upaya peningkatan riset dan inovasi sektor unggulan di Kabupaten Dairi. Hal ini dapat mendorong terciptanya inovasi sektor unggulan berbasis teknologi yang menghasilkan produk turunan berkualitas unggul.

Penerapan ekonomi hijau Kabupaten Dairi pada periode pertama bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara kokoh tanpa mengesampingkan permasalahan lingkungan. Pembangunan ekonomi hijau merupakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan. Implementasi pembangunan ekonomi hijau menitikberatkan pada upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, namun dengan memberikan batasan dalam memanfaatkan SDA dan mengurangi emisi karbon. Melalui penerapan ekonomi hijau, diharapkan sektor agroindustri di Kabupaten Dairi dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi/emisi karbon, dan secara bersamaan menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi hijau, investasi yang dikembangkan berupa penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*). Transisi ekonomi konvensional menjadi ekonomi hijau di Kabupaten Dairi

bertujuan agar pertumbuhan ekonomi dan investasi sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan inklusivitas sosial masyarakat.

Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah juga menjadi fokus pembangunan Kabupaten Dairi pada periode 2025-2029. Perluasan akses digital ke seluruh wilayah merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas, pemasaran, dan daya saing UMKM di Kabupaten Dairi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan misalnya meningkatkan akses pembiayaan secara digital (*fintech*) dan akses untuk mempromosikan produk unggulan melalui *platform* digital. Hal ini dapat memperluas jangkauan penjualan produk-produk unggulan Kabupaten Dairi baik di dalam maupun luar negeri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.

Penguatan *Transformasi Tata Kelola* difokuskan untuk melakukan upaya perbaikan terkait manajemen ASN, pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan kapasitas masyarakat sipil. Upaya peningkatan manajemen ASN dilakukan karena hingga Tahun 2023 penerapan reformasi birokrasi (RB) di Kabupaten Dairi masih mendapatkan predikat B atau baik. Hal itu mengindikasikan bahwa pelaksanaan RB belum berjalan merata di seluruh unit kerja, sehingga perlu adanya peningkatan kinerja perangkat daerah maupun unit kerja agar penerapan RB lebih optimal dan merata.

Kinerja perangkat daerah maupun unit kerja di pemerintahan dapat ditunjang dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik. Digitalisasi pemerintahan mampu menyajikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Teknologi informasi juga secara spesifik menunjang misi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif berbasis digital. Hal itu yang mendasari adanya upaya peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Peningkatan manajemen ASN dan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat sipil. Tahap 1 berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat sipil sebagai bentuk advokasi transparansi, akuntabilitas sosial dan keterbukaan informasi publik.

Penciptaan *Masyarakat demokratis, Lingkungan aman dan Stabilitas*

*Ekonomi Makro* difokuskan pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, lembaga demokrasi yang kuat dan akuntabilitas berbasis digital. Stabilitas ekonomi ditekankan dengan menguatkan fondasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta menjaga stabilitas harga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

*Ketahanan sosial, budaya dan ekologi* pada tahap 1 difokuskan pada optimalisasi kerukunan umat beragama dan meningkatkan peran keluarga untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat. Ketahanan masyarakat juga dibangun untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Penciptaan iklim riset dan inovasi dilakukan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan dan menurunkan emisi GRK *Pembangunan Kewilayahan dan pembangunan sarana dan prasarana* pada tahap ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah sebagai bentuk antisipasi terhadap ketimpangan antar kelompok. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan di seluruh wilayah, terutama di kawasan permukiman penduduk yang berada di wilayah paling luar Kabupaten Dairi, pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, pengelolaan persampahan, serta jaringan drainase sebagai wujud mitigasi bencana banjir di Kabupaten Dairi.

*Pembiayaan Pembangunan dioptimalkan* dengan efektifitas perencanaan dan penganggaran serta pembiayaan alternatif (KPBU) dan menguatkan instrumen dan sistem informasi untuk melakukan reformasi tata kelola fiskal daerah.

Pada Tahapan Penguatan Transformasi ini PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp. 47,47 juta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen per tahun. Hal ini dicapai dengan menguatkan fondasi sebagai pusat pengembangan agroindustri, dengan arah kebijakan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. 1  
Fokus Arah Kebijakan Penguatan Transformasi

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
<b>Transformasi Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi pelayanan dasar kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat.</li> <li>• Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang unggul.</li> <li>• Mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan agroindustri dan pariwisata.</li> </ul>
<b>Transformasi Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan hilirisasi sumber daya alam unggulan</li> <li>• Memperkuat industri regional dan agroindustri melalui investasi berskala besar.</li> <li>• Menerapkan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dalam agroindustri.</li> <li>• Mengembangkan pariwisata berkelanjutan.</li> <li>• Memperkuat ekonomi kreatif melalui UMKM.</li> <li>• Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur transportasi.</li> <li>• Mengembangkan kapasitas riset dan inovasi serta pemasaran digital.</li> </ul>
<b>Transformasi Tata Kelola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguatkan kelembagaan yang dinamis dan responsif.</li> <li>• Meningkatkan kualitas ASN melalui sistem merit.</li> <li>• Mendigitalisasi pelayanan publik.</li> <li>• Mengelola pariwisata secara berkelanjutan melalui POKDARWIS.</li> <li>• Meningkatkan kerjasama investasi, teknologi, dan pengetahuan.</li> </ul>
<b>Keamanan dan Stabilitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.</li> <li>• Menjaga stabilitas ekonomi makro dengan penguatan kapasitas fiskal daerah, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat.</li> <li>• Mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis risiko.</li> </ul>
<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan kerukunan umat beragama dan budaya.</li> <li>• Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana.</li> <li>• Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.</li> </ul>
<b>Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuntaskan pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan di seluruh wilayah.</li> <li>• Menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata melalui konektivitas.</li> <li>• Memperkuat infrastruktur dasar untuk pengembangan agroindustri dan pariwisata.</li> <li>• Mengembangkan layanan air bersih.</li> </ul>
<b>Pembiayaan Pembangunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguatkan instrumen dan sistem informasi untuk reformasi tata kelola fiskal daerah.</li> </ul>

### 5.1.2 Arah Kebijakan Tahap 2 (2030-2034): Percepatan Transformasi

Evaluasi kinerja Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Transformasi merupakan landasan arah kebijakan pada tahap ini. Setelah pelaksanaan penguatan transformasi pada tahap sebelumnya diharapkan fondasi ekonomi sudah mengalami penguatan, sehingga kolaborasi setiap aspek

tahap 1 menjadi landasan akselerasi pembangunan di tahap 2.

Tahapan *percepatan transformasi sosial* fokus pada percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif. Pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin merata dan berkualitas, perlindungan sosial adaptif semakin komprehensif, kompetensi SDM yang semakin meningkat sehingga memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja dan berwirausaha, serta didukung kolaborasi *penta-helix*. Pada tahapan kedua, kondisi pelayanan dasar diharapkan sudah tersedia dengan baik dan merata, sehingga perlu upaya percepatan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan kondisi sosial yang inklusif. Selain itu, pengelolaan pelayanan dasar diharapkan lebih tertata dan terintegrasi dari tahapan sebelumnya.

*Percepatan transformasi ekonomi* difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam unggulan, dan sumber daya teknologi di Kabupaten Dairi. Pada tahapan ini, pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi telah diperkuat dan diperluas dengan dukungan pemanfaatan teknologi digital yang dirintis sejak tahapan pertama. Penggunaan teknologi digital diharapkan telah menjangkau seluruh aspek dan sektor pembangunan secara masif, sehingga dapat mendukung hilirisasi sektor unggulan di Kabupaten Dairi.

*Percepatan transformasi tata kelola* memfokuskan pada upaya pengembangan manajemen ASN yang lebih spesifik pada peningkatan kualitas ASN berbasis merit. Upaya peningkatan kualitas ASN dilakukan dengan mengoptimalkan sistem merit sehingga meningkatkan kinerja ASN Kabupaten Dairi. Pemerintahan yang dikelola berbasis merit akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif karena sistem merit menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas dan ditempatkan sesuai kompetensinya. Dengan adanya ASN yang profesional, berintegritas, dan ahli di bidangnya, maka akan menciptakan sistem kelembagaan yang berkualitas, dan berdampak pada output yang dihasilkan, yakni pelayanan publik. Upaya pengembangan manajemen ASN berbasis merit yang menghasilkan ASN yang kompeten dan sistem kelembagaan yang berkualitas juga akan berdampak pada kesejahteraan ASN.

*Percepatan transformasi Masyarakat demokratis, lingkungan aman dan Stabilitas Ekonomi Makro* diciptakan dengan berfokus pada

peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman dan demokratis serta pengelolaan fiskal yang adaptif.

*Ketahanan sosial, budaya dan ekologi* difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung untuk memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya. Penguatan ketahanan budaya lokal dengan meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara sistematis dalam menjaga identitas kebudayaan lokal. Manajemen lingkungan semakin diperkuat untuk menjaga keberlanjutan kondisi lingkungan di Kabupaten Dairi, dan mencegah adanya *over*-eksploitasi sumberdaya alam. Tata kelola dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu diperkuat dengan adanya pedoman dan regulasi yang jelas dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu manajemen lingkungan juga diperlukan untuk meningkatkan manajemen kebencanaan yang dimungkinkan dapat timbul dari aktivitas yang dikembangkan. Pemanfaatan teknologi berbasis riset dan inovasi dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, air, udara dan tanah, serta meningkatkan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan bencana.

Pembangunan *kewilayahan dan pembangunan sarana dan prasarana* difokuskan pada peningkatan keterhubungan dalam wilayah maupun keluar wilayah Kabupaten Dairi. Fokus ini juga sebagai upaya pemerataan pembangunan dan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dengan aksesibilitas yang lebih memadai, sehingga distribusi barang dan jasa lebih mudah dilakukan. Pada tahap ini, keterhubungan antar wilayah sudah terbuka, namun masih perlu penguatan untuk meningkatkan kualitas jaringan jalan dan utilitasnya.

*Pembiayaan* Pembangunan difokuskan dengan peningkatan pengembangan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah dan non-pemerintah.

Hasil pada Tahapan Percepatan Transformasi ini, PDRB per kapita diharapkan akan tercapai sebesar Rp. 62,64 juta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen per tahun. Hal ini dicapai dengan percepatan upaya transformasi setelah memiliki fondasi yang kuat sebagai pusat pengembangan agroindustri dan pariwisata. Pada tahap ini arah kebijakan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. 2  
Fokus Arah Kebijakan Percepatan Transformasi

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
<b>Mewujudkan Transformasi Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.</li> <li>• Mempercepat pengembangan SDM yang relevan dengan kebutuhan agroindustri dan pariwisata.</li> <li>• Mengembangkan pelatihan dan pendidikan yang lebih berkualitas untuk membangun SDM yang produktif.</li> </ul>
<b>Mewujudkan Transformasi Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produktivitas ekonomi secara masif di sektor unggulan.</li> <li>• Memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di perkotaan dan perdesaan.</li> <li>• Mendorong investasi dalam teknologi tinggi dan agroindustri untuk mendukung inovasi.</li> </ul>
<b>Mewujudkan Transformasi Tata Kelola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kelembagaan yang dinamis dan kolaboratif.</li> <li>• Meningkatkan profesionalisme ASN dengan dukungan teknologi informasi.</li> <li>• Digitalisasi layanan publik untuk efisiensi pemerintahan.</li> </ul>
<b>Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• Meningkatkan efektivitas belanja publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.</li> </ul>
<b>Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat internalisasi nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat.</li> <li>• Mengembangkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan air.</li> </ul>
<b>Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas fisik dan digital.</li> <li>• Memperkuat infrastruktur pendukung agroindustri dan pariwisata.</li> </ul>
<b>Pembiayaan Pembangunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta.</li> <li>• Optimalisasi sumber pendanaan non-pemerintah untuk pembangunan strategis.</li> </ul>

### 5.1.3 Arah Kebijakan Tahap 3 (2035-2039): Peningkatan Daya Saing

Tahapan ketiga mengarah pada perwujudan daya saing daerah dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin kokoh. *Transformasi sosial* difokuskan pada SDM berdaya saing yang dibentuk dari ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif, sistem pelayanan kesehatan yang bermutu, ketahanan sosial masyarakat semakin meningkat, serta SDM yang produktif dan inovatif. SDM yang berdaya saing dan produktif diwujudkan setelah penguatan fondasi pelayanan dasar yang dilakukan pada penahapan pertama dan percepatan peningkatan kualitas SDM pada penahapan kedua. Perwujudan SDM yang berdaya saing dan produktif bertujuan agar dapat mengisi lapangan kerja strategis kedepannya dalam sektor-sektor unggulan daerah.

Perwujudan *daya saing transformasi ekonomi* pada tahapan ketiga

fokus pada upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Dairi. Inovasi merupakan kata kunci penting dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah. Inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan produk dan layanan baru, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Inovasi yang berkualitas dan berkelanjutan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif daerah, sehingga dapat memperkuat posisi Kabupaten Dairi sebagai *hub* ekonomi antar kawasan/perbatasan provinsi dan optimalisasi logistik serta peningkatan akses pasar global melalui sektor agroindustri dan pariwisata sehingga dapat bersaing di pasar global. Pengembangan infrastruktur digital dan logistik diharapkan dapat mendukung ekspor dan perdagangan global dan regional.

Tahapan ketiga pada *transformasi tata kelola* pemerintahan fokus pada upaya kelembagaan yang adaptif dengan ditunjang oleh sumber daya manusia ASN yang profesional dalam upaya menjaga efektivitas pengendalian pembangunan, serta memberikan pelayanan publik yang inovatif.

Penciptaan Masyarakat demokratis, lingkungan aman dan Stabilitas Ekonomi Makro difokuskan pada pemantapan Kabupaten Dairi sebagai wilayah yang memiliki lingkungan yang aman untuk bertempat tinggal, menjalankan investasi, dan berdemokrasi.

Ketahanan sosial, budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif. Pemanfaatan unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya dan pemajuan kebudayaan dengan peningkatan kualitas tata kelola lembaga di bidang kebudayaan. Manajemen pengelolaan lingkungan hidup pada tahapan sebelumnya telah dikembangkan dan diperkuat dengan pengendalian yang dilaksanakan oleh semua sektor yang terlibat, termasuk juga masyarakat. Aturan serta regulasi harus ditaati bersama, pengawasan dan pengendalian agar keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan terus terjaga dan tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan banyak kerugian dan bencana. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengurangi pencemaran lingkungan, integrasi sistem pangan, dan

pengelolaan limbah di perkotaan.

*Pembangunan Kewilayahan dan pembangunan sarana dan prasarana* difokuskan pada penguatan dan peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian untuk menyiapkan masyarakat yang dapat berdaya saing di Kabupaten Dairi. Terlebih lagi perwujudan Kabupaten Dairi sebagai hub di Sumatera Utara yang terus dikembangkan, juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai sehingga produktivitas terus meningkat. Selain itu, peningkatan aksesibilitas wilayah keluar Kabupaten Dairi juga terus dikembangkan agar distribusi barang dan jasa tidak terhambat. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat juga terus dilakukan, agar kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan pertumbuhan perekonomian daerah yang terus meningkat dan semakin berdaya saing.

*Pembiayaan* Pembangunan difokuskan pada peningkatan kemandirian fiskal daerah dan perluasan cakupan sektor yang memanfaatkan sumber dana yang berasal dari pemerintah dan non pemerintah.

Diharapkan PDRB per kapita pada Tahapan Peningkatan Daya Saing ini semakin tinggi yaitu sebesar Rp. 83,43 juta dan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,9 persen per tahun. Fokus arah kebijakan pada tahap ini sebagai berikut.

Tabel 5. 3  
Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Daya Saing

<b>Aspek Arah Kebijakan</b>	<b>Fokus Arah Kebijakan</b>
<b>Mewujudkan Transformasi Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantapkan daya saing SDM melalui peningkatan produktivitas dan inovasi.</li> <li>• Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan dengan adopsi teknologi canggih.</li> <li>• Memperkuat kerjasama regional dalam pelatihan dan pendidikan untuk mendukung inovasi dan daya saing.</li> </ul>
<b>Mewujudkan Transformasi Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantapkan sektor agroindustri dan pariwisata untuk bersaing di pasar regional.</li> <li>• Mempercepat modernisasi dan digitalisasi sektor utama.</li> <li>• Mengembangkan infrastruktur digital dan logistik untuk mendukung ekspor dan perdagangan regional.</li> </ul>
<b>Mewujudkan Transformasi Tata Kelola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan adaptasi kelembagaan dan kompetensi ASN untuk mendukung lingkungan bisnis yang dinamis.</li> <li>• Mengembangkan regulasi adaptif yang mendukung inovasi dan efisiensi.</li> </ul>

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan untuk menjaga relevansi dan efektivitas.</li> </ul>
<b>Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantapkan Kabupaten Dairi sebagai wilayah yang aman untuk investasi dan bisnis.</li> <li>Meningkatkan investasi dalam infrastruktur pariwisata untuk mendukung daya tarik nasional.</li> </ul>
<b>Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.</li> <li>Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya sambil memastikan adaptasi terhadap perubahan.</li> </ul>
<b>Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur modern.</li> <li>Mengembangkan infrastruktur modern untuk meningkatkan konektivitas.</li> </ul>
<b>Pembiayaan Pembangunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan memperluas sumber pendanaan non-pemerintah.</li> <li>Memberikan insentif untuk investasi di sektor agroindustri dan pariwisata.</li> </ul>

#### **5.1.4 Arah Kebijakan Tahap 4 (2040-2045): Perwujudan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

Pada tahap ini fokus pembangunan diagendakan pada perwujudan Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. *Transformasi sosial* difokuskan untuk mewujudkan sistem layanan dasar yang dapat menopang hajat hidup masyarakat Kabupaten Dairi secara tangguh dan berketahanan, serta responsif dalam merespons dinamika sosial yang ada kedepannya. Perwujudan transformasi sosial dilakukan dengan penguatan SDM yang unggul, pemantapan pelayanan kesehatan yang berketahanan, dan transformasi perlindungan sosial yang adaptif.

*Transformasi ekonomi* fokus pada perwujudan Kabupaten Dairi sebagai pusat perekonomian (*economy hub*) di Provinsi Sumatera Utara, implementasi pengolahan berbasis sumber daya alam secara masif di seluruh sentra produksi seperti pertanian dan perkebunan yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Dairi, memberi nilai tambah (*value added*) pada produk sektor primer, hilirisasi subsektor industri manufaktur yang memiliki keterkaitan kuat ke depan (*forward linkage*), memanfaatkan pasar domestik dengan *middle-income class* yang besar untuk mengembangkan jasa, industri, dan produk agrikultur bernilai

tambah tinggi.

*Transformasi tata kelola* pada tahapan ini fokus pada perwujudan kelembagaan yang adaptif, ASN yang profesional dan adaptif .

*Masyarakat demokratis, lingkungan aman dan Stabilitas Ekonomi Makro* terwujud dengan difokuskan pada masyarakat damai, demokratis, dan taat hukum serta menguatnya pengelolaan kapasitas fiskal daerah dan sektor keuangan.

*Ketahanan sosial, budaya dan ekologi* difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, terwujudnya pelestarian budaya dan kearifan lokal, kondisi lingkungan hidup tetap terjaga dengan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh semua pihak dengan melakukan kolaborasi lintas sektor. Dalam rangka pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan fokus arah kebijakan pada tahap ini mendorong upaya penerapan ekonomi hijau di tingkat regional dan mempertahankan status Kaldera Toba di UNESCO Global Geopark Network sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

*Pembangunan Kewilayahan dan pembangunan sarana dan prasarana* difokuskan pada penjagaan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang merata, berkeadilan, dan andal untuk mendukung ekonomi wilayah serta pelayanan dasar yang berkualitas. Pembiayaan Pembangunan difokuskan pada sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin meningkat.

Perwujudan arah kebijakan Kabupaten Dairi tahap keempat ini, PDRB per kapita mencapai Rp. 120 juta dan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6,1 persen per tahun.

Tabel 5. 4  
Arah Kebijakan Perwujudan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

<b>Aspek Arah Kebijakan</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Mewujudkan Transformasi Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan standar layanan kesehatan dan pendidikan ke level nasional.</li><li>• Memastikan seluruh masyarakat memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.</li><li>• Mengembangkan program-program sosial yang adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.</li></ul>
<b>Mewujudkan Transformasi Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan inovasi dalam semua sektor ekonomi.</li></ul>

Aspek Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat posisi Kabupaten Dairi sebagai hub regional untuk agroindustri dan pariwisata.</li> <li>Mengintegrasikan ekonomi Kabupaten Dairi dengan jaringan nasional melalui peningkatan konektivitas dan digitalisasi.</li> </ul>
<b>Mewujudkan Transformasi Tata Kelola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencapai tata kelola yang berintegritas dan adaptif, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas.</li> <li>Meningkatkan indeks pembangunan kepariwisataan.</li> <li>Menjadi model tata kelola yang baik di tingkat nasional.</li> </ul>
<b>Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan stabilitas politik dan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi.</li> <li>Meningkatkan pendapatan dari sektor strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.</li> </ul>
<b>Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong upaya penerapan ekonomi hijau di tingkat regional.</li> <li>Mempertahankan status Kaldera Toba di UNESCO Global Geopark Network sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan.</li> </ul>
<b>Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung ekonomi wilayah yang berkelanjutan.</li> <li>Memperkuat infrastruktur digital dan konektivitas.</li> </ul>
<b>Pembiayaan Pembangunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sinergi pendanaan pemerintah dan swasta.</li> <li>Mendorong model pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang adil dan merata.</li> </ul>

### 5.1.5 Arah Kebijakan Transformasi

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5  
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029	2030-2035	2035-3039	2040-2045
<b>Misi 1</b> Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki Kesehatan prima, pendidikan	Penguatan Transformasi 1. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan 3. Peningkatan cakupan perlindungan sosial	Percepatan Transformasi 1. Penguatan mutu layanan kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan 2. Peningkatan daya saing kependidikan 3. Penguatan pelayanan	Peningkatan Daya saing Transformasi 1. Penguatan sistem pelayanan kesehatan yang bermutu 2. Peningkatan ekosistem pendidikan	Perwujudan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan 1. Pemantapan pelayanan kesehatan yang berketahanan 2. Penguatan SDM yang unggul

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029	2030-2035	2035-3039	2040-2045
berkualitas berdaya saing, dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan kebijakan yang inklusif bagi kelompok rentan</li> <li>5. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perindungan sosial yang komprehensif</li> <li>4. Penguatan inklusivitas sosial bagi kelompok rentan</li> <li>5. Pemantapan kompetensi tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan ketahanan dan inklusivitas sosial</li> <li>4. Peningkatan produktivitas kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Perlindungan sosial yang adaptif</li> </ul>
<b>Misi 2</b> Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik serta perdesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	<p>Penguatan Transformasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan dan inisiasi ekosistem hilirisasi industri</li> <li>2. Inisiasi fondasi agroindustri</li> <li>3. Penyiapan dan inisiasi ekonomi hijau</li> <li>4. Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah</li> <li>5. Peningkatan kapasitas pelaku IKM/UMKM/ Ekonomi kreatif</li> <li>6. Peningkatan riset dan inovasi untuk mengembangkan SDA unggulan</li> <li>7. Penyiapan perdesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi</li> <li>8. Penyiapan ekosistem pariwisata</li> <li>9. Penataan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba</li> <li>10. Peningkatan iklim investasi daerah</li> </ul>	<p>Percepatan Transformasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan ekosistem dan akselerasi hilirisasi industri</li> <li>2. Pengembangan agroindustri</li> <li>3. Penerapan ekonomi hijau</li> <li>4. Pemanfaatan akses digital di seluruh wilayah</li> <li>5. Digitalisasi pemasaran produk IKM/UMKM/ Ekonomi kreatif</li> <li>6. Optimalisasi hasil riset dan inovasi pengembangan SDA unggulan</li> <li>7. Penguatan dan perluasan pusat pertumbuhan ekonomi</li> <li>8. Penguatan kualitas destinasi pariwisata</li> <li>9. Penguatan iklim investasi daerah dan terbangun <i>link and match</i> tenaga kerja</li> </ul>	<p>Peningkatan Daya saing Transformasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan hilirisasi industri terhadap sektor unggulan daerah</li> <li>2. Peningkatan agroindustri</li> <li>3. Peningkatan penerapan ekonomi hijau dalam berbagai aspek</li> <li>4. Peningkatan daya saing pariwisata</li> <li>5. Penguatan dan peningkatan pemanfaatan akses digital</li> <li>6. Penguatan digitalisasi pemasaran IKM/UMKM/ Ekonomi kreatif</li> <li>7. Peningkatan Inovasi yang berkualitas dan berkelanjutan</li> <li>8. Optimalisasi pusat pertumbuhan ekonomi di desa dan kota</li> <li>9. Optimalisasi daya saing pariwisata</li> <li>10. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja</li> </ul>	<p>Perwujudan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hilirisasi industri berkelanjutan</li> <li>2. Perwujudan pusat ekonomi (<i>economy hub</i>) di Sumatera Utara berbasis agroindustri</li> <li>3. Penerapan ekonomi hijau secara menyeluruh dan berkelanjutan</li> <li>4. Penerapan pariwisata berkelanjutan</li> </ul>
<b>Misi 3</b> Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas dan prima	<p>Penguatan Transformasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas manajemen ASN</li> <li>2. Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi</li> <li>3. Peningkatan kapasitas masyarakat sipil</li> </ul>	<p>Percepatan Transformasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas ASN berbasis merit</li> <li>2. Terwujudnya kelembagaan yang berkualitas</li> <li>3. Terwujudnya SDM ASN yang sejahtera dan kompeten</li> </ul>	<p>Peningkatan Daya saing Perwujudan tata kelola kolaboratif yang dicirikan dengan kelembagaan yang adaptif, ASN yang profesional dan pelayanan publik inovatif</p>	<p>Perwujudan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan ASN yang profesional dan adaptif, Kelembagaan yang adaptif, Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif</p>

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029	2030-2035	2035-3039	2040-2045
<b>Misi 4</b> Mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro	Penguatan Transformasi Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, lembaga demokrasi yang kuat dan akuntabilitas berbasis digital	Percepatan Transformasi Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penciptaan ruang publik yang lebih sehat dan pengelolaan fiskal yang adaptif	Peningkatan Daya saing Transformasi Pemantapan lingkungan yang aman untuk bertempat tinggal, berdemokrasi, dan menjalankan investasi	Perwujudan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Masyarakat damai, demokratis, dan taat hukum dan penguatan kapasitas fiskal daerah dan sektor keuangan
<b>Misi 5</b> Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan penciptaan ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan	Penguatan Transformasi 1. Peningkatan peran keluarga berkualitas, Peningkatan kesetaraan gender, komunitas masyarakat untuk pembangunan kebudayaan dan menggerakkan modal sosial	Percepatan Transformasi 1. Penguatan peran keluarga berkualitas 2. Penguatan ketahanan budaya lokal 3. penguatan manajemen lingkungan	Peningkatan Daya saing Transformasi 1. Masyarakat dan keluarga yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana 2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkesetaraan 3. Penguatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal 4. Penguatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Perwujudan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan 1. Masyarakat dan keluarga tangguh berketahanan terhadap berbagai perubahan dan bencana 2. Lestarinya budaya dan kearifan lokal 3. lingkungan hidup terjaga
<b>Misi 6</b> Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah	Penguatan Transformasi Pemenuhan infrastruktur dasar untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah	Percepatan Transformasi 1. Peningkatan keterhubungan antar wilayah 2. Peningkatan kualitas jaringan jalan dan utilitas	Peningkatan Daya saing Transformasi Penguatan dan peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian	Perwujudan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Infrastruktur yang berkelanjutan dalam menopang perekonomian daerah dan pelayanan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah
<b>Misi 7</b> Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Perkuatan Transformasi 1. Pembangunan sarana prasarana memperhatikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Percepatan Transformasi 1. Peningkatan kolaborasi pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan Daya saing Transformasi Pengelolaan lingkungan dan perlindungan bencana berbasis jasa ekosistem dan lintas sektoral	Perwujudan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Kualitas dan ketersediaan infrastruktur

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029	2030-2035	2035-3039	2040-2045
	2. Adaptasi, mitigasi bencana dan keselamatan.	2. Akselerasi aksi kampung iklim dan desa tangguh bencana		yang merata, berkeadilan dan andal
<b>Misi 8</b> Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan dan peningkatan akuntabilitas pemerintah	Perkuatan Transformasi 1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten 2. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan	Percepatan Transformasi 1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten 2. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan	Peningkatan Daya saing Transformasi 1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten 2. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan	Perwujudan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan 1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten 2. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan

## 5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi “Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Sasaran Pokok dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) merupakan hasil penyelarasan dengan RPJPD Sumatera Utara dan RPJPN Tahun 2025-2045. Sasaran pokok tersebut dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) misi (agenda transformasi dan landasan transformasi) yang telah diuraikan sebelumnya dan pencapaiannya diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang bersifat *progresif* melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan daerah atau disebut 17 Indonesia Emas (17 IE). Misi transformasi sosial dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah yaitu:

1. Masyarakat Kabupaten Dairi sehat dan terjamin yang dicapai dengan IE1;
2. Masyarakat Kabupaten Dairi berpendidikan berkualitas unggul yang dicapai dengan IE2;
3. Masyarakat Kabupaten Dairi sejahtera dan terlindungi yang dicapai dengan IE3.

Misi transformasi ekonomi dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah berupa Kabupaten Dairi yang produktif dengan keunggulan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan dicapai dengan IE4, IE5, IE6, IE7, dan IE8. Misi transformasi tata kelola dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah berupa pemerintahan Kabupaten Dairi berkinerja unggul didukung partisipasi masyarakat yang tinggi dicapai dengan IE9. Dalam rangka mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah juga dicapai dengan sasaran pokok yaitu Kabupaten Dairi yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul dicapai dengan IE10, IE11, dan IE12. Demikian juga dengan mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah berupa Kabupaten Dairi berketahanan sosial budaya dan ekologi yang unggul, maju dan berkelanjutan dicapai dengan IE13, IE14, IE15, IE16, dan IE17. Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan daerah atau IE tersebut ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 6  
Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan

<b>Agenda</b>	<b>Pelaksanaan Misi</b>	<b>Sasaran Pokok</b>	<b>Arah Pembangunan (IE)</b>
Transformasi	1. Mewujudkan transformasi sosial	1. Masyarakat Kabupaten Dairi sehat dan terjamin	1) IE1. Kesehatan untuk Semua
		2. Masyarakat Kabupaten Dairi berpendidikan berkualitas unggul	2) IE2. Pendidikan Unggul dan Merata
		3. Masyarakat Kabupaten Dairi sejahtera dan terlindungi	3) IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
	2. Mewujudkan transformasi ekonomi	4. Kabupaten Dairi yang produktif dengan keunggulan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	4) IE4. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 5) IE5. Penerapan Ekonomi Hijau melalui Industri Hijau (Agroindustri Unggul) 6) IE6. Investasi Unggul Bernilai Tinggi ( <i>High Value</i> ) yang Didukung oleh Transformasi Digital 7) IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global melalui Industri (termasuk Agroindustri) Kreatif dan Wisata Unggul Kelas Dunia

Agenda	Pelaksanaan Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)
			8) IE8. Pertumbuhan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Ekonomi
	3. Mewujudkan transformasi tata kelola	5. Pemerintahan Kabupaten Dairi berkinerja unggul didukung partisipasi masyarakat yang tinggi	9) IE.9 Penguatan Kapabilitas Tata Kelola Berintegritas dan Regulasi Adaptif
Landasan Transformasi	4. Mewujudkan Masyarakat Demokratis dengan Penciptaan Lingkungan Aman dan Stabilitas Ekonomi Makro	6. Kabupaten Dairi yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul	10) IE10. Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan Aman 11) IE11. Stabilitas Ekonomi 12) IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan
	5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	7. Kabupaten Dairi berketahanan sosial budaya dan ekologi yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan	13) IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 14) IE14. Pembangunan Keluarga Berkualitas, kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif 15) IE15. Lingkungan Hidup yang Berkualitas 16) IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 17) IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Uraian gambaran kinerja dalam mencapai ketujuh sasaran pokok pembangunan di atas dijelaskan sebagai berikut.

### 5.2.1 Masyarakat Kabupaten Dairi Sehat dan Terjamin

Masyarakat Kabupaten Dairi sehat dan terjamin dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
2. Pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular terutama tuberkulosis.
3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.

4. Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif tenaga medis khususnya daerah sulit yang kekurangan tenaga medis.
5. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
6. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah.
7. Penguatan layanan kesehatan ibu, anak, lanjut usia dan layanan kesehatan mental.
8. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
9. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
10. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
11. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
12. Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting*.
13. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
14. Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan Kesehatan yang berkelanjutan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. 7  
Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Kabupaten Dairi Sehat dan Terjamin

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar; Peningkatan fasilitas kesehatan ibu dan anak; Penanganan gizi buruk dan <i>stunting</i> ; Penemuan dan pengobatan Tuberkulosis; Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional; Penyediaan fasilitas kesehatan di kawasan industri agroindustri dan destinasi wisata.	Modernisasi fasilitas kesehatan; Peningkatan efisiensi sistem kesehatan; Pengembangan kebijakan kesehatan berbasis data dan teknologi; Pengembangan kebijakan penanganan Tuberkulosis berbasis data dan teknologi; Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan nasional; Meningkatkan fasilitas kesehatan di kawasan industri dan wisata dengan teknologi digital.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan spesialis; Penguatan kolaborasi dalam bidang kesehatan; Pengembangan teknologi kesehatan canggih; Penguatan kolaborasi dalam penanganan Tuberkulosis; Memastikan layanan kesehatan berkualitas di semua area, termasuk kawasan industri dan wisata.	Optimalisasi sistem kesehatan berbasis digital; Peningkatan standar kesehatan; Penguatan layanan kesehatan berkelanjutan; Optimalisasi sistem penanganan Tuberkulosis berbasis digital; Layanan kesehatan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk kawasan industri dan wisata.	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	75,5	79
				2. Kesehatan Ibu dan anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	55	15
				3. Penanganan Tuberkulosis: a) Cakupan penemuan dan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%) b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	90-92	100
				4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95	99,5

Peningkatan UHH menunjukkan perbaikan dalam layanan kesehatan, gizi, dan kondisi hidup yang lebih baik, yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesehatan yang baik adalah prasyarat untuk menjadikan Kabupaten Dairi sebagai daerah yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan, karena masyarakat yang sehat lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih baik dalam pengembangan industri dan pariwisata.

Menurunkan angka kematian ibu dan prevalensi stunting adalah indikator penting dari peningkatan kesehatan ibu dan anak. Ini penting karena kesehatan ibu dan anak yang baik memastikan generasi berikutnya yang lebih sehat dan produktif. Kesehatan ibu dan anak yang baik juga mempengaruhi persepsi wisatawan dan investor, membuat Kabupaten Dairi lebih menarik sebagai pusat pengembangan industri dan pariwisata.

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang dapat menghambat produktivitas masyarakat. Tingkat penemuan dan pengobatan yang tinggi menunjukkan sistem kesehatan yang efektif dalam menangani penyakit menular. Ini penting untuk memastikan tenaga kerja yang sehat dan produktif, yang mendukung pengembangan industri dan pariwisata di Kabupaten Dairi. Lingkungan yang sehat juga penting untuk menarik wisatawan dan investor.

Cakupan jaminan kesehatan yang luas memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus menghadapi beban biaya yang berat. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan akses kesehatan yang terjamin, Kabupaten Dairi dapat mengembangkan tenaga kerja yang sehat, yang merupakan kunci untuk mendukung industri dan pariwisata yang maju dan berkelanjutan.

### **5.2.2 Masyarakat Kabupaten Dairi Berpendidikan Berkualitas Unggul**

Masyarakat Kabupaten Dairi berpendidikan berkualitas unggul dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Percepatan wajib belajar pendidikan dasar .
2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar.
3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
4. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
6. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah.
7. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
8. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
9. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
10. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

11. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.
12. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
13. Pengembangan perpustakaan dan pustakawannya sebagai pusat informasi dan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan inovasi, promosi dan pelestarian budaya, pusat komunitas, dan pengembangan ekonomi lokal.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 8  
Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Kabupaten Dairi Berpendidikan Berkualitas Unggul

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Peningkatan kualitas pengajaran dan pelatihan guru; Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan; Implementasi program literasi membaca dan numerasi; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; Penyediaan beasiswa dan dukungan finansial; Pengembangan kurikulum pendidikan untuk agroindustri dan pelatihan tenaga kerja di sektor pariwisata.	Modernisasi fasilitas pendidikan; Peningkatan efisiensi sistem pendidikan; Pengembangan kebijakan pendidikan berbasis data dan teknologi; Penguatan program literasi membaca dan numerasi; Peningkatan efisiensi sistem pendidikan; Peningkatan program pendidikan dan pelatihan untuk mendukung sektor agroindustri dan pariwisata.	Peningkatan kualitas pendidikan; Penguatan kolaborasi dalam bidang pendidikan; Pengembangan teknologi pendidikan canggih; Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat; Pengembangan program pendidikan berbasis keterampilan kerja; Program pendidikan dan pelatihan untuk mendukung sektor agroindustri dan pariwisata.	Optimalisasi sistem pendidikan berbasis digital; Peningkatan standar pendidikan; Penguatan layanan pendidikan berkelanjutan; Penguatan program literasi membaca dan enumerasi; Optimalisasi sistem pendidikan berbasis digital; Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk mendukung sektor agroindustri dan pariwisata.	5. Hasil Pembelajaran:		
				a) Standar kompetensi minimum SD pada asesmen tingkat nasional untuk:		
				i. Literasi membaca	76,2	78,5
				ii. Numerasi	73,26	75,5
				b) Standar kompetensi minimum SMP pada asesmen tingkat nasional untuk:		
				i. Literasi Membaca	74,06	76,5
				ii. Numerasi	69,95	71,5
c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,88	13,2-13,27				
d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,53	15,04-15,10				
				6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	20,83	23,01-23,5
				7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	71,1	85,0

Mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi menunjukkan bahwa siswa memiliki keterampilan dasar yang diperlukan

untuk sukses dalam kehidupan dan pekerjaan. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang tinggi menunjukkan komitmen masyarakat terhadap pendidikan. Peningkatan dalam indikator-indikator ini akan menghasilkan masyarakat yang lebih terdidik, yang merupakan fondasi penting untuk pengembangan industri dan pariwisata. Masyarakat yang terdidik lebih mampu berinovasi dan berpartisipasi dalam ekonomi modern, mendukung visi “Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Selanjutnya tingkat pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang lebih spesifik dan mendalam, yang penting untuk pekerjaan di sektor industri dan pariwisata yang berkembang.

Proporsi penduduk dengan pendidikan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk inovasi dan peningkatan produktivitas. Hal ini mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih kompleks dan bernilai tinggi, yang sesuai dengan visi Kabupaten Dairi. Indikator Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi menunjukkan seberapa baik sistem pendidikan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.

Pekerja dengan keahlian menengah hingga tinggi penting untuk mendukung industri yang lebih maju dan pariwisata kelas dunia. Peningkatan dalam indikator ini akan membantu memastikan bahwa Kabupaten Dairi memiliki tenaga kerja yang terampil dan kompeten, yang dapat mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan daya saing.

### **5.2.3 Masyarakat Kabupaten Dairi Sejahtera dan Terlindungi**

Masyarakat Kabupaten Dairi sejahtera dan terlindungi dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
2. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi

energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.

3. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 9  
Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Kabupaten Dairi Sejahtera dan Terlindungi

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BAS E-LINE 2025	TARGET 2045
Peningkatan akses layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi; Peningkatan cakupan dan kualitas jaminan sosial ketenagakerjaan; Program pemberdayaan penyandang disabilitas dan peningkatan akses ke sektor formal; Program jaminan sosial untuk pekerja, termasuk di sektor agroindustri dan pariwisata.	Modernisasi fasilitas layanan sosial dan ketenagakerjaan; Peningkatan efisiensi sistem jaminan sosial; Pengembangan kebijakan inklusif berbasis data dan teknologi; Memperluas program perlindungan sosial bagi pekerja termasuk di sektor agroindustri dan pariwisata.	Penguatan kolaborasi dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan; Pengembangan teknologi layanan sosial dan ketenagakerjaan canggih; Peningkatan kualitas dan akses layanan bagi penyandang disabilitas; Perlindungan sosial yang komprehensif untuk pekerja termasuk di sektor agroindustri dan pariwisata.	Optimalisasi sistem jaminan sosial berbasis digital; Peningkatan standar layanan sosial dan ketenagakerjaan; Penguatan layanan inklusif dan berkelanjutan untuk penyandang disabilitas; Perlindungan sosial yang komprehensif untuk pekerja termasuk di sektor agroindustri dan pariwisata.	8. Tingkat Kemiskinan (%)	7,10-7,00	0,17 - 0,67
				9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten (%)	11,92	50,50
				10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1,00	5,00

Tingkat kemiskinan yang rendah menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penurunan tingkat kemiskinan mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Dengan mengurangi kemiskinan, Kabupaten Dairi dapat memastikan bahwa lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan industri dan pariwisata, ini juga mendukung visi Kabupaten Dairi.

Cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tinggi memastikan bahwa pekerja memiliki perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin mereka hadapi selama bekerja. Ini meningkatkan keamanan kerja dan kesejahteraan pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan stabilitas ekonomi. Dengan memberikan perlindungan sosial yang memadai, Kabupaten Dairi dapat menarik lebih banyak investasi dan tenaga kerja berkualitas, mendukung pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan.

Inklusi penyandang disabilitas dalam sektor formal menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dan inklusi ekonomi. Memberikan kesempatan kerja yang setara kepada penyandang disabilitas meningkatkan kesejahteraan mereka dan memanfaatkan potensi produktif mereka dalam ekonomi. Ini mendukung visi Kabupaten “Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, di mana semua lapisan masyarakat dapat berkontribusi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

#### **5.2.4 Kabupaten Dairi yang Produktif dengan Keunggulan IPTEK dan Inovasi serta Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan**

Kabupaten Dairi yang produktif dengan keunggulan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
2. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor.
3. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
4. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu dan teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim tanam komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan,

teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/platform*.

5. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
6. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
7. Pengembangan *closed loop model* pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, bank, dan asuransi pertanian.
8. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan darat dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani.
9. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan darat.
10. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah.
11. Pengembangan aglomerasi industri sesuai dengan industri unggulan daerah dengan penyediaan tenaga kerja, meningkatkan daya saing industri, penetapan upah minimum yang sesuai, memperluas akses pasar dan kelancaran konektivitas lalu-lintas barang dan jasa, meningkatkan investasi dan pembiayaan sektor perbankan, penyediaan dan perbaikan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian.
12. Pengembangan sektor unggulan daerah yang terpadu khususnya dalam memenuhi kebutuhan Kabupaten Dairi.
13. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan.
14. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
15. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
16. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar-wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan

kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain: layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya).

17. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.
18. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)*.
19. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy*.
20. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage*.
21. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi.
22. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal.
23. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi.
24. *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*.
25. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenities, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan *urban tourism* dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Danau Toba.
26. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
27. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
28. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
29. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
30. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana ke pelabuhan Silahisabungan.
31. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK termasuk dalam pengembangan industri di daerah dalam rangka mendukung percepatan

tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri (DUDI) daerah yang berdaya saing.

32. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.
33. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau.
34. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
35. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, serta pemenuhan standarisasi dan sertifikasi (BPOM, PIRT, Halal, HAKI, Merk, dan lain-lain.)
36. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
37. Peningkatan produktivitas BUMD, khususnya dalam rangka mengembangkan industri unggulan dan sektor unggulan daerah.
38. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia.
39. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh wilayah.
40. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik).
41. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi.
42. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif terutama bagi masyarakat umum.
43. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
44. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
45. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
46. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.

47. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, penataan kawasan kumuh, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 10  
Target Kinerja Kabupaten Dairi yang Produktif dengan Keunggulan IPTEK dan Inovasi serta Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Pengembangan teknologi industri dan kreatif; Peningkatan riset dan inovasi; Peningkatan akses keuangan, pendidikan, dan pelatihan; Pengembangan fasilitas pariwisata; Promosi pariwisata; Pelatihan SDM pariwisata; Penyediaan akses pasar dan jaringan pemasaran untuk UMKM, koperasi, dan BUMD; Pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru; Program pemberdayaan perempuan; Penerapan teknologi canggih dalam produksi agroindustri dan inovasi dalam layanan wisata.	Modernisasi industri; Diversifikasi produk wisata; Peningkatan kerjasama; Pengembangan destinasi wisata baru; Peningkatan efisiensi produksi; Insentif pajak untuk industri kreatif; Penguatan jaringan distribusi dan akses pasar; Program wirausaha; Kebijakan fleksibel di tempat kerja untuk mendukung partisipasi perempuan; Peningkatan investasi dalam R&D dan inovasi produk di sektor agroindustri dan pariwisata.	Pengembangan kluster industri; Peningkatan kolaborasi antara industri dan lembaga penelitian; Peningkatan investasi di sektor pariwisata; Pengembangan pariwisata berkelanjutan; Peningkatan akses teknologi dan inovasi; Penguatan kapasitas manajerial UMKM, koperasi, dan BUMD; Pengembangan program pelatihan keterampilan; Peningkatan akses informasi; Jaringan dukungan kerja bagi perempuan; Peningkatan R&D dan inovasi di sektor agroindustri dan pariwisata.	Pengembangan teknologi industri maju; Peningkatan daya saing; Penguatan ekosistem pariwisata unggulan; Kolaborasi publik-swasta; Peningkatan inovasi dalam ekonomi kreatif; Ekspansi pasar; Optimalisasi program pelatihan kerja; Program kesetaraan gender dan akses ke modal usaha bagi perempuan; Inovasi berkelanjutan di sektor agroindustri dan pariwisata.	11.Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	0,395-0,399	10,14-12,34
				12.Pengembangan Pariwisata:		
				a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,61-2,77	5,2-5,4
				b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	NA	6.000-10.000
				c) Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN)		
				13.Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	NA	0,76
				14.Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
				a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level kabupaten (%)	61,97	65,00
				b) Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah pada level kabupaten (%)	2,5%	5,00%
				c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,68	8,0
d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	4,70				
e) <i>Return on Asset</i> (RoA) BUMD (%)	0	5,60				
15.Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,43	1,027				

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
				16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	79,86	82,44-85,71
				17. Tingkat Penguasaan IPTEK: Indeks Inovasi Daerah	35,5	71,5
Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi hijau; Peningkatan riset dan inovasi terkait teknologi hijau; Program edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya ekonomi hijau; Implementasi praktik agroindustri yang ramah lingkungan dan pengembangan ekowisata.	Implementasi skala besar proyek energi terbarukan; Integrasi teknologi hijau dalam sektor industri utama; Penguatan kerjasama dengan sektor swasta dalam penerapan teknologi hijau; Pengembangan praktik industri dan wisata yang lebih ramah lingkungan.	Diversifikasi sumber energi terbarukan dan peningkatan Peningkatan efisiensi penggunaan energi dan pengurangan emisi karbon di sektor industri; Penguatan kebijakan insentif pajak untuk industri hijau; Promosi dan pemasaran untuk teknologi hijau dan produk hijau; Implementasi penuh industri hijau dan wisata berkelanjutan.	Implementasi standar untuk teknologi dan produk hijau; Peningkatan investasi berkelanjutan dalam teknologi hijau; Penguatan daya saing dalam penerapan ekonomi hijau; Industri hijau dan wisata berkelanjutan di seluruh wilayah.	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a) Indeks Ekonomi Hijau	51,12	77,18
Pengembangan infrastruktur TIK di seluruh wilayah kabupaten/kota; Peningkatan akses internet dan layanan digital; Program literasi digital dan pelatihan TIK untuk masyarakat dan tenaga kerja; Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan TIK; Promosi investasi di sektor agroindustri dan digitalisasi promosi pariwisata.	Modernisasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur TIK; Integrasi TIK dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; Peningkatan investasi di sektor TIK; Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan TIK; Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan investasi dan promosi.	Peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi TIK canggih; Penguatan ekosistem <i>start-up</i> dan perusahaan teknologi; Promosi dan ekspansi produk dan layanan TIK; Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang TIK melalui pelatihan lanjutan dan program beasiswa; Transformasi digital yang mendukung investasi di sektor agroindustri dan pariwisata.	Optimalisasi penggunaan TIK dalam semua sektor kehidupan; Implementasi standar dalam pengembangan TIK; Peningkatan investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan TIK; Transformasi digital yang mendukung investasi di sektor agroindustri dan pariwisata.	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,50	7,50

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Peningkatan infrastruktur transportasi, logistik, dan industri; Penyediaan insentif investasi; Peningkatan kapasitas produksi dan kualitas barang dan jasa ekspor; Pengembangan pasar ekspor baru; Meningkatkan ekspor produk agroindustri dan promosi pariwisata Kabupaten Dairi.	Modernisasi sistem logistik dan infrastruktur industri; Optimalisasi distribusi barang dan jasa antar wilayah; Penguatan regulasi; Diversifikasi produk dan jasa ekspor; Memperkuat jaringan nasional dan meningkatkan ekspor serta kunjungan wisatawan.	Pengembangan teknologi canggih dalam logistik dan produksi; Peningkatan investasi dan inovasi industri; Penguatan <i>branding</i> produk di pasar; Ekspansi dan promosi produk agroindustri dan pariwisata.	Optimalisasi sistem digital dalam distribusi dan produksi; Peningkatan standar untuk investasi, logistik, dan ekspor; Penguatan stabilitas dan daya saing berkelanjutan dalam ekonomi; Ekspansi dan promosi produk agroindustri dan pariwisata.	20.Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	11,26	5,85
				21.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,90	21,55
				22.Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	27,90	33,73
				a) Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	64,00	75,50
Peningkatan infrastruktur dasar dan layanan publik di kota dan desa; Program pembangunan perumahan layak dan terjangkau; Perencanaan permukiman baru skala besar dan pengurangan luas kawasan kumuh; Pemberdayaan desa untuk mencapai kemandirian ekonomi; Peningkatan konektivitas antar wilayah metropolitan dan pedesaan; Pembangunan industri/ agroindustri di daerah perkotaan dan pedesaan serta pengembangan destinasi wisata; Modernisasi infrastruktur perpustakaan.	Modernisasi infrastruktur perkotaan dan perdesaan; Pengembangan kota cerdas ( <i>smart city</i> ) dan desa cerdas ( <i>smart village</i> ); Integrasi teknologi dalam manajemen perkotaan dan perdesaan; Peningkatan akses hunian layak dan berkelanjutan; Pengembangan kawasan permukiman baru skala besar, hunian vertikal dan pengentasan kawasan kumuh; Mendorong pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan industri agroindustri dan pariwisata; Percepatan modernisasi perpustakaan.	Penataan dan peremajaan permukiman perkotaan; Peningkatan daya saing wilayah metropolitan di tingkat nasional; Penguatan kolaborasi antara kota dan desa dalam pembangunan berkelanjutan; Promosi untuk investasi di kota dan desa; Peningkatan kualitas hidup di desa melalui program kemandirian ekonomi; Mendorong pertumbuhan yang seimbang di perkotaan dan perdesaan dengan industri /agroindustri dan pariwisata; Perpustakaan yang terintegrasi dan inovatif.	Optimalisasi pengelolaan kota dan desa berbasis digital; Implementasi standar untuk hunian layak dan berkelanjutan; Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang unggul, maju dan berdaya saing; Peningkatan kontribusi wilayah metropolitan terhadap PDRB nasional; Penguatan kemandirian desa berkelanjutan; Pertumbuhan seimbang di perkotaan dan perdesaan dengan industri/ agroindustri dan pariwisata; Perpustakaan pintar dengan teknologi canggih.	23.Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	74,36	84,5
				a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan b) Indeks Desa Membangun		

Industri pengolahan adalah salah satu sektor kunci dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Rasio PDRB industri pengolahan yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki basis industri yang kuat, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan dalam sektor ini juga mendukung pengembangan agroindustri yang lebih maju dan berkelanjutan, sesuai dengan visi Kabupaten Dairi.

Pariwisata adalah sektor ekonomi penting yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan rasio PDRB dari penyediaan akomodasi dan jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa Kabupaten Dairi berhasil menarik lebih banyak wisatawan, yang mendukung pengembangan pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin banyak jumlah wisatawan akan meningkatkan IPKN Kabupaten Dairi. IPKN menggambarkan kualitas Pembangunan Kepariwisata bersifat lintas sektor dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dengan tujuan untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia pada *Travel and Tourism Development Index*. Ekonomi kreatif mencakup berbagai sektor yang mengandalkan kreativitas dan inovasi, seperti seni, desain, media, dan teknologi.

Proporsi PDRB ekonomi kreatif yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki ekosistem inovasi yang kuat, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas. Ini sejalan dengan visi Kabupaten Dairi “Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

UMKM, koperasi, dan BUMD memainkan peran penting dalam ekonomi daerah. Indikator-indikator ini menunjukkan seberapa produktif sektor-sektor tersebut dalam berkontribusi terhadap PDRB dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan produktivitas di sektor-sektor ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kuat dan dinamis di Kabupaten Dairi.

Tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan bahwa ekonomi daerah mampu menciptakan cukup banyak lapangan kerja untuk penduduknya. Penurunan tingkat pengangguran adalah indikator penting dari stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang mendukung

visi Kabupaten Dairi “Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

Partisipasi angkatan kerja perempuan yang tinggi menunjukkan inklusi gender dalam ekonomi dan meningkatkan potensi produktivitas keseluruhan daerah. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah penting untuk memastikan bahwa seluruh potensi sumber daya manusia daerah dimanfaatkan secara optimal, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indeks Inovasi Daerah menunjukkan seberapa baik daerah tersebut dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru serta inovasi.

Penguasaan IPTEK yang tinggi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan teknologi, yang mendukung visi Kabupaten Dairi “Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

Indeks Ekonomi Hijau yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam aktivitas ekonominya. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menerapkan ekonomi hijau, Kabupaten Dairi dapat meningkatkan daya saing, menarik investasi hijau, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini sejalan dengan visi “Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

Indeks Pembangunan TIK yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki infrastruktur TIK yang baik, akses yang luas terhadap teknologi informasi, dan tingkat penggunaan yang tinggi oleh masyarakat dan sektor bisnis. Hal ini penting karena akses dan penggunaan TIK meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi seperti industri, pendidikan, dan kesehatan, memungkinkan proses bisnis yang lebih cepat dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Infrastruktur TIK yang baik juga mendukung pengembangan industri berbasis teknologi dan sektor pariwisata melalui promosi, manajemen destinasi, dan peningkatan pengalaman wisatawan. Selain itu, akses yang luas terhadap TIK memberdayakan masyarakat dengan keterampilan digital, memudahkan akses informasi, layanan publik, dan peluang pendidikan, serta menciptakan peluang kerja baru. Transformasi digital dalam pemerintahan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, dan

akuntabilitas, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah dan mempercepat proses administratif. Lebih lanjut, TIK mendukung inovasi di berbagai sektor dan dapat digunakan untuk mendukung praktek ramah lingkungan dan keberlanjutan, seperti smart grid dan manajemen energi.

Koefisien variasi harga yang rendah menunjukkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa serta ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung perdagangan domestik. Hal ini penting karena harga yang seragam memastikan bahwa semua masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan, memiliki akses yang setara terhadap barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, sehingga meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, mengurangi perbedaan harga antar wilayah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta menunjukkan pasar yang lebih efisien dan terintegrasi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Ekspor barang dan jasa yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu bersaing di pasar dan memiliki produk serta layanan yang diminati oleh negara lain. Hal ini penting karena ekspor membantu diversifikasi ekonomi dengan membuka pasar baru dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Selain itu, ekspor meningkatkan pendapatan daerah dari devisa, yang penting untuk stabilitas ekonomi. Ekspor juga membantu daerah untuk meningkatkan standar kualitas dan efisiensi produksi, yang mendukung daya saing. Koefisien variasi harga yang rendah dan kelancaran ekspor sangat tergantung dengan kondisi kemandapan jalan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas.

Proporsi kontribusi PDRB wilayah perkotaan yang tinggi menunjukkan bahwa kota memainkan peran penting dalam perekonomian. Hal ini penting karena kota sebagai pusat ekonomi utama dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selain itu, wilayah perkotaan yang berkontribusi besar terhadap PDRB menarik lebih banyak investasi. Peningkatan kontribusi dari wilayah perkotaan juga mencerminkan pengembangan infrastruktur yang baik, yang mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Akses ke hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini penting karena hunian yang layak dan terjangkau meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, akses ke perumahan yang layak mengurangi

ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga mendukung stabilitas sosial. Lingkungan hunian yang baik juga mendukung produktivitas dan partisipasi ekonomi masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan. Desa mandiri mencerminkan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi di daerah perdesaan. Hal ini penting karena desa yang mandiri mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, peningkatan jumlah desa mandiri membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Desa mandiri juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara efisien dan bertanggung jawab.

#### **5.2.5 Pemerintahan Kabupaten Dairi Berkinerja Unggul Didukung Partisipasi Masyarakat yang Tinggi**

Pemerintahan Kabupaten Dairi berkinerja unggul didukung partisipasi masyarakat yang tinggi dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah menuju regulasi satu data, sinkronisasi dengan proses bisnis dengan dukungan teknologi informasi.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan kolaboratif serta sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah Kabupaten Dairi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.
6. Pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja dan memegang teguh *core value*.
7. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.

8. Penguatan fungsi pengawasan yang mengedepankan pengendalian internal dengan dukungan penuh teknologi informasi.
9. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 11  
Target Kinerja Pencapaian Pemerintahan Kabupaten Dairi Berkinerja Unggul Didukung Partisipasi Masyarakat yang Tinggi

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Penataan regulasi hukum yang transparan dan akuntabel; Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum; Implementasi program pelatihan dan pendidikan hukum untuk aparat penegak hukum	Modernisasi sistem peradilan dan penegakan hukum; Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses hukum; Pengembangan kebijakan hukum berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama dalam reformasi hukum; Implementasi teknologi canggih dalam penegakan hukum; Promosi standar hukum	Optimalisasi sistem hukum berbasis digital; Peningkatan standar dalam penegakan hukum; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem hukum	24.Indeks reformasi hukum	75	90
Pembangunan infrastruktur TIK untuk pemerintahan; Peningkatan literasi digital di kalangan aparatur pemerintah; Pengembangan <i>platform e-government</i> dasar	Modernisasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur TIK pemerintahan; Integrasi layanan publik berbasis digital; Peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan <i>e-government</i>	Pengembangan teknologi canggih dalam <i>e-government</i> ; Promosi layanan <i>e-government</i> ; Penguatan inovasi digital dalam sistem pemerintahan	Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis digital secara menyeluruh; Implementasi standar dalam <i>e-government</i> ;	25.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,518	3,50
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan publik; Penyediaan infrastruktur layanan publik yang memadai; Pengembangan sistem manajemen layanan publik berbasis data	Modernisasi fasilitas dan sistem layanan publik; Integrasi teknologi dalam manajemen layanan publik; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Penguatan inovasi dalam layanan publik; Pengembangan kolaborasi dalam manajemen layanan publik; Promosi standar pelayanan publik	Optimalisasi sistem layanan publik berbasis digital; Implementasi standar dalam pelayanan publik; Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam	26.Indeks Pelayanan Publik	3,57	4,50

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
	pelayanan publik		layanan publik			
Penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah, pembangunan <i>talent pool</i> di seluruh instansi	Pembangunan sistem informasi manajemen talenta dan satu data manajemen talenta, penuntasan asesmen kompetensi ASN	Penguatan manajemen kinerja ASN, pengembangan kompetensi ASN	Optimalisasi manajemen talenta berbasis teknologi, penguatan kebijakan penghargaan bagi ASN			
Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, penerapan sistem penggajian tunggal ( <i>single salary</i> ) dan sistem pensiun	Penguatan pengawasan atas penerapan sistem merit, peninjauan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian	Penguatan upaya pencegahan korupsi melalui pembatasan transaksi tunai, penguatan sistem pelaporan harta kekayaan ASN	Optimalisasi sistem pendidikan anti korupsi melalui redesain kurikulum, penguatan tata kelola berbasis integritas			
Peningkatan kesadaran dan pendidikan antikorupsi; Penerapan sistem pelaporan harta kekayaan yang transparan; Penguatan lembaga antikorupsi dan pengawasan internal pemerintah	Modernisasi sistem pengawasan dan audit; Peningkatan efisiensi dan efektivitas lembaga antikorupsi; Pengembangan kebijakan integritas berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama dalam pemberantasan korupsi; Implementasi teknologi canggih dalam sistem pengawasan dan audit;	Optimalisasi sistem pengawasan dan audit berbasis digital; Peningkatan standar dalam pemberantasan korupsi; Penguatan budaya integritas dan transparansi di semua lapisan masyarakat	27. Indeks Integritas Nasional	74,74	80,00
Penerapan tata kelola yang transparan dan adaptif di sektor agroindustri dan pariwisata.	Mengoptimalkan regulasi dan tata kelola yang adaptif dan berintegritas di sektor agroindustri dan pariwisata.	Tata kelola yang adaptif dan transparan di sektor agroindustri dan pariwisata.	Tata kelola yang adaptif dan transparan di sektor agroindustri dan pariwisata.			

Indeks Reformasi Hukum yang tinggi menunjukkan bahwa sistem hukum di suatu daerah berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Hal ini penting karena reformasi hukum meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Selain itu, kepastian hukum mendorong investasi domestik dan asing dengan memberikan lingkungan

bisnis yang stabil dan dapat diprediksi. Sistem hukum yang kuat juga membantu dalam pengendalian dan pemberantasan korupsi, yang mendukung tata kelola yang baik.

Indeks SPBE yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintahan telah mengadopsi teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini penting karena *e-government* meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan dan transparansi dalam pelayanan publik. Selain itu, sistem elektronik mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Teknologi informasi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Indeks Pelayanan Publik yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat menerima layanan yang berkualitas dan memuaskan dari pemerintah. Hal ini penting karena pelayanan publik yang baik meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kualitas layanan publik yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang efisien juga mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan.

Indeks Integritas Nasional yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintahan memiliki integritas yang kuat dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika. Hal ini penting karena integritas yang tinggi membantu dalam mencegah dan memberantas korupsi di semua level pemerintahan. Selain itu, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Pemerintahan yang berintegritas juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

#### **5.2.6 Kabupaten Dairi yang Demokratis dan Aman dengan Stabilitas Ekonomi Makro yang Unggul**

Kabupaten Dairi yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah,

KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dan sebagainya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

3. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

4. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 12  
Target Kinerja Pencapaian Kabupaten Dairi yang Demokratis dan Aman dengan Stabilitas Ekonomi Makro yang Unggul

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Penataan regulasi hukum yang transparan dan akuntabel; Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum; Implementasi program pelatihan dan pendidikan hukum untuk aparat penegak hukum	Modernisasi sistem peradilan dan penegakan hukum; Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses hukum; Pengembangan kebijakan hukum berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama dalam reformasi hukum; Implementasi teknologi canggih dalam penegakan hukum; Promosi standar hukum	Optimalisasi sistem hukum berbasis digital; Peningkatan standar dalam penegakan hukum; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem hukum	28.Hukum Berkeadilan		
				a) Persentase penegakan hukum peraturan daerah	70	100
				b) Persentase Pencapaian aksi HAM	70	90
Peningkatan patroli keamanan dan kehadiran polisi di lingkungan; Program edukasi dan penyuluhan tentang keamanan masyarakat; Penguatan kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan	Modernisasi fasilitas keamanan dan teknologi pengawasan; Peningkatan efisiensi respons cepat terhadap kejadian kriminal; Pengembangan kebijakan keamanan berbasis data dan teknologi	Penguatan kolaborasi dalam menjaga keamanan; Implementasi teknologi canggih dalam sistem keamanan;	Optimalisasi sistem keamanan berbasis digital; Peningkatan standar dalam menjaga keamanan; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem keamanan	29.Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	53,94	100,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi;	Modernisasi sistem pemilihan umum; Peningkatan efisiensi dan	Penguatan kerjasama dalam proses demokrasi; Implementasi	Optimalisasi sistem pemilihan umum berbasis digital;	30.Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Program edukasi dan penyuluhan tentang hak-hak demokrasi; Penguatan lembaga demokrasi dan transparansi dalam proses pemilihan	transparansi dalam proses demokrasi; Pengembangan kebijakan demokrasi berbasis data dan teknologi	i teknologi canggih dalam sistem pemilihan umum;	Peningkatan standar dalam proses demokrasi; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem demokrasi			
Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan demokratis serta meningkatkan keamanan di destinasi wisata.	Memastikan lingkungan yang aman dan kondusif di tempat kerja dan destinasi wisata.	Lingkungan yang aman dan demokratis di kawasan industri dan destinasi wisata.	Lingkungan aman dan demokratis di kawasan industri dan destinasi wisata.			
Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pajak; Penyuluhan dan edukasi kepada wajib pajak; Penyediaan insentif dan kemudahan dalam pembayaran pajak	Modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi; Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan pajak; Pengembangan kebijakan perpajakan berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama dalam bidang perpajakan; Implementasi teknologi canggih dalam sistem perpajakan;	Optimalisasi sistem perpajakan berbasis digital; Peningkatan standar dalam sistem perpajakan; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem perpajakan	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,33-0,42	1,0-2,0
Pengendalian harga barang dan jasa; Peningkatan kapasitas produksi dan distribusi; Penguatan regulasi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga	Modernisasi sistem distribusi dan manajemen stok; Peningkatan efisiensi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa; Pengembangan kebijakan inflasi berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama dalam menjaga stabilitas harga; Implementasi teknologi canggih dalam pengendalian inflasi;	Optimalisasi sistem pengendalian inflasi berbasis digital; Peningkatan standar dalam menjaga stabilitas harga; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengendalian inflasi	32. Tingkat Inflasi (%)	1,75 - 3,75	0,9 - 3,10
Peningkatan literasi keuangan masyarakat; Penguatan regulasi dan	Modernisasi sistem keuangan berbasis teknologi; Peningkatan		Optimalisasi sistem keuangan berbasis digital; Peningkatan	33. Pendalaman/ Intermediasi sektor keuangan a) Total Dana Pihak	31,02	69,4

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
kebijakan yang mendukung pendalaman sektor keuangan; Penyediaan insentif dan kemudahan dalam akses ke layanan keuangan	efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan; Pengembangan produk dan layanan keuangan inovatif		standar dalam layanan keuangan; Penguatan integritas dan transparansi dalam sektor keuangan	Ketiga/PDRB (%)		
				b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	1,31
				c) Total Kredit/PDRB (%)	25,7	61,5
Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan; Program literasi dan edukasi keuangan untuk semua lapisan masyarakat; Penyediaan insentif dan kemudahan dalam akses ke layanan keuangan	Modernisasi sistem keuangan berbasis teknologi; Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan; Pengembangan produk dan layanan keuangan inovatif	Penguatan kerjasama dalam sektor keuangan; Implementasi teknologi canggih dalam layanan keuangan;	Optimalisasi sistem keuangan berbasis digital; Peningkatan standar dalam layanan keuangan; Penguatan integritas dan transparansi dalam sektor keuangan	34. Inklusi Keuangan (%)	97,52	99,83
Menjamin stabilitas ekonomi dengan pengelolaan industri yang efisien dan pengelolaan pariwisata yang baik.	Menjaga stabilitas ekonomi dengan manajemen yang efisien di sektor agroindustri dan pariwisata.	Menjaga stabilitas ekonomi di sektor agroindustri dan pariwisata dengan manajemen yang efisien.	Stabilitas ekonomi di sektor agroindustri dan pariwisata dengan manajemen yang efisien.			
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur kerjasama antar daerah; Meningkatkan kerjasama untuk mendukung pertumbuhan sektor agroindustri dan pariwisata.	Modernisasi fasilitas dan sistem kerjasama berbasis teknologi; Pengembangan program kerjasama inovatif; Meningkatkan ketangguhan kerjasama untuk mendukung sektor-sektor utama.	Implementasi teknologi canggih dalam sistem kerjasama; Kerjasama yang kuat dan efektif untuk mendukung sektor-sektor utama.	Optimalisasi sistem kerjasama berbasis digital; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem kerjasama; Kerjasama yang kuat dan efektif untuk mendukung sektor-sektor utama.	35. Jumlah kerjasama antar daerah	20	100
Peningkatan kapasitas dan kompetensi	Modernisasi sistem manajemen dan	Penguatan kerjasama nasional dalam	Optimalisasi sistem kepemimpinan berbasis	36. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	3	4,5

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
kepemimpinan kepala daerah; Program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.	kepemimpinan daerah; Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah; Pengembangan kebijakan kepemimpinan berbasis data dan teknologi	bidang kepemimpinan daerah; Implementasi teknologi dalam sistem manajemen kepemimpinan; Promosi nasional standar kepemimpinan daerah	digital; Peningkatan standar dalam tata kelola pemerintahan daerah; Penguatan integritas dan transparansi dalam kepemimpinan daerah			

Peningkatan persentase penegakan hukum peraturan daerah yang tinggi menunjukkan bahwa sistem hukum di daerah tersebut berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan. Hal ini penting karena kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan bisnis. Selain itu, sistem hukum yang adil dan efektif meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Penegakan hukum yang baik juga mencegah konflik dan kekacauan, serta mendukung lingkungan yang aman dan tertib, demikian juga dengan persentase pencapaian aksi HAM yang menggambarkan komitmen daerah mendukung pelaksanaan RANHAM.

Proporsi penduduk yang merasa aman adalah indikator penting dari lingkungan yang aman dan stabil. Hal ini penting karena rasa aman meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memungkinkan mereka untuk beraktivitas tanpa rasa takut. Selain itu, lingkungan yang aman mendorong aktivitas ekonomi, seperti berbelanja dan bekerja, tanpa khawatir akan kejahatan. Rasa aman juga memperkuat kepercayaan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan komunitas. Indeks Demokrasi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sistem demokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik. Hal ini penting karena demokrasi yang kuat melindungi kebebasan dan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Selain itu, demokrasi yang berfungsi dengan baik mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Sistem demokrasi yang stabil juga mencegah konflik politik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Rasio pajak daerah yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pendapatan dari pajak secara efektif. Hal ini penting karena pajak merupakan sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, rasio pajak yang tinggi menunjukkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan pajak yang stabil juga membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung stabilitas ekonomi makro.

Tingkat inflasi yang terkendali sangat penting untuk stabilitas ekonomi. Hal ini penting karena inflasi yang rendah dan stabil menjaga daya beli masyarakat dan mencegah penurunan kesejahteraan. Selain itu, inflasi yang terkendali menarik investasi karena menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dapat diprediksi. Tingkat inflasi yang moderat juga memudahkan perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi yang efektif.

Pendalaman sektor keuangan mencerminkan kemampuan sektor keuangan untuk mendukung perekonomian daerah. Hal ini penting karena pendalaman sektor keuangan meningkatkan akses masyarakat dan bisnis terhadap modal, yang penting untuk investasi dan ekspansi. Selain itu, sektor keuangan yang dalam dan luas meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi risiko sistemik. Penetrasi asuransi yang tinggi juga membantu masyarakat dan bisnis mengelola risiko, meningkatkan keamanan ekonomi. Inklusi keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa layanan keuangan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting karena akses ke layanan keuangan memungkinkan masyarakat untuk menabung, mendapatkan pinjaman, dan mengelola risiko, yang memberdayakan mereka secara ekonomi. Selain itu, inklusi keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan partisipasi ekonomi dan konsumsi. Akses ke layanan keuangan juga mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan peluang yang lebih merata bagi semua kelompok masyarakat.

Jumlah kerjasama antar daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerah aktif dalam meningkatkan daya saing daerah. Hal ini penting karena kerjasama membuka peluang untuk transfer teknologi, investasi, dan peningkatan kapasitas, yang meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, hubungan kerjasama yang baik mendorong perdagangan dan investasi,

yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kerjasama juga memfasilitasi pertukaran budaya dan pengetahuan, yang memperkaya masyarakat serta meningkatkan keterampilan dan inovasi.

Kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah kunci untuk mencapai stabilitas dan keberhasilan dalam pemerintahan daerah. Hal ini penting karena kepemimpinan yang baik menciptakan lingkungan politik dan sosial yang stabil, mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, pemimpin yang efektif mampu mengelola sumber daya dengan baik, mengambil keputusan yang tepat, dan menjalankan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan yang berintegritas juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang penting untuk keberhasilan program dan kebijakan publik.

#### **5.2.7 Kabupaten Dairi Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

Kabupaten Dairi berketahanan sosial budaya dan ekologi yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila.
2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
6. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
7. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

8. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
9. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
10. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
11. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 13  
Target Kinerja Pencapaian Kabupaten Dairi Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat; Peningkatan program pelestarian budaya; Penguatan lembaga budaya dan pendidikan kebudayaan; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur budaya;	Pendidikan budaya di sekolah; Modernisasi fasilitas budaya; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pelestarian budaya; Pengembangan kebijakan kebudayaan berbasis data dan teknologi;	Pengembangan program pendidikan budaya berbasis komunitas; Penguatan kerjasama dalam pelestarian budaya; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan budaya; Promosi budaya;	Optimalisasi pendidikan budaya berkelanjutan; Optimalisasi sistem pelestarian budaya berbasis digital; Peningkatan standar dalam pengelolaan budaya; Penguatan daya saing budaya;	37.Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,88	64,47
Peningkatan dialog antar umat beragama; Program edukasi dan penyuluhan tentang toleransi; Penguatan lembaga kerukunan umat beragama	Peningkatan moderasi beragama; Modernisasi fasilitas untuk dialog antar umat beragama; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam program toleransi; Pengembangan kebijakan kerukunan berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama antar lembaga keagamaan; Penguatan kerjasama dalam promosi kerukunan; Implementasi teknologi canggih dalam manajemen kerukunan; Promosi	Penguatan kerukunan umat beragama berbasis nilai-nilai lokal; Optimalisasi sistem kerukunan berbasis digital; Peningkatan standar dalam manajemen kerukunan; Penguatan integritas dan	38.Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,34-78,41	85,58-86,36

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
		standar kerukunan	transparansi dalam sistem kerukunan			
Memperkuat peran budaya dan agama dalam mendukung sektor agroindustri dan pariwisata.	Memperkuat peran budaya dan agama dalam mendukung sektor agroindustri dan pariwisata.	Memperkuat budaya dan agama dalam mendukung sektor agroindustri dan pariwisata.	Memperkuat budaya dan agama dalam mendukung sektor agroindustri dan pariwisata.			
Peningkatan program pendidikan dan penyuluhan keluarga; Penguatan lembaga keluarga dan komunitas; Penyediaan fasilitas dan layanan untuk kesejahteraan keluarga	Modernisasi fasilitas dan layanan keluarga;- Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam program kesejahteraan keluarga; Pengembangan kebijakan keluarga berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama dalam promosi kualitas keluarga; Implementasi teknologi canggih dalam manajemen keluarga; Promosi standar kualitas keluarga	Optimalisasi sistem manajemen keluarga berbasis digital; Peningkatan standar dalam kesejahteraan keluarga; Penguatan integritas dan transparansi dalam manajemen keluarga	39.Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	51,45-60,67	70,56-70,59
Pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial, peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang kesetaraan gender; Penerapan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja; Penguatan lembaga yang menangani isu kesetaraan gender; Mendorong	Penguatan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, pengembangan program pemberdayaan komunitas; Modernisasi fasilitas untuk mendukung kesetaraan gender; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam program kesetaraan gender; Pengembangan kebijakan kesetaraan gender berbasis data dan teknologi; Mendorong inklusivitas dan kesetaraan di tempat kerja.	Penguatan program kesetaraan gender dan inklusi sosial berbasis komunitas, pengembangan kebijakan yang mendukung keluarga berkualitas; Penguatan kerjasama dalam promosi kesetaraan gender; Implementasi teknologi canggih dalam manajemen kesetaraan gender; Promosi standar kesetaraan gender; Kesetaraan gender dan inklusivitas di tempat kerja.	Optimalisasi program kesetaraan gender dan inklusi sosial berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program inklusi sosial; Optimalisasi sistem manajemen kesetaraan gender berbasis digital; Peningkatan standar kesetaraan gender; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem kesetaraan gender; Kesetaraan gender dan inklusivitas di tempat kerja.	40.Indeks Ketimpangan Gender	0,38	0,2-0,19

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
kesetaraan gender dan inklusivitas di tempat kerja.						
Peningkatan program pelestarian keanekaragaman hayati; Penguatan lembaga pengelola keanekaragaman hayati; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pelestarian keanekaragaman hayati	Modernisasi fasilitas untuk pelestarian keanekaragaman hayati; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati; Pengembangan kebijakan pelestarian berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama dalam pelestarian keanekaragaman hayati; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan keanekaragaman hayati; Promosi standar pelestarian	Optimalisasi sistem pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis digital; Peningkatan standar dalam pelestarian keanekaragaman hayati; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengelolaan hayati	41.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,562	0,656
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan ; Peningkatan program pelestarian lingkungan hidup; Penguatan lembaga pengelola lingkungan hidup; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pelestarian lingkungan hidup; Peningkatan akses sanitasi aman dan pengelolaan sampah	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang berkelanjutan , pengembangan program lingkungan hidup berbasis komunitas; Modernisasi fasilitas untuk pelestarian lingkungan hidup; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup; Pengembangan kebijakan pelestarian berbasis data dan teknologi; Peningkatan pengelolaan sampah dan akses sanitasi	Penguatan program pengelolaan lingkungan hidup berbasis teknologi, pengembangan kebijakan lingkungan hidup yang inklusif; Penguatan kerjasama dalam pelestarian lingkungan hidup; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan lingkungan hidup; Promosi standar pelestarian; Peningkatan pengelolaan sampah dan akses sanitasi	Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan , peningkatan kualitas hidup melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan ; Optimalisasi sistem pengelolaan lingkungan hidup berbasis digital; Peningkatan standar dalam pelestarian lingkungan hidup; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup; Optimalisasi pengelolaan sampah dan akses sanitasi	42.Kualitas Lingkungan Hidup		
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,90	83,49
				b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	68,43	100
				c) Pengelolaan sampah		
				i. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	10,00	90,00
ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	33,31	100				
Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui praktik industri hijau dan pengembangan	Memastikan praktik ramah lingkungan diterapkan di sektor agroindustri	Konservasi lingkungan hidup di sektor agroindustri dan pariwisata.	Lingkungan berkualitas di sektor agroindustri dan pariwisata.			

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
n pariwisata berkelanjutan .	dan pariwisata.					
Penguatan ketahanan energi dengan meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan energi baru terbarukan, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan ; Peningkatan program ketahanan energi, air, dan pangan;- Penguatan lembaga pengelola ketahanan energi, air, dan pangan; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk ketahanan energi, air, dan pangan; Mengembangkan teknologi yang mendukung ketahanan energi dan air serta memastikan ketersediaan air bersih dan energi di destinasi wisata.	Peningkatan kemandirian pangan melalui pengembangan pertanian yang berkelanjutan , pengembangan program ketahanan energi berbasis teknologi; Modernisasi fasilitas untuk ketahanan energi, air, dan pangan; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan energi, air, dan pangan; Pengembangan kebijakan ketahanan berbasis data dan teknologi; Mengembangkan teknologi untuk ketahanan energi dan air di sektor agroindustri dan pariwisata.	Penguatan program ketahanan air dan pangan berbasis komunitas, pengembangan kebijakan ketahanan energi yang inklusif; Penguatan kerjasama dalam ketahanan energi, air, dan pangan; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan energi, air, dan pangan; Promosi standar ketahanan; Ketahanan energi dan air di sektor agroindustri dan pariwisata.	Optimalisasi program ketahanan energi, air, dan pangan berkelanjutan , peningkatan kualitas hidup melalui ketahanan energi, air, dan pangan yang berkelanjutan ; Optimalisasi sistem ketahanan energi, air, dan pangan berbasis digital; Peningkatan standar dalam ketahanan energi, air, dan pangan; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengelolaan ketahanan; Ketahanan energi dan air di sektor agroindustri dan pariwisata.	43.Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a) Ketahanan Energi i. Konsumsi listrik per kapita (kWh) ii. Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar) b) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) c) Ketahanan Air i. Kapasitas Air Baku (m3/detik) ii. Akses Rumah Tangga terhadap sumber air aman (%) iii. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	470,958,60 89,7 0,64 70,20 50	611,634,80 94,5 20,93 100 70
Peningkatan program mitigasi dan penanggulangan bencana; Penguatan lembaga pengelola risiko bencana; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk mitigasi bencana; Menerapkan strategi mitigasi risiko	Modernisasi fasilitas mitigasi dan penanggulangan bencana; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan risiko bencana; Pengembangan kebijakan mitigasi berbasis data dan teknologi; Strategi mitigasi risiko bencana dan	Penguatan kerjasama dalam mitigasi dan penanggulangan bencana; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan risiko bencana; Promosi standar mitigasi; Ketahanan terhadap bencana dan	Optimalisasi sistem mitigasi dan penanggulangan bencana berbasis digital; Peningkatan standar dalam mitigasi bencana; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengelolaan risiko bencana;	44.Indeks Risiko Bencana (IRB)	151,2	116,14-93,62

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
bencana dalam operasi industri dan pengembangan destinasi wisata yang tahan terhadap bencana dan perubahan iklim.	perubahan iklim diterapkan di sektor agroindustri dan pariwisata.	perubahan iklim di sektor agroindustri dan pariwisata.	Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim di sektor agroindustri dan pariwisata.			
Peningkatan program penurunan emisi GRK; Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung penurunan emisi GRK; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk penurunan emisi GRK	Modernisasi fasilitas untuk penurunan emisi GRK; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan emisi GRK; Pengembangan kebijakan penurunan emisi berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama dalam penurunan emisi GRK; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan emisi GRK; Promosi standar penurunan emisi GRK	Optimalisasi sistem penurunan emisi GRK berbasis digital; Peningkatan standar dalam penurunan emisi GRK; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengelolaan penurunan emisi GRK	45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a) Kumulatif b) Tahunan	10,06 19,04	36,22 79,85

Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki lingkungan yang mendukung pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Hal ini penting karena pengembangan kebudayaan memperkuat identitas dan kearifan lokal, yang penting untuk ketuhanan sosial dan kebanggaan daerah. Selain itu, warisan budaya yang kaya menarik wisatawan, mendukung sektor pariwisata, dan meningkatkan pendapatan daerah. Pendidikan budaya juga mendorong kreativitas dan inovasi, yang penting untuk perkembangan sosial dan ekonomi.

Indeks Kerukunan Umat Beragama yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki lingkungan yang harmonis dan toleran. Hal ini penting karena kerukunan umat beragama mencegah konflik sosial dan menciptakan lingkungan yang damai, yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, toleransi beragama memperkuat keberagaman dan inklusi sosial, yang penting untuk kohesi sosial dan solidaritas. Kerukunan beragama juga meningkatkan citra daerah sebagai tempat yang aman dan harmonis, yang menarik wisatawan dan investor.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang tinggi menunjukkan bahwa keluarga-keluarga di daerah tersebut memiliki akses yang baik

terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Hal ini penting karena keluarga yang berkualitas dan sejahtera menciptakan dasar yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keluarga yang sehat dan stabil memberikan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan anak, yang penting untuk masa depan daerah. Keluarga yang kuat dan berkualitas juga berkontribusi pada stabilitas sosial, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Indeks Ketimpangan Gender yang rendah menunjukkan bahwa daerah memiliki tingkat kesetaraan gender yang baik. Hal ini penting karena kesetaraan gender memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, kesetaraan gender meningkatkan produktivitas dan inovasi, karena seluruh potensi sumber daya manusia dimanfaatkan secara optimal. Kesetaraan gender juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang tinggi menunjukkan bahwa daerah berhasil melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Hal ini penting karena keanekaragaman hayati yang terjaga mendukung ekosistem yang seimbang dan berfungsi dengan baik. Selain itu, keanekaragaman hayati yang kaya dapat menjadi daya tarik pariwisata dan mendukung ekonomi hijau. Ekosistem yang sehat juga mendukung ketahanan pangan, air bersih, dan kesehatan masyarakat.

Kualitas lingkungan hidup yang baik sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting karena lingkungan yang bersih dan sehat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang baik mendukung pembangunan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Lingkungan hidup yang berkualitas juga meningkatkan daya tarik daerah bagi wisatawan dan investor.

Ketahanan energi yang baik menunjukkan bahwa daerah memiliki akses yang memadai dan pemanfaatan energi yang efisien. Hal ini penting karena akses yang memadai terhadap energi listrik mendukung produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efisiensi energi yang tinggi mengurangi dampak lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Akses listrik yang luas juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas dasar seperti

penerangan, pemanas/memasak, dan perangkat elektronik. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengukur persentase penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup dalam jangka waktu tertentu, mencerminkan tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di masyarakat. Ketahanan pangan yang baik penting untuk memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Hal ini penting karena kecukupan gizi meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Selain itu, gizi yang baik mendukung kemampuan belajar anak-anak dan produktivitas kerja orang dewasa. Memastikan semua penduduk mendapatkan cukup pangan juga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketahanan air yang baik menunjukkan bahwa daerah mampu menyediakan sumber daya air yang memadai dan aman bagi penduduknya. Hal ini penting karena akses terhadap air minum yang aman mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air. Selain itu, ketersediaan air baku mendukung irigasi dan produksi pertanian, yang penting untuk ketahanan pangan. Ketersediaan air yang memadai juga mendukung industri dan kebutuhan ekonomi lainnya, mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Indeks Risiko Bencana yang rendah menunjukkan bahwa daerah memiliki tingkat risiko bencana yang rendah atau telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang efektif. Hal ini penting karena mengurangi risiko bencana membantu melindungi nyawa dan properti masyarakat. Selain itu, mengurangi dampak bencana alam mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana. Daerah dengan risiko bencana rendah juga lebih menarik bagi investor karena menawarkan lingkungan bisnis yang lebih aman dan stabil.

Penurunan emisi gas rumah kaca yang signifikan menunjukkan komitmen daerah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini penting karena mengurangi emisi GRK adalah langkah penting dalam mitigasi perubahan iklim global yang berdampak pada suhu, pola cuaca, dan fenomena alam ekstrem. Selain itu, penurunan emisi GRK mengurangi polusi udara, yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Daerah yang berhasil mengurangi emisi GRK juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan menunjukkan tanggung jawab lingkungan yang tinggi.

### 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Dari hierarki dan fungsi utama kawasan dapat diturunkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana utama yang seharusnya dibangun dalam kerangka mewujudkan rencana struktur ruang yang telah dirumuskan. Adapun program utama yang dilakukan/disediakan untuk masing-masing pusat-pusat kegiatan sebagaimana dijabarkan berikut ini.

1. Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sidikalang (Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo) dilakukan melalui:
  - a. Penyusunan/Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sidikalang.
  - b. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Bagian Wilayah Kawasan Perkotaan Sidikalang.
  - c. Pengembangan kawasan pusat penanganan bencana alam.
  - d. Pengembangan perkantoran pemerintahan.
  - e. Pengembangan SMA bertaraf internasional.
  - f. Pengembangan RSUD Sidikalang.
  - g. Pembangunan perumahan.
  - h. Pengembangan Pasar Regional Sidikalang.
  - i. Peningkatan Fungsi Terminal Regional Tipe B Sitinjo dan Tipe C Sidikalang.
  - j. Peningkatan kapasitas PDAM Tirta Nciho.
  - k. Peningkatan pengelolaan persampahan.
  - l. Pembangunan Gedung Olah Raga dan Kesenian.
  - m. Alokasi lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangunan (Lisiba).
  - n. Balai Latihan Kerja modern.
  - o. Pembangunan Sentra Industri Kecil.
  - p. Pembangunan Perguruan Tinggi.
2. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Sumbul dilakukan melalui:
  - a. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sumbul.
  - b. Penyusunan Rencana Rinci Bagian Wilayah Kota Sumbul.
  - c. Pembangunan jalan penyelamatan dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan longsor.

- d. Pembangunan Terminal Tipe C Kota Sumbul.
  - e. Pembangunan Sub Terminal Agribisnis.
  - f. Alokasi lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangunan (Lisiba).
  - g. Pengembangan perumahan.
  - h. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.
  - i. Pembangunan lumbung pangan.
  - j. Peningkatan pusat perdagangan.
  - k. Peningkatan daerah irigasi.
  - l. Pengembangan tata batas hutan.
3. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tigalingga dan Paronggil, dilakukan melalui:
- a. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Tigalingga dan Paronggil.
  - b. Penyusunan Rencana Rinci Bagian Wilayah Kota Tigalingga dan Paronggil.
  - c. Pembangunan jalan penyelamatan dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan lonsor.
  - d. Peningkatan pusat perdagangan.
  - e. Peningkatan jaringan jalan lokal.
  - f. Pengembangan tata batas hutan.
  - g. Pembangunan fasilitas penunjang sentra pertanian.
  - h. Pembangunan gudang pengumpul dan rantai jemur hasil pertanian.
  - i. Pembangunan jalan usaha tani.
  - j. Pengembangan puskesmas rawat inap.
4. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kutabuluh, Silalahi, Berampu, Sigalingging, Bunturaja, Lae Parira, Silumboyah, Tiga Baru, Sopobutar dan Gunung Sitember, dilakukan melalui:
- a. Pembangunan gedung dan jalan penyelamatan dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan lonsor.
  - b. Pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.
  - c. Pembangunan jalan usaha tani.
  - d. Pengembangan puskesmas pembantu.
  - e. Peningkatan pusat perdagangan dan jasa.

f. Pengembangan sarana dan prasarana wisata.

## **A. Sistem Jaringan Transportasi**

### **1. Transportasi Darat;**

Untuk melayani pergerakan barang, jasa dan manusia secara efektif dan efisien diperlukan pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan yang menghubungkan antar pusat permukiman, peningkatan dan cakupan pelayanan kendaraan angkutan penumpang dan barang serta pembangunan dan peningkatan terminal penumpang.

Program utama yang diperlukan untuk mewujudkan sistem jaringan prasarana angkutan darat adalah:

1. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan kolektor dan lingkungan.
2. Perbaikan dan optimalisasi fungsi terminal tipe B Sitingo.
3. Pembangunan terminal antar kecamatan tipe C di Sidikalang, Sumbul, Tigalingga, Parongil.

### **2. Transportasi Danau;**

Program peningkatan dan pembangunan transportasi danau adalah:

1. Peningkatan fungsi Dermaga Silalahi.
2. Pembangunan prasarana pendukung wisata di Dermaga Silalahi.

## **B. Sistem Jaringan Prasarana Energi**

Program pembangunan yang perlu dilakukan adalah:

1. Optimalisasi pemanfaatan PLTA yang sudah ada.
2. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, seperti PLTA, mikro hidro, tenaga angin, dan tenaga surya.
3. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada wilayah yang terdapat obyek wisata.
4. Pembangunan PLTA/PLTMH pada beberapa kawasan yang mempunyai potensi sumber daya air.
5. Pengembangan sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan tenaga angin sesuai dengan potensinya.

### **C. Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi**

Program pengembangan prasarana telekomunikasi adalah:

1. Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator Swasta/BUMN.
2. Penataan dan efisiensi penempatan BTS.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha masyarakat.

### **D. Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air**

#### **1. Kawasan Resapan Air;**

Sebagian besar terdapat kawasan resapan air di Kabupaten Dairi (WS Toba – Asahan dan WS Alas – Singkil). DAS yang mengalir ke Danau Toba terletak di kawasan pegunungan. Namun kondisi terakhir mengindikasikan bahwa terjadi penurunan fungsi terhadap kawasan tangkapan air hujan. Untuk itu langkah strategis yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi area-area dan kondisi tangkapan air hujan pada hulu-hulu sungai dan selanjutnya menyiapkan rencana aksi untuk rehabilitasi.

#### **2. Irigasi;**

Seluruh Daerah Irigasi (DI) sangat bergantung dari keberadaan hutan yang menjadi sumber air irigasi. Selain diperlukan adanya rehabilitasi kawasan hutan dan dalam rangka mendorong terciptanya lahan pangan abadi untuk ketahanan pangan lokal, maka diperlukan perbaikan saluran irigasi dan perluasan cakupan DI dari potensial menjadi fungsional.

#### **3. Air Minum;**

Untuk peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air minum seyogyanya seluruh pusat-pusat permukiman mendapat layanan air minum dari PDAM Tirta Nciho. Pelayanan penyediaan air minum di Kabupaten Dairi sebagian dilakukan oleh PDAM Tirta Nciho meliputi wilayah kawasan perkotaan Sidikalang dan Ibukota kecamatan. Sumber-sumber air Baku PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi meliputi Air Permukaan (sungai) dan mata air.

Pengembangan PDAM Tirta Nciho direncanakan secara bertahap sesuai kemampuan dan kebutuhan dengan prioritas sesuai hierarki

pusat-pusat permukiman. Disamping itu cakupan pelayanan pada pusat permukiman secara terus menerus tetap ditingkatkan. Pada Tahun 2030 diharapkan seluruh Ibukota Kecamatan dan desa-desa sudah mendapat pelayanan air minum baik melalui PDAM Tirta Nciho maupun Hidran Umum.

#### **4. Pengendalian Longsor;**

Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Dairi adalah longsor. Hal ini dipengaruhi keadaan topografi dan menurunnya fungsi hutan sehingga limpasan air hujan menjadi sangat tinggi dan menimbulkan longsor pada beberapa tempat. Kawasan yang paling rentan terhadap bahaya longsor adalah kemiringan  $>25\%$ . Untuk mengantisipasi longsor dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi area tangkapan hujan di hulu dan melakukan penurapan pada titik-titik tebing sebagai pengendali longsor.

#### **E. Sistem Jaringan Prasarana Permukiman**

Program pembangunan prasarana permukiman adalah:

1. Pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk dengan program pembangunan perumahan dengan konstruksi tahan gempa.
2. Pembangunan perumahan perkotaan di Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil.
3. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan berupa jalan lingkungan, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan.
4. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan-kawasan rawan air minum di Perkotaan dan Perdesaan.
5. Perbaikan perumahan yang belum permanen dan semi permanen di seluruh pusat-pusat pelayanan.
6. Optimalisasi TPS di Sidikalang dan TPA Sidiangkat.
7. Pembangunan TPS di seluruh pusat-pusat pelayanan PKLp, PPK dan PPL.
8. Pembangunan TPA di Sumbul, Tigalingga dan Parongil.
9. Pembangunan drainase di kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil.

10. Pembangunan IPAL di Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga, Parongil dan Silalahi untuk keperluan limbah rumah tangga dan industri.
11. Pembangunan jalan lokal/lingkungan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
12. Rehabilitasi kawasan/lingkungan permukiman.

## **F. Rencana Perwujudan Kawasan Pertanian**

### **1. Pertanian Lahan Basah;**

Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah/sawah adalah:

1. Peningkatan pelayanan irigasi dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir irigasi.
2. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, pemasaran hasil pertanian (sub terminal agribisnis).
3. Peningkatan produksi pertanian lahan basah/sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat lebih meningkat .
4. Pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
5. Insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktifitas lahan dan kinerja petani.
6. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.

### **2. Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura;**

Program untuk mewujudkan rencana pola ruang pertanian lahan kering dan hortikultura diperlukan hal-hal:

1. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering.
2. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik kawasan.
3. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan dan optimasi lahan.
4. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan usaha tani, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen.

5. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.

#### **G. Rencana Perwujudan Kawasan Perkebunan**

Jenis komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Kabupaten Dairi adalah kopi, jeruk, kakao dan lain-lain dan tanaman lainnya.

Program untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah:

1. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung.
2. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.
3. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan untuk mendukung perkebunan, meliputi:
  - a. Subsistem Hulu (*up stream*): sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif).
  - b. Subsistem Usaha tani (*on farm*): produksi pertanian primer (budidaya).
  - c. Subsistem Hilir (*down stream*): pengolahan hasil pertanian dan perdagangan.
  - d. Subsistem Kelembagaan (*supporting institution*): perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan lain-lain.

#### **H. Rencana Perwujudan Kawasan Peternakan**

Program yang dikembangkan untuk perwujudan kawasan peternakan adalah:

1. Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu dan kuda di seluruh kecamatan, khusus ternak lembu diarahkan di Kecamatan Tigalingga dan Siempat Nempu Hulu sedangkan ternak kuda di Kecamatan Parbuluan. Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH) ataupun susu sapi dan kerbau (yoghurt)

2. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba di Kecamatan Lae Parira, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga dan Tanah Pinem, sedangkan ternak babi dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini juga dibangun prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.
3. Pengembangan sentra peternakan unggas di seluruh kecamatan.
4. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan
5. Pengembangan kawasan terintegrasi, seperti:
  - Kawasan integrasi peternakan-tanaman pangan dan hortikultura (*organic farm*).
  - Kawasan integrasi peternakan-perkebunan (kakao, karet dan lain-lain).
  - Kawasan integrasi peternakan-perikanan .
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
7. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal.

#### **I. Rencana Perwujudan Kawasan Perikanan**

Program yang dikembangkan untuk perwujudan kawasan perikanan adalah:

1. Pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran. Arah kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
  - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
  - b. Peningkatan akses jalan ke kawasan perikanan budidaya.
  - c. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha.
  - d. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan.
  - e. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan, pemasaran produk perikanan.

- f. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan.
  - g. Peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank.
2. Pembangunan dermaga khusus perikanan untuk menunjang pengembangan perikanan. Arahannya kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
    - a. Melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan pelabuhan perikanan.
    - b. Melaksanakan desain teknis detail pembangunan pelabuhan perikanan.
    - c. Pembangunan fisik pelabuhan dan fasilitas penunjangnya.
    - d. Operasional dan pengelolaan dermaga perikanan.

#### **J. Rencana Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Sumber Daya Alam**

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi. Arahannya kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
  - a. Inventarisasi sumber daya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan geologi yang berpotensi untuk dieksplorasi dan dieksploitasi dalam skala ekonomi
  - b. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian.
  - c. Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
  - d. Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (*bussines plan*) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.
  - e. Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif, seperti panas bumi, tenaga air dan lain-lain.
  - f. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.

2. Pengembangan energi alternatif. Arahannya kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
  - a. Melakukan kajian pengembangan energi alternatif bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan lain-lain.
  - b. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif.
  - c. Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik energi alternatif.

#### **K. Rencana Perwujudan Kawasan Pariwisata**

Program yang dikembangkan untuk kawasan pariwisata adalah:

1. Pengembangan kawasan wisata terpadu yang dipusatkan di Kota Sidikalang. Arahannya kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
  - a. Melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata.
  - b. Melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai even promosi.
  - c. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
2. Pengembangan potensi sumber daya alam sebagai obyek-obyek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu. Arahannya kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
  - a. Inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai obyek wisata.
  - b. Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata.
  - c. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.

#### **L. Rencana Perwujudan Kawasan Industri**

Program yang dikembangkan untuk kawasan industri adalah:

- a. Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/anyam-

- anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain;
- b. Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain;
  - c. Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain;
  - d. Kecamatan Silima Punggapungga, jenis industri besar, sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/anyaman-anyaman dan lain-lain.

## **M. Rencana Perwujudan Kawasan Permukiman**

### **1. Permukiman Perkotaan;**

Pembangunan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Dairi dikembangkan di Kawasan Perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil dengan pendekatan berdasarkan mitigasi bencana alam. Prinsip dasar pembangunan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi bangunan tahan gempa (ringan dan kompak dibangun pada tapak yang datar). Bangunan rumah panggung tradisional yang paling cocok untuk kawasan yang rawan gempa.
2. Tidak dibangun disisi tebing untuk menghindari runtuhnya tanah akibat longsor, gerusan air ataupun akibat gempa.
3. Bangunan penyelamat (*escape building*) sebagai rumah perlindungan bersama bila terjadi bencana alam. Pada saat normal (tidak terjadi bencana) bangunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bangunan sosial, baik untuk balai pertemuan, pesta kawin/adat, kegiatan agama, dan lain-lain. Konstruksi bangunan tahan gempa dan berada pada kawasan yang aman dan mudah dijangkau.
4. Permukiman harus didukung dengan infrastruktur dasar, seperti sistem transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah serta dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan lain-lain.

Pembangunan permukiman dikembangkan dengan komposisi 1 : 3 : 6, artinya bila dibangun 1 unit rumah mewah harus sebanding dengan pembangunan 3 rumah sedang dan 6 rumah sederhana. Komposisi tersebut sekaligus menggambarkan pemetakan kelompok tingkatan kepadatan rumah, yaitu kepadatan tinggi, sedang dan rendah.

Program pembangunan permukiman kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan disesuaikan dengan karakteristik, fungsi dan rencana pembangunan pada masing-masing kawasan, seperti rencana pembangunan sarana penunjang lainnya untuk pengembangan wilayah, yaitu:

1. Pemintakan zona permukiman eksisiting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan:
  - Daya tampung kota, terkait dengan kawasan yang relatif aman dari ancaman bencana alam, lahan dengan kemiringan dibawah 15%.
  - Rencana pembangunan perumahan.
  - Rencana pembangunan sentra industri kecil.
  - Rencana pengembangan fasilitas utama kota (taman kota, stadion olah raga, dan lain-lain).
  - Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
2. Identifikasi kelengkapan dan cakupan pelayanan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing kawasan dan perkiraan kebutuhan sampai dengan Tahun 2030, seperti:
  - Jalan lingkungan.
  - Sistem jaringan prasarana air minum.
  - Sistem jaringan prasarana listrik.
  - Sistem jaringan prasarana telekomunikasi.
  - Sistem pengelolaan sampah (gerobak sampah, TPS dan TPA).
  - Sistem drainase dan pengelolaan limbah .
3. Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi.
4. Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting.

5. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman
6. Identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan yang relatif aman terhadap bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya.
7. Penyusunan rencana teknis tata ruang dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan.
8. Pengadaan perumahan melalui subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), seperti Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan sebagainya.

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang berisi cita-cita Kabupaten Dairi selama 20 tahun mendatang. Dokumen ini disusun menggunakan pendekatan teknokratik yang baik. Penyusunan dokumen RPJPD dijalankan melalui sebuah riset. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan berbagai teknik pengumpulan data lainnya.

### **6.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan jangka menengah daerah maupun jangka pendek dalam rangka terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi untuk tahun 2045 mendatang yaitu “Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”.

Visi pembangunan ini akan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan.

Kaidah pelaksanaan pembangunan ini meliputi 1) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan; 2) Kerangka Pengendalian; 3) Sistem Insentif; dan 4) Mekanisme Perubahan.

#### **6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran**

Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan sangat penting karena menjadi indikator kinerja pemerintah daerah untuk memastikan semua program dan kegiatan berjalan dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsistensi ini sangat memengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan.

Selain itu, konsistensi tersebut memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika perencanaan dan pendanaan dilakukan secara terpisah, akan timbul inkonsistensi antara rencana yang disusun dengan alokasi belanja dalam proses penganggaran. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam alokasi belanja untuk berbagai jenis kegiatan, yang pada akhirnya mengakibatkan inkonsistensi alokasi belanja daerah. Padahal, masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebelum pelaksanaan. Perencanaan pembangunan adalah proses berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai secara terencana melalui tahapan-tahapan tertentu, dengan melibatkan berbagai unsur untuk mengalokasikan sumber daya, dengan tujuan akhir menyejahterakan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan seharusnya menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan holistik.

### **6.1.2 Kerangka Pengendalian**

RPJPD sebagai dokumen perencanaan 20 tahun dikendalikan melalui pengawasan terhadap dokumen jangka menengah dan pendek. Pengendalian ini bertujuan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemerintahan daerah, tujuan pemerintah daerah dijabarkan dengan jelas dalam dokumen perencanaan daerah yang idealnya selaras dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN). Tujuan pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tercantum dalam RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan operasional pada tingkat kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang berkelanjutan dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.

Pengendalian ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem

elektronik terpadu ini juga dihubungkan dengan tata kelola data pembangunan yang mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning).

Pengendalian terhadap risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

### **(1) Pengendalian Perencanaan**

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

**a) Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan.**

Konsistensi dalam penjabaran dokumen perencanaan mencakup konsistensi dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator kinerjanya, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi ini diterapkan pada berbagai dokumen perencanaan, meliputi konsistensi antara dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, serta Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

**b) Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.**

**c) Konsistensi perencanaan dan penganggaran.**

**d) Identifikasi risiko dalam perencanaan pembangunan dan langkah-langkah mitigasinya.**

Risiko secara sederhana adalah segala kemungkinan kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi risiko berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan penyebab, dampak, kategori, dan sumber risiko. Dengan demikian, dapat dirumuskan rencana

tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

## **(2) Pengendalian Pelaksanaan**

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Proses pemantauan dan evaluasi ini mencakup:

- a) Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah.
- b) Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- c) Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
- d) Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah, dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pengendalian demi memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan dukungan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan efektif dan tepat sasaran. Regulasi ini harus mengintegrasikan aspek pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, untuk menjaga kualitas pengendalian, regulasi tersebut harus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku.

### **6.1.3 Sistem Insentif**

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Untuk mendorong partisipasi ini, perlu dibangun sistem insentif yang efektif. Sistem insentif ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan semua pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

### **6.1.4 Mekanisme Perubahan**

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam situasi darurat (*force majeure*), seperti perubahan geopolitik,

geoekonomi, bencana, dan penyimpangan signifikan dalam pencapaian sasaran pembangunan dari tahap-tahap sebelumnya yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJP Daerah dapat diperbarui melalui RPJM Daerah.

Pembaruan ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh transformasi digital melalui sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada semua tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kelancaran proses bisnis dalam perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang konsisten.

#### **6.1.5 Komunikasi Publik**

Komunikasi publik memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan adanya komunikasi publik yang efektif, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan lebih baik oleh masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik mencakup tiga aspek utama, yakni:

1. struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional;
2. penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta
3. keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik dalam RPJP Daerah 2025-2045 diarahkan pada prinsip "tidak ada yang tertinggal" dan "partisipasi yang bermakna". Proses komunikasi melibatkan tiga pihak utama: Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Masyarakat.

Komunikasi dengan OPD dilakukan melalui Forum OPD agar mereka dapat memberikan masukan tentang prioritas pembangunan. Sementara itu, komunikasi dengan pemerintah daerah dilakukan secara bertahap,

dimulai dari musyawarah di tingkat kabupaten hingga provinsi, untuk membangun pemahaman dan partisipasi yang lebih luas.

Komunikasi dengan masyarakat umum, termasuk sektor swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, serta kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia, dijalankan melalui beragam metode yang memudahkan mereka dalam memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan, baik dengan memberikan masukan, kritik, maupun dukungan.

Pendekatan komunikasi publik ini didasarkan pada prinsip keterbukaan, yang menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian, komunikasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

## **6.2 Pembiayaan Pembangunan**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kabupaten Dairi 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup:

1. Penguatan perencanaan pembiayaan yang mencakup Penyusunan ulang regulasi daerah dan pembentukan lembaga daerah yang responsif terhadap perubahan, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis terkait pembiayaan, dan pengembangan inovasi dalam mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung perolehan skema pembiayaan yang memberikan dampak yang signifikan (*impact investment*).
2. Memperluas kerja sama bilateral, multilateral, dan kemitraan keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, khususnya pembiayaan yang inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, serta yang mendukung kolaborasi ekonomi lainnya;
3. Memperkuat dan memperluas berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, terutama dalam hal regulasi, tata kelola, dan kelembagaan, menuju model inisiatif

- keuangan swasta yang melibatkan sektor infrastruktur publik, utilitas, dan infrastruktur sosial;
4. Menerapkan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri lokal serta mendorong transfer teknologi;
  5. Maksimalkan penggunaan aset melalui praktik daur ulang aset, pertukaran aset (*asset offset*), dan eksploitasi peningkatan nilai aset yang timbul dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu wilayah (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non-publik dilakukan melalui:

1. Penggunaan instrumen pendanaan jangka panjang seperti dana pensiun, asuransi, instrumen pasar modal, dan dana abadi daerah.
2. Pengembangan produk pembiayaan syariah yang inovatif berdasarkan prinsip-prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil.
3. Inovasi dalam pembiayaan untuk mengatasi dampak perubahan iklim, termasuk berbagai jenis pembiayaan hijau, biru, dan sirkuler.;
4. Pengembangan produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik, atau bursa tematik lainnya.
5. Penguatan kombinasi pendanaan (*blended financing*) dengan memanfaatkan dana katalistik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi, dan dana keagamaan, termasuk jaminan, yang bertujuan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non-publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non-publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup:

1. Perbaikan dalam mengidentifikasi investasi publik pada setiap periode jangka menengah.
2. Peningkatan dalam proses persiapan dan penilaian proyek investasi publik.
3. Penyelarasan prioritas investasi publik pada tingkat daerah.
4. Modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik.
5. Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik.

6. Peningkatan dalam kerangka regulasi, tata kelola lembaga dan organisasi, serta kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen investasi publik.
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek investasi publik.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Dairi dalam pencapaian Visi RPJPD “Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari Kepala Daerah secara konsisten dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi;
3. Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Dairi kepada rakyat dan kepentingan rakyat;
4. Sinergitas, kerja sama, dan peran aktif antara Pemerintah Kabupaten Dairi, Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam pembangunan Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010